

Disertasi

Elly Warnisyah Harahap

# Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang “Demokrasi Islami”



Program  
Doktor



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN 2020

*Disertasi*

**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID  
TENTANG ‘DEMOKRASI ISLAMI’**

DISUSUN OLEH

ELLY WARNISYAH HARAHAP  
NIM. 94313030375

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. SYAHRIN HARAHAP, MA  
PROF. DR. AMROENI DRAJAT, MA

**PROGRAM STUDI  
AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**PROGRAM DOKTOR (S3)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA  
UTARA  
2020**

## **PERSETUJUAN PROMOTOR**

Disertasi Berjudul: •

**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG  
'DEMOKRASI ISLAMI'**

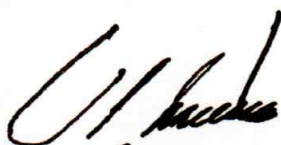
Oleh :

**ELLY WARNISYAH HARAHAHAP  
NIM. 943130375**

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk  
Sidang Promosi Doktor, Program Studi Doktor Aqidah dan Filsafat  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 28 Agustus 2020

Promotor I



**Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**  
NIP. 19610816 198303 1 007

Promotor II



**Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag**  
NIP. 19650212 199403 1 001

## PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing disertasi dari mahasiswa yaitu:

Nama : Elly Warnisyah Harahap  
NIM : 943130375  
Prodi : Akidah dan Filsafat Islam  
Judul Disertasi : PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG  
'DEMOKRASI ISLAMI'

Berpendapat bahwa disertasi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat mengikuti seminar hasil.

Medan, 10 Juni 2020

Promotor I



**Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**  
NIP. 19610816 198303 1 007

Promotor II



**Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag**  
NIP. 19650212 199403 1 001



## PENGESAHAN

Disertasi Berjudul:  
PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG 'DEMOKRASI ISLAMI'

**Elly Warnisyah Harahap NIM. 943130375** Telah di uji dalam Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) pada tanggal 13 Mei 2020, Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Doktor Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sumatera Utara.

Medan, 20 Agustus 2020  
Panitia Ujian Pendahuluan  
Disertasi (Tertutup)

Ketua

Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

Sekretaris

Dr. Arifinsyah, M.Ag  
NIP. 19680909 199403 1 004

Anggota

Penguji I

Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

Penguji II

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag  
NIP. 19620814 199203 1 003

Penguji III

Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA  
NIP. 19610816 198303 1 007

Penguji IV

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag  
NIP. 19650212 199403 1 001

Penguji V/Eksternal

Dr. Murvanto Amin, M.Si  
NIP. 19740930 200301 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara



Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama : Elly Warnisyah Harahap  
Nim : 943130375  
Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/20 Maret 1967  
Judul Disertasi : PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID  
TENTANG ‘DEMOKRASI ISLAMI’

Menyatakan bahwa hasil penemuan disertasi ini yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila terdapat dikemudian hari penulis disertasi ini adalah plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus bersedia menerima sanksi akademik berdasarkan aturan tata tertib di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Demikian, Surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

**Medan, 28 Agustus 2020**



**Elly Warnisyah Harahap  
NIM. 943130375**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	-
ت	tā`	t	-
ث	sā`	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā`	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā`	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā`	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: مُتَعَدِّدَةٌ ditulis *muta‘addidah*

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat, zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-aulyā'*

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan dhamah), ditulis *t*

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ dibaca *zakātul fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Contoh: جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyah*

كَرِيمٌ ditulis *karīm*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

قَوْلٌ ditulis *qaulu*

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof ( ' )

Contoh: مُؤَنَّثٌ ditulis *ditulis mu'annaś*

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: الْقِيَاسُ ditulis *al-qiyās*



2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf l (el) diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

Contoh: الشمس ditulis *as-syam*

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الشيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an, hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab, la Tahzan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

## ABSTRAK



NAMA : ELLY WARNISYAH HARAHAHAP  
NIM : 94313030375  
JUDUL : PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID  
TENTANG DEMOKRASI ISLAMI

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Islami. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah menganalisis pemikiran demokrasi Islami, konstruk pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid, dan menganalisis mengapa pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid penting bagi proses demokratisasi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sejarah dan politik. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer, yaitu buku-buku karangan Abdurrahman Wahid sendiri, seperti Mengurai Hubungan Agama dan Negara; Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, dan Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan, sementara sumber data sekunder, yang merupakan data pendukung didapatkan dari dokumen berupa buku-buku karangan Abdurrahman Wahid yang menjadi sumber kedua dari tema penelitian, dan hasil wawancara mendalam, juga buku-buku lain yang relevan dengan tema penelitian.

Untuk mendapatkan data yang valid digunakan teknik pengumpulan data: dokumentasi berupa buku-buku, baik yang berupa hard copy maupun pdf yang dianalisis secara mendalam hingga diperoleh data yang valid. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis wacana untuk menjawab bagaimana pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid adalah pertemuan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kenegaraan dengan Islam. Islam sebagai komplementer dalam bingkai demokrasi, yang mampu memberikan pengaruh dalam memberikan kebebasan sehingga tercapai civil society. Pentingnya pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid karena mampu menjembatani perbedaan-perbedaan dalam negara plural, di mana ada persamaan (musawwa) dan keadilan ('adalah) sehingga ketika diimplementasikan akan mampu mewujudkan tujuan demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu kehidupan yang baik dan sejahtera.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Islami Abdurrahman Wahid adalah demokrasi representatif, di mana perwakilan tidak didasarkan jumlah tetapi proporsional, yang dilandasi oleh ajaran universal Islam, keadilan, persamaan dan demokrasi. Konstruksi pemikiran demokrasi Islami adalah pertemuan demokrasi (Barat/liberal) yang didapatkan dari persentuhannya dengan buku-buku Barat, dengan ajaran Islam mazhab Ahlul Sunnah wal Jama'ah seperti yang dianut Nahdatul Ulama, organisasi yang didirikan oleh kakeknya, dan dipimpinnya selama beberapa periode. Pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid penting untuk diimplementasikan dalam proses demokratisasi di Indonesia karena mampu mempertemukan perbedaan dalam suasana saling pengertian yang tinggi, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia meskipun berbeda dengan kelompok mayoritas. Pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid ketika diimplementasikan akan memberikan kedamaian dan tenggang rasa yang tinggi.

Kata Kunci: Abdurrahman Wahid, Demokrasi Islami, Nilai-nilai Universal ajaran Islam





## ABSTRACT



NAME : ELLY WARNISYAH HARAHAHAP  
NIM : 94313030375  
TITLE : ABDURRAHMAN WAHID'S THOUGHTS  
ON ISLAMIC DEMOCRACY

This research is about Abdurrahman Wahid's thoughts on Islamic democracy. The research objective was to analyze Islamic democracy, the constructs of Islamic democratic thought and why the thought of democracy Abdurrahman Wahid is important for the democratization process in Indonesia

This research is qualitative research with a library approach. Data sources consist of two: primary data sources, namely Abdurrahman Wahid's works and secondary data sources, namely supporting data obtained from documents, books, articles, and supporting data relevant to the research theme. The data analysis method used is discourse analysis to discover Abdurrahman Wahid's Islamic democratic thoughts.

The results showed that Abdurrahman Wahid's Islamic democratic thought was a meeting between democratic and state values and Islam. Islam as a complementary framework of democracy that can provide influence in providing the freedom to achieve civil society. The importance of Abdurrahman Wahid's Islamic democratic thought because it is able to bridge differences in a plural state, where there is equality (*musawwa*), justice (*'adl*) and consultation (*shura*). So, that implementation will realize democratic goals that are in line with Islamic teachings, namely a good and prosperous life.

This research found that Abdurrahman Wahid's Islamic democracy is a representative democracy, where representation is not based on numbers but proportionally based on the universal values of Islam, namely justice, equality, and democracy. The construction of Islamic democratic thought is a meeting of democracy (Western / liberal) obtained from its contact with Western ideas, with the Islamic values of the Ahl Sunnah wa al-Jama'ah school of thought as adhered to by Nahdatul Ulama. Abdurrahman Wahid's democratic thought is relevant in Indonesian democratization because it brings together differences in an atmosphere of great mutual understanding and upholds human rights. Abdurrahman Wahid's Islamic democratic thought provides a high level of peace and tolerance in national life.

Keywords: Abdurrahman Wahid, Islamic democracy, and Universal Values of Islam.

## ملخص



اسم : إيلي وارنيشة هرحف

رقم القيد : 94313030375

عنوان : فكر عبد الرحمن وحيد

حول الديمقراطية الإسلامية

يدور هذا البحث حول تأثير أفكار عبد الرحمن وحيد على

الديمقراطية الإسلامية. كان هدف البحث هو تحليل بنيات الفكر الديمقراطي الإسلامي ومساهمة الفكر الديمقراطي الإسلامي لعبد الرحمن وحيد في عملية التحول الديمقراطي في إندونيسيا.

هذا البحث هو بحث نوعي بمنهج أدبي. تتكون مصادر البيانات من

مصدرين أساسيين للبيانات ، وهما كتب عبد الرحمن وحيد ومصادر

البيانات الثانوية ، وهي البيانات الداعمة التي تم الحصول عليها من

الوثائق والكتب والمقالات والبيانات الداعمة ذات الصلة بموضوع البحث. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل الخطاب لاكتشاف أفكار عبد الرحمن وحيد الديمقراطية الإسلامية.

وأظهرت النتائج أن الفكر الديمقراطي الإسلامي لعبد الرحمن وحيد

كان لقاء بين قيم الديمقراطية وقيم الدولة والإسلام. الإسلام كإطار مكمل

للمدنية يمكنه التأثير في توفير الحرية لتحقيق المجتمع المدني. أهمية

الفكر الديمقراطي الإسلامي لعبد الرحمن وحيد لأنه قادر على ردم

الخلافات في دولة تعددية ، حيث توجد مساواة وعدالة وشورى حتى يحقق

التنفيذ أهدافاً ديمقراطية تتماشى مع تعاليم الإسلام ، وهي الحياة الطيبة

والمزدهرة.

وجد هذا البحث أن الديمقراطية الإسلامية لعبد الرحمن وحيد هي

ديمقراطية تمثيلية ، حيث لا يعتمد التمثيل على الأرقام ولكن يعتمد بشكل

متناسب على القيم العالمية للإسلام ، وهي العدالة والمساواة والديمقراطية.

إن بناء الفكر الديمقراطي الإسلامي هو لقاء للديمقراطية (الغربية) /

الليبرالية) التي تم الحصول عليها من اتصالها بالأفكار الغربية ، مع  
التعاليم الإسلامية لمدرسة فكر أهل السنة والجماعة كما التزمت بها نهضة  
العلماء. يعتبر الفكر الديمقراطي لعبد الرحمن وحيد وثيق الصلة بإرساء  
الديمقراطية في إندونيسيا لأنه يجمع الاختلافات في جو من التفاهم المتبادل  
الكبير ويدعم حقوق الإنسان. يوفر الفكر الديمقراطي الإسلامي لعبد  
الرحمن وحيد مستوى عالٍ من السلام والتسامح في الحياة الوطنية.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamiin, segala puji hanya milik Allah, Sang Pencipta alam semesta, Sang Maha Pemilik kehidupan, pengatur yang tidak diatur. Berkat ridha dan pertolongannyalah, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini meski sebenarnya sangat terlambat. Harapan penulis semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada nabi Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah*, pemimpin umat yang sesungguhnya, sekaligus tokoh yang telah merubah peradaban dunia. Semoga kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam, mengikuti sunnahnya, dan meneladani perilakunya.

Penulis merasa bersyukur akhirnya tahap ini bisa penulis lalui. Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan disertasi ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan dukungan moril dari berbagai pihak, karena itu dengan kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orangtua penulis, almarhum dan almarhumah yang telah membimbing dan mencurahkan kasih sayang yang tidak terbatas bahkan sampai di akhir hidupnya. Untuk ibunda, almarhumah Ramsyah Hasibuan dan ayahanda, almarhum Drs. Ali Makmur Harahap yang tidak sempat menyaksikan keberhasilan penulis menyelesaikan studi, padahal sangat mengimpikan menyaksikan kesuksesan ananda tercintanya ini. hanya doa yang mampu ananda panjatkan ke hadirat Allah Swt., semoga ayah dan bunda ditempatkan di tempat terbaik di sisiNya. Untuk kasih sayang, kelembutan, perhatian, dan cinta yang tidak terbatas, sepanjang hidup penulis akan menjadi penyemangat untuk menjadi lebih baik lagi.
2. Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Saidurrahman Harahap, MA, sebagai pimpinan tertinggi UIN Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Prof. Dr. Katimin, M.Ag, yang bukan hanya bertindak sebagai



pimpinan fakultas, tetapi juga yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan program Doktor ini, sekaligus juga merupakan Dosen penulis yang telah memberikan ilmunya dengan tulus.

4. Ketua Prodi S3 Aqidah dan Filsafat Islam, Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan disertasi, dan memberi masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan disertasi ini. Selain itu beliau juga adalah Dosen penulis yang sudah memberikan ilmunya agar bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
5. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Syukur Kholil Dalimunthe yang tidak bosan-bosannya memotivasi agar program Doktor penulis segera selesai.
6. Mantan Ka. Prodi S3 Aqidah dan Filsafat Islam, Dr. Anwarsyah Nur, MA, yang memotivasi penulis untuk menyegerakan menyelesaikan proses perkuliahan, dan membimbing persoalan-persoalan administrasi selama perkuliahan.
7. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, dan Prof. Dr. Amroeni Drajat, MA, selaku Pembimbing Penulis yang rela meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dalam penulisan disertasi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk bimbingan Bapak berdua. Beliau berdua juga adalah Dosen penulis yang memberikan ilmunya bukan hanya pada waktu berada di kelas, tetapi di mana saja beliau berada tetaap menyediakan waktunya untuk berdiskusi, menyumbangkan ilmunya untuk penulis.
8. Dr. Ziaulhaq Hidayat, MA, sekretaris Prodi S3 Aqidah dan Filsafat Islam, adinda yang selalu mempermudah penulis menyelesaikan program Doktor ini. Tidak ada persoalan administrasi yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat di tangannya.
9. Wakil Dekan I, Dr. Arifinsyah, MA, wakil Dekan II, Dr. Hasna Nasution, MA, dan Wakil Dekan III, Dr. Maraimbang Daulay, MA yang terus menerus memotivasi penulis untuk menyelesaikan program Doktor ini.

10. Dosen-dosen penulis selama menimba ilmu di Program Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam; Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA (alm.), Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA, Prof. Dr. M.Ridwan Lubis, MA. Prof. Dr. Rahman Yusuf, MA, yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
11. Suami tercinta, Drs. Syarif Abdullah Siregar yang setia mendampingi dan menemani terutama ketika bimbingan dengan kedua pembimbing penulis, yang terus memotivasi agar gelar Doktor segera diperoleh. Begitu juga anak-anak, Nadhiatul Rif'ah Siregar, Luthfi Sakina Siregar, A.Md, Mardiana Siregar, Rais Sardi Siregar, semua menantu dan cucu.
12. Kakak/Abang, dan adik-adik penulis, Lelis Sriwati Harahap, S.Pd/ Musa Hasan Matondang, S.Pd, dr. Armansyah Harahap, SPOG/dr. Adil Lida, SPA, Nurlatifah Harahap, M.Pd, begitu juga para keponakan: Muhammad Ihsan Matondang/Lulu Izhar, Isnaini Rahmah Matondang, S. Pd, Ahmad Bukhari Matondang, A. Md, dan Nurul Fadhilah Matondang, A. Md. Terima kasih buat dukungan kalian semua.
13. Dr. Ahmad Suaedy, Drs.Marwan Dasopan, Alamsyah Djafar, dan Bashori yang telah memberikan informasi yang sangat berharga, sehingga disertasi ini bisa diselesaikan. Terimakasih buat kesediaan waktunya untuk penulis wawancara, dan buku-buku yang disiapkan.
14. Sahabat sekaligus adik, Dra. Husna Sari Siregar, M.Si, Dra. Endang Ekowati, MA, kakanda Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Segenap sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), dan semua pihak yang tidak bisa penuliskan satu persatu.  
Akhirul kalam, semoga disertasi ini bermanfaat.

Medan, Juli 2020  
Penulis

Elly Warnisyah Harahap

# DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	22
E. Batasan Istilah .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
G. Kajian Terdahulu.....	28
H. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Demokrasi .....	33
B. Definisi dan Karakteristik Demokrasi .....	40
C. Demokrasi di Indonesia.....	51
D. Permasalahan dalam Penegakan Demokrasi di Indonesia: HAM dan Angka Kemiskinan .....	63
E. Teori Demokrasi.....	67
<b>BAB III. LATAR BELAKANG DAN KEHIDUPAN     ABDURRAHMAN WAHID.....</b>	<b>77</b>
A. Latar Belakang Internal .....	77
B. Latar Belakang Eksternal .....	96
C. Aktivitas dan Karir Politik .....	112
D. Karya-karya Gus Dur .....	122

<b>BAB IV. PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI .....</b>	<b>125</b>
A. Makna Demokrasi Islami .....	125
B. Kualifikasi (Karakteristik) Demokrasi Islami .....	128
C. Pluralitas dalam Negara Demokrasi Indonesia .....	137
D. Islam dan Politik .....	160
E. Islam dan Demokrasi di Indonesia .....	170
F. Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam .....	191
G. Umat Beragama dalam Negara Demokrasi Indonesia .....	214
H. Konstruksi Pemikiran Demokrasi Gus Dur .....	223
1. Menilai Posisi Gus Dur Ditinjau dari Paradigma Politik Islam .....	223
2. Arkeologi Pemikiran Demokrasi Gus Dur .....	225
<b>BAB V. IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DEMOKRASI ABDURRAHMAN WAHID .....</b>	<b>241</b>
A. Implementasi Pemikiran Demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Kebijakan Pemerintah .....	241
B. Implementasi Pemikiran Demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Kehidupan Keagamaan .....	277
C. Implementasi Pemikiran Demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan .....	287
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>292</b>
A. Kesimpulan .....	292
B. Rekomendasi .....	294
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>296</b>

# Pendahuluan

*by* Elly Warnisyah

---

**Submission date:** 08-Jul-2024 03:34PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2413823692

**File name:** disertasi\_ujian\_terbuka\_zia\_1.pdf (3.31M)

**Word count:** 94875

**Character count:** 615351

### 3

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di masa modern ini adalah wacana yang selalu diperbincangkan dan terus berkembang. Sistem yang pada awalnya lahir dan dipraktikkan di Yunani ini, kini sudah menjadi sistem yang dipraktikkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Tidak heran jika sistem ini dianggap sebagai sistem terbaik, sehingga apapun yang terjadi di sebuah negara selalu diukur dengan paradigma demokrasi.

Pandangan bahwa sistem demokrasi adalah sistem politik dan cara pengaturan kehidupan yang terbaik bagi masyarakat modern, telah menyebabkan negara-negara di dunia ini, bahkan rejim totaliter sekalipun, mengklaim negaranya sebagai negara yang demokratis, setidaknya sedang berproses ke arah itu. Ini menyebabkan demokrasi menjadi salah satu ukuran terpenting di dalam tata hubungan internasional di mana negara-negara saling tergantung satu sama lain, terutama di era global ini. Tidak jarang kita mendengar pemutusan hubungan antar negara karena ditengarai salah satu negara tidak demokratis memperlakukan rakyatnya.<sup>1</sup>

UNESCO pada tahun 1949 melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa: “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*)”.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan UNESCO di atas melegitimasi kesempurnaan sistem demokrasi sebagai teori politik. Pandangan ini tentu saja menyebabkan sistem ini menjadi begitu populer, belum dapat tergoyahkan secara filosofis, sosiologis, maupun dalam format yuridis ketatanegaran. Sejalan dengan semakin diperkenalkannya *humanrights, civil society, dan konsep good governance* yang dianggap merupakan syarat demokratis tidaknya sebuah negara, maka kedudukan demokrasi semakin kuat, mengalahkan konsep-konsep yang lain. Pada akhirnya posisi teori demokrasi sebagai konsep terbaik yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia, tidak pelak lagi dipercaya di hampir semua negara di dunia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 2

<sup>2</sup> S.I. Benn dan R.S. Peters, *Principles of Political Thought*, yang dikutip dari Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 105

<sup>3</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 2

Demokrasi diyakini sebagai gagasan universal yang dapat diterima dalam ragam perspektif. Daya tarik demokrasi bahkan telah menjadi semacam obsesi sejumlah masyarakat non Barat sejak awal abad ke-20. Banyak wilayah jajahan Barat di Asia dan Afrika mulai bergerak untuk melepaskan diri dari penjajahan dengan munculnya kesadaran bahwa sistem demokrasi memberikan kemerdekaan bagi manusia yang tidak mereka dapatkan dari penjajah. Kegairahan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat begitu menggejala. Dengan senjata demokrasi yang diperoleh melalui pendidikan Barat, para pemuka masyarakat di wilayah jajahan percaya bahwa ini akan efektif digunakan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Di Indonesia, tepatnya di masa penjajahan Belanda, kesadaran ini mampu melahirkan Kebangkitan Nasional.<sup>4</sup>

Gambaran ini tidak hanya terjadi dalam sejarah kebangkitan *nation* Indonesia. Hampir di seluruh belahan dunia, gerakan demokratisasi kehidupan politik menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam mengubah persepsi sejarah tentang bagaimana menyelenggarakan kekuasaan secara etis, rasional, dan bertanggung jawab. Potensi demokrasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat benar-benar dipercaya, terutama dalam melindungi hak-hak individu ketika menghadapi kekuasaan negara dan pemerintah.<sup>5</sup> Huntington menggambarkan dengan sangat sangat jelas bagaimana proses transformasi sejarah di era modern memperlihatkan adanya upaya yang intens untuk menghapuskan segala bentuk pemerintahan yang tidak demokratis ataupun antidemokratik, dan kemudian menegakkan bentuk pemerintahan serta sistem politik yang demokratis.<sup>6</sup>

Kesepakatan bahwa sistem ini adalah sistem yang terbaik, tidak serta merta menyebabkan demokrasi dipraktikkan secara seragam, tetapi malah sangat beragam. Secara normatif maupun secara operasional keragaman demokrasi adalah fakta yang tidak terbantahkan, sehingga dikenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, demokrasi nasional, demokrasi Soviet, dan sebagainya.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri pernah dijalankan demokrasi

---

<sup>4</sup> Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoretis untuk Indonesia*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Madya dalam ilmu politik FISIP UI, 1 November 1997, h.20

<sup>5</sup>A. Rahman Zainuddin, Kata Pengantar Penerjemah dalam buku *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* karya Robert A. Dahl, jilid II, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1992, h.xxxiv

<sup>6</sup>Pernyataan Huntington ini dapat dilihat dalam buku A Preface to Economic Democracy, (terjemahan: Demokrasi Ekonomi) karya Robert A. Dahl, dalam Kata Pengantar yang ditulis Dorojatun Kuntjorojakti, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1992, h. xiii

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 105



presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan kemudian kembali ke demokrasi presidensial yang diberi sebutan khusus oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia dengan demokrasi Pancasila.

Ide demokrasi yang dianggap *ambiguous* adalah penyebab mengapa demokrasi disebutkan dengan istilah yang sangat beragam, seperti hasil kesimpulan penelitian UNESCO pada tahun 1949 itu. *Ambiguity* atau ketaktentuan itu paling tidak menyangkut: lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, dan praktik demokrasi (*either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, idea and practice are conditioned*)<sup>8</sup>.

Dilatar belakangi ide yang beragam, maka definisi demokrasi pun menjadi sangat beragam juga, meskipun tetap dapat ditarik benang merahnya yang merupakan inti dari demokrasi, yaitu pemerintahan di mana rakyat-lah sesungguhnya yang memiliki kekuasaan (kedaulatan), bukan raja seperti dalam sistem monarki, dan bukan pula Tuhan, seperti dalam sistem teokrasi. Sejalan dengan itu, para ahli pun menamakan demokrasi dengan beragam nama sesuai dengan karakteristik dari model demokrasi yang diinginkannya, tetapi inti dari demokrasi tidak akan berubah, yaitu adanya kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan terjaminnya Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Selain definisi dan penerapannya yang berbeda, teori demokrasi pun begitu banyak, namun bagaimanapun dan siapapun pencetus teori itu, ada kesepakatan tentang inti dari demokrasi, yaitu adanya kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia (HAM). Lagi-lagi untuk menentukan siapa rakyat yang berdaulat itupun masih menjadi perbedaan di antara para ahli dan negara-negara yang menerapkannya. Belum lagi persoalan kebebasan, dan hak asasi manusia. Kebebasan dan hak asasi yang mana yang dilindungi?

Persoalan-persoalan itu tidak luput dari perhatian para ahli politik, sehingga memunculkan kritik terhadap demokrasi, seperti yang dinyatakan oleh William N. Nelson: *Is there any rational basis for believe in political democracy? Is there any reason to beliefethat democracy is an especially good form of government?*<sup>9</sup>

Pernyataan seperti ini sepertinya mengada-ada, tetapi sangat tajam dan mendasar. Untuk mendukung pernyataannya itu, Nelson berupaya menjawabnya melalui analisis ilmu pemerintahan, mengevaluasi struktur dan cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Berbeda dengan John Burnheim yang langsung menyatakan ketidakpercayaannya terhadap eksistensi demokrasi dalam praktiknya pada bagian pendahuluan bukunya:

<sup>8</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 105

<sup>9</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi...*, h.2

“Democracy <sup>64</sup>s not exist in practice. At best we have what the ancient would have called elective oligarchies with strong monarchial elements. Most contemporary discussions of democracy assume that the task of democratic theory is to provide either some justification for these regimes or some normative guidance for their improvement.”<sup>10</sup>

Bagi para pendukung demokrasi pernyataan ini kelihatannya juga tidak masuk akal dan sarkastis. Pernyataan ini dikupasnya dalam pendekatan politik dan kekuatan posisi birokrasi dalam negara.<sup>11</sup> Jelas bahwa pengertian dan teori demokrasi masih menjadi permasalahan, belum lagi persoalan penerapannya, sehingga Robert A. Dahl menyatakan bahwa “kata demokrasi dewasa ini tidak <sup>69</sup> merupakan istilah yang mempunyai pengertian terbatas dan khas, dan lebih banyak merupakan penerimaan yang kabur terhadap sebuah gagasan yang populer.”<sup>12</sup>

Kritik-kritik terhadap demokrasi tidak membuat sistem ini ditinggalkan. Demokrasi tetap saja masih menjadi harapan bukan hanya pakar politik tetapi warga negara pada umumnya untuk sebuah sistem yang mampu mewujudkan kehidupan negara di mana hak-hak individu terjamin sepanjang tidak melukai hak-hak individu yang lain. Demokrasi tetap saja masih dianggap sistem yang terbaik, sehingga seakan-akan tidak pernah salah, bahkan ketika hal yang bertolakbelakang dengan karakteristiknya terjadi di sebuah negara sehingga menyebabkan *chaosnya* negara tersebut, maka yang dipersalahkan bukanlah sistemnya melainkan orangnya, oknumnya, pelaku demokrasi tersebut. Tindakan kriminal yang menyebabkan ketidakamanan, korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, mafia peradilan, dan berbagai ketimpangan yang lain, tidak pernah dianggap sebagai kesalahan sistem demokrasi, tetapi pelaku atau oknumnya-lah yang menyelewengkan makna demokrasi tersebut. Demokrasi bahkan sudah dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat, sistem yang terbaik dibandingkan dengan sistem yang lainnya yang menjadikan keadilan, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, serta kebebasan sebagai sumber hukumnya.<sup>13</sup>

Kuatnya kedudukan demokrasi telah menyebabkan luluhlantaknya teori-teori yang lain mengenai tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh para filsuf, ahli hukum, dan ahli politik hingga awal milenium ketiga ini. Ini dinyatakan oleh Larry Berman dan Bruce Allen Murphy dalam buku *Approaching Democracy*, sebagai berikut:

<sup>10</sup> William N. Nelson, *On Justifying Democracy*, (London, Boston, and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1980), h. 1

<sup>11</sup> John Burnheim, *Is Democracy Possible?* (Los Angeles: University of California Press 1985), h.1.

<sup>12</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi...*, h. 3

<sup>13</sup> Lihat *Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Konsep Fiqih Humanistik Abou al Fadl*, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009.

*Democracy as a political system has become increasingly popular. The number of democracies worldwide, just a handful a century ago, increased from three of four dozen in the 1950s to 118 of the 191 countries by the end 1996, containing 62 percent of the world population, the highest total in history. Clearly, we live in an age of democratic aspirations, and for many who seek to achieve democracy....*<sup>14</sup>

Demokrasi menjadi begitu kuat dan langgeng bahkan menyatu dengan alam pikir manusia karena prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya berasal dari konsep “moralitas” dan “hukum alam”, yakni hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Demokrasi di era modern ini sudah menjadi standar moral secara alamiah, sehingga bahkan dianggap tidak akan sirna sampai kapanpun di dunia. Harapan masyarakat begitu tinggi terhadap demokrasi, sehingga ketika ada sebuah pemerintahan bertindak otoriter dan diktator, maka demokrasi dianggap merupakan dewa penyelamat, meskipun ketika demokrasi dipraktikkan ternyata tetap saja masih menyisakan persoalan.<sup>15</sup>

Selain masalah-masalah di atas, ketika dipraktikkan-pun demokrasi masih memiliki persoalan. Demokrasi dianggap bising dan cerewet. Banyak hal terutama tentang kebijaksanaan pemerintah dipertanyakan bahkan dikritik oleh rakyat secara terus menerus. Kegaduhan dan demonstrasi memang merupakan darah daging demokrasi, tetapi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem pemerintah yang hening, sepi, tetapi menikam dari belakang, seperti yang terjadi di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno dan di masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lihat saja pemerintahan dibawah Presiden Soekarno di Indonesia selama menjabat pada 1950-an, terkesan bising dan gaduh, tetapi demokrasi berjalan dengan baik, dan hak asasi rakyat diakui bahkan terus dipelihara. Kala itu, tidak ada pemenggalan kepala manusia, tidak ada pembredelan surat kabar,<sup>16</sup> sementara di masa pemerintahan Soeharto keran kebebasan berbicara benar-benar ditutup. Ini yang dikritik oleh Abdurrahman Wahid sebagai “demokrasi seolah-olah”.<sup>17</sup>

Demokrasi juga terkesan gaduh, dan tertutup atau menutup diri. Kesan yang salah sebenarnya, karena demokrasi justru sangat terbuka, bahkan transparansi adalah salah satu indikator dan esensi demokrasi. Demokrasi terkesan tertutup ataupun menutup diri, hanya karena bawaannya yang tidak mungkin memuaskan semua manusia, dan tentu saja semua sistem juga begitu. Paling jauh, demokrasi hanya berbicara pada

<sup>14</sup> Larry Berman and Bruce Allen Murphy, *Approaching Democracy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1999), h. 3

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 3

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara ...*, h.3

<sup>17</sup> Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 71

tataran mayoritas, bukan totalitas, dan memang seperti itulah demokrasi, suara mayoritas merupakan penentu. Pihak minoritas, misalnya mereka yang kalah suara dalam pemilihan umum, terkesan sebagai “musuh”, tetapi musuh ini harus ditoleransi, bukan musuh yang harus dibumihanguskan. Kelompok minoritas inilah yang kecewa, dan menjadi ribut. Itu sebabnya, pada level praktis, demokrasi terkesan menutup diri terhadap “musuh-musuh” tersebut. Sulit ada suara konsensus dalam dunia politik. Yang sering terjadi adalah suara mayoritas. Hal ini sebenarnya wajar karena perbedaan kepentingan dan keinginan, tetapi demokrasi tetap harus punya nyali, di samping tingkat kesabaran dan toleransi yang tinggi.<sup>18</sup>

Ada beberapa faktor mengapa masyarakat selalu mendambakan adanya demokrasi, yaitu:

1. *“Faktor demokrasi prosedural. Prosedur pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, berdasarkan suara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan.*
2. *Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, keputusan diambil secara bersama-sama, meskipun ada pihak yang kalah dan merasa suaranya tidak terwakili, tetapi karena prosesnya dilakukan bersama-sama, dan keputusan-pun diambil secara demokratis, maka pihak yang kalah akan tetap merasa dihargai. Dengan cara seperti ini, maka tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan hasil keputusan, tinggi.*
3. *Faktor tujuan yang bersifat substantif. Demokrasi diyakini mengandung banyak manfaat, seperti pernyataan Miller di bawah ini:*
4. *... demokrasi dipertahankan karena ia menghasilkan kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan – keputusan yang memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual, dan sebagainya. ... bahwa demokrasi akan memajukan mereka ...<sup>19</sup>*
5. *Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Pengambilan keputusan secara demokratis merupakan hal yang paling mungkin untuk mencapai kebahagiaan, karena proses pengambilan putusan melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan tersebut.”<sup>20</sup>*

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 4-5

<sup>19</sup> David Miller dan Larry Siedentop, *Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat, dan Teori*, Terj. Nazaruddin Syamsuddin, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h, 254

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 5-6

Gagasan tentang pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Batasan-batasan itu tercantum dalam konstitusi, karenanya pemerintahan demokrasi sering juga disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*). Jadi *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *resrained government*.<sup>21</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa kedaulatan pemerintah dalam negara yang menerapkan demokrasi dibatasi oleh konstitusi (undang-undang). Itu artinya pemerintah tidak memiliki kekuasaan penuh yang tidak terbatas, yang rentan menimbulkan pemerintahan yang tiran. Pembatasan oleh konstitusi itu pada dasarnya untuk menjaga kedaulatan rakyat. Jadi, tidak ada proses yang terjadi dalam penyelenggaraan negara yang tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk sepenuhnya menjamin kesejahteraan rakyat. Hukum (konstitusi) itu sendiri dibuat oleh rakyat, dan berdasarkan aspirasi rakyat melalui perwakilannya di dewan perwakilan rakyat, apapun nama, dan model perwakilan itu. Ini yang membedakannya dengan metode lain yang sentralistik dan despotik misalnya. Hal ini tergambar dalam banyak literatur, antara lain dalam *The Encyclopedia of Philosophy*:<sup>22</sup>

“ *It is generally agreed that people live best in societies regulated by laws. Laws and policies help people cooperate, coordinate their activities, and establish justice in society. ‘DEMOCRACY’ refers to a method in which all minimally competent members of a society. The people decide as a single body, and there is some provision for quality in the means to participate. This method contrasts with decentralized methods of decision making such as markets as well as with monarchy, aristocracy, oligarchy, and dictatorship. Theoretical debates about democracy concern its proper range. The nature and strength of the equality that is required, as well as the nature and basis of its worth.*”

Batasan-batasan umum tentang demokrasi dimiliki oleh semua jenis atau model demokrasi, seperti pembagian yang dilakukan oleh Logemann yang mengklasifikasikannya kepada:<sup>23</sup>

1. “Demokrasi Barat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi Barat adalah demokrasi yang mengutamakan kebebasan.
2. Demokrasi Timur. Menurut Snetleage, demokrasi Timur adalah demokrasi yang mengutamakan persamaan.

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h.52

<sup>22</sup>, Donald M. Borchert, *The Encyclopedia of Philosophy*, (New York, USA: Simon and Schuster Macmillan, 1966), h.124

<sup>23</sup>Padmo Wahjono, *Kuliah-kuliah Ilmu Negara*, cet. 1, yang dikutip dari Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, h. 57



3. Demokrasi Sederhana, yaitu demokrasi yang biasanya masih ada di pedesaan di mana rakyat menggunakan musyawarah, bukan cara-cara yang dikenal dalam teori demokrasi, seperti voting.
4. Diktator, terdiri dari Nazisme dan Facisme. Di negara model ini pemimpin dianggap sebagai eksponen rakyat atau pencerminan kepentingan rakyat, orang yang terkemuka di antara rakyat, juga terkemuka di antara yang sama (primus inter pares).”

Dari klasifikasi itu tidak nampak Demokrasi Pancasila yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Itu makanya Mohammad Hatta menyatakan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi Barat, bukan pula demokrasi Timur. Bagi Hatta, demokrasi di Indonesia tidak semata-mata ditransfer dari peradaban Barat, meskipun demokrasi sejatinya berasal dari Barat, tetapi berakar dari pedesaan-pedesaan Indonesia yang ternyata dari dulu demokratis dalam penyelenggaraan kehidupan desanya.<sup>24</sup>

Abdurrahman Wahid (selanjutnya akan disebut Gus Dur, sesuai dengan nama panggilannya), tokoh yang sedang dijadikan sebagai objek kajian ini juga memiliki konsep demokrasi. Meskipun demokrasi berasal dari Barat, tetapi Gus Dur tidak mengadopsi demokrasi model Barat, tetapi tidak juga model Timur, meskipun Gus Dur berasal dari negeri yang termasuk ke dalam wilayah Timur dunia. Konsep demokrasiya bukan model Barat dan bukan pula Timur, tetapi demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai martabat kemanusiaan yang bersifat universal yang digali dari agama-agama, filsafat, maupun tradisi dan budaya nusantara.<sup>25</sup> Nilai-nilai demokrasi sendiri, menurut Gus Dur mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok, dan nilai yang bersifat derivasi atau pengembangan dari nilai pokok tadi. Nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan, yang sifatnya sangat universal, berlaku sekaligus dibutuhkan di bagian negara manapun di dunia ini. Lebih lanjut Gus Dur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebebasan ialah kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara, dan hak kolektif dari masyarakat.<sup>26</sup>

Wacana demokrasi yang begitu populer menyentuh semua bagian dunia, bahkan juga negara-negara Islam yang sebenarnya sudah memiliki

<sup>24</sup> Cita-cita Hatta untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus, karena kesejahteraan di bidang politik saja tidak cukup, harus sejalan dengan kesejahteraan di bidang ekonomi. Selengkapnya bisa dilihat di buku Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Peny. Sri Edi Swasono dan Zuzie Ridjal, (Jakarta: UI-Press, 1992).

<sup>25</sup> Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2010), h. 249-250.

<sup>26</sup> Zainuddin, “Islam Tak Kompatibel dengan Demokrasi?” dalam Jaringan Islam Liberal, Jawa Pos, 10Pebruari 2002 yang dikutip HM. Zainuddin dalam *ibid*.

model ideal sistem politik dan pemerintahan ketika diperintah oleh Muhammad Saw. dan dilanjutkan para khalifah al-rasyidah setelahnya. Di negara-negara Islam dikenal istilah *syûra* sebagai padanan kata demokrasi, meskipun ini tidak seluruhnya benar. Sebagian beranggapan bahwa *syura* adalah demokrasi, sementara sebagiannya lagi beranggapan bahwa demokrasi merupakan bentuk *syûra* versi Eropa, tetapi, tidak sama persis dengan *syûra*, karena demokrasi tidak berpegang pada dasar-dasar syariat Islam, tidak berada dibawah naungannya, dan juga tidak akan terikat dengan batas-batasnya.<sup>27</sup>

Alquran sendiri sebagai kitab suci umat Islam tidak merumuskan dengan rinci tentang sistem politik yang dapat diterapkan umat Islam, namun telah menjadi semacam kesepakatan *jumhur* (mayoritas) ulama *Fiqh Siyasa* bahwa Alquran dijadikan landasan bagi penerimaan demokrasi dalam Islam, dengan mengungkap beberapa prinsip yang juga ada pada demokrasi, seperti: *syura* (musyawarah baik melalui representasi pada lembaga legislatif maupun eksekutif atau secara langsung); *al-musawwa* (kesetaraan); *al-'adalah* (keadilan); *ra'iyah* (akuntabilitas publik), dan seterusnya.<sup>28</sup>

Islam memandang musyawarah sangat penting, begitu pentingnya sehingga salah satu surah dalam Alquran dinamakan dengan Asy-Syura. Banyak ayat yang memerintahkan bermusyawarah, di antaranya adalah QS. Asy-Syura/42: 38:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم  
ومما رزقناهم ينفقون

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”<sup>29</sup>

Demokrasi memang sudah diperkenalkan pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 SM di Yunani, dan pada abad ke-15 dan 16, perkembangannya sudah mulai naik di Eropa Barat, tetapi wujud yang konkret dari sistem ini baru tercapai pada akhir abad ke-19. Pada abad ke-20, demokrasi tidak lagi hanya membatasi diri pada aspek politik saja, tetapi bahkan sudah meluas mencakup aspek ekonomi, sehingga selain dikenal demokrasi politik, ada juga demokrasi ekonomi.<sup>30</sup> Gagasan tentang demokrasi terus berkembang, termasuk di Indonesia, negara yang bahkan

<sup>27</sup> Taufik Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta:Gema Insani 1992) h.21

<sup>28</sup> Azyumardii Azra, *Menjaga Indone* 62 ( Jakarta:Kencana, 2020), h.77

<sup>29</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019, pdf. h. 708.

<sup>30</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar...*, h.1-8

merdeka pun belum. Sistem ini, sama seperti di negara-negara lain di dunia juga menjadi harapan tokoh-tokoh di Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta.

Di Indonesia beberapa pemikir politik Islam sempat mewarnai peta pemikiran politik, seperti Muhammad Natsir dan Soekarno, yang kemudian dilanjutkan oleh Nurkholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan kawan-kawan pada era selanjutnya. Kedua tokoh ini, Nurkholish Madjid dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki pemikiran yang hampir sama dalam persoalan modernisme, bahkan Greg Barton mengelompokkan keduanya pada kelompok yang sama, pemikir neo-modernisme. Begitupun, dalam masalah hubungan negara dan agama, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Nurkholish Madjid dengan semboyannya "Islam yes, Partai Islam No"<sup>31</sup> cenderung sekuler, namun masih menyatakan bahwa agama dan negara tidak dipisahkan Gus Dur justru lebih tegas dari itu. Gus Dur menginginkan pemisahan yang jelas antara agama dengan negara. Gus Dur tidak setuju adanya campurtangan negara secara formal ke dalam kehidupan beragama rakyatnya. Baginya Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara, dan cukup menjadi sistem moral saja, yang akan menjamin harmonisasi hubungan antar anak bangsa yang berbeda-beda. Justru moralitas agama akan memberikan sumbangan bagi pembentukan politik yang sehat bagi bangsa ini.<sup>32</sup>

Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur dengan tegas mengatakan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan, sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Sama sekali tidak ada doktrin bahwa negara harus berbentuk formal negara Islam, sama seperti tidak adanya keharusan pelaksanaan dalam hal-hal kenegaraan.

Keinginannya untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Gus Dur tidak ingin Islam harus tampil

<sup>31</sup> Isu ini menyedot perhatian masyarakat, apalagi diungkapkan dalam situasi politik yang memanas saat itu. Majalah Tempo dan Panji Masyarakat yang kalangan pembacanya umumnya dari kalangan elit, baik dari kalangan Islam maupun lainnya kerap memberitakannya karena dianggap menarik. Situasi politik yang memanas saat itu diakibatkan oleh kondisi umat Islam yang saat itu sedang merasakan romantisme menghidupkan kembali partai-partai Islam yang ikut mendukung berdirinya Orde Baru. Tiar Anwar Bachtiar, *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia: Kritik-kritik terhadap Islam Liberal dari H.M. Rasjidi* (2014) *INSIST*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 45

<sup>32</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 58



dalam bentuk formal di negara yang jelas-jelas bukan negara agama (teokrasi) ini. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukan cuma milik golongan Islam, sehingga menempatkan Islam sebagai ideologi negara sangat riskan menyebabkan perpecahan bangsa. Itu sebabnya, Abdurrahman Wahid konsisten memperjuangkan pluralisme di negara yang menjadikan demokrasi sebagai bentuk dan sistem pemerintahannya di mana pluralitas agama merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Dalam kondisi seperti ini, sikap semestinya pemeluk agama dan pemerintah adalah tidak bersikap diskriminatif terhadap salah satu agama, minoritas maupun mayoritas. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, semua orang harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, dan ini sejalan dengan pandangannya tentang demokrasi. Lebih tegas Gus Dur mengatakan bahwa dalam pandangan Islam tidak diwajibkan adanya sebuah sistem Islam. Klaim mendirikan negara untuk kepentingan Islam jelas bertentangan dengan demokrasi, karena tidak mengadopsi perlakuan yang sama semua warga negara di hadapan Undang-undang.<sup>33</sup>

Gus Dur sangat menyadari bahwa keragaman adalah sesuatu yang nyata, yang tidak bisa diingkari. Hampir tidak ada daerah yang masyarakatnya homogen di Indonesia ini, baik dari etnis, kebudayaan, maupun agama. Itu sebabnya, Gus Dur konsisten memperjuangkan pluralisme di negara yang menjadikan demokrasi sebagai bentuk dan sistem pemerintahannya di mana pluralitas agama yang sering ditengarai menjadi sumber konflik antarumat beragama merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Dalam kondisi seperti ini, sikap semestinya pemeluk agama dan pemerintah adalah tidak bersikap diskriminatif terhadap salah satu agama, minoritas maupun mayoritas. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, semua orang harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, dan ini sejalan dengan pandangannya tentang demokrasi, bahkan itulah bentuk demokrasi yang diinginkannya.<sup>34</sup>

Fakta-fakta di atas membuat Gus Dur intens membicarakan pluralisme, pribumisasi Islam di samping demokrasi, yang ketika dianalisis akan kelihatan bahwa masing-masing pemikiran itu berjaln berkelindan, dan saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk kemajuan bangsa, dan kehidupan bernegara yang lebih baik di mana

<sup>33</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda...*, h.7

<sup>34</sup> Persamaan hak dan kedudukan semua warga negara dalam menjalankan agamanya dijamin di dalam pasal-pasal 29 ayat 2 UUD 1945. <sup>81</sup>emberikan keistimewaan terhadap salah satu agama, akan mencederai demokrasi. Lihat Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 288-289

ada keadilan tanpa memandang ras, etnis, budaya, bahkan agama di negara yang terkenal sangat plural ini.

Pandangan Gus Dur yang dikemukakan di atas sekilas kelihatannya berbeda dengan umumnya pandangan masyarakat muslim terutama di Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan ide-ide Gus Dur menjadi menarik, bahkan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Sifat kontroversial pandangan, dan gerakannya bahkan menjadi magnet yang menyebabkan orang, terutama kalangan akademisi tertarik untuk menganalisisnya lebih jauh, apalagi di masa di mana ormas bahkan ajaran Islam banyak dihujat akhir-akhir ini, terutama karena beberapa peristiwa teror yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian kecil kalangan Islam yang salah memahami ajaran agamanya.

Tokoh yang lebih dikenal dengan sebutan <sup>15</sup>Gus Dur ini memang dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan merupakan salah seorang intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat disegani, tetapi sekaligus juga sering disalah mengerti. Greg Barton mengatakan banyak wajah yang dimainkan Gus Dur di tengah-tengah masyarakat, di antaranya: figur religius, juga politisi sekuler atau intelektual liberal.<sup>35</sup>

Kesalahmengertian terhadap Gus Dur memang seringkali diakibatkan oleh pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, dianggap *nyeleneh* (bahasa gaul berasal dari bahasa Sunda kasar yang artinya plesetan, gokil, yang bertujuan untuk lucu-lucuan<sup>36</sup>), tetapi itu tidak mengurangi ketokohnya. Di balik sikap dan pernyataannya yang kontroversial, Gus Dur adalah pemimpin Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi agama yang besar, kalau bukan dianggap terbesar di Indonesia, dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak bisa dinafikan juga bahwa organisasi ini justru lebih disegani dan semakin dikenal karena keberadaan Gus Dur di dalamnya.

Hal lain yang membuat Gus Dur dihormati, selain faktor ketokohnya secara pribadi seperti yang dijelaskan di atas, adalah faktor genealoginya. Gus Dur berasal dari keturunan *darah biru*, dengan tradisi pesantren sejak dari kakeknya, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Meminjam terminologi Clifford Geertz, Gus Dur termasuk golongan santri dan priyayi sekaligus dalam tipologi masyarakat Jawa. Ini yang membuatnya berada pada posisi inti dalam kosmologi dan emosi komunitas-meminjam

<sup>35</sup> Greg Barton dalam "Memahami Abdurrahman Wahid", Pengantar dalam Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. xxi.

<sup>36</sup> KBBI online, [www.pusatkata.xyz](http://www.pusatkata.xyz), diunduh pada Minggu, 18 Pebruari 2017, pukul 22.41 WIBB.

istilah Gaffar Karim- masyarakat Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU).<sup>37</sup>

Gus Dur adalah cucu Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pejuang kemerdekaan, dan anak Wahid Hasyim yang juga meneruskan kepemimpinan NU. Wahid Hasyim bahkan sempat menjabat sebagai Menteri Agama di awal kemerdekaan Indonesia. Dengan *trah* seperti itu, Gus Dur tampil dengan karakternya yang kuat dan menjadi orang yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik organisasi Islam ini, terutama setelah Gus Dur berhasil memimpin organisasi ini dalam beberapa periode. Menyebutkan NU, pada saat yang sama hampir tidak bisa dipisahkan dengan mengingat Gus Dur di dalamnya, sosok yang bukan hanya religius tetapi juga luas pemikirannya.

Gus Dur yang luas pemikirannya telah mampu membawa NU menjadi organisasi yang tidak lagi konservatif. Di tangannya, NU direformasi secara internal sehingga menjadi wadah yang paling dinamis terhadap terjadinya berbagai dialog dan pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Luasnya pergaulan dan wawasan Gus Dur yang menjangkau hampir seluruh disiplin ilmu mampu membawa NU menjadi “kawah candradimuka” bagi kemunculan sejumlah politisi dan intelektual muda NU progresif, baik yang segaris dengannya maupun yang berlawanan dengannya.”<sup>38</sup>

Sebagai seorang yang sangat menyadari pluralitas bangsanya, sekaligus telah mempelajari bahkan mengalami hidup di negara-negara dengan peradaban yang berbeda, pemikiran dan tindakan Gus Dur sangat pluralis. Ali Masykur Musa menjelaskan bahwa Gus Dur adalah orang yang sadar sepenuhnya bahwa ia hidup dalam sebuah negara yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang dirumuskan untuk mempersatukan semua unsur yang berbeda di negara yang sangat majemuk ini. Kesadaran Gus Dur terhadap hal itu mungkin melebihi orang lain. Karena itu, baik dalam agama apalagi dalam politik, sikap yang <sup>98</sup> tunjukkan Gus Dur adalah inklusif, bukan eksklusif. Gus Dur bersikap **terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang** atau asal usulnya, karena Gus Dur sangat percaya, “jika kita melakukan perbuatan baik, orang lain tidak pernah bertanya apa agama kita.”<sup>39</sup>

**3** Dalam kaitannya dengan pluralisme, Gus Dur menyatakan bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan sekaligus toleran dan memandang semua manusia **adalah setara**, bahkan status muslim dan non-muslim pun

122

<sup>37</sup> Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), h. 68.

16

<sup>38</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur* (Bandung: Erlangga, 2010), h. xi.

<sup>39</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap...*, h. xi.



setara. Pernyataan Alquran banyak menunjukkan hal ini. Perbedaan di antara manusia justru dihargai, bahkan dimaksudkan Allah untuk saling mengenal di antara sesama manusia. Dalam hal itu, Islam jelas-jelas menyatakansikap yang egaliternya yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan yang tidak adil karena alasan kelas, suku, ras, gender atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat. Menurut Greg Barton, Gus Dur meyakini bahwa pandangan religius yang membentuk dan melahirkan nilai-nilai yang berasal dari Eropa Kristen dan Yahudi dalam visi pokoknya sejajar dengan pesan Islam.<sup>40</sup>

Pluralisme juga erat kaitannya dengan demokrasi. Penegakan pluralisme bukan hanya ditujukan untuk penciptaan pola hidup berdampingan secara damai di antara perbedaan yang ada, tetapi pluralisme diharapkan juga mampu menumbuhkan kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus dan ikhlas sehingga hubungan yang tercipta antar kelompok adalah saling memberi dan menerima (*take and give*) dengan tulus. Pada akhirnya ini akan melahirkan kebebasan untuk bersikap saling terbuka melalui serangkaian dialog yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan menghargai yang menjadi salah satu substansi demokrasi.<sup>41</sup>

Sejalan dengan itu, seperti yang sudah diungkapkan di atas, dalam rangka berdemokrasi ajaran agama tidak perlu diformalisasikan dalam kehidupan bernegara. Tentu saja pemikiran ini lahir karena kesadarannya akan pluralitas bangsa Indonesia. Karena itu, bagi warga negara yang beragama Islam (agama mayoritas di negeri ini), cukuplah memperjuangkan sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi, tanpa perlu menuntut dijadikannya Islam sebagai landasan formal negara ini.<sup>42</sup>Ide ini, sekali lagi, bertolakbelakang dengan pandangan sebagian besar masyarakat muslim Indonesia.

Idenya yang lain yang cukup kontroversial adalah idenya untuk mengganti ucapan “assalamu ‘alaikum” dengan “selamat pagi”, yang membuatnya dihujani kritik. Ide itu adalah bagian dari ide “pribumisasi Islam” yang merupakan pemikiran sekaligus keinginannya yang menurutnya akan mampu mendamaikan dan menyatukan bangsa ketika digabungkan dengan ide toleransi dan demokrasinya.

Ide-ide yang diungkapkan di atas sekalipun kontroversial, tetapi tidak dapat dipungkiri merupakan ide yang cerdas yang lahir dari kepedulian

<sup>40</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. xxxi.

<sup>41</sup>Nur Kholishoh, *Demokrasi Aja Kok Repot: Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012), h. 163.

<sup>42</sup>M. Imam Aziz (Ed.), *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser* (Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 186.

terhadap kehidupan bangsa yang dicintainya. Dianggap kontroversial karena berlawanan dengan pandangan kebanyakan orang, yang akhirnya menimbulkan perdebatan, mengundang kritik tetapi sekaligus pujian. Kritik pedas terhadap Gus Dur bahkan sampai kepada tuduhan bahwa Gus Dur *inkonsisten*, munafik (*hipokrit*) atau menggunakan standar ganda.<sup>43</sup> Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tuduhan itu disebabkan oleh pandangan dan sikap politiknya yang berbeda tersebut, tetapi di balik kritik dan tuduhan itu, tidak sedikit orang yang memujinya, terutama kalangan NU. Banyak yang begitu fanatik yang sampai-sampai menganggap Gus Dur hampir-hampir tiada cela, bahkan pandangan-pandangannya yang kontroversial dan *nyeleneh* pun, dianggap karena ketidakmampuan orang untuk mencernanya, sehingga yang muncul adalah tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Gus Dur. Tidak heran jika kemudian penilaian terhadapnya pun bertolak belakang, satu pihak menganggapnya gila, tetapi satu pihak yang lain menganggapnya wali.<sup>44</sup>

Pro-kontra terhadap Gus Dur bukan hanya karena pemikirannya, tetapi juga sikap politiknya. Sikapnya sering dianggap *plin-plan*, tetapi semua fakta itu justru membuat sosok Gus Dur menjadi semakin menarik untuk dibicarakan, terutama dalam pandangan pribadi penulis. Untuk memahami Gus Dur tidak cukup hanya dengan melihat apa yang nampak secara kasat mata. Selalu dibutuhkan pemikiran lebih dalam untuk memahami sosok yang satu ini. “Apa yang tersirat di balik pemikiran dan pernyataannya yang mengundang kontroversi itu?” Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan untuk memahami itu, dan difokuskan pada pemikirannya tentang demokrasi, sebagai salah satu bagian saja dari pemikiran politik, meskipun pembicaraan tentang sikap politiknya juga tidak dapat sama sekali diabaikan sepanjang hal itu mendukung pemikirannya.

Ketertarikan itu juga tidak terlepas dari posisinya yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini, sebagai Presiden. Memang masa jabatannya sebagai Presiden sangat singkat, tetapi waktu yang singkat itu pun masih bisa membuatnya menorehkan prestasi, terutama dalam kaitannya dengan pemikiran dan sikapnya yang demokratis. Baik prestasi maupun kontroversi yang selalu mengitari kehidupannya, menjadikan Gus Dur dengan segala kekurangan dan kelebihan sebagai tokoh yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Ali Masykur Musa mengibaratkan Gus Dur sebuah buku yang takkan pernah habis dibaca. Pemikiran-pemikiran Gus Dur selama kurun waktu tertentu bahkan hingga wafatnya telah memberi

<sup>43</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, h. xxiv 6

<sup>44</sup>A. Mustofa Bisri, “Prawacana”, dalam Tim INCRoS, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. iv.

warna “khas” terhadap dinamika politik serta bangunan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.<sup>45</sup>

Sama seperti Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia yang dikaji banyak orang, maka pengkajian terhadap Gus Dur juga layak dilakukan, terlepas dari apakah orang menyukainya atau tidak. Dengan melakukan kajian yang objektif tentang tokoh ini, akan semakin dipahami pemikiran politiknya, konstruk pemikirannya, bahkan pengaruhnya baik bagi kalangan NU maupun bagi bangsa Indonesia umumnya. Apalagi mengingat akhir-akhir ini persoalan politik di negeri ini demikian kompleks, bukan tidak mungkin pengaruh pemikiran Gus Dur berperan di dalamnya.

Menempatkan pemikiran demokrasi Gus Dur dalam kerangka pemikiran politik Islam berarti juga menempatkan pemikirannya dalam kerangka ajaran-ajaran yang selama ini dikenal sebagai konsep Islam, baik menurut sumber kitab suci maupun hadis bahkan pemikiran politik pemikir terdahulu. Islam adalah sebuah unit budaya yang khas dan mandiri. Dalam kedudukannya sebagai sebuah unit budaya tersebut, Islam juga menjadi sebuah ideologi politik, yang telah dan terus memotivasi para penganutnya baik sebagai individu maupun komunitas. Di tangan Gus Dur, Islam sebagai sebuah ideologi politik telah menginspirasinya untuk memikirkan dan melakukan banyak hal untuk dirinya, keluarganya, bahkan masyarakatnya. Pemikiran demokrasi Gus Dur, karenanya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang dianut dan diperjuangkannya sepanjang hidupnya.

Membicarakan Gus Dur berarti membicarakan salah seorang tokoh besar dalam sejarah, terutama sejarah Indonesia. Mengkaji seorang tokoh besar, yang pengaruhnya diyakini cukup luas sebagai salah satu pengendali perjalanan sejarah, dalam tradisi akademik memang banyak dilakukan,<sup>46</sup> karena mengkaji seorang tokoh beserta gagasannya bukan hanya ditujukan untuk memperlihatkan kebesaran tokoh tersebut dan pengaruhnya, baik pada zamannya maupun sesudahnya, tetapi juga pada saat yang sama hal ini bisa menjadi motivasi bagi anak bangsa untuk berkiprah lebih banyak dan lebih baik di negaranya sendiri.

Menurut Syahrin Harahap, ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, integritas tokoh tersebut dilihat dari sisi keluasan ilmu dan moralnya. Kedalaman ilmu, kepemimpinan, dan keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya akan memperlihatkan kekhasan dan kelebihanannya dibanding orang-orang segenerasinya, di

<sup>45</sup>Listiyono Santoso, “Pengantar Penulis”, dalam *Teologi...*, h. 30.

<sup>46</sup>Seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Harahap bahwa dalam studi historiografi diketahui paling tidak ada lima yang mengendalikan perjalanan sejarah, yaitu: (1) para dewa, (2) rencana besar Tuhan, (3) gagasan-gagasan besar yang pernah lahirkan anak manusia, (4) tokoh-tokoh besar, serta (5) keadaan sosial dan ekonomi. Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Pranada, 2011), h. 4.

samping integritas moralnya yang terjaga yang membuatnya pantas menjadi tokoh.

Kedua, karya-karya monumental, berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik di zamannya maupun sesudahnya.

Ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya yang terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran maupun kepemimpinan dan keteladanannya, sehingga ketokohnya diakui, diidolakan, diteladani, dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi sesudahnya.<sup>47</sup>

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis terinspirasi untuk mengkaji lebih jauh pemikiran demokrasi Islami Gus Dur dengan anggapan bahwa Gus Dur adalah salah seorang tokoh besar Indonesia yang pemikirannya sampai kini masih dibicarakan bahkan memengaruhi orang. Mengapa Gus Dur? Karena tokoh ini bukan hanya orang yang telah menorehkan sejarah sebagai salah satu dari orang nomor satu di negeri ini, tetapi juga pemikiran-pemikirannya sering sekali dianggap kontroversial dan tidak lazim apalagi bagi seorang yang memiliki latarbelakang pendidikan agama yang begitu kuat, seperti yang telah diungkap di atas. Di balik itu, sebenarnya pemikiran Gus Dur sangat dipengaruhi oleh ajaran agamanya, dan itu akan semakin kelihatan ketika seseorang semakin mengenal Gus Dur, termasuk pemikirannya tentang demokrasi.

Gagasan Gus Dur tentang demokrasi tidak bisa dinafikan banyak terinspirasi oleh ajaran Islam, berangkat dari paradigma kontekstualisasi *Fiqh* dan *Qawaid al-Fih*. Meskipun Gus Dur menolak formalisasi Islam dalam kehidupan negara, tetapi pemikiran-pemikirannya terinspirasi oleh ajaran-ajaran Islam, termasuk pemikirannya tentang demokrasi. Itu bisa dilihat dari istilah-istilah yang dipergunakannya ketika menjelaskan konsep demokrasi yang diinginkannya. Berdasarkan itu, penulis menyebutkan pemikiran Gus Dur tentang demokrasi dengan “Demokrasi Islami”, artinya demokrasi yang bersifat Islam, atau yang diinspirasi dari ajaran-ajaran Islam. Berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, arti akhiran –i yang diletakkan pada kata benda tertentu, artinya memiliki sifat khusus atau tertentu. Jadi “demokrasi Islami” berarti demokrasi yang memiliki sifat Islam. Tanda petik pada istilah itu untuk menunjukkan bahwa istilah itu berasal dari penulis, bukan dari Gus Dur sendiri.

Penelitian ini penulis beri judul **Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang ‘Demokrasi Islami’**.

---

<sup>47</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi...*, h. 8.



## **B. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Islami menurut Abdurrahman Wahid ?
2. Bagaimana konstruksi demokrasi Islami Abdurrahman Wahid?
3. Bagaimana implementasi pemikiran demokrasi Islami dalam proses demokratisasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemikiran demokrasi Islami menurut Abdurrahman Wahid.
2. Menjelaskan konstruksi pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid.
3. Menganalisis implementasi pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid dalam kehidupan bernegara.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Manfaat Teoritis.**

- a. Diharapkan penelitian ini akan mampu memberi kontribusi pemikiran, khususnya tentang demokrasi yang menjadi salah satu pembahasan penting dalam pemikiran politik, terutama politik Islam di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Indonesia terutama para mahasiswa jurusan Politik bisa memetakan dengan jelas kedudukan Gus Dur di antara para pemikir politik Islam Indonesia lainnya.
- b. Peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai dasar bagi penelitian lanjutan, terutama dalam melihat pemikiran politik Abdurrahman Wahid, khususnya tentang demokrasi. Disadari bahwa hasil dari penelitian ini mungkin masih menyisakan beberapa persoalan yang belum terjawab atau teori yang belum didudukkan secara benar, maka penelitian lanjutan akan menyempurnakannya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi inspirasi dalam berpolitik, terutama bagi masyarakat muslim..
- b. Para pemikir dan aktivis politik, khususnya kalangan muslim juga bisa menjadikan penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan bagi proses berpolitik, dan menghasilkan pemikiran yang berguna, demi kemajuan bangsa dan negara.

## **E. Batasan Istilah**

### **1. Pemikiran.**



Pemikiran berasal dari kata dasar “pikir”, kemudian mendapat awal “pe”, dan akhiran “an”. Menurut KBBI, arti kata “pemikiran” adalah proses, cara, perbuatan memikir.<sup>48</sup>

## 2. Demokrasi Islami

- a. Demokrasi, secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Yunani, dari kata “demos” yang berarti rakyat, dan “cratein” yang berarti pemerintahan atau “cratos” yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, secara etimologi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah “keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat”.<sup>49</sup> Oleh Abraham Lincoln (1809-1895), diistilahnannya dengan *government of the people, by the people and for the people*. Dari pengertian ini tampak jelas besarnya kekuasaan rakyat: dari rakyatlah pemerintahan (kekuasaan) berasal, rakyat juga yang memerintah, dan untuk kepentingan rakyat juga semua kekuasaan itu.
- b. Islami adalah adjektiva (kata sifat), yang berarti bersifat keislaman.<sup>50</sup>

Jadi “demokrasi Islami” berarti demokrasi yang memiliki sifat Islam. Tanda petik pada istilah itu untuk menunjukkan bahwa istilah itu berasal dari penulis sendiri, bukan dari gusdur sendiri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Metode merupakan suatu cara atau berupa jalan yang akan ditempuh oleh seorang peneliti yang gunanya adalah untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang akan dihadapi,<sup>51</sup> dalam hal ini berarti mengkaji dan membahas pemikiran Abdurrahman Wahid dalam persoalan politik, dengan fokusnya, yaitu demokrasi. Persoalan apa saja yang dianggap relevan dengan demokrasi yang dibicarakan oleh Gus Dur yang tertuang dalam karyanya atau karya orator yang memuat pemikirannya akan diulas dan dianalisis.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak dilakukan

<sup>48</sup>KBBI online

<sup>49</sup>Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 110.

<sup>50</sup>KBBI online

<sup>51</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), h. 179.

dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.<sup>52</sup> Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, yaitu persoalan demokrasi dalam perspektif Abdurrahman Wahid dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan kepustakaan, ditambah wawancara terhadap beberapa orang yang dianggap memahami alurpikir Abdurrahman Wahid. Oleh karenanya, penelitian ini lebih menekankan persoalan kedalaman (kualitas) data bukan pada banyaknya (kuantitas) data.

Sebagai bagian dari pemikiran Islam yang mengulas konsep demokrasi Abdurrahman Wahid, maka penelitian ini menggunakan metode studi konsep. Metode studi konsep menurut Hasan Bakti Nasution adalah “penelitian terhadap suatu konsep atau suatu pemikiran yang berkaitan dengan pemikiran Islam. Penelitian ini menitikberatkan pada suatu konsep/pemikiran tentang pemikiran Islam. Studi konsep/pemikiran bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu konsep/pemikiran dari berbagai aspeknya yang dirumuskan oleh seorang atau beberapa orang pemikir, yang meliputi aspek ontologi (keberadaan suatu konsep); epistemologi (latar belakang lahirnya konsep tersebut), dan aksiologi (kegunaan suatu konsep dan pengaruhnya kemudian).”<sup>53</sup> Dalam hal ini yang dikaji adalah pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid dengan menggunakan pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan sejarah dilakukan untuk menemukan data biografi Gus Dur, dan latar belakang pemikiran demokrasi Gus Dur, sementara pendekatan politik dilakukan untuk menganalisis teori-teori demokrasi, dan pemikiran demokrasi Gus Dur.

## 2. Sumber Data

Dalam mencari data yang relevan, dan valid supaya ditemukan pemikiran Gus Dur secara utuh, penulis menganalisis karya-karya Gus Dur, juga penulis lain tentangnya. Pemahaman secara kaku dan normatif diupayakan dihindari sejauh mungkin dalam upaya memahami pemikiran Gus Dur, baik yang tergambar di tulisan-tulisannya sendiri, maupun tulisan orang lain. Cara ini perlu dilakukan karena sebuah karya ilmiah yang penuh dengan data yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, tidak cukup hanya dengan melihat *ontologis* sebuah pemikiran tetapi juga *epistemologi*, dan aksiologinya: apa yang melatarbelakangi kemunculan pemikiran itu, bagaimana dan untuk apa dimunculkan.

Dalam rangka itu, penelitian yang mendalam mengenai situasi yang mengitarinya, baik dimensi internal maupun eksternal, yang menyangkut

<sup>52</sup>Nawawi Hadari, *Penelitian Terpadu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 46.

<sup>53</sup>Hasan Bakti Nasution, *Metodologi Studi Pemikiran Islam: Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf, Tareqat*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 19

kondisi ekonomi, budaya, politik, juga situasi pemikiran, latar belakang kehidupannya, pendidikannya, pemikiran yang mempengaruhinya dan segala hal yang melatarbelakangi pemikirannya.<sup>54</sup> Untuk mendapatkan data yang cukup lengkap dalam hal ini, maka buku Biografi Gus Dur akan dijadikan sumber utama, dan buku-buku lain yang relevan sebagai pelengkap.

Sumber data dalam rangka menganalisis pemikiran Gus Dur, peneliti klasifikasi ke dalam dua kelompok:

**a. Data Primer.**

Dalam hal ini, data didapatkan dari sumber tertulis karya Gus Dur sendiri, yang berbentuk buku maupun jurnal yang memuat tulisannya. Ada tiga sumber utama penelitian ini, yaitu: *Mengurai Hubungan Agama dan Negara; Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan; Islam, Negara, dan Demokrasi.*

**b. Data Sekunder.**

Jika data primer didapatkan dari buku-buku Gus Dur yang langsung berhubungan dengan tema penelitian, maka sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku Gus Dur di luar buku utama sebagai sumber data tambahan, dan buku maupun sumber tertulis lain, bahkan pandangan orang yang mengenal Gus Dur, diantaranya buku *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Greg Barton), *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur* (Ali Masykur Musa); *Damai Bersama Gus Dur, Retorika Politik Gus Dur dalam Pro<sup>44</sup> Demokrasi di Indonesia; Humanisme Gus Dur* (Syaiful Arif); *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Tim INCRoS); *Gus Dur; Islam Nusantara dan Kewarganegaraan* (Ahmad Suedy) *Gus Dur; Islam dan Kebangkitan Indonesia* (A. Muhaimin Iskandar); *Islam Kosmopolitas: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan; Ijtihad Politik Gus Dur* (Munawar Ahmad), *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, Islam, Negara dan Demokrasi* dan lain-lain. Sumber berikutnya adalah informasi yang didapatkan dari wawancara terhadap beberapa orang yang mengenal dengan dekat Gus Dur, yaitu Yenni Wahid, melalui asistennya, yaitu Alamsyah, Dr. Ahmad Suaedy, anggota Ombudsman, pendiri dan mantan direktur Abdurrahman Wahid Center dan Wahid Institute, juga Drs. Marwan Dasopang, anggota DPR RI fraksi PKB.

**3. Teknik Pengumpulan Data.**

**a. Dokumentasi.**

---

<sup>54</sup>Lihat Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 64. Latar belakang atau dimensi eksternal dan internal mempengaruhi pemikiran seorang tokoh.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode yang lazim digunakan untuk penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan mengkaji buku-buku karya yang relevan sebagai data primer dan buku-buku penulis lain tentang sebagai data sekunder. Dalam hal ini buku Abdurrahman Wahid dan penulis-penulis lain yang mengulas pemikirannya akan dikaji sedalam-dalamnya untuk mendapatkan inti pemikirannya (tentu saja dalam perspektif peneliti), seperti *Islamku Islam Anda Islam Kita*; *Prisma Pemikiran Gus Dur*; *Islam Kosmopolita: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*; *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*; *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*; *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, dan buku-buku lain yang relevan.

#### b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap tiga orang, yaitu Alamsyah, yang mewakili Yenni Wahid, Dr. Ahmad Suaedy, dan Drs. Marwan Dasopang. Wawancara terhadap Yenni Wahid dilakukan secara tertulis dan dijawab oleh asistennya, Alamsyah Djafar, sementara wawancara terhadap Ahmad Suaedy dan Marwan Dasopang dilakukan secara langsung yang dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Desember 2019.

#### 4. Metode Analisis Data.

Sebagai terakhir dari metode penulisan ini adalah metode analisis data. Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu hipotesis.

Analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah analisis wacana (*discourse analysis*) yang merupakan bagian dari analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menutupi kelemahan analisis isi kuantitatif. Ada perbedaan antara analisis isi kuantitatif dengan analisis wacana. Jika analisis isi kuantitatif pada umumnya untuk menjawab pertanyaan “apa (*what*)” dari pesan atau isi komunikasi, maka pada analisis wacana ditujukan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana (*how*)”, yaitu bagaimana isi teks berita dan bagaimana pesan itu disampaikan. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua jenis analisis tersebut ialah analisis wacana lebih bersifat kualitatif dari pada analisis isi, karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis isi. Perbedaan lain adalah analisis isi digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat *manifest* (nyata), sementara analisis wacana fokus pada pesan yang bersifat *latent* (tersembunyi). Analisis isi mempertimbangkan “apa yang dikatakan”, tetapi tidak sampai menyentuh bagaimana ia dikatakan. Analisis



wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi, sedangkan analisis isi memang diarahkan untuk mengadakan generalisasi.<sup>55</sup>

### G. Kajian Terdahulu

Tulisan tentang Gus Dur sesungguhnya sudah sangat banyak, mulai dari yang mengungkap pemikirannya, baik di satu bidang tertentu maupun di beberapa bidang sekaligus, sisi-sisi kehidupannya, biografinya sampai humor dan kedudukannya sebagai wali(?). Beberapa tulisan tersebut ada yang merupakan hasil penelitian dalam bentuk disertasi, ada yang merupakan buku. Beberapa kajian tentang Gus Dur yang dapat penulis kemukakan, diantaranya:

Nur Kholisoh, “Demokrasi Aja Kok Repot”. Buku ini berasal dari disertasi doktoral Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, yang berjudul: *Dramatistic Pentad: Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. Penelitian yang dilakukan Nur Kholisoh dengan metode kualitatif interpretif dengan paradigma konstruktivis ditujukan untuk mengetahui substansi dan identifikasi yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai seorang komunikator politik serta dramatisme dari retorika politik Gus Dur dalam proses demokrasi di Indonesia selam Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan menggunakan teori *dramatistic pentad* dari Kenneth Burke, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses identifikasi dan konsubstansialitas yang dilakukan oleh Gus Dur, juga khalayaknya adalah pembuka jalan bagi berlangsungnya komunikasi politik saat menyampaikan ide-ide demokrasi di Indonesia. Dengan melihat identifikasi sebagai inti dari komunikasi persuasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya melakukan identifikasi dengan khayalaknya, komunikasi yang dilakukan Gus Dur dalam menyampaikan ide tentang demokrasi mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diberi kata pengantar oleh Salahuddin Wahid, adik Gus Dur, hasil penelitian dalam bentuk disertasi ini dibukukan pada tahun 2012.

Ahmad Suaedy, *Gus Dur; Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka*. Disertasi yang kini menjadi buku ini merupakan salah satu sumbangan tentang pemikiran dan tindakan Gus Dur yang paling bermakna karena bukan saja merupakan hasil riset yang panjang dan teliti melainkan juga mencerminkan pemahaman penulisnya atas inti dari pemikiran Gus Dur. Suaedy berhasil mengungkap sisi humanis Gus Dur dalam menghadapi aspirasi eksponen separatis Aceh dan Papua dengan pendekatan personal dan empati. Disertasi doktoral dalam bidang Studi Islam di Program Pascasarjana UIN Kalijaga, Yogyakarta ini ditulis pada tahun 2018, dan dibukukan pada tahun itu

---

<sup>55</sup> Azwar Aziz, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir tentang Ideologi Pancasila*, disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016, tidak dipublikasikan

juga, diberi kata Pengantar oleh Sinta Nuriyah, istri almarhum Gus Dur. Sebagai orang yang pernah sangat dekat dengan Gus Dur, dan bahkan beliau jugalah pendiri sekaligus Direktur Abdurrahman Wahid Center di Universitas Indonesia (2013-2016), dan pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Wahid Institute (2003-2012), Ahmad Suaedy memberikan banyak sekali data terkait bagaimana Gus Dur menyelesaikan konflik Aceh dan Papua sejak tahun 1999-2001.<sup>56</sup>

Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur; Analisis Wacana kritis*. Buku ini asalnya adalah disertasi doktoral Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta pada tahun 2007, kemudian dibukukan pada tahun 2010. Dengan menggunakan metode *Critical Discourse Analysis*, penulis tidak hanya menguraikan pemikiran politik Gus Dur, tetapi juga mampu memetakan peristiwa politik di baliknya, mampu menjelaskan perkembangan pemikiran, bahkan *Power Abuse* dibalik produksi wacana politik Gus Dur. Metode inilah yang membedakannya dengan model pembacaan terhadap teks Gus Dur lainnya. Sebuah pembacaan dengan penggunaan metodologi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademis, yang mengantarkan penulisnya lulus dengan nilai *cum laude*.<sup>57</sup>

Abd. Rahman, *Gitu Aja Kok Repot*. Buku ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan interdisipliner dengan fokus biografi politik Gus Dur. Buku yang diterbitkan pada tahun 2014 ini mencoba menelaah berbagai aspek kehidupan Gus Dur, khususnya yang berkaitan dengan dunia politik, mulai dari biografinya, sejarah perjalanan politiknya, pemahaman keagamaannya, dan lain sebagainya. Dalam Pendahuluan, penulisnya menyatakan bahwa pendekatan biografi politik yang digunakannya dibenturkan dengan realitas sebagian besar masyarakat yang mengandaikan Gus Dur menjadi presiden lagi. Buku yang ditulis sebagai manifestasi dari rasa rindu kepada sosok pemimpin yang merakyat, yang sangat memperhatikan nasib rakyat kecil, kelompok minoritas, tertindas dan yang hak-haknya dikorupsi penguasa, menunjukkan semangat perjuangan Gus Dur dalam kemanusiaan yang perlu terus dikobarkan, terutama karena Gus Dur menggunakan cara dan pendekatan yang damai bahkan terhadap orang-orang yang membencinya sekalipun.<sup>58</sup>

Moh. Mahfud MD, *Gus Dur, Islam, Politik, dan Kebangsaan*. Buku yang ditulis oleh mantan Menteri Pertahanan di era Gus Dur ini banyak mengungkap kesan pribadi Mahfud MD terhadap Gus Dur selaku presiden dan penilaiannya tentang ide-ide dan pemikiran Gus Dur. Meskipun Mahfud MD adalah anggota kabinetnya Gus Dur tetapi Mahfud berusaha seobjektif mungkin

57

<sup>56</sup>Ahmad Suaedy, *Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh & Papua 1991-2001*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018).

<sup>57</sup>Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisa Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

<sup>58</sup> Abd. Rahman, *Gitu Aja Kok Repot*, (Jogjakarta: Palapa, 2014)

menilai ide dan kebijakan-kebijakan Gus Dur. Buku ini bisa dikatakan merupakan apresiasi kekaguman Mahfud terhadap ide-ide brilliant dan pemikiran-pemikiran cemerlang Gus Dur tentang Islam dan keindonesiaan. Upayanya untuk memperkenalkan sisi Gus Dur yang akrab, bersahaja, dan humoris menjadi penyeimbang penilaian kontroversial dan *nylenehnya* Gus Dur. Buku yang diterbitkan pada tahun 2010 ini, sebenarnya tidak secara khusus ditulis dalam bentuk buku oleh Mahfud, tetapi merupakan kumpulan artikel dan kolom Mahfud tentang Gus Dur, yang oleh LKiS diterbitkan, terutama dalam rangka mengenang Gus Dur setelah kepergiannya menghadap Ilahi.<sup>59</sup>

Tim INCRÈs (Institut of Culture and Religion Studies), “Beyond the Symbol Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur”. Buku ini membongkar arkeologi sosial-pemikiran dan gerakan Gus Dur, juga menjelaskan makna (tafsir) dari sejumlah simbol yang sering digunakan Gus Dur di hadapan publik. Buku yang merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis ini mengungkap posisi Gus Dur dan pemikirannya di tengah-tengah kancah pemikiran di Indonesia, tentu saja menurut kacamata penulisnya masing-masing. Pemikirannya yang dinilai kontroversial dan *nyleneh* berusaha ditafsirkan oleh masing-masing penulis dengan sudut pandang yang berbeda tetapi dengan pendekatan yang sama, antropologi. Buku yang diterbitkan pada tahun 2000 ini, merupakan kumpulan tulisan tentang Gus Dur yang ditulis oleh 20 (dua puluh) orang penulis, yang masing-masing mengungkap sisi yang paling mereka kenal dan pahami dari seorang Gus Dur.

Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur.*, diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini menjelaskan tentang prinsip dasar dari pemikiran Gus Dur yakni *Humanisme Islam*. Prinsip yang ditemukannya setelah bergelut dengan teks-teks Gus Dur khususnya teks awal dekade 1980 an adalah kenyataan bahwa semua pemikiran Gus Dur: pribumisasi Islam, Islam sebagai etika sosial, hubungan Islam dan negara, hubungan antar agama, demokrasi, kebudayaan, hingga pemikiran ke-NU-an menunjukkan kepedulian yang dalam atas kemanusiaan. Humanisme Gus Dur, menurut Syaiful Arif adalah humanisme Islam komunitarian di mana prinsip kemanusiaannya dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan berujung pada perwujudan masyarakat yang adil. Menyebut Gus Dur sebagai Humanis menempatkannya pada nilai-nilai universal.<sup>107</sup> Syaiful Arif juga menyatakan bahwa sifat humanisme yang ditunjukkan Gus Dur merujuk pada prinsip bahwa kebijakan politik suatu negara tergantung pada kepentingan nasional. Penulisnya memulai kata pengantarnya dengan mengatakan bahwa buku yang ditulisnya berangkat dari kegelisahan pasca Gus Dur wafat, kegelisahan dari seseorang yang sangat dekat dengan Gus Dur, memahami Gus Dur, bahkan mendedikasikan dirinya untuk mendalami dan mengembangkan pemikiran Gus Dur.

<sup>59</sup>Mahfud MD, *Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).



Selain penelitian tentang Gus Dur, perlu juga dikemukakan penelitian yang menjadikan konsep demokrasi sebagai objek dari peneliti lain, di antaranya:

Nella Lucky, *Demokrasi Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Reformulasi Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat Madani)*. Disertasi mahasiswa 123 UIN Sutan Syarif Kasim, Riau ini membahas tentang konsep demokrasi Taqiyuddin an-Nabhani, tokoh pendiri Hizbut Tahrir. Dalam disertasi ini, Nella menjelaskan bahwa menurut Taqiyuddin an-Nabhani demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan syari'at, berbeda dengan pemahaman demokrasi pada umumnya yang dipahami, kedaulatan berada di tangan rakyat. Nella membedakan antara demokrasi (Barat) dengan demokrasi (Islam) ala Taqiyuddin an-Nabhani, di antaranya dengan: jika demokrasi menghendaki adanya suara mayoritas dalam mencapai keputusan, Islam menghendaki adanya kebenaran hakiki dalam menemukan kebenaran; jika demokrasi memandang manusia adalah individu-individu sehingga melahirkan kebebasan individu, maka Taqiyuddin an-Nabhani mereformulasi kebebasan menjadi kebebasan yang dibatasi oleh syari'at dan tidak mengandung mudharat. Pada akhirnya konsep demokrasi Taqiyuddin an-Nabhani itu dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>60</sup>

Agus Sudibyo, *Normalisasi Status Darurat sebagai Potensialitas dalam Negara Demokrasi: Telaah Kritis atas Pemikiran Politik Giorgio Agamben*, disertasi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Buku ini semula adalah disertasi dengan judul: *Normalisasi Status Darurat sebagai Potensialitas dalam Negara Demokrasi: Telaah Kritis atas Pemikiran Politik Giorgio Agamben* pada Program Pascasarjana Sekolah tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mencoba menjawab apakah suatu rezim demokrasi boleh menerapkan keadaan darurat atau status darurat. Jawabannya boleh, tetapi *Giorgio Agamben mewanti-wanti agar rezim tidak sembarangan menetapkan status tersebut. Agamben menegaskan, penyelenggaraan kekuasaan secara konsekuen mesti dijalankan berdasarkan normalitas prinsip demokrasi: pemisahan wewenang, check and balancing, supremasi hukum, dan kesetaraan-keadilan bagi semua orang.*<sup>61</sup>

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, buku yang naskah utamanya berasal dari tesis S2 pada tahun 1989, dan dibukukan pertama sekali pada tahun 1993. Buku ini menggambarkan tentang

<sup>60</sup>Nella Lucky, *Demokrasi Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Reformulasi Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat Madani)*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. Tidak dipublikasikan

<sup>61</sup>*Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben.* [https://m.media indonesia.com](https://m.media.indonesia.com), diakses pada Kamis, 30 Juli 2020 pukul 17.26 wibb.



demokrasi dan peranan negara, demokrasi di Indonesia, baik teori maupun praktiknya, dan beberapa persoalan lain yang berkaitan dengan demokrasi dan hubungannya dengan konstitusi. Buku ini memaparkan dengan sangat lugas betapa tuntutan konstitusi untuk membangun sistem politik yang demokratis ternyata seringkali ditorpedo oleh kekuasaan politik. Hubungan demokrasi dengan konstitusi digambarkan sering berubah sesuai dengan perubahan politik.

Tujuh tulisan awal di atas menjadikan Gus Dur sebagai objek penelitiannya, sama seperti penulis, tetapi semua tulisan itu berbeda fokusnya dengan fokus yang penulis pilih. Penulis berfokus pada pemikiran Gus Dur tentang demokrasi, dan dihubungkan dengan pemikiran Pribumisasi Islam-nya (pemikiran yang lahir karena memperhatikan pluralitas bangsa Indonesia) yang digagas Gus Dur dalam negara demokrasi Indonesia, sementara tiga tulisan terakhir membahas konsep demokrasi. Perbedaannya dengan tulisan penulis adalah pada tokoh yang dipilih, Nella Lucky dengan tokohnya Taqiyuddin an-Nabhani, dan Agus Sudibyo dengan tokoh Giorgio Agamben. Fokus tulisannya juga berbeda, Nella Lucky konsep demokrasi Taqiyuddin an-Nabhani dihubungkan dengan masyarakat madani, dan Agus Sudibyo menyoroti status darurat. Moh. Mahfud MD menyoroti demokrasi dalam hubungannya dengan konstitusi di Indonesia yang ternyata sering saling tolak dan tarik, berubah sesuai dengan perubahan politik, dan sama sekali tidak menyoroti secara spesifik pandangan salah seorang tokoh, sementara penulis menyoroti konsep demokrasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan konsep tersebut, yaitu Pribumisasi Islam sebagai bagian dari konsep pluralisme Gus Dur, dan implementasi konsep/pemikiran demokrasi Gus Dur dalam kebijakan negara dan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Karena perbedaan fokus dan tujuan, maka distingsi tulisan-tulisan di atas dengan tulisan penulis dalam disertasi ini sangat jelas. Meskipun penulis-penulis di atas juga banyak yang mengupas pemikiran demokrasi Gus Dur, tetapi bahkan tidak satupun yang menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi Gus Dur adalah demokrasi Islami, seperti yang penulis nyatakan. Berdasarkan telaahan terhadap karya-karya Gus Dur, dan juga tulisan penulis lain tentang pemikirannya, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran Gus Dur tentang demokrasi tidak bisa dinafikan merupakan demokrasi yang bersifat Islami, bukan sekedar menunjukkan bahwa landasannya adalah ajaran Islam, tetapi bahkan sangat Islami, karena justru berangkat dari nilai-nilai universal ajaran Islam. Demokrasi yang sejatinya berasal dari Barat, tidak diterimanya mentah-mentah, tetapi tidak pula ditolaknya. Pada sisi yang lain, Gus Dur dikenal sangat menjunjung budaya nusantara, sehingga konsepnya tentang demokrasi bisa dikatakan juga berakar dari budaya nusantara yang sangat plural. Demokrasi Barat yang bebas nilai (terutama agama) dipertemukan

dengan nilai-nilai universal Islam: *musawwa*, *'adalah*, dan *syûra* dengan menggunakan *ushul al-fiqh*, dan *qawa'id al-fiqh*, sehingga menghasilkan 'demokrasi Islami', yang di dalamnya Pribumisasi Islam menjadi keniscayaan.

#### H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disajikan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama yaitu Pendahuluan, yang berisi Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua yaitu Landasan Teori yang membahas Sejarah Demokrasi, Definisi dan Karakteristik Demokrasi, Demokrasi di Indonesia, dan Teori Demokrasi .

Bab tiga yaitu Latarbelakang dan Kehidupan Abdurrahman Wahid yang membahas Latar Belakang Internal, Latar Belakang Eksternal, Aktivitas dan Karir Politik, dan Karya.

Bab empat yaitu Pandangan Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi, yang berisi Makna Demokrasi Islami, Karakteristik (Kualifikasi) Demokrasi Islami, Agama dan Demokrasi, Konstruksi Pemikiran Demokrasi Abdurrahman Wahid, Pluralitas dalam Negara Demokrasi Indonesia, dan Hak Asasi Manusia

Bab lima tentang Islam, Demokrasi, dan Umat Islam Indonesia, yang berisi Islam dan Politik, Pribumisasi Islam, Islam dan Demokrasi di Indonesia, dan Umat Beragama dalam Negara Demokrasi Indonesia.

Bab enam tentang Implementasi Pemikiran Demokrasi Abdurrahman Wahid, yang berisi Implementasi dalam Kebijakan Negara dan politik, Implementasi dalam Kehidupan Keagamaan, dan Implementasi dalam kehidupan Sosial Kemasyarakatan.

Bab tujuh adalah Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Sejarah Demokrasi

Demokrasi pada awalnya muncul di negara-negara kota Yunani Kuno pada abad ke-6 SM hingga pada abad ke-3 SM, dan negara kota yang pertama sekali mempraktikkannya adalah Athena. Demokrasi saat itu menerapkan model partisipasi politik langsung, dimana hak dalam membuat keputusan politik secara langsung dilakukan oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Proses politik dengan penataan kehidupan bersama yang dikelola secara bersama juga ini, oleh Aristoteles dinamakan 'Politeia', suatu bentuk negara ideal. Ciri utama demokrasi kuno ini ialah pengelolaan bersama seluruh warga polis (negara kota/city state), yang jumlah warganya masih sangat sedikit<sup>62</sup>.

Sistem yang tergolong modern pada saat itu memang memungkinkan untuk dilakukan karena memang jumlah warga negaranya masih sedikit. Begitupun, ternyata tidak semua rakyat ikut terlibat dalam peristiwa politik yang penting itu. Ketentuan demokrasi itu hanya berlaku bagi warga negara resmi, dan itu hanya sebagian kecil dari penduduk atau warga negara, sementara kelompok mayoritas yang terdiri dari kaum perempuan, budak belian, dan orang asing yang kedua orangtuanya bukan warga negara Athena tidak dilibatkan dalam proses itu.<sup>63</sup>

Meskipun proses politik itu sudah dilakukan oleh rakyat, bukan lagi oleh penguasa, tetapi tetap saja partisipasi politik yang masih mendiskriminasi kelompok tertentu itu, belum memperlihatkan kebebasan dan persamaan bagi semua rakyat Yunani pada saat itu, tetapi setidaknya apa yang dipraktikkan di negara kecil yang maju itu, sudah menunjukkan cikal bakal penghargaan terhadap rakyat di mana di belahan dunia lain sistem yang dipergunakan pada umumnya masih monarki, yang kekuasaannya mutlak di tangan penguasa.

Sebagai sebuah sistem politik, istilah demokrasi pertama sekali diperkenalkan oleh sejarawan Herodotus (490-420 SM). Herodotus menggunakan istilah ini sebagai sebutan untuk bentuk kenegaraan hasil pembaruan Kleistenes di Athena yang terus mengalami perkembangan sejak diterapkan, yang kemudian diadopsi oleh polis Yunani lain dan bertahan di Athena sampai dijajah oleh Iskandar Agung pada tahun 322 M.<sup>64</sup> Dalam sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Kleistenes pada tahun 508 SM itu, semua keputusan penting diambil oleh majelis yang berjumlah 500 orang yang dipilih untuk jangka waktu satu atau dua tahun-oleh semua warga negara (di mana budak dan wanita tidak dihitung). Selain jumlahnya yang dibatasi, masa jabatannya pun dibatasi pula, tidak boleh dipilih lebih dari dua

<sup>62</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Pancasila*, h. 44-45

<sup>63</sup>Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 87.

<sup>64</sup>John Dunn, *Democracy the Unfinished Journey, 508 BC to AD 1993*, (London: Oxford University Press, 1992), h. 16

kali, sehingga jumlah warga negara yang secara aktif terlibat sangat tinggi. Majelis inilah yang mengangkat dan memberhentikan para pemimpin.<sup>65</sup>

Apa yang dipraktikkan oleh Yunani pada masa itu-dengan segala kekuarungannya- adalah kelebihan dan kemajuan dibandingkan dengan negara-negara lain pada masa itu. Kelebihan mereka di antaranya adalah: *pertama, mereka mengembangkan suatu sistem kelembagaan canggih yang secara eksplisit didasarkan pada gagasan "kekuasaan di tangan rakyat". Kedua, prinsip demokrasi benar-benar mereka sadari dan refleksikan secara eksplisit-filosofis dengan mempertimbangkan pro dan kontranya, dan membandingkannya dengan bentuk-bentuk negara lain seperti monarki dan oligarki.*

Sumber informasi mengenai demokrasi ideal Athena didapatkan dari pidato Pericles, seorang jenderal dan politisi, yang kemungkinan disusun kembali oleh Thucydides tiga puluh tahun setelah Pericles menyampaikan pidato tersebut. Isi pidato tersebut di antaranya:

*"Konstitusi kita disebut demokrasi karena kekuasaan tidak di tangan minoritas, tetapi semua rakyat. Apabila ada problema untuk menyelesaikan perselisihan privat, semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Apabila problemanya adalah menempatkan seseorang di depan orang lain dalam kedudukan tanggungjawab publik, yang diperhitungkan bukanlah keanggotaannya dalam klas tertentu, tetapi kemampuan nyata yang dimiliki oleh orang tersebut".<sup>66</sup>*

Seiring waktu, gagasan demokrasi Yunani perlahan hilang ketika bangsa Romawi yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani bahkan terpengaruh olehnya, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400 M). Saat itu struktur sosial yang feodal sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat di mana Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya sangat berkuasa. Di masa ini dihasilkan sebuah prestasi penting, yaitu dokumen yang menandai kehidupan demokrasi di Abad pertengahan, yaitu *Magna Charta* (Piagam Besar), yang merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan raja Inggris, yaitu Raja John. *Pada piagam itu tertulis untuk pertama kalinya seorang raja mengakui dan menjamin beberapa hak privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Peristiwa ini dianggap sebagai tonggak perkembangan gagasan demokrasi.<sup>67</sup>*

Pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (*national state*) di Eropa Barat dalam bentuk yang modern. Perubahan sosial dan kultural sebagai persiapan untuk memasuki abad modern telah dimulai, saat di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya, terutama pembatasan gereja, yang selama ini bahkan membelenggu perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman ini, yaitu zaman Renaissance (1350-1600), terutama berpengaruh di Eropa Selatan,

<sup>65</sup> Lihat uraian Simon Hornblower dalam John Dunn (p, eny.), *Democracy the Unfinished ...*, h. 1-16

<sup>66</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 21-22.

<sup>67</sup> Mirim Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 109



seperti di Italia, dan Reformasi Gereja (1500-1650) yang pengikutnya banyak di Eropa Utara, seperti Jerman dan Swiss.<sup>68</sup>

Zaman renaissance adalah zaman penting yang menandai hilangnya dominasi gereja terhadap negara. Kebebasan berpikir sebagai dampak zaman renaissance telah membuka jalan untuk meluaskan gagasan di bidang politik, yang menyadarkan orang akan hak-hak politiknya. Dampak akan kesadaran akan hak-hak politik itu, telah membuat kritikan-kritikan tajam dilontarkan oleh rakyat terhadap rajanya, yang semula memiliki kekuasaan tidak terbatas.<sup>69</sup> Ini menandai munculnya konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, baik bersifat naskah (*written constitution*), maupun tidak bersifat naskah (*unwritten constitution*). Konstitusi ini menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Hal yang dua abad sebelumnya sudah digagas oleh Montesquieu dan John Locke. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (*constitutionalism*), sementara negara yang menganutnya dinamakan *Constitutional State* atau *Rechtsstaat*, dan demokrasiya dinamakan demokrasi konstitusional.

<sup>26</sup> Carl J. Friedrich menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah:

*Suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing)*<sup>70</sup>.

Pembatasan-pembatasan dimaksud tercantum dalam konstitusi (undang-undang) negara yang bersangkutan. Sejak itu sampai sekarang, model demokrasi inilah yang paling banyak digunakan, dengan berbagai variannya.

Zaman renaissance juga telah mengakibatkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan rasio. Teori rasionalistis yang muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan itu telah melahirkan kesadaran untuk membuat kontrak sosial (*social contract*) antara raja dengan rakyatnya. Kontrak sosial ini-lah salah satu yang menandai sistem demokrasi modern. Beberapa filsuf yang mencetuskan gagasan ini di antaranya John Locke (1632-1704) dari Inggris, dan Montesquieu (1689-1755) dari Prancis. Keduanya mencetuskan ide yang dikenal dengan Trias Politika. Kesadaran akan hak-hak politik yang digaungkan oleh kedua filosof ini bersama beberapa filosof lain akhirnya menimbulkan Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika pada akhir abad ke-18, dan sebagai akibat dari pergolakan itu gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Pada tahap ini demokrasi semata-mata bersifat politik dengan berpegang pada asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal right*), dan hak

<sup>68</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 110.

<sup>69</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 110.

<sup>70</sup> Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, yang dikutip dari Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h.112

pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).<sup>71</sup> Perkembangan demokrasi selanjutnya terbagi ke dalam tiga gelombang<sup>72</sup>, yaitu

### **1. Gelombang Demokrasi Pertama**

Gelombang demokrasi ini berakar dari Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Samuel Huntington mengatakan bahwa gerakan demokrasi pada tahap pertama ini disebut sebagai sistem politik demokrasi pada tingkat pemerintahan nasional, dan muncul pertama kalinya di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Di masa ini, terjadi penghapusan hak milik di negara-negara bagian yang baru dengan hak pilih yang universal bagi seluruh warga kulit putih yang benar-benar memberikan suara mereka pada pemilihan presiden pada tahun 1828, yang persentasenya jauh di atas 50%.

Pada dasawarsa berikutnya, demokrasi sudah mulai dipraktikkan di Italia dan Argentina menjelang Perang Dunia I, dan kemudian disusul dengan suatu gerakan besar-besaran menuju demokrasi yang berlangsung di negeri-negeri yang menggantikan kerajaan-kerajaan Romanov, Hapsburg dan Hokenzohrn. Di awal 1930-an sesudah gelombang pertama mulai berakhir, giliran Spanyol dan Cile yang juga menjadi negara demokrasi. Tahun-tahun ini, 1920-1930-an merupakan puncak perkembangan demokrasi di antara bangsa-bangsa di dunia.<sup>73</sup>

Perkembangan yang menggembirakan pada sekitar tahun 1920-1930 itu, ternyata di bagian negara lain yang justru menunjukkan perkembangan yang bertolakbelakang, demokrasi malah dijauhi, bahkan kembali ke bentuk pemerintahan otoriter. Roy C. Machridis dan Bernard E. Brown mengatakan bahwa selama dua dasawarsa tersebut, demokrasi malah padam di negara-negara Jerman, Italia, Austria, Polandia, negara-negara Baltik, Spanyol, Portugal, Yunani, Argentina, Brasil, dan Jepang. Yang bangkit malah ideologi komunis, fasis, dan militerisme.

Jonathan Sunshine menyebutkan dua kriteria utama untuk menentukan bahwa sebuah negara sudah mencapai kualifikasi demokrasi pada gelombang pertama ini, yaitu: (1) 50% laki-laki dewasa berhak memberikan suara; dan (2) seorang eksekutif yang bertanggungjawab harus mempertahankan dukungan mayoritas di dalam suatu pemilihan untuk parlemen, baik terpilih maupun dipilih di dalam suatu pemilihan umum berjangka. Dengan menggunakan kriteria inilah, maka Amerika Serikat dianggap merupakan negara yang sudah menerapkan demokrasi pada tahun 1828.<sup>74</sup>

### **2. Gelombang Demokrasi Kedua**

Gelombang demokrasi kedua mulai terlihat pada masa Perang Dunia II, dimana pendudukan sekutu justru telah melahirkan kesadaran dan mendorong munculnya lembaga-lembaga demokrasi di Jerman, Barat, Italia, Austria, Jepang dan Korea., tetapi di bagian negara lain, Cekoslowakia dan Hungaria, tempat di

<sup>71</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, 111, dan Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 44

<sup>72</sup> Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik...*, h. 44-52.

<sup>73</sup> Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik...*, h. 45

<sup>74</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi...*, h. 16

mana demokrasi baru saja berdiri, justru menjadi lenyap karena desakan Soviet. Yunani tempat awal demokrasi tumbuh yang sempat menghilang setelah pendudukan Romawi, kembali menerapkan demokrasi pada akhir dasawarsa 1940 dan awal dasawarsa 1950, begitu juga Turki, yang disusul kemudian oleh Brasil dan Kostarika. Empat negara Amerika Latin, yaitu Argentina, Kolombia, Peru, dan Venezuela bahkan sudah menerapkan Pemilihan Umum yang demokratis pada tahun 1945 dan 1946.

Di Asia gelombang demokrasi menyentuh Pakistan, negara yang baru lahir pada tahun 1947 itu. Karena instabilitas politik yang terjadi pada awal 1950-an, sistem parlementer diubah menjadi presidensial, dan Ayub Khan diangkat menjadi "Presiden Revolusioner". Sementara itu, Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, dalam perkembangannya justru mengalami pasang surut demokrasi yang terjadi dalam 3 (tiga) masa, yaitu: Pertama, digunakannya sistem parlementer (1945-1959), dan karena dianggap kurang cocok dengan iklim politik pada saat itu, kemudian Soekarno menggantinya dengan Demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Sistem ini malah memberi kekuasaan terlalu besar kepada Presiden, sehingga kemudian sistem ini pun diganti, dan diterapkanlah Demokrasi Pancasila sampai sekarang.

### 3. Gelombang Demokrasi Ketiga

Samuel Huntington memulai penjelasannya tentang gelombang demokrasi ketiga dengan mengajukan pertanyaan: Pertama, mengapa yang beralih dari sistem otoriter ke sistem demokrasi hanya sekitar 30 negara, padahal ada sekitar 100 negara otoriter di dunia? Kedua, mengapa perubahan itu terjadi dalam dasawarsa 1970 dan 1980, bukan pada rentang waktu yang lain?<sup>75</sup>

Dalam menjawab pertanyaan ini, Huntington mengatakan bahwa rezim-rezim yang berubah menjadi demokratis pada gelombang ketiga ini adalah yang sebelumnya berupa rezim satu partai, rezim militer, diktator perorangan, dan oligarki rasial di Afrika Selatan. Di antara negara-negara itu, menurut Huntington ada yang selama 15 tahun sejak tahun 1974 tidak melakukan demokratisasi, seperti China dan Birma, sementara Indonesia adalah salah satu di antara rezim militer yang tidak melakukan demokratisasi di negaranya. Sebagian di antaranya sebenarnya sudah pernah mengalami demokratisasi, tetapi kemudian berubah menjadi sistem seperti sebelumnya, dan di gelombang ketiga ini kembali menerapkan demokratisasi. Jadi, negara-negara pada kelompok kedua ini mencoba untuk kedua kalinya.<sup>76</sup>

Jika pola yang pertama, sebagian dari negara-negara yang menjadi demokratis adalah negara-negara yang untuk pertama kalinya mencoba menjadi demokratis, pola yang kedua berlaku pada negara-negara yang mencoba untuk kedua kalinya, maka pola yang ketiga adalah demokrasi terputus-putus. Hal ini terjadi pada negara-negara yang sudah membangun rezim demokrasi dalam waktu yang relatif panjang, namun kemudian karena kondisi yang berkembang di negaranya, proses demokratisasi terhenti, dan pada masa berikutnya karena

<sup>75</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Terj. Asril Marjohan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 51

<sup>76</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi...*, h. 51-52.

gelombang demokrasi yang begitu deras, pemimoin otoriteranya terpaksa tunduk pada suatu hasil pemilihan umum yang baru, dan mereka kalah.<sup>77</sup>

Gelombang demokrasi ketiga ini berlangsung di Eropa Selatan. Tiga bulan sesudah kudeta di Portugis, rezim militer yang memerintah di Yunani sejak 1967. runtuh, dan diubah menjadi pemerintahan sipil di bawah pimpinan Constantine Karamanlis, yang terpilih menjadi pemimpin pada tahun 1947, dan sistem monarki berangsur-angsur dihilangkan.<sup>78</sup>

Pada akhir dasawarsa 1970, gelombang demokrasi menuju negeri Amerika Latin. Di Asia, India yang selama satu setengah tahun berada di bawah pemerintahan darurat, kembali ke demokrasi, dan di Pilipina, terbunuhnya Benguo Aquino bermuara pada tumbangnya rezim diktator Marcos, dan sistem politik kembali menjadi demokrasi pada Pebruari 1986. Pada akhir dasawarsa 1980, perkembangan demokrasi memasuki wilayah dunia komunisme. Rezim komunis tumbang di Hungaria, Republik Baltik, Polandia, Cekoslovakia, dan Rumania.

Di Afrika dan Timur Tengah, gerakan demokrasi terjadi pada dasawarsa 1980. Nigeria berubah dari pemerintahan militer menjadi demokrasi, dan disusul oleh Senegal, Tunisia, Mesir, dan Yordania yang bahkan mengalami liberalisasi menjelang tahun 1990. Nepal, Albania, dan negeri-negeri lain di Afrika Selatan juga menjalankan pemerintahan yang demokratis.

#### **B. Definisi dan Karakteristik Demokrasi.**

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam definisi demokrasi di mana rakyat memiliki kekuatan penuh atas dirinya, demokrasi saat ini telah diterima oleh hampir seluruh pemerintahan dunia. Sistem yang pada awalnya diperkenalkan sebagai respon terhadap monarki absolut pada akhir abad pertengahan di Eropa ini dianggap merupakan sistem yang terbaik karena bukan hanya membuat rakyat menjadi pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, tetapi juga mampu membuat rakyat mencapai kesejahteraan dengan mendapat perlakuan yang sama, baik dalam hak maupun kewajiban dan tanggungjawab.

Dalam negara demokrasi, meskipun terkadang muncul kesulitan untuk mendefinisikan siapa itu rakyat, dan tindakan-tindakan pemerintah yang mana yang benar-benar berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat, tetap saja dalam kata ini terkandung nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang pasti dimiliki oleh demokrasi khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, membuat sistem ini menjadi harapan rakyat untuk tercapainya kehidupan bernegara yang baik sekaligus sejahtera. Begitu memukaunya istilah ini sehingga Indonesia-pun telah mengadopsi sistem ini sejak awal Indonesia terbentuk pada tahun 1945.

<sup>77</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi...*, h. 53

<sup>78</sup> Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h., 49



Dari namanya, “demos” dan “cratein”, yang berarti pemerintahan rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa atas dirinya, tidak ada kekuasaan lain, bentuk pemerintahan ini dianggap yang paling mampu mengangkat harkat dan martabat warga negara bagaimanapun rendahnya status sosial warga negara tersebut. Dari pengertian secara etimologis kata tadi “pemerintahan (oleh) rakyat, terkandung konotasi: (1) suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*), atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik”.<sup>79</sup>

Dari makna konotasi di atas dapat dipahami bahwa dalam demokrasi mereka yang miskin memiliki lebih banyak kedaulatan dibandingkan yang kaya, karena jumlahnya lebih banyak, sementara pengambilan keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Ketika rakyat kecil dan miskin bisa berdaulat, padahal di sistem sebelumnya seperti monarki dan otokrasi, rakyat kecil hampir-hampir tidak memiliki kekuasaan bahkan terhadap dirinya sendiri, itulah tujuan demokrasi. Berdaulat artinya memiliki kebebasan, tidak terbelenggu seperti kehidupan kaum budak

Aristoteles dalam karyanya *Politics* yang ditulis antara 335 dan 323 SM menyatakan: “asas dasar dari konstitusi demokrasi adalah kebebasan. Setiap demokrasi mempunyai tujuan kebebasan. Memerintah dan kemudian diperintah, adalah salah satu elemen dari kebebasan. Ide demokrasi tentang keadilan dalam kenyataannya adalah persamaan numerik dan bukan persamaan berdasarkan merit (prestasi)”

Aristoteles menyatakan ada tiga unsur atau kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan negara kota. Pertama, unsur deliberatif, yang bisa disusun di atas sistem yang berbeda. Sistem yang pertama menyerahkan keputusan dari semua masalah kepada semua warga negara, inilah yang dinamakan demokrasi. Sistem yang kedua, menyerahkan keputusannya kepada beberapa orang warga negara, yang disebut dengan oligarki. Sistem yang ketiga, menyerahkan beberapa masalah kepada semua warga negara, sementara sebagian masalah lain kepada sebagian saja dari warga negara. Ini yang dinamakan aristokrasi dan pemerintahan konstitusional.<sup>80</sup>

Lebih lanjut, Aristoteles mengatakan bahwa bentuk konstitusi yang baik adalah pemerintahan konstitusional (*polity*), sementara tiga bentuk yang lain, menyimpang, yang buruk, yaitu demorasi, oligarki, dan tiran. Yang terburuk adalah tiran, terburuk berikutnya oligarki, dan kemudian yang kurang buruk adalah demokrasi.<sup>81</sup> Jadi, di mata Aristoteles demokrasi hanya bentuk pemerintahan yang kurang buruk di antara pemerintahan yang buruk, padahal di masa modern hampir semua negara dunia berlomba untuk menyatakan dan mengadopsi bentuk ini dalam pemerintahannya.

Secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikan demokrasi sesuai dengan harapan idealnya tentang sistem ini. Joseph Schmeter mengatakan, *demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para*

<sup>79</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 1

<sup>80</sup> Aristoteles, *Politik*, Terj. Saut Pasaribu, (Yogyakarta: Narasi, 1995), h. 202

<sup>81</sup> Aristoteles, *Politik...*, h. 164

*individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.*<sup>82</sup>

Philippe C. Schmitter mengatakan bahwa *demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.*<sup>83</sup>

Dari dua definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi:

- dibutuhkan perencanaan institusional
- ada keputusan politik
- ada kekuasaan individu
- dilakukan atas nama rakyat
- pemerintah bisa diminta pertanggungjawabannya
- ada kompetisi sekaligus kerjasama
- ada perwakilan yang dipilih oleh rakyat

S.P. Varma mengatakan *metode demokratis merupakan tatanan kelembagaan untuk sampai kepada keputusan-keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dengan alat-alat perjuangan kompetitif bagi suara rakyat.*<sup>84</sup>

Meskipun definisi demokrasi begitu beragam, tetapi titik temu definisi itu adalah pada tertumpunya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang benar-benar berdaulat pada dirinya sendiri. Begitupun, untuk memastikan kedaulatan rakyat tersebut, tentu ada ciri-ciri yang harus dimiliki yang memastikan bahwa sebuah negara benar-benar menerapkan sistem ini.

Bagi Dahl, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat dan memiliki segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.<sup>85</sup>

Pengertian ini dapat disejajarkan dengan ciri-ciri negara demokratis yang dipergunakan Kongres Amerika tahun 1989 dalam menentukan kriteria dari negara-negara Eropa Timur yang pantas diberi bantuan, yaitu sebagai berikut: (a) *didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif, berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil, (b) diakuinya secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul, (c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik, (d) diciptakannya suatu badan*

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 2

<sup>83</sup> Mu<sup>56</sup> Fuady, *Konsep Negara...*, h. 3

<sup>84</sup> S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Terj. Tohir Effendi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 212.

<sup>85</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para ...*, Pengantar

<sup>40</sup> Rober A. Dahl, *Demokrasi dan Para...*, h. xxv merupakan kutipan dari Support for East European Democracy (SEED) Act of 1989, 17 November 1989.

kehakiman yang bebas, dan (e) didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang tidak memihak.<sup>86</sup>

Eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu berkorelasi sangat tinggi, bahkan adanya sejumlah kebebasan individu merupakan komponen esensial dari demokrasi, terutama demokrasi liberal. Kebebasan merupakan keutamaan yang khas dari demokrasi. Itu sebabnya, kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, menentukan nasib sendiri merupakan syarat utama negara demokratis.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, negara-negara di dunia sekarang ini mengaku sebagai negara demokrasi. Secara normatif seperti itu faktanya. "Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" adalah sistem yang terbaik karena bukan hanya mampu mewujudkan negara sejahtera, tetapi pada saat yang sama kebebasan, keadilan, dan HAM dilindungi. Dalam pemahaman ini, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara dan biasanya ini diterjemahkan dalam konstitusi masing-masing negara, namun secara empirik tidak banyak negara yang benar-benar membuktikan diri sebagai negara yang demokratis. Demokratis tidaknya sebuah negara harus dibuktikan secara empiris (*procedural democracy*)<sup>87</sup> seperti dinyatakan oleh Bernhard Sutor, yaitu; *adanya jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan partai-partai. beroposisi; lalu adanya pemilihan yang bebas, sama, rahasia atas dasar minimal dua alternatif, dimana para wakil dipilih untuk waktu tertentu.*<sup>88</sup>

Ciri-ciri ini juga dikemukakan oleh Bingham Powell Jr. Powell menyebut lima kriteria terwujudnya demokrasi<sup>89</sup>, yaitu:

1. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warga negara
2. Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif
3. Kebanyakan orang dapat ikut serta, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih
4. Pemilihan bebas
5. Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, pers, berkumpul dan berorganisasi serta membentuk partai politik.

Affan Gaffar menyimpulkan ciri-ciri demokrasi, yaitu:<sup>90</sup>

<sup>86</sup>Ada dua macam pemahaman tentang demokrasi, pemahaman secara normative dan pemahaman secara empirik (*procedural democracy*). Lihat Graeme Duncan, *Democratic Theory and Prac*<sup>54</sup>, (London: Cambridge University Press, 1983), h. 25.

<sup>87</sup>Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 56 dan Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 7-10.

<sup>88</sup>Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok...*, h. 57 yang dikutip dari *Politische Ethik Gesamtdarstellung auf der Basis der Christlichen Gessellschaftslehre Paderborn*, 1991, h. 148.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hal 56 dan Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 7-10.

<sup>90</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia...*, h. 5-6.

1. *Akuntabilitas.* Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya juga harus mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya.
2. *Rotasi kekuasaan.* Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
3. *Rekrutmen politik yang terbuka.* Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
4. *Pemilihan umum.* Dalam suatu negara demokrasi pemilihan umum dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
5. *Menikmati hak-hak dasar.* Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*) dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

Demokrasi – dengan semua ciri yang telah disebutkan di atas - diterapkan secara berbeda oleh tiap-tiap negara. Perbedaan yang paling tua dalam bentuk demokrasi adalah antara demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung, mengikuti kenyataan bahwa tidak semua warga negara dengan nyata ikut serta atau tidak ikut serta dalam pembentukan undang-undang.<sup>91</sup> Dalam hal yang pertama terdapat penyatuan kedaulatan tertinggi dengan kedaulatan legislatif

Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya sendiri tanpa perantara yang pertama sekali dikumandangkan oleh Jean Jaques Rousseau. Persyaratannya ialah:

1. *Jumlah warga negara harus kecil*
2. *Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata atau hampir merata*
3. *Masyarakat secara kebudayaan harus homogen*
4. *Mereka yang melaksanakan undang-undang tidak boleh bertindak sendiri di luar kemauan rakyat yang telah membuat undang-undang pertama kali.*<sup>92</sup>

Jika demokrasi langsung hanya dimungkinkan untuk dilakukan di negara kecil yang jumlah penduduknya sedikit, maka sekarang kondisi itu hampir tidak kita dapati lagi. Karenanya pada umumnya sekarang bentuk

<sup>91</sup>Mac Iver, *Negara Modern*, Terj. Moertono, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h. 313.

<sup>92</sup> Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Zulkifli Hamid, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 72.

perwakilan-lah yang dipraktikkan. Cara yang paling sederhana untuk mengklasifikasikan demokrasi adalah menurut bentuk dan luasnya asas perwakilan ini. Sifat umum dari negara-negara demokrasi perwakilan ini adalah dewan-dewan legislatif yang terpenting didasarkan atas perwakilan. Dua tipe yang ekstrim adalah (a) negara-negara dimana pemerintah pusat termasuk kedua kamar legislatif dan kepala eksekutif sama sekali tergantung pada hasil pemilihan perwakilan, contohnya Amerika Serikat, dan (b) negara-negara dimana hanya “*house of commons*”nya (dewan perwakilan rakyat) nya sajalah yang merupakan perwakilan langsung di samping adanya “*upper house*”, dewan senat yang tidak merupakan perwakilan dengan kepala kementerian yang tidak ditentukan oleh suatu sistem pemilihan dan kepala negara titular yang permanen, contohnya adalah Konstitusi Britania.

Meskipun penerapan demokrasi di negara-negara dunia tidak sama, bahkan namanya pun berbeda, tetapi demokrasi tetap saja dianggap bentuk pemerintahan yang menjadi alternatif terbaik diantara bentuk-bentuk pemerintahan lain yang sudah lebih dulu ada, seperti monarki, oligarki, ataupun teokrasi. Bentuk ini sebenarnya masih tetap sering dipertanyakan sebagai satu-satunya bentuk yang terbaik, dalam artian model demokrasi terbaik yang mana yang lebih tepat untuk masing-masing negara, tetapi tetap saja apapun nama demokrasinya, bentuk ini dianggap merupakan bentuk terbaik terutama di masa modern ini. “Sebuah laporan studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana Barat dan Timur yang disponsori oleh UNESCO pada awal 1950-an menyatakan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.”<sup>93</sup>

Ciri demokrasi yang lain adalah adanya kebebasan berpendapat yang merupakan satu hal yang sangat penting dalam semua peristiwa politik. Demokrasi juga menuntut tanggungjawab yang sama untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan negara. Hak setiap warga negara untuk diperlakukan dengan adil, dan mendapat perlakuan yang sama, disisi lain warga negara harus menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama dan penguasa berhak untuk bertindak dengan kewenangan serta melindungi negara dari ancaman-ancaman luar.

Dari dasar-dasar tersebut, dapat dijabarkan ciri-ciri demokrasi, sebagai berikut:

1. *Pemilihan pejabat oleh semua untuk semua.*
2. *Pemerintah oleh semua untuk masing-masing dan masing-masing pada gilirannya untuk semua.*
3. *Jabatan diisi dengan cara undian, atau oleh semuanya, atau tidak sama sekali berdasarkan pengalaman atau ketrampilan.*
4. *Masa waktu jabatan tidak didasarkan kualifikasi pemilikan harta kekayaan.*
5. *Orang yang sama tidak akan menduduki jabatan yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dilakukan, harus sangatlah jarang dan hanya dalam hal yang berhubungan dengan keadaan perang.*

<sup>93</sup> Lindha Pasu, *Demokrasi dalam Sudut Pandang Islam*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada Jumat, 21 Pebruari 2020 pada pukul 13.35 wibb.



6. Masa jabatan yang sesingkat mungkin.
7. Juri harus dipilih dari seluruh warga negara dan mengadili semua hal yang penting dan dalam tingkat yang tertinggi, seperti hal-hal yang mempengaruhi konstitusi dan perjanjian antar individu.

Menurut Robert Dahl, dalam demokrasi skala besar terdapat elemen-elemen yang harus dimilikinya, yaitu:<sup>94</sup>

1. Para pejabat yang terpilih. Kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi pemerintahan demokrasi skala besar yang modern merupakan perwakilan.
2. Pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilu yang seringkali diadakan dan dilaksanakan dengan adil di mana tindakan pemaksaan agak jarang dipakai.
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya hukuman keras mengenai masalah persamaan politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, rezim, tatanan sosial ekonomi, dan ideology yang ada.
4. Akses sumber-sumber informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif dan bebas dari warga lain, para ahli, surat kabar, majalah, buku, telekomunikasi, dan lain-lain. Lagi pula, sumber-sumber informasi alternatif yang ada secara nyata tidak berada di bawah kendali pemerintah atau kelompok politik lain yang berusaha mempengaruhi keyakinan dan tingkah laku masyarakat, dan sumber-sumber alternatif ini secara efektif dilindungi UU.
5. Otonomi asosiasi. Untuk mencapai hak mereka yang beraneka macam itu, termasuk hak yang diperlukan untuk keefektifan tindakan lembaga-lembaga politik demokrasi, maka warga negara juga berhak membentuk kumpulan atau organisasi yang relative bebas, termasuk parpol dan kelompok kepentingan yang bebas
6. Hak Kewarganegaraan yang inklusif. Tak seorang pun yang menetap disuatu negara dan tunduk pada UU negara tersebut dapat diabaikan hak-haknya, hal yang berikan kepada warga negara lainnya dan diperlukan kelima lembaga politik yang baru saja disebut.

Demokrasi juga menuntut adanya konstitusi (undang-undang), yang harus dipatuhi untuk menjamin semua warga negara melaksanakannya dengan baik. Konstitusi yang dijadikan sebagai salah satu ciri negara demokrasi, di masa modern bahkan menjadi sebuah model demokrasi tersendiri, yaitu demokrasi konstitusional untuk menyebutkan nama lain demokrasi liberal. Dalam hal ini, pemerintahan berdasarkan hukum bukan oleh manusia (*Government by laws, not by men*). Pembatasan oleh hukum ini diistilahkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental dengan *Rechtsstaat*, sementara ahli Anglo Saxon menyebutnya dengan Rule of Law.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law yaitu :<sup>95</sup>

1. *Perlindungan Konstitusi, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosuderal untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.*
2. *Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.*
3. *Pemilihan umum yang bebas.*
4. *Kebebasan untuk menyatakan pendapat.*
5. *Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi*
6. *Pendidikan kewarganegaraan (civic education)*
7. *Pendemokrasian berbeda pada berbagai negara, tergantung dengan bagaimana negara tersebut memberikan kekuasaan hak dan kewajiban kepada rakyatnya dalam hal pemerintahan. Meskipun sosok demokrasi masih tetap sering dipertanyakan sebagai satu-satunya bentuk yang paling baik dalam arti kata sosok demokrasi yang bagaimana yang terbaik dan paling sesuai bagi satu-satu negara namun nampaknya dapat diambil kesimpulan umum bagaimanapun bentuk atau sosok demokrasi yang dipilih, bentuk ini tetap merupakan yang terbaik. Tinggal bentuk mana yang paling sesuai dengan jiwa masing-masing bangsa yang menerapkannya.*

Kita dapat mengamati apakah tatanan politik (*political order*) merupakan sistem yang demokratis atau tidak, dalam hal ini dijelaskan oleh Affan Gaffar, yaitu:<sup>96</sup>

1. *Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan publik yang yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakannya baik yang akan dilakukan maupun yang telah diimplementasikan kepada publik (masyarakat). Selain itu juga, ia juga harus mempertanggungjawabkan kata-katanya serta perilakunya selama ia memegang jabatan publik.*
2. *Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Sehingga tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang yang lain menjadi penutup.*
3. *Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat memiliki kesempatan yang sama.*

Amien Rais menyebutkan ada sepuluh kriteria demokrasi, yaitu: (1). *Partisipasi dalam pembuatan keputusan;* (2). *Persamaan di depan hukum;* (3). *Distribusi pendapatan secara adil;* (4). *Kesempatan pendidikan yang sama, adanya empat macam kebebasan, yakni kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama;* (5).

<sup>95</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 116

<sup>96</sup> Efriza, *Ilmu Politik..*, h.114

*Keterbukaan terhadap informasi; (6). Mengindahkan tatakrma politik; (7). Kebebasan individu; (8). Semangat kerjasama; dan 10. Hak untuk protes.*<sup>97</sup>

Ciri-ciri demokrasi di atas masih ditambahkan lagi dengan keberadaan hukum dalam sebuah negara yang menjadi keharusan dalam sebuah demokrasi konstitusional. Miriam Budiardjo menegaskan *bahwa demokrasi kontitusional “pertama-tama merupakan Rechstaat”, lebih terinci disebut: (1) Perlindungan konstitusional, (2). Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3). Pemilihan umum yang bebas, (4) Kebebasan menyatakan pendapat, (5). Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan (6). Pendidikan kewarganegaraan dimana (7). Kebijakan politik ditetapkan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:*

*(1). Pemerintahan yang bertanggungjawab, (2).Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum yang bebas yang minimal beralternatif dua yang melakukan pengawasan, (3).Adanya beberapa partai politik, (4).Pers atau media bebas, (5).Sistem peradilan bebas yang menjamin hak-hak asasi.Miriam Budiardjo juga menunjuk pada kenyataan bahwa dalam sejarah perkembangan kesadaran demokratis hak-hak kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sering diabaikan.*<sup>98</sup>

S.M. Amin menyimpulkan, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan umum.
2. Kepartaian.
3. Trias Politika.
4. Oposisi.
5. Voting atau pemungutan suara.

Meskipun para ahli telah menentukan ciri-ciri sebuah negara demokrasi dengan begitu tegas, tetapi faktanya masih banyak negara yang memiliki permasalahan dengan ciri-ciri di atas. Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah hak-hak asasi yang kurang dilindungi, termasuk kurangnya kebebasan pers.

Untuk menganalisis bagaimana pemberlakuan demokrasi di sebuah negara, dapat dilihat dari dua bentuk pemahaman terhadap demokrasi yang dikenal dalam ilmu politik, yaitu:

Pemahaman secara normatif, yaitu memahami demokrasi sebagai sesuatu yang secara ideal ingin dilakukan di sebuah negara. Makna “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” adalah rujukannya dalam hal ini.

Pemahaman secara empirik. Dalam hal ini, ilmuan politik akan melihat bagaimana demokrasi dipraktikkan di sebuah negara berdasarkan faktanya, dengan menggunakan indikator tertentu, yaitu kebebasan, persaingan secara bebas antara

<sup>97</sup> Lihat Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. xvi-xxv

<sup>98</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia....*, h. 255.

pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan memerintah tanpa kekerasan, dan bebas mengekspresikan pendapat.<sup>99</sup>

Dengan menggunakan kedua pemahaman itu pula, akan terlihat bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak dari awal berdirinya negara ini sampai sekarang.

### C. Demokrasi di Indonesia.

Ada dua kecondongan (trend) utama dalam demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Keduanya walaupun sama-sama menyatakan dan memperjuangkan kedaulatan rakyat namun penekanannya berbeda bahkan bertolak belakang.

Jika demokrasi liberal dengan menekankan kedaulatan (kekuasaan) tertinggi berada di tangan rakyat, maka warga negara yang merupakan rakyat dari sebuah negara mempunyai kebebasan individu yang sangat tinggi. Demokrasi sosialis, sebaliknya. Demokrasi liberal dianggap akan mengesampingkan orang-orang yang lemah yang dengan ketidakmampuannya secara ekonomi dan fisik menyebabkan individualismenya tidak bisa dengan leluasa dikembangkannya berhadapan dengan individualisme orang lain. Karena itu agar rakyat benar-benar berdaulat atas dirinya sendiri semuanya harus dijadikan milik masyarakat, milik bersama sehingga tidak akan ada intimidasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. Jadi yang penting di sini adalah sosialisme/kolektivisme.

Dengan dua trend di atas, apapun bentuknya, demokrasi tetap merupakan pilihan yang paling bijak, paling baik seperti dikemukakan oleh Ulrich Matz bahwa demokrasi merupakan tatanan politik yang dengan memperhatikan ciri-ciri hakiki atau kodrati manusia menawarkan pemecahan paling baik terhadap masalah pemaksaan sebagai unsur hakiki politik.<sup>100</sup>

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sejak awal pembentukannya sudah menyatakan sebagai negara demokrasi. Para founding fathers bangsa ini berketetapan hati menjadikannya sistem pemerintahan, meskipun umat muslim merupakan mayoritas yang sebenarnya bisa saja menjadikan khilafah sebagai sistem pemerintahan. Para ulama dan tokoh-tokoh bangsa dengan alasan mementingkan persatuan dan kesatuan justru tidak menjadikan Islam sebagai bentuk dan sistem pemerintahannya.

Demokrasi liberal dan demokrasi sosialis (rakyat) yang menjadi dua kutub demokrasi di dunia, bertolak belakang. Kedua bentuk demokrasi ini bukan menjadi rujukan penerapan demokrasi di Indonesia, Indonesia adalah negara yang unik dengan tingkat pluralitasnya yang sangat tinggi, karena itu menerapkan salah satu dari kedua kutub demokrasi tersebut tidak cocok bagi rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan jauh sebelum negara ini terbentuk.

<sup>99</sup> Indra Pahlevi, "Sistem Multi Partai pada Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap DPR-RI (Periode 1998-1999)", dalam Uli Sintong Siahaan dan Siti Nur Solehah (Eds.), *Peran Politik DPR-RI pada Era Reformasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Jenderal DPR-RI, 2001), h.10.

<sup>100</sup> Franz Magnis Suseno, *Sebuah Telaah...*, h. 50.



26 Mattulada mengatakan, dalam kehidupan masyarakat nusantara dikenal kelompok-kelompok masyarakat yang disebut “kaum” atau “<sup>26</sup>ang” (Bugis), atau marga (Batak). Semua anggota kaum, anang, atau marga ini terikat satu sama lain <sup>26</sup>h hubungan kekerabatan yang ketat, yang satu sama lain wajib saling menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya. Tiap-tiap warga kaum memiliki hak dan kedudukan yang sama, sementara kepala kaum tidak memiliki kelebihan hak atas warga lainnya.<sup>101</sup>

Mohammad Hatta juga menyatakan hal yang sama. Demokrasi, kata Hatta berakar dari negara Indonesia sendiri, dari pedesaan-pedesaan Indonesia dengan nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan bahkan sudah berurat berakar. Itu sebabnya, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia bukan semata-mata ditransfer dari peradaban Barat, tetapi digali dari kearifan-kearifan lokal pedesaan-pedesaan Indonesia, seperti Minangkabau yang telah lama menerapkan musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, padahal belum bersentuhan dengan peradaban Barat.<sup>102</sup>

Dengan mempertimbangkan pola hidup kemasyarakatan tradisional bangsa, dan ditambah kondisi politik dunia, maka bangsa Indonesia menerapkan demokrasi s<sup>26</sup>bagai sistem pemerintahannya, yang waktu itu lebih dikenal dengan sebutan “kedaulatan rakyat”. Pern<sup>26</sup>aan resmi tentang demokrasi ini pernah dikemukakan oleh HOS. Cokroaminoto ketika mengajukan mosi tentang pembentukan parlemen di negeri <sup>26</sup>ahan Hindia Belanda pada tahun 1918, jauh sebelum kemerdekaan. Mosi ini kemudian diikuti berbagai organisasi kebangsaan, dan dapat dianggap sebagai pikiran resmi pertama tentang pemikiran demokrasi<sup>26</sup>i Indonesia. Konsep “Parlementarisme” Cokroaminoto pada saat itu mendekati demokrasi liberal yang banyak dijalankan di negara-negara Eropa Barat pada sa<sup>26</sup>itu. Demokrasi parlementarisme yang diinginkan HOS. Cokroaminoto saat itu adalah “demokrasi dalam rangka Pluralisme yang harus memberikan peluang sebesar-besarnya bagi peranan rakyat untuk menentukan jalannya negara”. Pemikiran ini kemudian juga diikuti oleh Soekarno dan Hatta.<sup>103</sup>

Meskipun Soekarno dan Hatta mengikuti pikiran HOS. Cokroaminoto, tetapi mereka menolak demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara Eropa Barat saat itu. Menurut Soekarno dan Hatta, demokrasi liberal seperti di Eropa Barat hanyalah demokrasi politik, namun di bidang sosial dan ekonomi justru merugikan rakyat.

Selain tidak setuju pada demokrasi liberal (pluarlisme), Soekarno juga menolak menjadikan Indonesia menjadi negara agama (Islam), dan justru mendukung pemisahan negara dan agama (sekularisasi), seperti yang dditerapkan di Turki. Msenurutnya meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi rakyat tetap bisa memasukkan semua paham keagamaanya ke dalam undang-undang asalkan

73  
<sup>101</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (JakartaL Rineka Cita, 2000), h. 31

<sup>102</sup> Elly Warnisyah Harahap, *Demokrasi dalam Pemikiran Politik Hatta*, Tesis, Program Pasasarjana IAIN Sumatera Utara, 2002, tidak dipublikasikan.

<sup>103</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, h. 34



perwakilan mereka mengusulkan itu. Pernyataan ini dikemukakannya berkaitan dengan polemiknya dengan M. Natsir mengenai hubungan negara dengan agama.<sup>104</sup>

*“Lagi pula disesuatu negeri jang ada demokrasi jang ada perwakilan rakjat jang benar-benar mewakili rakjat, dinegeri jang demikian itu, rakjatnya toch dapat memasukkan segala matjam “keagamaannya” ke dalam tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang jang dipakai didalam negara, kedalam tiap-tiap politik jang dilakukan oleh negara, walaupun disitu agama dipisahkan dari negara. Asal sebagian besar dari anggauta-anggauta parlemen politiknja politik agama, maka semua putusan-putusan parlemen itu bersifat agama pula. Asal sebagian besar dari anggauta-anggauta parlemen itu politiknja politik Islam, maka tidak akan dapat berdjalanlah satu usul djuapun jang tidak bersifat Islam.”*<sup>105</sup>

George McTurnan Kahin, seorang peneliti Indonesia berkebangsaan Amerika mengulas dengan detil secara empirik revolusi dan demokrasi di negara ini sejak masa penjajahan Belanda. Kahin mengatakan, nasionalisme sebagai cikal bakal lahirnya negara Indonesia terbentuk dari sejumlah faktor masa lalu, dan juga kolonialisme Belanda yang mampu melahirkan revolusi, dan pada akhirnya melahirkan negara Indonesia. Kahin mengkategorikan faktor lahirnya nasionalisme tersebut kepada tujuh faktor, yaitu: masa lalu, batas teritori (wilayah administrasi Belanda), agama, bahasa, *Volksraad* (Dewan Rakyat) bentukan Belanda, perkembangan radio, dan pendidikan sebagai gerakan kultural.<sup>106</sup>

Nasionalisme yang sudah dimiliki bangsa Indonesia yang dilatarbelakangi ketujuh faktor di atas, mampu melahirkan revolusi. Organisasi-organisasi pemuda banyak dibentuk yang diawali oleh Serikat Islam dan Boedi Oetomo. Keberhasilan organisasi ini diikuti oleh organisasi pemuda lain, yang setelah Boedi Oetomo tidak lagi bernuansa kedaerahan, tetapi nasionalis. Persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terkandung dalam nasionalisme itu mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dari Ssabang sampai Merauke, hingga akhirnya kemerdekaan pun dicapai.

Setelah era awal pembentukan negara, Indonesia mengalami pasang surut penerapan demokrasi., yang dapat dibagi ke dalam empat masa penerapan, yaitu:<sup>107</sup>

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. 25
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.

<sup>104</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, h. 34

<sup>105</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Panitia Penerbit Dibawah Bendera revolusi, Jilid I, Cetakan III, 1964), h. 407.

<sup>106</sup> George McTurnan Kahin, *Indonesia: Semangat Nasionalisme dan Lahirnya Revolusi*, Terj. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), h. 51-91.

<sup>107</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 127-128.

38

4. Masa republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa republik Indonesia III

#### **Ad.1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959): Masa Demokrasi Konstitusional.**

Di masa Republik Indonesia I, di masa-masa awal kemerdekaan, sistem demokrasi yang dijalankan adalah presidensial, tetapi sistem ini berubah menjadi sistem parlementer dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden no. X Tahun 1945 (3 Nopember 1945). Kabinet parlementer pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, tanpa merubah Undang-undang Dasar 1945. Sistem parlementer ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang Dasar 1949 (konstitusi Republik Indonesia Serikat sejak 14 Desember 1949) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 sejak tanggal 15 Agustus 1950 (dengan bentuk negara kesatuan tetapi dengan sistem parlementer).

Sistem parlementer diberlakukan oleh Presiden Soekarno dengan pertimbangan:

1. *Beberapa tokoh partai tidak setuju terhadap usul pembentukan partai tunggal dengan nama Partai Nasional Indonesia.*
2. *Dorongan kaum muda revolusioner untuk membentuk suatu sistem parlementer yang lebih liberal*
3. *Dengan sistem parlementer yang liberal, dunia internasional akan mendapat kesan bahwa Indonesia adalah suatu negara demokrasi, bukan negara boneka hadiah pemerintah Jepang.<sup>108</sup>*

Sistem parlementer yang dijalani selama kurang lebih lima tahun ternyata kurang cocok bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan yang begitu kuat ketika menghadapi penjajahan Belanda sebagai musuh bersama, mulai melemah karena kuatnya kepentingan politik. Pengalaman yang minim dalam demokrasi membuat partai-partai dan Dewan Perwakilan Rakyat begitu mendominasi, dan ini tidak baik bagi iklim demokrasi.<sup>109</sup>

Undang-undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer yang menuntut badan eksekutif dengan Presiden sebagai kepala negara konstitusional (*constitutional head*) dan menteri-menterinya mempunyai tanggungjawab politik. Karena kuatnya dominasi partai, dan koalisi partai bisa berubah sewaktu-waktu, ditambah partai oposisi pun tidak mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif, menyebabkan kabinet berkali-kali jatuh karena mosi tidak percaya. Umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan umum 1955 tidak pernah bertahan lebih dari delapan bulan. Tentu saja ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik karena pemerintah tidak berkesempatan melaksanakan programnya. Pemilihan Umum pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 pun tidak membawa stabilitas yang diharapkan.<sup>65</sup>

Semua faktor di atas membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memutuskan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Dengan ini sistem parlementer berakhir.

<sup>108</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 171.

<sup>109</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 128

### **Ad. 2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965): Masa Demokrasi Terpimpin.**

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah upaya untuk mencari jalan ke luar dari kemacetan politik setelah beberapa kali pemerintahan yang terbentuk melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Kabinet yang berulang kali jatuh karena kuatnya lembaga legislatif telah menyebabkan dampak instabilitas politik dan ekonomi. Demokrasi parlementer yang dipraktikkan sebelumnya dan dirumuskan secara formal melalui Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dianggap sebagai penyelenggaraan demokrasi yang salah dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa sendiri. Ini yang membuat Presiden memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden, dan menyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.<sup>110</sup>

Beralihnya sistem dari parlementer ke Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa pemerintahan lebih mengarah ke sistem totaliter, dan atas nama revolusi Indonesia seperti yang dikumandangkan saat itu, suara rakyat dibungkam dan yang bersuara kritis dikirim ke penjara. Demokrasi dan revolusi yang digaung-gaungkan saat itu, semu belaka. Yang ada justru sistem pemerintahan oligarki bahkan otokrasi, dengan jargon nasakom (nasional, agama, dan komunis)<sup>111</sup>

Dengan beralihnya sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin, kewenangan Presiden jadi sangat besar bahkan menjurus ke sistem pemerintahan tirani, apalagi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 membuat keadaan menjadi lebih parah, karena Presiden diberikan wewenang untuk ikut campur tangan dalam bidang yudikatif yang nyata-nyata melanggar doktrin Trias Politika.<sup>112</sup>

Ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Demokrasi Terpimpin di masa Soekarno mengarah kepada tirani, yaitu:<sup>113</sup>

1. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia.
2. Kebebasan pers dibelenggu.
3. Prinsip due process tidak dijalankan, baik secara substantif maupun secara prosedural.
4. Oposisi terhadap pemerintahan tidak dibenarkan.
5. Partai-partai politik tidak berperan, sehingga mekanisme kedaulatan rakyat tidak berjalan.
6. Parlemen tidak berfungsi, dan tidak mencerminkan kehendak rakyat.
7. Tidak ada check and balances antar lembaga-lembaga pemerintah.
8. Pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam bidang yudikatif.
9. Kekuasaan tersentralisasi ke pusat, sehingga peran daerah berkurang.
10. Korupsi merajalela.
11. Terbengkalainya program-program pembangunan ekonomi.

### **Ad.3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998): Masa Demokrasi Pancasila.**

<sup>110</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia...*, h. 8-9.

<sup>111</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 171-172

<sup>112</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 172

<sup>113</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h. 172-173

Masa ketiga ini adalah masa di mana Soeharto memegang tampuk kepemimpinan setelah Soekarno mengamanatkan kepemimpinannya melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Pertentangan politik ditambah peristiwa G.30 S/PKI menjadi akhir dari Demokrasi Terpimpin Soekarno. Pemberontakan G.30 S/PKI yang sukses dihancurkan oleh Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) adalah awal dari kepercayaan Soekarno terhadap Soeharto. Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966 itu memberikan perintah kepada Soeharto untuk *atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/mandataris MPRS demi untuk menjamin keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.*<sup>114</sup>

Supersemar yang diterima Soeharto memberi legitimasi untuk membubarkan PKI, sekaligus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk stabilitas politik. Dengan Supersemar itu juga, kekuasaan Soekarno lenyap, apalagi kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS yang melalui Sidang Istimewa mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1967, bahkan kemudian mengangkatnya sebagai presiden definitif pada maret 1968. Dengan kekuasaan di tangannya, Soeharto mulai menjalankan pemerintahan, dan menggeser sistem politik dari titik ekstrem otoriter ke sistem demokrasi liberal. Kembali dan dikenal dengan sebagai sistem politik Orde Baru.<sup>115</sup>

Orde Baru di mana Soeharto sebagai Presidennya merupakan implementasi dari aliansi ABRI, terutama Angkatan Darat (sebagai aktor utama) dengan kaum teknokrat (sebagai aktor pendamping) Landasan periode ini adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Ketetapan-ketetapan MPRS. Setelah penyelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 dalam masa Demokrasi Terpimpin, maka diadakan beberapa tindakan korektif, terutama Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan Presiden Soekarno seumur hidup. Ketetapan itu dibatalkan, sehingga masa jabatan Presiden kembali lima tahun, seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945, seperti juga beberapa ketentuan dan kebijakan yang menyeleweng lainnya.<sup>116</sup>

Sistem di masa ini secara resmi disebut sistem Demokrasi Pancasila. Meskipun dengan nama berbeda, tetapi faktanya demokrasi pada masa ini tidak jauh berbeda dengan Demokrasi Terpimpin Soekarno. Soeharto juga otoriter, bahkan membentuk beberapa lembaga dan berbagai jurus ketatanegaraan dan politik untuk membungkam suara rakyat. Salah satu lembaga yang paling ditakuti adalah Pangkoptamtif. Kritik-kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai anti pemerintah dan diidentikkan dengan anti Pancasila. Melihat dari fakta-fakta itu, maka

<sup>114</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, h. 60.

<sup>115</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, h. 60-61

<sup>116</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 131.



sebenarnya di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia sama sekali tidak demokratis, yang ditunjukkan dengan fenomena-fenomena berikut:

1. *Dilecehkannya hak-hak fundamental rakyat.*
2. *Tidak dilaksanakannya prinsip due process, baik secara substantif, maupun secara prosedural.*
3. *Dominasi peranan militer dalam politik dan pemerintahan*
4. *Birokrasi pengambil keputusan tersentralisasi di pusat.*
5. *Peran dan fungsi partai politik dihilangkan.*
6. *Berlaku sistem kepartaian tunggal, yaitu Golongan Karya yang diback up oleh pemerintah, dan dua partai lainnya PPP dan PDI dikedepikan.*
7. *Dewan Perwakilan Rakyat hanya menjadi stempel untuk menyetujui tindakan pemerintah.*
8. *Lembaga pengadilan dan putusan pengadilan dapat diatur oleh pemerintah melalui Menteri Kehakiman.*
9. *Campur tangan pemerintah dalam setiap urusan politik dan publik.*
10. *Pemaksaan terhadap keseragaman penafsiran ideologi negara.*
11. *Banyaknya lembaga pemerintah nonformal dengan kekuasaan yang sangat besar, seperti Pangkoptif, asisten pribadi Presiden, dan lain-lain.*
12. *Korupsi dan nepotisme merajalela.*
13. *Meskipun dilakukan beberapa kali pemilihan umum, tetapi pada dasarnya itu hanya formalitas karena hasilnya harus sesuai dengan kehendak pemerintah.*

Kekuasaan Soeharto lenyap setelah tiga puluh dua tahun berkuasa lewat serangkaian demonstrasi ketidakpuasan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki Gedung DPR/MPR di Senayan pada bulan Mei 1998 adalah langkah awal kejatuhan Soeharto dan tumbanganya Orde Baru.

#### **Ad.4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang): masa Reformasi.**

Masa Orde baru di mana Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, akhirnya tumbang juga. Tumbanganya Orde Baru ini mengawali Orde Reformasi di mana terjadi reformasi di bidang politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman di masa Orde Baru telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi akan membawa kehancuran bagi bangsa ini. Pelajaran pahit ini menyatukan pandangan bangsa untuk sekali lagi melakukan upaya demokratisasi, agar kedaulatan rakyat sebagaimana yang diinginkan demokrasi dapat ditegakkan, dan perwakilan rakyat dapat benar-benar menjalankan fungsinya.

Dengan lengsernya Soeharto, maka Habibie yang saat itu menjabat Wakil Presiden secara otomatis menggantikan Soeharto menjadi Presiden. Tugas Habibie sebagai Presiden pertama di masa reformasi benar-benar berat. Langkah-langkah demokratisasi harus segera dilakukan. Oleh karena itu Habibie beserta jajarannya segera mempersiapkan Pemilu, dan melakukan beberapa langkah penting dalam upaya melakukan demokratisasi di segala bidang, sesuatu yang hilang di masa pemerintahan Soeharto. Beberapa Undang-undang<sup>47</sup> terutama yang menyangkut politik segera dibuat, meliputi Undang-undang (UU) Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang disahkan pada awal tahun 1999. UU yang jauh lebih demokratis dibanding UU sebelumnya mampu



membuat terselenggaranya Pemilu yang juga demokratis, dan itu diakui dunia internasional.<sup>117</sup>

Pemilu yang digelar di masa Habibie pada tahun 1999 merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan segala Kekuatan pro demokrasi yang berhasil melengserkan Soeharto, juga berkeinginan untuk mengenyahkan Habibie dalam tata pemerintahan karena beranggapan Habibie adalah kroni Soeharto. Kedudukan Habibie sebagai Presiden adalah legal-konstitusional, karena itu untuk melenyapkannya pun harus dengan cara yang legal-konstitusional. Untuk mengatasi itu, maka disepakati untuk melakukan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 10-13 Nopember untuk mempercepat Pemilu pada tahun 1999, yang mestinya baru akan jatuh pada tahun 2002. Dengan jiwa besarnya Habibie rela untuk tidak mempertahankan masa jabatannya, padahal mestinya Habibie masih menjabat sampai tahun 2003.

Pertarungan politik antara sisa-sisa kekuatan Orde Baru dengan kekuatan pro demokrasi begitu ketat. Partai Politik peserta Pemilu yang semula hanya tiga partai menjadi 48 partai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera dibentuk yang berjumlah 53 orang dan diketuai oleh Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri (1988-1993). Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU pada tahun 1999 itu ternyata diikuti dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Tingkat partisipasinya mencapai 92,99%.<sup>118</sup>

Hasil Pemilu pada saat itu menunjukkan PDIP sebagai partai Politik yang meraih suara terbanyak, dengan perolehan 153 kursi. Partai kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 51 kursi, dan PPP memperoleh 58 kursi.<sup>119</sup> Meskipun PDIP adalah partai pemenang Pemilu yang memperoleh kursi jauh di atas PKB, partainya Gus Dur, tetapi ternyata dalam pemilihan Presiden, Gus Dur lah yang diangkat menjadi Presiden dengan diusung oleh Poros Tengah yang diketuai Amien Rais. Amien Rais adalah tokoh penting di balik berhasilnya Gus Dur menjadi Presiden. Sayangnya masa jabatannya Gus Dur terlalu singkat, karena kemudian Gus Dur dijatuhkan melalui Sidang Istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya.

Meski masa jabatan Gus Dur sangat singkat, namun pemerintahan Gus Dur masih menorehkan prestasi demokratis, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI. Di masa Soeharto, ABRI memiliki dua fungsi sekaligus, fungsi pertahanan, dan fungsi sosial politik, dan kini ABRI hanya memiliki fungsi pertahanan, sebagaimana yang seharusnya. Prestasi yang ditorehkan awal masa reformasi ini kemudian berlanjut dengan prestasi-prestasi lain dalam rangka demokratisasi di bawah pemimpin-pemimpin yang berbeda.

Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Perubahan-perubahan penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis dilakukan, sehingga

<sup>117</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 134

<sup>118</sup>Pramono U Tanthowi, "Habibie Menyelamatkan Pemilu dan Demokrasi". [geotimes.go.id](http://geotimes.go.id), Kamis, 12 September 1999, diakses Selasa, 11 Agustus 2020

<sup>119</sup>Rumah Pintar Pemilu, KPU Kabupaten Tasikmalaya, Sejarah Pemilu Zaman Reformasi. <https://rppkabtsm.wordpress.com>, diakses Selasa, 11 Agustus 2020

amandemen itu baru selesai dalam waktu empat tahun. Peranan DPR diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam Pemilu, pengawasan terhadap Presiden diperketat, dan hak asasi manusia juga memperoleh jaminan yang lebih kuat. Amandemen UUD 1945 juga mengamankan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dan Pilpres secara langsung yang pertama kali dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk legislatif.

Setelah pelaksanaan Pilpres dan Pemilu legislatif secara langsung yang sukses dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah memilih Kepala Daerah secara langsung, yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan UU ini, maka pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia harus dilakukan secara langsung, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah daerah yang lebih demokratis.

#### **D. Permasalahan dalam Penegakan Demokrasi di Indonesia: HAM dan Angka Kemiskinan.**

Membicarakan hak asasi manusia (HAM)<sup>120</sup> berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>121</sup> Seiring dengan perkembangan zaman di mana HAM sangat diperhatikan terutama dalam rangka demokrasi, kini HAM dibicarakan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara.

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia yang sejak lahir, sejatinya telah diberi oleh Sang Pencipta Kehidupan hak-hak yang tidak boleh dirampas oleh orang lain. Melalui kesadaran universal inilah lahir apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab. Pelanggaran

<sup>120</sup>Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq*, ialah kewenangan atau kewajiban melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Lihat <sup>116</sup>ahim Anis, *Mu'jim al-wasith*, juz I (Beirut: Dar al-fikri, t.th), h, 1815; Munir Ba'al Bahi, *al Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al 'ilmi li al Malayin, 1979), hlm. 798. Hak Asasi Manusia (HAM) <sup>71</sup>am bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Lihat departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. <sup>106</sup>

<sup>121</sup> Franz Magnis Suseno. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001). h. 121

75 atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya, dan kejahatan 75 manusia oleh orang atau pihak yang justru tidak menghargai kemanusiaannya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami pergeseran dari sekedar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkret.

Ketika pasal-pasal HAM terurai dalam konstitusi, itu artinya bahwa langkah awal jaminan konstitusi atas HAM telah dimulai sebagai bagian inheren dalam menciptakan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi. Pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu HAM sebagai keikutsertaan pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus memproteksi jaminan atas HAM sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi.<sup>122</sup>

Seperti diketahui masalah masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan menyebarnya konsep HAM dalam konteks global dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi kabar yang selalu dibicarakan di hampir semua belahan dunia, meskipun harus diakui pula masih banyak terjadi pelanggaran HAM oleh negara-negara yang menginvasi Negara lainnya. .Sesungguhnya sudah dari zaman dahulu problem HAM dikenal di banyak kawasan dunia, tetapi yang paling banyak sumber tertulisnya adalah negara-negara Barat, termasuk negara-negara Dunia Ketiga.

Cikal bakal konsep hak asasi manusia di dunia Barat terdapat dalam karangan beberapa filsuf abad ke-17, antara lain John Locke (1632-1704) yang merumuskan beberapa hak alam yang dimiliki manusia secara alamiah. Konsep ini bangkit kembali se usai Perang Dunia II dengan dicanangkannya 103 arasi Universal yang dijabarkan dalam dua perjanjian internasional yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966).<sup>103</sup>

Men 91 t UU No.39 Tahun 1999, “Hak Asasi Manusia (HAM) 91 lah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dihargai, bahkan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya.”<sup>123</sup>

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia mematuhi dan sudah meratifikasi beberapa Undang-undang Ham Internasional. Berikut adalah Unndang-undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

UNDANG-UNDANG INTERNASIONAL HAM (*Internasional Bill of Human Rights*)

90 mencakup:

1. Deklaras 90 niversal Hak Asasi Manusia (1948).
2. Kovenan 90 ernational Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966/1976)
3. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966/1976)

51

<sup>122</sup> Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.(Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2007).

<sup>123</sup> UU Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 pasal 1

4. *Optional Protocol dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (mengenai pengaduan perorangan) (1966/1976)*
5. *Optional Protocol II dari kovenan Internasional Hak sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati (1989).*

#### **Beberapa Sifat Hak Asasi**

1. *Hak asasi umumnya tidak terkena restriksi (atau batasan)*
2. *Hak asasi boleh di restriksi dalam keadaan darurat.*
3. *Ada hak asasi yang boleh direstriksi oleh Undang-Undang: Pasal 19 (mempunyai pendapat), pasal 21 (berkumpul secara damai), pasal 22 (berserikat)*
4. *Ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun (non-derogable): pasal 6 (hak atas hidup), pasal 7 (siksaan), pasal 8 (anti perbudakan), pasal 11 (anti pasang badan), pasal 15 sifat kedaluarsa tindakan criminal atau non-retroaktif), pasal 16 (pribadi atau person di hadapan hukum), pasal 18 (berfikir, berkeyakinan, beragama).<sup>124</sup>*

Lebih dari sepuluh tahun sejak Indonesia berubah dari rezim politik otoriter ke rezim demokrasi, dalam rentang waktu itu telah banyak perubahan yang terjadi di dunia internasional. Diantaranya adalah krisis ekonomi 2008 yang telah melumpuhkan pusat-pusat ekonomi dunia, terutama Amerika Serikat dan Negara-negara di kawasan Eropa. Selama tiga belas tahun pasca-reformasi atau setelah krisis 1998, Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Perubahan itu dalam catatan dan analisis berbagai lembaga bantuan pembangunan tidak hanya menyangkut sistem politik, akan tetapi juga sistem ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya.

Pertama, Indonesia ialah negara yang berpenghasilan menengah, meski Indonesia berada pada tingkat Lower middle income country dengan penghasilan 3.000 dolar AS per kapita per tahun (2010). Namun sebagian dari kelompok negara-negara berpendapatan menengah, Indonesia kini berada di kelompok yang sama dengan Negara-negara yang pendapatannya 5.000 dolar AS per kapita.

Kedua, Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar setelah India dan Amerika Serikat. Sekaligus menjadi Negara dengan mayoritas penduduk muslim yang telah menerapkan demokrasi. Demokrasi diterapkan melalui sistem multipartai, dimana sudah dilakukan tiga kali pemilihan umum yang di lihat cukup dmokratis. Indonesia sekarang juga menjadi Negara terdesentralisasi dengan banyak wewenang dan sumber daya di tingkat kota dan kabupaten.

Ketiga, meski menjanjikan perubahan yang baik dan menyenangkan, badan-badan bantuan pembangunan juga mencatat bahwa Indonesia masih saja dibelenggu oleh berbagai kendala. Setidaknya terdapat tujuh permasalahan yang bisa menghambat kemajuan Indonesia pada masa kini dan masa depan, yaitu: (i) kemiskinan dan pengangguran; (ii) pertumbuhan ekonomi yang belum berkelanjutan; (iii) efektivitas dan kapasitas pemerintah, termasuk kendala dalam desentralisasi; (iv) korupsi yang masih luas dan sistemik; (v) minimnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi; (vi) tantngan perubahan

<sup>124</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar...*,h. 211-222



iklim dan kerusakan lingkungan; (vii) ketimpangan gender, yaitu perbuatan tak sesuai terhadap laki-laki dan perempuan.

Masalah lain yang selalu muncul yang menjadi ciri Indonesia ialah angka kemiskinan yang masih tinggi. Indonesia mempunyai tantangan besar dalam hal penganggulangan kemiskinan.

Diskursus tentang mekanisme dan institusionalisasi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai sebuah pilihan politik Negara saja sejak tahun 2000 sebenarnya tidak mengalami kemajuan signifikan. Kepemimpinan politik pada era transisi di bawah B.J Habibie telah menelurkan suatu harapan baru bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dengan membentuk UU No. 39/2009 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>125</sup>

#### E. Teori Demokrasi (*Democratic Theory*)

Salah satu teori demokrasi adalah yang diajukan Carol C. Gould. Carol mengklasifikasikan tiga model teori demokrasi, yaitu: (1) *model individualism liberal*, (2) *model pluralis*, (3) *model sosialisme holistik*.<sup>126</sup>

Teori demokrasi model individualisme liberal menjelaskan bahwa demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu dalam proses politik. One man one vote adalah inti dari pandangan ini.

Gould menjelaskan bahwa Ontologi yang diletakkan oleh teori demokrasi ini adalah individualisme abstrak. Teori ini memahami individu atau orang sebagai dasar entitas yang menyusun masyarakat, dan ini sifatnya abstrak jika dilihat dari kenyataan bahwa manusia dalam beberapa aspeknya berbeda satu sama lain, dan memandang manusia dari sifat-sifat universalnya saja. Esensi teori ini adalah bahwa setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam kemerdekaan dan hak-hak dasarnya... Individu juga dipahami sebagai pelaku yang bebas memilih, yang dalam kebebasannya itu, dia tidak boleh diganggu.<sup>127</sup>

Teori demokrasi dari kaum pluralis adalah model teoritis yang nampak dalam tulisan Madison, Dewey, Schumpeter, Dhal, dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Pluralism memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan kelihatannya akan berdampak konflik dalam proses politik. Jadinya, demokrasi politik diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik (kompetisi) itu agar diperoleh keadilan sosial. Teori ini memaksimalkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak terwakili kelompok tempat dia bergabung. Teori ini juga mementingkan perlindungan kebebasan memilih para

<sup>125</sup> AE Priyono. *Merancang Arah Baru Demokrasi*. (Jakarta: PT Gramedia. 2014), h.(462-493)

<sup>126</sup> Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*, h.59-60

<sup>127</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat demokrasi...*, h. 60



individu dengan menyediakan alternative-alternatif politik yang mampu mewakili pluralism kelompok kepentingan (*interest group*). Struktur politik yang diciptakannya menutup kemungkinan hegemoni suatu kelompok atau partai tunggal.

Sosialisme holistik sebagai teori ketiga adalah salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi yang kemunculannya untuk menanggapi ditolaknya hubungan sosial dari individualism liberal. Jika teori yang pertama (individualism liberal) cenderung memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara lebih adil, maka teori kedua (pluralis) menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi. Demokrasi liberal menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan, baik politik maupun ekonomi, sementara sosialis (teori kedua) justru memahami komunitas atau masyarakat keseluruhan yang utama, dan meletakkan politik di bawah kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi yang holistik inilah (teori kedua) yang menjadi tulang punggung teori sosialisme holistik.<sup>128</sup>

Hal yang memikat dari pandangan sosialisme holistik ini adalah bahwa kebebasan terlihat sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu, membantu teraktualisasikannya potensi totalitas. Jadi, haluan akhirnya ialah kemakmuran ekonomis totalitas masyarakat, karena tercukupinya ekonomi dipandang sebagai suatu kondisi bagi kebebasan.<sup>129</sup>

Gambaran dari tiga model teori demokrasi yang digambarkan oleh Carol C. Gould di atas merupakan bentuk dasar dari ragam perkembangan teori tentang hak asasi manusia dan teori politik lainnya juga banyak memiliki sisi yang sama dan para paralel dengan kategori dasar dari tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Gould.<sup>130</sup>

Dari tiga model demokrasi tersebut, kelihatan pendasaran ontologi sosial yang disematkan pada masing-masing teori berbeda satu sama lain, namun demikian, pada fase pragmatis prosedural, ketiga model tersebut kedaulatan suara mayoritas bagi keabsahan suatu keputusan politik. Bagaimanapun juga suara mayoritas rakyatlah yang menjadi ukuran utama untuk menentukan pengambilan keputusan dan tindakan politik.<sup>131</sup>

## F. Jenis Demokrasi

Demokrasi terbagi atas lima jenis, yaitu: (1) demokrasi liberal, yaitu pemerintah dibatasi oleh UU dan pemilu yang bebas yang diselenggarakan. Banyak negara Afrika mencoba mempraktikkan model ini tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. (2) mimpin (penguasa). Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi kebiasaannya menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan, (3) demokrasi sosial, yaitu meletak kepedulian pada

<sup>128</sup> Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi...*, h.61-62

<sup>129</sup> Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*, h.63

<sup>130</sup> Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*, h. 63

<sup>131</sup> Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*, h. 64

28

keadilan sosial dan egalitarianism bagi persyaratan untuk mendapatkan kepercayaan politik, (4) demokrasi partisipasi, yaitu yang menekan ikatan timbale balik antara penguasa dan yang dikuasai, (5) demokrasi konstitusional, yaitu yang menegakkan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menegakkan kerjasama yang erat.<sup>132</sup>

Jika dilihat dari aspek bagaimana dan sejauhmana partisipasi rakyat dalam suatu cara pengambilan keputusannya, konsep negara demokrasi minimal memunculkan tiga macam demokrasi, yaitu :<sup>133</sup>

1. Demokrasi Perwakilan
2. Demokrasi Langsung
3. Demokrasi dengan Partai tunggal

Demokrasi perwakilan adalah model demokrasi yang sangat banyak dianut saat ini, bahkan dapat dikatakan bahwa model perwakilan inilah yang saat ini merupakan *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal. Dengan demokrasi perwakilan yang disebut juga sebagai demokrasi tidak langsung, yang dimaksudkan ialah bahwa para pejabat negara yang pada dasarnya dipilih oleh rakyat, melaksanakan kekuasaannya, kewenangan dan fungsinya mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam area tertentu, ataupun secara keseluruhan.<sup>134</sup>

Tentu saja, dalam melaksanakannya, tetap taat terhadap hukum dan tatakrama yang berlaku. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam parlemen yang akan mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Karena itu, untuk sistem demokrasi tidak langsung ini disebut juga dengan istilah demokrasi perwakilan. Sementara itu, sistem demokrasi langsung, atau yang sesekali juga disebut dengan sistem demokrasi partisipatif atau demokrasi murni, rakyat memilih sendiri secara langsung terhadap setiap keputusan yang menyangkut dengan kepentingan publik, tanpa melalui perwakilannya. Demokrasi dengan Partai Tunggal, yaitu hanya diizinkan satu partai di dalam negara. Terkadang terdaopat lebih dari satu partai, tetapi pada hakikatnya hanya satu partai itu saja yang berfungsi, sementara partai yang lain sengaja didisain sebagai pelengkap saja.<sup>135</sup>

Dari sekian banyak ide dan praktik demokrasi, paling tidak dapat diketengahkan ketiga jenis demokrasi ini, yaitu demokrasi demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat, serta tambahan aliran ketiga yaitu demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia.

#### a. Demokrasi Konstitusional

Menurut Miriam Budiardjo indetitas dari demokrasi konstitusional merupakan gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>136</sup>

104

<sup>132</sup> Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, (Bandung : Alfabet. 2013)., h.114

<sup>133</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara ...*, h.34

<sup>134</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara...*, h.34

<sup>135</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara ...*, h.34

<sup>136</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h.52

Demokrasi konstitusional sering disebut demokrasi liberal, merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualistis. Lebih lanjut Kusnardi berpendapat bahwa menurut Mac Iver dan Jhon Herz ciri-ciri demokrasi liberal ialah ditandai secara konstitusional pembahasan terhadap pemerintah untuk memberi perlindungan bagi individu dan kelompok-kelompok dengan menyusun pergantian pemimpin secara terbuka, tertib, dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.<sup>137</sup>

#### **b. Demokrasi Rakyat**

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk 2(dua) a). suatu wadah front persatuan (united front) yang merupakan prinsip dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat dimana partai komunis berfungsi sebagai penguasa, b). penggunaan beberapa lembaga pemerintah dari negara yang lama. Di RRC gagasan demokrasi rakyat terdoktrin oleh pemikiran Mao Tse Tung yang melancarkan gagasan mengenai demokrasi baru (new democracr). Fron persatuan juga diakuinya sebagai wadah kerjasama partai komunis China yang berpengaruh dengan beberapa partai kecil lainnya<sup>138</sup>

#### **c. Demokrasi Nasional**

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada akhir tahun 1250-an, harapan kaum komunis untuk menanamkan pengaruh kekuasaannya terhadap negara-negara *bourgeois democratic revolutions* agar terjadi revolusi proletar ternyata mengalami kegagalan meskipun ideologi komunisme mengalami kemajuan. Dalam kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20 tahun 1956 muncul satu konsep yang dicetuskan oleh Khrushchey berbunyi: “ *Kemenangan Komunis dapat dicapai melalui tansisi damai (peaceful transition), yaitu melalui saluran-saluran yang sah dan atas dasar kerjasama dengan kekuatan borjuasi yang ada*”. Konsep ini kemudia diterima dalam suatu konferensi 64 Partai Komunis yang diadakan di Moskow pada 1957.<sup>139</sup>

Pada 1960, dalam pertemuan 81 Partai Komunis di Moskow gagasan Khrushchev tersebut dirumuskan secara lebih terperinci lagi dan dicetuskan suatu pola baru, yaitu negara demokrasi Nasional.<sup>140</sup>

#### **d. Demokrasi Pancasila**

Demokrasi yang dianut di Indonesia, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan cirri-cirinya terdapat artian dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat ditolak adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua pokok yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :<sup>141</sup>

<sup>137</sup> Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik...*, h.54

<sup>138</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*h. 90.

<sup>139</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*,h. 91

<sup>140</sup> Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.56

<sup>141</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2013),. h. 106

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)
2. Sistem Konstitusional, Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua sebutan Rechtsstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdapat di Pembukaan Undang-Undang Dasar.<sup>142</sup>

Model-model demokrasi yang lain dijelaskan secara lebih terperinci oleh David Held melalui tabel berikut:

**MODEL-MODEL DEMOKRASI MENURUT DAVID HELD**  
(david Held, 2007:x)

<b>Model Demokrasi</b>	<b>Prinsip-Prinsip Penilaian</b>
Model I <b>Demokrasi Klasik</b>	Warga Negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara beraliran
Model II <b>Republikanisme Protektif</b>	Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga Negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh yang lain.
Model III <b>Republikanisme dan Perkembangan</b>	Para warga negar harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam prose tekad diri bagi kebaikan bersama
Model IV <b>Demokrasi Protektif</b>	Para penduduk membutuhkan perlindungan dari para pemimpin, begitu pula dari sesamanya, untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan penduduk secara keseluruhan.
Model V <b>Demokrasi Developmental</b>	Partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengamdi dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

<sup>142</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 106

<p><b>Model VI</b> <b>Demokrasi</b> <b>Langsung dan</b> <b>Akhir dari Politik</b></p>	<p>Pembangunan yang bebas dari semuanya hanya dapat diraih dengan pembangunan yang bebas dari setiap orang. Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-benar lengkap; hanya kesetaraan yang dapat menjamin situasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemampuan manusia sehingga setiap orang bias memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima apa yang mereka butuhkan.</p>
<p><b>Model VII</b> <b>Demokrasi</b> <b>Kompetisi Elite</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Metode pemilihan elit politik yang terampil dan imajinatif yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif.</li> <li>● Halangan bagi kepemimpinan politik yang berlebihan.</li> </ul>
<p><b>Model VIII</b> <b>Demokrasi</b> <b>Pluralisme</b></p>	<p>Menjamin pemerintah oleh minoritas dan, dengan demikian, kebebasan politik penghambat tumbuhannya faksi-faksi dengan kekuasaan berlebihan dan Negara yang tidak responsif.</p>
<p><b>Model IX</b> <b>Demokrasi Legal</b></p>	<p>Prinsip mayoritas merupakan cara yang efektif dan selalu dibutuhkan untuk melindungi individu-individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan mempertahankan kebebasan. Namun, bagi kehidupan politik, seperti kehidupan ekonomi, kekuasaan mayoritas harus dibatasi dengan peraturan hukum. Hanya dibawah keadaan-keadaan tersebut, prinsip mayoritas bias berfungsi dengan pantas dan bijak.</p>
<p><b>Model X</b> <b>Demokrasi</b> <b>Partisipatif</b></p>	<p>Sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya bisa didapat dalam sebuah masyarakat partisipatif, sebuah masyarakat yang menolong perkembangan sebuah kemampuan nilai politik, menjaga sebuah urusan terhadap masalah-masalah kolektif dan menyumbangkan pada pormasi warga Negara yang berpengetahuan yang mampu menerima sebuah kepentingan tetap dalam proses memerintah.</p>
<p><b>Model XI</b> <b>Demokrasi</b> <b>Deliberatif</b></p>	<p>Persyaratan kelompok politik yang dilaksanakan dengan kesepakatan warga Negara yang bebas dan berdasarkan pada pikiran. Kemampuan “justifikasi Mutual” terhadap keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi permasalahan kolektif.</p>



<b>Model XII Otonomi Demokrasi</b>	Masyarakat bisa menikmati hak yang selaras dan, selanjutnya, kewajiban yang selaras dalam spesifikasi kerangka kerja politik yang melahirkan dan membatasi kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh masyarakat; yang artinya, mereka harus bebas dan setara dalam menentukan keadaan kehidupan mereka sendiri, selama mereka tidak menyebarluaskan skema kerja ini untuk mengingkari atau menyangkal atau melanggar hak-hak orang lain.
<b>Model XIII Demokrasi Kosmopolitan</b>	Dalam dunia yang penuh dengan interaksi global dan regional yang semakin intensif, dengan komunitas nasib yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global maupun pemerintahan local dan nasional.

### BAB III LATAR BELAKANG DAN KEHIDUPAN ABDURRAHMAN WAHID

#### A. Latar Belakang Internal

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur adalah salah satu tokoh penting di Indonesia. Ketokohan Gus Dur dapat dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi perannya di tengah masyarakat terutama masyarakat Islam, Gus Dur adalah ketua sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama selama beberapa periode, bahkan sampai menjelang akhir hidupnya. Dari sisi perannya sebagai salah seorang pemimpin bangsa, Gus Dur adalah presiden ke-lima, meskipun masa jabatannya hanya sebentar dan terhenti karena sebuah *impeachment* DPR/MPR, namun itu tidak menyebabkan kebesaran namanya menjadi hilang. Gus Dur tetaplah tokoh yang diperhitungkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional, meskipun seringkali tindakan dan ungkapannya sangat kontroversial. Bukan Gus Dur namanya jika tidak kontroversi (pen.), dan itu justru yang membuat nama Gus Dur tetap saja dibicarakan.

Abdurrahman Wahid adalah keturunan orang yang dihormati dan dikenal baik di negeri ini terutama di kalangan pesantren. Kakeknya dari pihak ayah, Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri pesantren Tebuireh yang pernah menjadi Menteri Agama pada era pemerintahan Soekarno. Hasyim Asy'ari juga merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926,<sup>143</sup> organisasi Islam terbesar di tanah air di samping Muhammadiyah.

Dari sisi keturunan (dari pihak ayah), Gus Dur pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah keturunan Tionghoa dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan a Lok, saudara kandung dari raden patah (Tan Eng Hwa), pendiri kesultanan Demak. Tan a Lok dan Tan Eng Hwa sendiri merupakan anak dari puteri Campa seorang keturunan Tiongkok yang merupakan selir dari Raden Brawijaya V. Berdasarkan penelitian Louis Charles Damain, seorang peneliti Perancis, Tan Kim Han diidentifikasi

<sup>143</sup> K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren setelah kembali dari Mekah selama 7 tahun. Pada 31 Januari 1926 bersama dengan kiai Bisri Syamsuri dan K.H. Wahab Chasbullah mendirikan NU. Hasyim Asy'ari diangkat menjadi Rais Akbar yang berarti Pemimpin Agung, Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Terj. Lie Hua (Yogyakarta: Saufa, 2016) h. 28, juga Nur Kholisoh, *Demokrasi Aja Kok Report. Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012), h. 1

<sup>15</sup> sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang makamnya ditemukan di Trowulan.<sup>144</sup>

K.H. Hasyim Asy'ari selain sebagai ulama dan pemimpin Islam di masyarakat tradisional, juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak memberi inspirasi sekaligus yang teguh pendirian dan kerap melancarkan kritik terhadap pemerintahan Belanda. Sikapnya sebagai seorang nasionalis ini membuat pemerintah memberinya gelar Pahlawan Nasional.

Hasyim Asy'ari yang dilahirkan di Jombang pada bulan Pebruari 1871 dan meninggal di Jombang pada bulan Juli 1947 ini banyak menghabiskan waktunya belajar di pesantren, sejak dari pesantren keluarga sejak kecil sampai remaja hingga kemudian pada tahun 1892 pergi menuntut ilmu ke Mekah dan menyelesaikan studinya di bawah bimbingan seorang guru terkenal yang berasal dari Sumatera Barat, Syaikh Ahmad Chatib Minangkabau, dan menjadi ahli hadis.<sup>145</sup>

Setelah menyelesaikan studinya di Mekah, Hasyim Asy'ari kembali ke Jombang dan mendirikan pesantren di desa Tebuireng, meskipun teman-temannya menasehati untuk tidak memilih desa itu karena desa itu penuh dengan rumah-rumah pelacuran dan tempat minum-minuman keras. Hasyim Asy'ari tetap bersikukuh mendirikan pesantren di daerah tersebut justru dengan keyakinan bahwa sebuah pesantren harus memainkan peran dalam mengubah masyarakat yang ada di sekitarnya, dan perjuangannya tidak sia-sia. Pesantren Tebuireng terkenal sampai sekarang, dan telah banyak menghasilkan kaum terpelajar.

<sup>78</sup> Pada tahun 1926, K.H. Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti "kebangkitan para ulama", sebuah organisasi Islam tradisional yang terkuat, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Sejak NU didirikan, K.H. Hasyim Asyari diangkat menjadi Rais Akbar, yang secara harfiah berarti Pemimpin Agung, dan itu juga berarti dia menjadi Kepala dari Dewan Penasehat Agama organisasi itu. Selain itu K.H. Hasyim Asyari juga diberi gelar keimatan *Hadhratussyaikh* (Guru Agung).<sup>146</sup>

Kakek Gus Dur dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri juga merupakan ulama besar yang sangat dihormati di kalangan NU. Kiai Bisri Syansuri dilahirkan pada bulan September 1886 di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang memiliki banyak pesantren. Bersama dengan Hasyim Asy'ari, dia dianggap sebagai salah seorang tokoh kunci bagi lahirnya NU. Peran penting Kiai Syansuri yang lain adalah beliau yang memperkenalkan pada dunia pesantren kelas pertama bagi santri putri di

<sup>144</sup> Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur, Misteri di Balik Pelengserannya* (Jogjakarta: CiSoD, 2014), h.7.

<sup>145</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 23.

<sup>146</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 48

pesantrennya yang baru<sup>12</sup> didirikannya di desa Denanyar yang terletak di luar Jombang.<sup>147</sup>

Kiai Bisri selain seorang ahli fiqih dan administratur pendidikan yang berbakat, juga seorang ahli pertanian yang handal. Pesantrennya di Denanyar terkenal karena pendekatan yang teratur dan disiplin terhadap keilmuan dan kehidupan bersama.<sup>148</sup>

Wahid Hasyim, ayah Gus Dur adalah putra pertama dan anak kelima dari sepuluh bersaudara. Ketika mengandung Wahid Hasyim, nenek Gus Dur, ibu dari Wahid Hasyim sakit keras. Saat itu Nyai Hasyim Asy'ari (ibu Wahid Hasyim) bernazar jika anak yang dikandungnya lahir dengan selamat, maka ia akan membawa bayinya tersebut ke Madura untuk diberkati oleh Kiai Cholid (guru suaminya). Ketika Wahid Hasyim lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, maka Nyai Hasyim Asy'ari menunaikan nazarnya itu. Kejadian ini diprediksi sebagian orang sebagai pertanda bahwa Wahid Hasyim kelak akan jadi orang besar.<sup>149</sup>

Sebagai anak seorang guru yang dihormati, yang memiliki pesantren yang terkenal, tidak susah bagi Wahid Hasyim untuk menempuh pendidikan yang baik. Ayahnya sendiri yang menjadi pengajar di pesantren milik ayahnya tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren tersebut, pada usia tigabelas tahun, Wahid Hasyim meninggalkan Tebuireng dan pergi menempuh pendidikan dari satu pesantren ke pesantren lain dalam waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya kembali ke Tebuireng dan dengan persetujuan ayahnya melakukan studi pribadi selama empat tahun.<sup>150</sup>

Di samping belajar secara formal di pesantren, oleh ibunya Wahid Hasyim disuruh belajar bahasa Inggris dan Belanda kepada seorang manajer Eropa di pabrik gula dekat rumahnya. Sebagai seorang putri dari keluarga ningrat Jawa, ibunya menganggap penguasaan kedua bahasa asing ini juga sangat penting.<sup>151</sup>

Pendidikan yang ditempuh Wahid Hasyim sebenarnya sudah cukup baik pada masa itu, tetapi Wahid Hasyim merasa itu saja tidak cukup, karenanya ketika berusia delapan belas tahun, ia melanjutkan studinya ke Mekah selama dua tahun, kemudian magang di pesantren Tambakberas selama dua tahun, dan akhirnya mendirikan pesantren sendiri di Denanyar.<sup>152</sup>

Wahid Hasyim juga berminat terjun ke dunia politik sebagaimana ayahnya, bahkan pada tahun 1938 ia juga bergabung dengan organisasi

<sup>147</sup> <sup>8</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 29

<sup>148</sup> <sup>21</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.29.

<sup>149</sup> <sup>8</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*,h. 31.

<sup>150</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*,h. 32

<sup>151</sup> <sup>21</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h.32

<sup>152</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h.32-33



Nahdhatul Ulama, organisasi keagamaan yang didirikan oleh ayahnya. Padahal organisasi itu pernah dikritiknya sebagai organisasi yang “mewakili sekumpulan orangtua yang lambat bertindak, tidak revolusioner atau bertindak secara revolusioner”.<sup>153</sup>

Seperti mewarisi NU dari ayahnya, Wahid Hasyim juga berjuang keras membesarkan NU, tentu saja bersama pengurus lain. Kelemahan NU seperti yang dikritiknya tadi mulai dipikirkan dengan cara berbeda. Dalam bahasa Wahid Hasyim, dia mengatakan: “faktor-faktor internal itu (kelemahan-kelemahan tadi-pen.), yang sebelumnya saya anggap sebagai penghalang kemajuan, mungkin sebenarnya adalah sebaliknya: mereka bisa mendorong terjadinya kemajuan”.<sup>154</sup> Memang meskipun NU dianggap organisasi agama “tradisional” tetapi jaringan akar rumputnya sangat luas. Basis massa di akar rumput ini justru merupakan potensi yang sangat besar.<sup>155</sup>

Kebesaran ayahnya, Kiai Hasyim Asyari benar-benar diwarisi oleh Wahid Hasyim. Dia bukan hanya mewarisi kepemimpinan NU, tetapi juga pada akhirnya menjadi Menteri Agama, sama seperti ayahnya, bahkan bertahan sampai lima kabinet pada masa presiden Soekarno, tetapi pada tahun 1952 dia harus kehilangan jabatannya karena kegagalannya dalam manajemen perjalanan haji pada tahun 1951. Kesalahan dalam pengaturan perjalanan haji itu telah menyebabkan beberapa ribu calon jama'ah haji gagal berangkat. Atas kesalahan ini, Wahid Hasyim mendapat mosi tidak percaya dari DPR yang membuat Wahid Hasyim melepaskan jabatannya.<sup>156</sup>

Ibu Gus Dur, Solichah juga bukan perempuan biasa. Sebagai anak dari Kiai Bisri Syansuri, ditambah lagi sebagai istri dari orang penting negeri ini di masanya, Solichah menjadi perempuan yang patut diperhitungkan kemampuannya. Solichah memang bukan seorang cendekiawan sebagaimana almarhum suaminya, tetapi ia juga bukan ibu rumah tangga biasa. Bekal pendidikan yang diterimanya dari ayahnya dan lingkungan pesantren ditambah bimbingan dari suaminya sendiri dalam mengajarkan membaca huruf Latin dan bahasa Melayu membuatnya bisa dengan mudah menerima dan berdaptasi dengan perkembangan zaman. Selama mendampingi suaminya, Solichah telah tumbuh menjadi wanita yang aktif, gemar membaca dan mengikuti perkembangan tanah air bahkan setelah suaminya meninggal pengaruhnya kian membesar dan menjadi tokoh penting di komunitasnya terutama di kalangan NU.<sup>157</sup>

<sup>153</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h. 33  
<sup>154</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h. 33  
<sup>155</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h. 33  
<sup>156</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h. 43  
<sup>157</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur ...*, h.47.



Melihat latarbelakangnya, kelihatan sekali kalau Gus Dur adalah keturunan para tokoh pembesar yang dalam sejarahnya juga banyak berperan dalam proses pembangunan bangsa ini dimulai sejak masa penjajahan sampai ke masa sekarang. Keterlibatan keluarganya dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dibuktikan dengan keterlibatan kakeknya Hasyim Asyari dan ayahnya Wahid Hasyim dengan gerakan nasionalis yang memimpin perjuangan revolusioner melawan penjajah Belanda setelah akhir Perang Dunia II. Itulah yang menyebabkan kedua orang ini mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, dan nama mereka diabadikan sebagai nama-nama jalan bersama dengan nama-nama pahlawan nasional lain.<sup>158</sup>

Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan ke delapan dalam penanggalan Itu makanya hari lahir Gus Dur selalu dirayakan pada tanggal 4 Agustus, padahal Gus Dur dilahirkan pada bulan ke delapan dalam penanggalan Islam bukan penanggalan Masehi. Tanggal lahir Gus Dur sebenarnya adalah tanggal 4 Sya'ban 1400 bertepatan dengan tanggal 7 September 1940 menurut penanggalan Masehi di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri.<sup>159</sup>

Sebenarnya Gus Dur terlahir dengan nama Abdurrahman Addakhil, namun karena nama ini tidak cukup dikenal maka kemudian diganti dengan nama "Wahid" mengacu pada nama ayahnya dan lalu dipanggil dengan sebutan Gus Dur. Menurut tradisi pesantren, "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "abang" atau "mas".<sup>160 161</sup>

Gus Dur menjalani masa kecilnya sampai berumur sekitar empat tahun di desa kelahirannya, kemudian pindah ke Jakarta karena mendampingi ayahnya yang akan bertugas di Shumubu (Kantor Urusan Agama). Pendidikannya semasa masih berada di Jombang langsung dibimbing oleh kakeknya, K.H. Hasyim Asyari. Kakeknya membajarnya mengaji dan membaca Alquran. Berkat tangan dingin kakeknya, pada usia lima tahun Gus Dur telah lancar membaca Alquran.<sup>162</sup>

Menurut Greg Barton kepindahan ayahnya ke Jakarta sebenarnya adalah sebagai kompensasi bagi kesalahan penjajah Jepang yang telah memukuli dan menahan kakeknya karena kakeknya tersebut menolak untuk membungkuk hormat ke arah matahari terbit atau memuja kaisar Jepang. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh tentera Jepang tersebut, kakeknya

<sup>158</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.

<sup>159</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 25-26.

<sup>160</sup> Gus N. Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 12.

<sup>161</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.20

<sup>162</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.47

tidak lagi dapat menggunakan lengan kanannya sementara penahanannya justru mengakibatkan pemerintah Jepang semakin tidak dapat mengendalikan kaum nasionalis yang pada umumnya adalah muslim, dan K.H. Hasyim Asyari adalah salah satu tokoh nasionalis, apalagi sebagai pemimpin pesantren K.H. Hasyim Asyari memiliki jaringan sosial yang luas dan sangat berharga. Sebagai pernyataan maafnya pemerintah Jepang meminta K.H. Hasyim Asyari memimpin Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada bulan Maret 1942 ketika lembaga ini didirikan. Penawaran ini bagi K.H. Hasyim Asyari sangat dilematis; jika ia menolak tawaran tersebut, maka ini pasti akan menimbulkan kecurigaan di pihak Jepang tetapi jika ia menerimanya maka itu akan berbau akomodasi, baik bagi dirinya sendiri sebagai kiai senior maupun bagi NU, karenanya K.H. Hasyim Asyari menunjuk putranya sendiri, Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan tersebut.<sup>163</sup>

Pada literatur yang lain disebutkan bahwa kepindahan Wahid Hasyim karena ia akan memimpin Partai Masyumi.<sup>164</sup> Kedua alasan ini tampaknya sama-sama benar, dan akhirnya Wahid Hasyim pindah ke Jakarta dengan membawa serta putra tertuanya, Gus Dur sementara anggota keluarga yang lain masih tetap tinggal di Jombang.

Memiliki orangtua dan kakek yang terpandang di tengah masyarakat membuat Gus Dur kecil berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional. Gus Dur telah mengenal Tan Malaka yang saat itu sering dia panggil dengan sebutan “paman Hussein” pada usianya yang masih empat tahun pada tahun 1944. Di Jakarta ini juga Gus Dur mengenal sahabat baik ayahnya, seorang Jerman yang telah masuk Islam dan dipanggil dengan nama Williem Iskandar Bueller yang mengajarkan Gus Dur untuk mencintai musik klasik Eropa. Inilah awal kecintaan Gus Dur terhadap musik-musik klasik terutama karya-karya Beethoven yang memperkaya citarasa musiknya yang sebelumnya terbatas pada lagu-lagu Islam tradisional dan bacaan Alquran.<sup>165</sup>

Gus Dur kecil tinggal berdua dengan ayahnya di Jakarta sampai Jepang menyerah kepada sekutu dan itu menandakan kekuasaan Jepang terhadap Indonesia sebenarnya juga berakhir. Setelah Jepang menyerah Gus Dur dan ayahnya kembali ke Jombang dan tinggal di situ selama revolusi berkecamuk sementara ayahnya, Wahid Hasyim masih tinggal di Jakarta tetapi secara teratur mengunjungi keluarganya di Jombang dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini berlangsung sekitar tahun 1944-1949, dan pada Desember 1949 Gus Dur bersama ayahnya kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan tempat tinggal bagi semua anggota keluarga karena mereka

<sup>163</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur....*, h. 36-37

<sup>164</sup> <https://www.merdeka.com/abdurrahman-wahid/>, diakses pada Kamis, 7 Februari 2019, pukul 08.33

<sup>165</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 41

akan tinggal menetap<sup>3</sup> di Jakarta. Saat itu ayahnya sudah menjabat sebagai Menteri Agama, dan menduduki jabatan itu selama lima kabinet dan baru melepaskannya pada bulan April 1952.<sup>166</sup>

Di Jakarta Gus Dur melanjutkan pendidikan dasar<sup>15</sup> yang telah dimulai di pesantren di Jombang dan masuk pada kelas 3 di SD KRIS di Jakarta Pusat. Di sekolah ini Gus Dur hanya menempuh pendidikannya selama dua tahun yaitu di kelas 3 dan 4, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari yang dekat dari rumahnya di Matraman, Jakarta Pusat. Di samping itu Gus Dur juga belajar secara privat bahasa Belanda kepada salah seorang teman ayahnya, seorang Jerman yang masuk Islam, Williemo Iskandar Bueller. Nama Iskandar adalah nama tambahan setelah Bueller masuk Islam. Pada saat belajar di rumah Bueller lah Gus Dur diperkenalkan dengan musik klasik yang selalu dip<sup>3</sup>engarkan oleh Bueller lewat gramofon di rumahnya. Menjel<sup>3</sup> lulus SD, Gus Dur memenangkan lomba menulis (mengarang) se Jakarta. Tidak heran jika kemudian Gus Dur menjadi seorang jurnalis di usia remaja sampai dewasa.<sup>167</sup>

Setelah menamatkan sekolah dasar, Gu<sup>12</sup>Dur kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah E<sup>8</sup>konomi Pertama (SMEP) pada tahun 1954. Pada tahun pertama di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) ini, Gus Dur terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalannya dalam ujian ini karena ia sering menonton pertandingan sepakbola sehingga pekerjaan rumahnya terbengkalai. Selain itu kecerdasannya menyebabkan dia merasa bahwa pelajaran-pelajarannya di kelas tidak cukup menantang, di samping dia juga masih merasa sangat kehilangan ayahnya yang meninggal karena k<sup>12</sup>lakaan pada tanggal 19 April 1953). Ayahnya meninggal dunia pada usia 38 tahun, sementara Gus Dur baru berusia 12 tahun. Sejak itu ibunya yang berperan aktif m<sup>15</sup>endidik dan membesarkan Gus Dur dan lima orang saudaranya.<sup>168</sup>

Pada tahun 1954, Gus Dur dikirim ke Yogyakarta karena kurang berhasil dalam pelajarannya di SMEP di Jakarta. <sup>3</sup>Di Yogyakarta Gus Dur melanjutkan pendidikannya di SMEP Gowongan. Sekolah ini dikelola oleh gereja Katolik Roma dan sepenuhnya menerapkan kurikulum sekuler, <sup>8</sup>eskipun begitu Gus Dur tidak ketinggalan pendidikan agamanya karena pada saat yang sama ia juga belajar di pesantren Krapyak. Di SMEP Gus Dur belajar bahasa Inggris karena dorongan dari s<sup>12</sup>h seorang gurunya, pak Sumatri-salah seorang aktivis Partai Komunis Di kota ini dia tinggal di rumah Kiai Junaidi, salah seorang sahabat ayahnya, salah seorang anggota

<sup>166</sup> <sup>8</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 37-39

<sup>167</sup> <sup>8</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.37-41

<sup>168</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 45



Majelis Tarjih (Dewan Penasehat Agama) Muhammadiyah sekaligus orang yang berpengaruh di SMEP.<sup>169</sup>

Sekolah di SMEP sekaligus belajar di pesantren Al-Munawwir di Krapyak, membuat Gus Dur memiliki pengetahuan umum sekaligus agama yang cukup baik. Gus Dur mengikuti pendidikan di pesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu dan di sini dia belajar bahasa Arab pada K.H. Ali Ma'shum yang dikenal sebagai kiai yang egaliter. Di kota ini kegiatan rutিনnya adalah setelah sholat Subuh, mengaji pada K.H. Ali Ma'shum di pesantren Krapyak, siang harinya sekolah di SMEP dan malam harinya ikut berdiskusi dengan kelompok H. Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya. Ketika menjadi siswa di SMEP, Gus Dur didorong oleh salah seorang gurunya, pak Sumatri untuk menguasai bahasa Inggris, bahkan ketika tahu bahwa bahasa Inggrisnya sudah begitu baik, pak Sumatri- yang juga anggota Partai Komunis- memberi buku karya Lenin, *What is To be Done*.<sup>170</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMEP, Gus Dur mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Dia bergabung dengan pesantren Tegalrejo di Magelang sampai tahun 1959, dan belajar kepada kiai Khudori, salah seorang pemuka NU. Pada saat yang sama, dia juga belajar parowaktu di pesantren Denanyar, Jombang di bawah bimbingan kakeknya dari pihak ibu, kiai Bisri Syansuri. Gus Dur hanya butuh dua tahun untuk menamatkan pelajarannya dimana siswa lain pada umumnya membutuhkan waktu empat tahun untuk itu.<sup>171</sup>

. Di pesantren Tegalrejo, Gus Dur mulai banyak bersentuhan dengan buku-buku Barat. Kecintaannya terhadap buku sebenarnya telah terlihat sejak ia tinggal di Yogyakarta. Di kota pelajar itu Gus Dur bisa menemukan begitu banyak buku dari semua jenis pengetahuan. Kemampuannya membaca tulisan dalam bahasa Belanda dan Prancis yang sudah dimilikinya ketika di Jakarta benar-benar membantunya untuk bisa memahami dengan baik buku-buku Barat tersebut. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik, Gus Dur melahap buku-buku dan novel Barat seumpama karya Ernest Hemingway, John Steinbach, dan William Faulkner. Selain itu ia juga membaca beberapa karya Johan Huizinga, Andre Malraux, Ortega Y Gasset, dan beberapa karya penulis Rusia seperti Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky dan Mikhail Sholokov. Dia juga membaca *Das Capital*-nya Karl Marx bahkan buku-buku karya filosof Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, dua orang filosof yang banyak berpengaruh pada para filosof muslim abad pertengahan.

<sup>169</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Durs...*, h. 49

<sup>170</sup> Rony Wijaya, *Abdurrahman Wahid*, [www.bio.or.id](http://www.bio.or.id)>Presiden, diakses pada Kamis, 7 Pe21ari 2019 pukul 08.35 WIB

<sup>171</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.52.





mengganggu baginya sehingga dia harus mengulang kembali pelajarannya. Ini menyebabkan ia gagal memperoleh ijazah dari universitas Al Azhar, tetapi kesedihannya karena kegagalan dalam ujian terobati dengan pertunangannya dengan Nuriyah, gadis yang dicintainya. Pada tahun itu juga, tahun 1966 Gus Dur mendapatkan tawaran beasiswa dari universitas Baghdad di Irak. Tentunya tawaran ini merupakan kesempatan baik, jadi meskipun dia tidak mendapatkan ijazah dari universitas Al Azhar, tetapi dia tetap dapat mendapatkan ijazah dari universitas lain, masih di Timur Tengah. Ia pun meneruskan pendidikannya di Baghdad.<sup>176</sup>

Berbeda dengan ketika berada di Kairo, di Baghdad Gus Dur mengikuti pelajarannya dengan tekun dan disiplin. Kebiasaan indisipliner yang ditunjukkannya ketika di universitas Al Azhar, Kairo, yang memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan pendidikannya, benar-benar memberikan pelajaran berharga buatnya. Di Baghdad jadwal Gus Dur lenih padat dan lebih ketat dibandingkan dengan ketika berada di Kairo, tetapi Gus Dur masih tetap menekuni hobinya membaca bahkan menonton film di bioskop. Di samping itu, Gus Dur juga bekerja dari pukul 11.00 – 14.00 di kantor Ar-Rahmadani, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang impor tekstil dari Eropa dan Amerika sebagai penulis dan penerjemah surat-menyurat.<sup>177</sup>

Selama tiga tahun berada di Baghdad, Gus Dur juga belajar bahasa Perancis di Pusat Kebudayaan Perancis di kota itu, bahasa yang sebenarnya sudah mulai dipelajari Gus Dur secara otodidak ketika di Kairo. Gus Dur memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Perancis itu berawal dari pertemuannya dengan seorang guru bahasa Perancis di Pusat Kebudayaan Perancis di sebuah pesta. Guru tersebutlah yang menawarkan Gus Dur untuk belajar di situ. Tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Gus Dur. Penguasaan Gus Dur terhadap beberapa bahasa asing, seperti Belanda, Perancis, Arab dan bahasa lain itu yang membuat Gus Dur menguasai buku-buku berbahasa asing dan menunjukkan kapasitas intelektualnya yang tidak bisa dibilang rendah, bahkan sangat cerdas.<sup>178</sup> Kecerdasannya inilah yang nanti selalu dijadikan alasan oleh orang-orang yang mengenal Gus Dur dengan baik terutama kalangan NU untuk membela ungkapan-ungkapan Gus Dur yang terkesan *nyeleneh*.

Gus Dur adalah tipe orang yang aktif. Meskipun ia kuliah sambil bekerja, bahkan juga menulis untuk majalah, Gus Dur juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dengan jabatannya itu, Gus Dur terus

8

<sup>176</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.94-111

<sup>177</sup> Greg Barton, *Biography Gus Dur...*, h. 104

<sup>178</sup> Gus Dur merupakan sosok yang memiliki berbagai potensi, kecerdasan, kemampuan dan penguasaan berbagai bidang: Keagamaan, Kesenian, budaya, sosial, politik, ekonomi, termasuk spiritual dan tasawuf. Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.105

berkorespondensi dengan para mahasiswa Indonesia di seluruh Timur Tengah, dan kadang-kadang mengunjungi mereka. Gus Dur dan juga para pelajar Indonesia yang berada di Timur Tengah tersebut juga terus memantau perkembangan di tanah air yang saat itu dipimpin oleh Soeharto.<sup>179</sup>

Ketika berada di Baghdad itulah Gus Dur menikah dengan Nuriyah pada tahun 1968 yang pernikahan itu sendiri tidak dihadiri oleh Gus Dur karena ketiadaan biaya dan waktu untuk pulang ke tanah air. Gus Dur diwakili oleh kakeknya, Bisri Syansuri. Selama berada di Baghdad Gus Dur juga menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Setelah menamatkan pendidikannya di universitas Baghdad, Gus Dur pergi ke Belanda dengan tujuan melanjutkan pendidikan di universitas Leiden pada tahun 1970. Sayangnya ijazahnya dari universitas Baghdad kurang diakui sehingga dia gagal meneruskan pendidikan di negara yang dia idam-idamkan. Akhirnya dia memutuskan pulang ke tanah air setelah mengunjungi Jerman dan Prancis pada tahun 1971.<sup>180</sup>

Gus Dur kembali ke Jakarta pada tanggal 4 Mei 1971, dan pada bulan September 1971 pesta pernikahan Gus Dur dan Nuriyah dilangsungkan. Setelah itu mereka tinggal di kampung halaman Gus Dur, Jombang. Profesi pertama yang digelutinya adalah guru dan kemudian menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Tebuireng, Jombang. Sementara itu di Jakarta Gus Dur telah bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat, sehingga Gus Dur terpaksa harus bolak-balik Jakarta-Jombang.<sup>181</sup>

LP3ES adalah LSM yang didanai oleh German Neumann Institute dan kemudian mendapat bantuan dari Yayasan Ford. Bagi para intelektual muda, terutama yang berasal dari kalangan Islam progresif dan kaum sosial demokrat, seperti Dawam Raharjo, Adi Sasono, Aswab Mahasin, dan Gus Dur sendiri, lembaga ini sangat menarik. Bagi Gus Dur pribadi ketertarikan itu karena lembaga ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap dunia pesantren dan adanya upaya untuk menggabungkannya dengan pengembangan masyarakat.<sup>182</sup>

Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1974, Gus Dur menjadi guru di pesantren tempat dia menuntut ilmu dulu, yaitu pesantren Tambakberas, Jombang. Pamannya, K.H. Yusuf Hasyim juga memintanya untuk menjadi sekretaris pesantren Tebuireng. Satu tahun kemudian ia juga menjadi guru

<sup>179</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.92

<sup>180</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.109 - 111

<sup>181</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 113 - 115

<sup>182</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.114



kitab Al-Hikmah. Pada tahun 1977 Gus Dur mengajar di universitas Hasyim Asyari dan diberi jabatan sebagai dekan fakultas Politik dan Kepercayaan. Dengan posisinya sebagai sekretaris, Gus Dur mulai sering mendapat undangan sebagai narasumber di forum-forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Aktivitasnya di pesantren dan sebagai narasumber di sejumlah forum memang bukan aktivitas yang berkaitan dengan politik, tetapi tulisan-tulisannya tentang politik mulai mewarnai jagat pemikiran di negeri ini.<sup>183</sup>

Sampai masa-masa ini Gus Dur belum terlibat dengan gerakan politik bahkan di NU pun tidak, padahal organisasi itu didirikan oleh kakeknya. Kakeknya Bisri Syansuri sampai dua kali memintanya untuk bergabung tetapi ditolaknya, baru pada kali ketiga Gus Dur menerima tawaran untuk bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU.<sup>184</sup>

8 Prestasi penting LP3ES salah satunya adalah diterbitkannya majalah Prisma yang selama bertahun-tahun menjadi sebuah jurnal ilmu sosial utama di negeri ini dan Gus Dur menjadi salah satu kontributornya. Pekerjaannya sebagai kontributor menyebabkan sering berkeliling pesantren di seluruh Jawa yang membuatnya sangat prihatin dengan kemiskinan yang pada umumnya dialami oleh pesantren. Sebenarnya Gus Dur juga berniat untuk melanjutkan pendidikan ke universitas McGill di Kanada, tetapi niat itu dia urungkan karena merasa lebih bertanggungjawab untuk mengembangkan pesantren yang dia lihat sangat memprihatinkan, bukan hanya karena nilai-nilai pesantren yang semakin luntur tetapi juga karena kemiskinan yang pada umumnya melanda pesantren.<sup>185</sup>

Ketika bekerja di majalah Prisma, Gus Dur terus mengembangkan bakat menulisnya. Sebagai seorang jurnalis, artikel yang ditulisnya diterima dengan baik oleh masyarakat dan ia mulai mengembangkan reputasinya sebagai komentator sosial. Saat-saat inilah tulisan-tulisan Gus Dur yang memuat pemikirannya mulai dikenal. Gus Dur juga menjadi jurnalis di majalah Tempo dan koran KOMPAS. Gus Dur mulai sering mendapat undangan untuk menjadi narasumber pada seminar dan kuliah umum yang mengharuskannya bolak-balik Jakarta-Jombang. Kesuksesannya sebagai jurnalis dan komentator sosial tidak membuatnya merasa cukiup dalam hal finansial sehingga dia menambah penghasilan dengan cara menjual kacang dan mengantar es.<sup>186</sup>

Karir menulis Gus Dur terus berkembang. Sementara itu sebagai cucu pendiri NU, Gus Dur juga akhirnya berkecimpung di NU, organisasi

21

<sup>183</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.121-124

<sup>184</sup> <https://www.merdeka.com/abdurrahman-wahid/>, diakses pada Kamis, 7

Pebruari 2018 pukul 08.33

<sup>185</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 114-115.

<sup>186</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.120-121

yang telah didirikan sekaligus dibesarkan oleh kakek dan ayahnya. Pada tahun 1980, ia ditunjuk menjadi salah seorang Katib Awwal PBNU sampai tahun 1984, dan pada tahun 1984 kedudukannya telah naik menjadi ketua Dewan Tanfidz NU.<sup>187</sup>

Bergabung dengan NU, Gus Dur mendapat pengalaman politik pertamanya ketika ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu partai Islam yang merupakan fusi dari empat partai Islam termasuk NU dalam Pemilu Legislatif tahun 1982. Ketika menjabat sebagai ketua Dewan Tanfidz NU inilah karir politiknya semakin naik dan Gus Dur benar-benar menjadi salah seorang yang sangat dikenal bahkan pengaruhnya pun tidak sedikit di negeri ini, apalagi Gus Dur sering sekali melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial.

Jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU mulai membawa Gus Dur ke atas panggung nasional. Posisi Ketua Umum PBNU di tangannya menjadi sesuatu yang amat strategis.<sup>188</sup> Pada tahun 1987 Gus Dur menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia, dan pada tahun 1989 Gus Dur berhasil menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Dalam pada itu jabatan sebagai ketua Dewan Tanfidz NU tetap dipegangnya sampai Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999-2001.<sup>189</sup>

Gus Dur diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tanggal 3-20 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum tersebut MPR melakukan pemilihan presiden dengan tiga orang calon; Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sendiri. Gus Dur sebenarnya adalah calon alternatif yang diusung oleh partai-partai berbasis Islam Poros Tengah yang diketuai oleh Amien Rais mengingat persetujuan antara kelompok B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri semakin keras. Habibie sendiri akhirnya mengundurkan diri karena pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden ditolak pada tanggal 19 Oktober 1999. Kedudukan Habibie akhirnya digantikan oleh Yusril Ihza Mahendra, tetapi Yusril pun akhirnya mengundurkan diri juga.<sup>190</sup>

Dalam sidang yang dinilai paling demokratis sejak Konstituante 1957 tersebut, Gus Dur terpilih dengan dukungan 373 suara, sementara

<sup>187</sup> Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum Tanfidzyah pertama kali pada Mukhtamar Situbundo pada tahun 1984. Lihat Irawan Suhanda(Ed), *Gus Dur Santri Par Excellence*,( Jakarta : Kompas, 2000),. H. 171 8

<sup>188</sup> A. Effendy Choiri, dkk (ed.), *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur* (Jakarta; Pensil-324, 2010), h. 131 15

<sup>189</sup> <https://www.merdeka.com/abdurrahman-wahid>, diakses pada hari Kamis, 7 Pebruari 2019 pukul 08.35 wwib

<sup>190</sup> Agus N. Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 53

Megawati Soekarnoputri memperoleh 313 suara dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya. Lima suara dinyatakan abstain, sebagaimana diberitakan koran KOMPAS edisi 21 Oktober 1999.<sup>191</sup>

Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden, banyak harapan yang disandarkan di pundaknya. Di mata banyak pengamat Gus Dur adalah sosok yang sangat cerdas, memiliki visi kenegaraan yang cemerlang, dan kredibilitas tinggi dalam hal perjuangan menegakkan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Gus Dur juga diharapkan akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, terutama ancaman disintegrasi. Sayangnya harapan yang tinggi tersebut tidak terwujud. Alih-alih membuat negara menjadi jauh lebih baik dan demokratis setelah era kejatuhan Soeharto, pemerintahan Gus Dur bahkan dinilai oleh para pesaingnya bukan hanya gagal memulihkan kehidupan ekonomi, tetapi juga gagal menciptakan kehidupan stabilitas sosial politik sebagaimana diharapkan.

Bukan hanya gagal menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga banyak kebijakan Gus Dur selaku presiden yang dinilai kontroversial dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian politik yang semakin mempersulit upaya pemulihan ekonomi, konflik antar elit politik, indeks harga saham yang bergerak fluktuatif, dan investasi (asing) yang tidak kunjung tiba, ditambah dengan berbagai tindak kekerasan dan kerusuhan dan ancaman disintegrasi sosial di beberapa wilayah. Koran Tempo bahkan mengatakan, sebagai manager Abdurrahman Wahid bukannya menghasilkan solusi, malah menjadi akar permasalahan itu sendiri.<sup>192</sup>

Kekecewaan masyarakat semakin banyak terhadap presidennya. Harapan bahwa Gus Dur yang latarbelakang politiknya jauh dari birokrasi akan membawa banyak perubahan, tetapi malah pemerintahannya semakin terjebak ke dalam jaringan kesulitan yang sebagiannya timbul justru karena tindakan Gus Dur sendiri. Kesalahan besar yang dianggap dilakukan Gus Dur diantaranya adalah keinginannya untuk melakukan normalisasi hubungan dagang dengan Israel, negara yang menjajah Palestina, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, ide pencabutan TAP MPRS XXV 1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia, pembubaran BAKORSTANAS dan mekanisme penelitian khusus (litsus), proyek desakralisasi lembaga kepresidenan, supremasi sipil hingga seringnya melakukan reshuffle kabinet.<sup>193</sup>

<sup>191</sup> Mudjia Rahardjo, *Mengapa Gus Dur Jatuh? Suatu Kajian Bahasad dalam Wacana Politik*, (Surabaya: Lutfiansah Mediatama, 2005), h. 2.

<sup>192</sup> Mudjia Rahardjo, *Mengapa Gus Dur Jatuh...*, h. 4

<sup>193</sup> Mudjia Rahardjo, *Mengapa Gus Dur Jatuh...*, h. 5



Kebijakan-kebijakan yang dianggap salah itu masih ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya, seperti “biang kerok dari banyak persoalan akhir-akhir ini ada di MPR/DPR; sekarang banyak intelektual bergelar MA tetapi bukan Master of Arts melainkan maling; DPR kok seperti Taman Kanak-kanak; DPR memble aja”, dan lainnya.<sup>194</sup> Akibat itu semua, apalagi modal politik Gus Dur juga tidak begitu besar di DPR, tidak adanya kompromi politik Gus Dur dengan faksi-faksi di DPR, akhirnya pemerintahan Gus Dur dijatuhkan lewat Sidang Istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001.<sup>195</sup>

Gus Dur terpilih menjadi Presiden pada hari Rabu, 20 Oktober 1999 di akhir Sidang Umum MPR RI dan berakhir pada tanggal 23 Juli melalui Sidang Istimewa MPR RI.<sup>196</sup> Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI hanya sekitar 20 bulan. Lewat kasus Buloggate dan Bruneigate Gus Dur tidak bisa lagi mempertahankan kursi presidennya. Dekrit yang sempat dia keluarkan yang berisi; (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR malah memperburuk kedudukannya. MPR justru memberhentikannya secara resmi pada tanggal 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati sebagai Presiden RI.<sup>197</sup>

Berhentinya Gus Dur sebagai presiden tidak membuat Gus Dur mati langkah. Pada tahun 2002 Gus Dur bahkan masih diberi kepercayaan menjadi penasehat Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, dan pada tahun 2003 sebagai penasehat pada Gerakan Moral rekonsiliasi Nasional. Pada tahun 2004 bahkan Gus Dur masih memiliki ambisi untuk maju kembali dalam pemilihan presiden, namun oleh KPU ia dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan.<sup>198</sup>

Dengan keterbatasan yang dimilikinya tidak menyebabkan Gus Dur menjadi pasif. Pada bulan Agustus 2005 bersama dengan beberapa politisi terkemuka tanah air, diantaranya Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, Gus Dur membentuk Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu dan mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>199</sup>

<sup>194</sup> Mudjia Rahardjo, *Mengapa Gus Dur Jatuh...*, h. 5

<sup>195</sup> Gus Dur dimakzulkan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001 setelah sebelumnya Gus Dur mengeluarkan Dekrit. Justru dieluarkannya Dekrit menuai banyak protes. Gus Dur dianggap dictator dan tiran. Lihat Abd.Rahman. *Gitu Aja Kok Repot*, (Yogyakarta: PALAPA, 2014), h. 49-50

<sup>196</sup> Mudjia Rahardjo, *Mengapa Gus Dur Jatuh...*, h. 12

<sup>197</sup> Dekrit Gus Dur

<sup>198</sup> <https://www.merdeka.com/abdurrahman-wahid/>, diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 pukul 08.33 wwib

<sup>199</sup> Greg Barton

Pada tahun 2009 Gus Dur mulai diserang penyakit. Beberapa kali masuk rumah sakit akhirnya Gus Dur meninggal pada hari Rabu, 30 Desember 2009 pukul 18.45 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta akibat komplikasi penyakit ginjal, diabetes, stroke, dan jantung.<sup>200</sup>

## **B. Latar Belakang Eksternal**

Ketika Gus Dur lahir Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar menyisakan kesengsaraan yang bahkan sampai sekarangpun masih terasa dampaknya. Masa-masa kecil yang dilewati Gus Dur dengan melihat kenyataan bahkan merasakan sendiri bagaimana dia bersama keluarganya mengungsi tentunya akan diingat seumur hidupnya. Meskipun dalam hal pendidikan tidak menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik dan mencukupi. Tentu saja itu semua karena dia termasuk golongan priyayi yang di masa penjajahan Belanda memang diberi kesempatan dan perlakuan lebih dibanding masyarakat biasa (masyarakat bawah), meskipun tetap saja di bawah orang-orang Belanda sebagai kelas satu, dan keturunan asing sebagai golongan kedua.<sup>201</sup>

Gus Dur lahir saat Indonesia belum lagi merdeka. Ketika Gus Dur lahir, bangsa Indonesia termasuk ayah dan kakeknya sedang berjuang sepenuh tenaga dengan peralatan dan senjata yang sangat sederhana merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Perjuangan panjang selama kurang lebih 3,5 abad itu baru berbuah ketika bangsa Indonesia atas nama Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaannya di masa-masa Jepang yang saat itu menjajah Indonesia sedang kehilangan kekuasaannya setelah Amerika melakukan pengeboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Momen penting itulah yang dipergunakan oleh Soekarno-Hatta dan para pemuda untuk memproklamkan kemerdekaannya.

Jalan panjang untuk mencapai kemerdekaan diwarnai perkembangan politik yang penting dalam membangun negara yang adil, makmur dan sejahtera. Demokrasi yang dianggap merupakan sistem terbaik yang pada umumnya dipraktikkan oleh sebagian besar negara dunia dengan segera menjadi pilihan bangsa Indonesia.

<sup>200</sup> Irwan Suhada (ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: KOMPAS, 2010), h. x

<sup>201</sup> Pada masa itu penduduk Indonesia terbagi ke dalam tiga kelas. Pembagian kelas ini tentu saja menurut pemerintah Hindia Belanda; kelas satu adalah mereka, orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia; kelas dua adalah mereka-mereka keturunan asing yang tinggal menetap di Indonesia termasuk keturunan China dan Arab maupun keturunan asing yang lain, sementara kelas terendah yang sering disebut inlander oleh pemerintah Hindia Belanda adalah orang Indonesia asli pemilik sesungguhnya bumi Indonesia, yang dijajah oleh Belanda.

Ada beberapa bentuk demokrasi yang bisa dijadikan sebagai contoh, tetapi belum tentu itu juga baik bagi bangsa Indonesia yang memiliki latarbelakang berbeda dengan negara-negara tersebut. Demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara Barat pada umumnya adalah demokrasi liberal, tetapi bentuk ini belum tentu cocok bagi bangsa Indonesia. Belum lagi pertentangan antar kelompok. Kelompok Islam yang diwakili oleh kaum ulama dan masyarakat yang menginginkan berlakunya simbol-simbol Islam dalam kehidupan negara secara resmi dan kelompok nasionalis yang merasa penetapan Islam sebagai simbol resmi negara justru tidak cocok bagi bangsa Indonesia yang sangat plural, meskipun umat Islam adalah mayoritas.<sup>202</sup>

Kompromipolitik antara dua kelompok tersebut sebenarnya sudah menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat Pancasila sebagai falsafah negara. Beberapa rumusan dasar negara sebelumnya sudah diusulkan oleh beberapa tokoh, seperti Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno, sampai akhirnya disepakati Pancasila<sup>51</sup> seperti yang dikenal sekarang. Atas desakan kelompok Islamis, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai lembaga yang ditugasi mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk rumusan UUD menambahkan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya pada sila pertama Pancasila. Disepakati pula bahwa rumusan Pancasila ini akan menjadi bagian Pembukaan<sup>115</sup> UUD 1945. 115

Tujuh kata tambahan pada sila pertama Pancasila dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dimana salah satunya adalah A.A. Maramis sebagai tokoh yang mewakili rakyat Indonesia bagian Timur. A.A. Maramis adalah satu-satunya non muslim di keanggotaan PPKI tersebut. A.A. Maramis sendiri tidak keberatan dengan penambahan tujuh kata tersebut, sehingga ketika pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi saat UUD 1945 disahkan, ketujuh kata itu dihapus, kelompok Islamis merasa sangat kecewa.<sup>203</sup>

Penghapusan ketujuh kata itu dijelaskan oleh Muhammad Hatta karena ditolak oleh masyarakat Indonesia bagian Timur yang mayoritas non muslim. Demi persatuan seluruh rakyat Indonesia, maka sekali lagi kalangan Islam berjiwa besar untuk menerima keputusan tersebut. Nahdhatul Ulama

<sup>202</sup> Umat Islam memang mayoritas, tetapi menempatkan Islam sebagai asas formal negara justru akan merusak persatuan bangsa. Bagi Gus Dur kelompok mayoritas maupun minoritas tidak menyebabkan kelompok mayoritas memiliki privilege atau keistimewaan untuk menjadikan agamanya sebagai asas formal negara, seperti yang dikatakannya. “Indonesia bukan negara agama tapi negara beragama. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, jadi tolong hargai lima agama yang lain”.

<sup>203</sup> Demokrasi

sebagai organisasi Islam sebenarnya menginginkan mempertahankan ketujuh kata tersebut tetap tercantum di dalam sila pertama Pancasila, tetapi Wahid Hasyim percaya bahwa mempertahankannya justru hanya akan membuka peluang bagi tumbuhnya sektarianisme dalam perpolitikan Indonesia. Kelak ketika Gus Dur juga berprinsip sama seperti yang tampak dalam tulisan-tulisan maupun pidatonya, dia mengatakan bahwa dia meneruskan perjuangan ayahnya.<sup>204</sup>

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas negeri ini memiliki peran yang tentunya lebih banyak dibanding umat agama lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah sumbangan terbesar umat Islam Indonesia yang di dalamnya berperan para ulama dari berbagai organisasi.

Umat Islam Indonesia jauh sebelum merdeka sebenarnya telah terpolarisasi ke dalam dua kelompok (aliran): tradisional dan modernis. Polarisasi kepada dua kelompok ini merupakan dampak dari gagasan-gagasan pembaharuan oleh para pembaharu muslim yang dimulai oleh Muhammad Abduh di Mesir di awal abad ke-20. Di Indonesia respon terhadap pembaharuan memunculkan Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Al-Irsyad sebagai golongan modernis dan golongan tradisional yang banyak tumbuh di pesantren-pesantren.

Gerakan modernis muncul sebagai respon terhadap kelompok tradisional yang dianggap menyebabkan banyaknya praktik-praktik keagamaan yang tidak benar di kalangan masyarakat, seperti takhayul, bid'ah dan churafat (TBC). Jargon gerakan modernis “kembali kepada Alquran dan Sunnah” merupakan kritik terhadap kalangan pesantren yang terlalu banyak bergantung kepada pendapat para ulama, tidak langsung merujuk kepada kedua sumber utama ajaran Islam: Alquran dan Hadis.

Kritik lain kalangan modernis terhadap kalangan tradisional (pesantren) adalah pemikiran kalangan pesantren dianggap “jumud” dan “menutup pintu ijtihad”, ditambah lagi dengan kecenderungan menutup diri untuk hanya menerima satu mazhab fiqih, yaitu mazhab Imam Syafi'i, dan satu mazhab aqidah yaitu As'ari-Maturidi. Praktik tasawuf yang lazim dilakukan di pesantren juga dianggap berkontribusi terhadap kemunduran umat Islam saat itu. Untuk melawan semua itu, gerakan modernis mengampanyekan “membuka kembali pintu ijtihad seluas-luasnya”.<sup>205</sup>

Kritik kalangan modernis di atas tentu saja tidak didiamkan begitu saja oleh kalangan pesantren (tradisional). Banyak pembelaan secara intelektual yang mereka lakukan, seperti melayani perdebatan, meyakinkan

<sup>204</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 79

<sup>205</sup> Tiar Anwar Bachtiar, *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia Kritik terhadap Islam Liberal dari H.M. Rasjidi sampai INSIST*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 1



jama'ah akan kebenaran ajarannya, dan sebagainya, tetapi karena mereka tidak menguasai media tetap saja sumber-sumber literasi modern dikuasai oleh kelompok modernis.

Pertahanan kalangan pesantren terhadap gencarnya kritik yang dilakukan oleh kelompok modernis justru membuahkan hasil yang baik, yaitu lahirnya Nahdhatul Ulama pada tahun 1926, disusul beberapa tahun kemudian dengan kelahiran beberapa organisasi serupa yang juga berasal dari pesantren (tradisionalis muslim), seperti Persatuan Umat Islam (PUI) di Majalengka, Jawa Barat, Al-Washliyah di Sumatera Utara, Persatuan Tarbiyah Islam (Pertidi Sumatera Barat, Nahdhatul Wathan (NW) di Nusa Tenggara Barat, dan Al-Khairat di Sulawesi Tengah.<sup>206</sup>

Meskipun berbeda dalam pandangan keagamaan, tetapi karena akar pokok (*ushul*) nya sama, yaitu sama-sama menerima kebenaran Alquran dan Hadis, kedua kelompok ini tidak sulit untuk bersatu dan mencari titik temu dalam hal-hal yang prinsip dan fundamental, terutama ketika dorongan politik muncul. Kohesi diantara kedua kelompok ini cepat terjadi, sebaliknya bisa menjadi sangat mudah putus ketika kepentingannya berbeda.

Beberapa momen sejarah memperlihatkan bahwa kedua kelompok ini pernah dipersatukan dalam Kongres-kongres Al-Islam (Umat Islam) sejak tahun 1925 yang digagas oleh Sarekat Islam. Pada Kongres Al-Islam pada tahun 1937, baik kelompok modernis maupun tradisionalis menyepakati berdirinya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia sebagai wadah kaum muslimin. Pada tahun 1945 MIAI resmi menjadi satu-satunya partai politik umat Islam dengan nama Majelis Syuro Muslimim Indonesia (Masyumi).<sup>207</sup>

Meskipun pada tataran politik kedua kelompok yang bertolakbelakang itu bisa bersatu, namun tidak dapat dipungkiri perbedaan keduanya tetap mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia bahkan sampai sekarang. Sejak Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1952 organisasi keagamaan Islam tampaknya terwakili Nahdhatul Ulama (tradisionalis) yang dipertentangkan dengan Muhammadiyah (modernis), meskipun sebenarnya mengelompokkan Nahdhatul Ulama sebagai tradisionalis perlu dipertanyakan karena justru pada beberapa hal, NU tampaknya lebih modernis dibandingkan Muhammadiyah, terutama setelah Gus Dur memimpin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Gus Dur terhadap NU, terutama kalangan muda begitu besar, begitu juga pengaruh NU terhadap Gus Dur.

Pada bidang politik terutama pada penerapan demokrasi sebagai sistem terbaik yang dipercaya dan disepakati oleh bangsa Indonesia yang diwakili oleh tokoh-tokoh pemuda, pun diwarnai oleh beberapa kali

<sup>206</sup> Tiar Anwar Bachtiar, *Pertarungan Pemikiran...*, h. 2

<sup>207</sup> Tiar Anwar Bachtiar, *Pertarungan Pemikiran...*, h. 3



perubahan. Tampak sekali bahwa bangsa ini masih mencari identitasnya, karenanya beberapa kali terjadi perubahan bentuk demokrasi, dari Demokrasi Presidensiil ke Demokrasi Parlementer, kemudian berubah menjadi Demokrasi Terpimpin, dan akhirnya kembali ke Demokrasi Presidensiil.

Demokrasi Parlementer menggantikan sistem Presidensiil yang telah disepakati di awal terbentuknya negara Indonesia dan jelas-jelas tercantum di dalam UUD 1945 masih pada awal terbentuknya negara ini dan masih berusia sekitar tiga bulan. Perubahan sistem ini ditandai dengan keluarnya Maklumat No X Wakil Presiden pada tanggal 3 Nopember 1945.<sup>208</sup> Dasar pemikiran Maklumat ini adalah dengan adanya banyak partai diyakini akan memperkuat upaya perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan.

Masa Demokrasi Parlementer merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Periode ini oleh Afan Gaffar disebutnya dengan periode *Representatif/Participatory Democracy*, dan Herbert Feith menamakannya dengan *Concitutional Democracy*. Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik bangsa Indonesia,<sup>209</sup> yang dibuktikan dengan:

Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, yang diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah dan menyebabkan bubarnya kabinet.

Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi karena berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol sosial. Akibatnya adala jatuhnya kabinet yang dianggap gagal menjalankan tugasnya.

Ketiga, kehidupan kepartaian dapat dikatakan memperoleh peluang besar untuk berkembang maksimal. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem multi partai, dengan hampir 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen pemimpin, pengurus maupun para pendukung partai. Campur tangan pemerintah bisa dikatakan sama sekali tidak ada.

<sup>208</sup> Pokok pikiran Maklumat tersebut adalah:

1. "Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratursegala aliran yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap, supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946". Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalam* 72 (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 11

<sup>209</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 13.

Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955 tetapi Pemilu ini adalah pemilu yang paling demokratis. Partai-partai politik memilih calonnya dengan bebas, dan kampanye dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Di samping itu pemilih juga bebas menggunakan hak pilihnya tanpa ada tekanan. Undang-undang Pemilu tahun 1953 adalah landasan berpijak yang sangat demokratis dan tidak memberi peluang kepada Panitia Pemilihan untuk membuat peraturan lebih lanjut. Sayangnya, Pemilu ini tidak berhasil melahirkan satu partai politik yang kuat, yang mampu membentuk eksekutif.

Kelima, masyarakat pada umumnya bisa merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 bisa terwujud dengan baik. Pers juga benar-benar bisa merasakan Kebebasan Pers karena tidak ada lembaga yang menghambat kebebasan itu, sehingga peran pers sebagai alat kontrol sosial bisa terwujud dengan baik padahal pers itu sendiri merupakan instrumen politik yang sangat efektif dari sejumlah partai politik. Beberapa partai politik yang besar justru memiliki surat kabar sendiri, seperti *Suluh Indonesia* yang kemudian dirubah namanya menjadi *Suluh Marhaen* yang merupakan milik Partai Nasional Indonesia (PNI); partai Sosialis Indonesia berafiliasi dengan harian *Pedoman*; Masyumi memiliki harian *Abadi*, Partai Komunis Indonesia adalah pemilik harian *Rakyat*.<sup>210</sup>

Meskipun masa Demorasi Parlemerter pada satu sisi menunjukkan terwujudnya demokrasi dengan baik setidaknya dengan bukti benar-benar terwujudnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan alat kontrol sosial yang bekerja dengan baik, tetapi ini malah mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan. Kabinet berkali-kali jatuh karena adanya mosi tidak percaya anggota parlemen. Situasi ini menyebabkan Soekarno sebagai Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden dan menyatakan Indonesia mengganti sistemnya menjadi sistem Demokrasi Terpimpin, dan partai politik dibatasi.

Bukan hanya dalam bidang politik Demokrasi Parlemerter yang diterapkan pada saat itu gagal. Bidang ekonomi juga tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, tingkat pendapatan perkapita rakyat tidak menjadi lebih baik. Memang sisa-sisa penjajahan masih sangat terasa, bahkan pemerintah kolonial Belanda masih mencoba untuk kembali menanamkan kuku penjajahannya. Kondisi ini dapat dipahami karena memang usia negara Indonesia masih sangat muda sementara kekayaannya sudah banyak dikuras oleh penjajah Belanda.

Kegagalan Demokrasi Parlemerter untuk membuat kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik menyebabkan presiden Soekarno mengambil

<sup>210</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia ...*, h. 13-15..

kebijakan merubah lagi sistem pemerintahannya menjadi Demokrasi Terpimpin<sup>211</sup>. Pada sisi yang lain banyaknya partai politik yang diharapkan membuat demokrasi terlaksana dengan baik ternyata menunjukkan kenyataan yang berbeda. Hal ini menyebabkan Soekarno kemudian membatasi jumlah partai hanya 10 (sepuluh) <sup>174</sup>hal dalam hal kepartaian sebenarnya UUD 1945 hanya menyatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (pasal 28). Sama sekali tidak ada pembatasan tentang jumlah partai politik, tetapi karena partai-partai yang banyak itu menurut Soekarno justru tidak menunjukkan hal yang positif, maka Maklumat Wakil Presiden No. X dikoreksi.

Perubahan-perubahan yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa Indonesia memang masih mencari bentuk demokrasi terbaik untuk diterapkan di Indonesia yang bukan hanya bertujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 tetapi sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan Indonesia asli seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Hatta.<sup>212</sup>

Ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1960, sekitar satu tahun setelah Dekrit Presiden, Soekarno menyampaikan perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia dan mengistilahkannya dengan tingkatan-tingkatan revolusi dengan membagi periodenya sebagai berikut:

Periode 1945-1950 adalah tingkatan *physical revolution*. Pada periode ini Indonesia merebut kekuasaan dari pihak imperialis dan

<sup>211</sup> Maklumat Wakil Presiden No. X berdampak menjamurnya partai-partai politik. Ada 40 partai politik yang terbentuk pada masa itu, tetapi keberadaannya bukannya memperbaiki sistem demokrasi Indonesia tetapi malah mengakibatkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak pernah bertahan lebih dari dua tahun. Hal ini membuat presiden Soekarno menetapkan Demokrasi Terpimpin, dengan alasan:

1. “Melihat dari segi keamanan nasional, demokrasi liberal justru menimbulkan banyak gerakan separatis yang membuat negara tidak stabil.
2. Melihat dari segi ekonomi, pergantian kabinet yang sering terjadi mengakibatkan berbagai program ekonomi yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat berjalan dengan baik.
3. Melihat dari segi politik, gagalnya konstituante merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.” Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1966 dengan keluarnya Supersemar.

<sup>212</sup> Bagi Hatta, demokrasi yang mestinya diterapkan di negeri yang dicintainya ini yang dia perjuangkan mati-matian kemerdekaannya adalah demokrasi yang bukan semata-mata ditransfer dari peradaban Barat sebagai pencipta dan pelopornya, tetapi justru harus berakar dari negerinya sendiri, dari pedesaan-pedesaan di Indonesia yang sejak lama telah memiliki nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan desanya, dan Minangkabau adalah contoh nyata untuk itu. Elly Warnisyah Harahap, *Demokrasi dalam Pemikiran Politik Mohammad Hatta*, tesis tidak dipublikasikan, h. 169

mempertahankannya dengan segenap jiwa raga meskipun dengan keterbatasan perbendaan (materiil). Periode ini adalah periode terbaik dimana seluruh rakyat bersatu dan memiliki dasar dan tujuan yang tegas-jelas untuk melenyapkan kekuasaan Belanda dari bumi Indonesia. Periode merebut dan mempertahankan kekuasaan ini adalah periode revolusi politik.<sup>213</sup>

Periode selanjutnya adalah periode 1945-1955 yang disebutnya dengan tingkatan *survival*, yang berarti “tetap hidup, tidak mati”. Pada periode ini rakyat Indonesia ternyata masih tetap tegak berdiri meskipun pada lima tahun sebelumnya “telah bertempur, menderita, berkorban-badaniah, lapar, kejar-kejaran dengan maut, dan badan penuh luka. Antara tahun 1950-1956 kita sembuhkanlah luka-luka itu, kita sulami mana yang bolong, kita tutup mana yang jebol, dan pada tahun 1955 kita dapat berkata, bahwa tertebuslah segala penderitaan yang kita alami dalam periodenya revolusi fisik”<sup>214</sup>. Demikian Soekarno dalam pidatonya.

Periode ketiga adalah periode 1955-sekarang (1960. pen), yaitu” *periode invesment: investment of human skill, material invesment, mental invesment*. Semua itu untuk *social constructions* untuk merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat. Investasi-investasi ini hanya dapat dilakukan dalam suatu suasana politik yang cocok, *favourable*, dan alam demokrasi liberal sama sekali tidak cocok untuk itu bahkan jahat; bahwa demokrasi liberal dus harus kita bongkar sama sekali; bahwa demokrasi terpimpin harus kita pancangkan teguh-teguh di atas puing-puingnya demokrasi liberal itu”.<sup>215</sup> Demikian ditambahkan Soekarno.

Dalam menjelaskan pentingnya Demokrasi Terpimpin, Soekarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin itu milik bangsa Indonesia. Revolusi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak merebut kemerdekaan sampai kemudian berhasil memperolehnya hanya bisa berlanhsung dan berakhir baik jika ada satu pimpinan revolusi yang revolusioner; satu ideologi dan konsepsi nasional yang revolusioner, jelas, tegas dan terperinci, yaitu Manifesto Politik dan USDEK.<sup>216</sup>

Dari pidato Soekarno ini tampak jelas tujuannya untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin. Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya tidak cocok bagi pertumbuhan investasi di segala bidang yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, Demokrasi Terpimpin adalah satu-satunya jalan bagi merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat.

<sup>213</sup> Iwan Siswo (Peny.), *Panca Azimat Revolusi Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato Sukarno 1926-1966*, Jilid II, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014)., h. 3

<sup>214</sup> Iwan Siswo (Peny.), *Panca Azimat ...*,h. 3-4.

<sup>215</sup> Iwan Siswo (Peny.), *Panca Azimat ...*,h. 74

<sup>216</sup> Iwan Siswo (Peny.), *Panca Azimat ...*,h. 90



Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan sebagai praktik pertama berdemokrasi di negeri ini yang ternyata gagal. Kegagalan kedua bentuk demokrasi tersebut bukan karena keduanya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kegagalan Demokrasi Parlementer bukan karena sifatnya yang ke”Barat-barat”an dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena Demokrasi Terpimpin yang menurut Soekarno merupakan “demokrasi asli” Indonesia juga gagal karena justru praktik-praktik politik yang terjadi di dalamnya sungguh-sungguh tidak demokratis, bahkan cenderung otoritarian.

Dikotomi “Barat” dan “asli” yang menunjukkan nilai-nilai kultural tertentu yang dilekatkan pada kata demokrasi ternyata tidak substansial, dengan alasan: *Pertama*, Demokrasi Parlementer yang dianggap berasal dari Barat ternyata lebih demokratis daripada Demokrasi Terpimpin. *Kedua*, dikotomi “Barat” dan “asli” sebenarnya lebih bersifat slogan politik ketimbang berisi suatu struktur pemikiran yang substantif, karena ternyata bukan saja tidak ada nilai demokrasi yang benar-benar bersifat “asli”, tetapi juga apologi tentang itu seringkali sangat kabur dan bias kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa “konsep demokrasi bernilai dan menjadi obsesi masyarakat justru karena ia bersifat universal, tidak dibatasi serta dibayangi oleh relativisme atau determinisme kultural tertentu”.<sup>217</sup>

Peristiwa-peristiwa sosial politik yang terjadi sepanjang tahun 1945-1950 seperti yang diungkapkan di atas adalah masa-masa revolusi dimana Gus Dur kecil bersama keluarga terutama ayahnya mengalami banyak kesulitan, penderitaan dan ketidakstabilan, sama seperti pada umumnya rakyat Indonesia. Gus Dur kecil telah menyaksikan perjuangan ayah dan ibunya juga keluarganya yang lain untuk menyambung hidup di tengah-tengah suasana penuh ketidakpastian. Dia juga tahu ayahnya sering tidak berada di rumah karena bersembunyi dari incaran Belanda padahal Indonesia sudah merdeka.

Selanjutnya Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soekarno di era Orde Lama, ayah Gus Dur, Wahid Hasyim adalah salah seorang pejabat negara. Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama sejak tahun 1948 dan menduduki jabatan itu dalam lima kabinet dan melepaskannya pada bulan April 1952.<sup>218</sup> Kedudukan ayahnya itu menyebabkan Gus Dur sering bertemu dengan banyak orang hebat: tokoh nasionalis, pemikir dan pejabat negara. Dia sudah mengenal Munawir Sjadzali yang nantinya juga akan menjadi Menteri Agama seperti ayahnya, dan Tan Malaka, tokoh sosialis di negeri ini, dan Gus Dur belakangan banyak terinspirasi dengan ajaran-ajaran sosialis, entah karena ada pengaruh Tan Malaka atau tidak.

<sup>217</sup> 8amsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia....*, h. 183.

<sup>218</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur....*, h. 39



Peristiwa-peristiwa sosial politik yang terjadi di era 1940-1950-an di Indonesia tidak berpengaruh secara langsung terhadap Gus Dur yang lahirnya pada tahun 1940, sebelum Indonesia merdeka. Masa kanak-kanak sampai dengan remaja yang dilewati Gus Dur di tanah air memang menorehkan banyak peristiwa politik, tetapi tentunya inipun belum begitu berpengaruh pada Gus Dur. Gus Dur kecil sampai remaja dengan kapasitas pemikiran sesuai dengan umurnya belum begitu memahami semua hal itu, tetapi tidak diragukan bahwa hal itu dalam periode kehidupannya selanjutnya sedikit banyak berpengaruh terhadap pemikiran dan sikapnya.

Di era 1950-an peristiwa-peristiwa sosial politik di tanah air ditandai dengan pertentangan Soekarno dengan partai politik Islam. Tokoh-tokoh penting Masyumi semakin keras mengkritik gaya kepemimpinan Soekarno yang otokratik. Puncaknya adalah ketika Soekarno mengumumkan pembubaran konstituante dan kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959. Saat inilah Soekarno mulai menerapkan Demokrasi Terpimpin yang menurutnya justru lebih baik dan sesuai dengan nilai asli demokrasi Indonesia, dan akan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>219</sup>

Masyumi menyadari bahwa ketetapan kembali ke UUD 1945 akan menyebabkan pupusnya harapan mereka untuk menghasilkan suatu undang-undang dasar yang mengakui peran dan otoritas Islam dalam negara. Sebaliknya, NU yang telah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 justru bersedia mengikuti kehendak pemerintahan Soekarno sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup sebagai organisasi politik, berbeda dengan Masyumi yang akhirnya dibubarkan oleh Soekarno.<sup>220</sup> Kelak ketika Gus Dur sudah kembali ke tanah air sesudah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad, ia sering mengkritik pemerintah yang saat itu sudah dipimpin oleh Soeharto, berbeda dengan NU yang dekat dengan pemerintah Soekarno.

Ketika Gus Dur remaja, Gus Dur sudah mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran asing. Kecintaannya terhadap buku membuatnya membaca buku-buku bahkan yang jarang dibaca oleh orang-orang yang memiliki latarbelakang pendidikan pesantren sepertinya. Gus Dur bahkan

---

<sup>219</sup> “Demokrasi terpimpin “loro-loroning-atunggal”, berarti: ada demokrasinja dan ada terpimpinja, ada terpimpinja dan ada demokrasinja, oleh karena ia adalah demokrasi pelaksana daripada A.P.R., yaitu Amanat Penderitaan Rakjat. Ia harus diharmonisasi dengan A.P.R., ia adalah satu bagian mutlak, satu integrerend deel daripada pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat”. Lihat Iwan Siswo (Peny.) *Panca Azimat Revolusi: Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato Sukarno 1926-1966*. Jilid II ( Jakarta : Keputusan Populer Gramedia, 2014), h.191

<sup>220</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur....*, h. 81

tertarik dengan pemikiran Marxisme. Gus Dur sudah membaca <sup>20</sup> *Das Kapital* karya Karl Marx, dan *What is to be Done* karya Lenin.<sup>221</sup>

Pada sisi yang lain meskipun Gus Dur tertarik pada ide-ide Marxis tetapi dia juga terganggu oleh antagonisme Marxisme dengan agama. Tidak mengherankan karena pendidikan yang dia dapatkan sejak kecil di keluarga dan lingkungan pendidikannya mengajarkannya untuk memahami dan meyakini bahwa agama (Islam) justru membuat seseorang dekat pada Tuhannya dan bahkan menawarkan penyelesaian-penyelesaian persoalan kehidupan. Karena itu meskipun ide-ide Marxis mulai populer di kalangan aktifis politik muslim di Indonesia pada tahun 1960-an, Gus Dur tetap berharap dalam Islam ia dapat memperoleh jawaban bagi masalah-masalah ketidakadilan, kemiskinan, dan penindasan. Oleh karena itu ia mulai membaca karya-karya intelektual muslim, seperti Sayyid Qutb, Said Ramadan, Hasan al-Banna, dan juga tertarik organisasi Ikhwanul Muslimin yang dibidani oleh Hasan al-Banna. Bahkan pamannya, Aziz Bisri pada tahun 1962 mendorong Gus Dur untuk mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin.<sup>222</sup>

Pengembaraan pemikiran Gus Dur pada tahap ini justru beralih ke fundamentalisme Islam, tetapi tampaknya hal ini tidak lama karena ketika dia pindah ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya pada tahun 1963, ia mulai menolak pemikiran fundamentalisme ini karena menganggapnya bertentangan dengan semangat Islam yang asli.

Gus Dur bukan hanya melakukan pengembaraan pemikiran, dari Marxisme, liberalisme, fundamentalisme melalui buku-buku yang dibacanya tetapi dia juga mengembara secara fisik. Untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya, dia meneruskan pendidikannya ke universitas Al Azhar di Mesir, salah satu perguruan tinggi tertua di dunia, dan tertua di dunia Islam. Tempat dimana buku-buku klasik tentang Islam ini banyak ditemukan adalah tempat yang bagi Gus Dur diharapkan akan mampu mewujudkan mimpinya menjadi sarjana yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, meskipun akhirnya dia harus menelan kekecewaan karena kegagalannya mendapatkan gelar sarjana. Meskipun begitu setidaknya ilmu yang dia dapatkan dari perkuliahan dan buku-buku yang dibacanya tentunya memberi pengaruh pada pemikiran dan kehidupannya.<sup>223</sup>

Di Mesir Gus Dur dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat muslim sulit menghindari polarisasi dan ekstrimisme. Ia melihat hubungan yang sumbang antara agama dan negara. Ini membuat Gus Dur mengikuti

<sup>221</sup> Tim INGRoS, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologi Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 10-11 dan Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 56

<sup>222</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 57

<sup>223</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 89-102

3 dengan penuh minat bagaimana pemerintah Mesir memperlakukan pemikir Islam Sayyid Qutb yang bukunya sudah dia baca ketika masih berada di Indonesia. Meskipun menganggap bahwa Sayyid Qutb mempunyai kesalahan mendasar dalam pandangan-pandangannya tetapi ia mengagumi tokoh yang sangat berani ini, di samping ia juga muak melihat kebrutalan pemerintah Mesir dalam menindas siapapun yang dianggap musuhnya, meskipun dalam bidang pemikiran. Oleh karena itu Gus Dur ikut bergabung dengan ratusan mahasiswa untuk berdoa di depan penjara Sayyid Qutb pada hari tokoh tersebut dihukum gantung oleh pemerintah Mesir.<sup>224</sup>

Dua setengah tahun berada di Kairo, Gus Dur tidak memiliki prestasi apa-apa, bahkan kemudian gagal dalam studinya. Meskipun Gus Dur kecewa dengan kegagalannya tersebut, tetapi setidaknya banyak manfaat yang diperolehnya dari lingkungan sosial dan intelektual di sana. Gaya memerintah Nasser yang otokratik membuatnya tidak betah tinggal di Mesir, apalagi studinya sudah gagal. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Bagdad, kota yang oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di sana disebut sebagai kota kosmopolitan yang penuh vitalitas, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun seni. Di sini kebebasan berpendapat lebih dijamin, para intelektual bisa bertukar pikiran secara terbuka dan memperdebatkan hal-hal yang berkaitan dengan filsafat dan agama.<sup>225</sup>

Di Bagdad Gus Dur bersahabat dengan seorang Yahudi Irak yang bernama Ramin, seorang pemikir liberal dan terbuka. Dengan Ramin bertemu secara teratur dan mendiskusikan banyak hal, mulai dari agama, filsafat dan politik. Sebagai sesama penulis dan penerjemah surat-surat di Ar-Rahmadani, persahabatan keduanya begitu baik. Gus Dur mengetahui Yudaisme dan pengalaman Diaspora orang-orang Yahudi dari Ramin. Dari Ramin jugalah Gus Dur mulai belajar menghormati Yudaisme dan memahami pandangan orang Yahudi serta keprihatinan sosial dan politik mereka yang hidup dalam Diaspora dan tertindas. Bisa jadi pemahamannya yang cukup baik tentang Yahudi ini yang membuat Gus Dur ketika menjadi presiden memutuskan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel yang membuatnya dikritik habis-habisan.<sup>226</sup>

Setelah gagal memperoleh gelar sarjana dari universitas Al- Azhar, Gus Dur mencoba peruntungan ke negara lain. Dia masih memiliki harapan belajar di belahan dunia tempat peradaban Islam pernah berjaya, dan dia memilih Bagdad. Di kota ini dia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan mendapatkan gelar sarjana.<sup>227</sup>

21  
224 Greg Barton, *Biografi Gus Dur....*, h. 100

225 Greg Barton, *Biografi Gus Dur....*, h. 103

226 Greg Barton, *Biografi Gus Dur....* h. 104-108

227 Greg Barton, *Biografi Gus Dur....*, h.111



Setelah menamatkan pendidikannya di Baghdad, Gus Dur tidak segera pulang ke tanah air. Ia pindah ke Eropa dengan harapan akan bisa meneruskan belajar di Belanda. Sayangnya, di kota inipun dia gagal. Setelah enam bulan tinggal di Belanda, ia mengembara ke Jerman dan tinggal di sana selama empat bulan, kemudian pindah lagi ke Perancis dan tinggal di sana selama dua bulan. Tidak banyak yang dia dapatkan di tiga negara ini tetapi setidaknya dengan tinggal di Eropa, Gus Dur berkesempatan belajar dari tangan pertama sifat masyarakat dan pemikiran mereka.<sup>228</sup>

### C. Aktivitas dan Karir Politik

Gus Dur adalah pribadi yang unik. Di balik pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, Gus Dur adalah orang yang hangat, demokratis dan pluralis. Penilaian seperti ini layak disematkan kepada “Guru Bangsa” ini, bahkan masih banyak lagi gelar yang disematkan untuknya, sehingga Effendy Choiri dan kawan-kawan menulis buku dengan judul “Sejuta Gelar untuk Gus Dur”. Tentunya dengan sebutan dan gelar sebanyak itu (tentu saja kata ini tidak bermakna harfiah) Gus Dur memiliki rekam jejak yang luas selama hidupnya.<sup>229</sup>

Aktivitas dan karir politik Gus Dur bisa dikatakan dimulai ketika ia bergabung dengan organisasi pelajar Indonesia di Kairo, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Gus Dur bersama temannya, Mustofa Bisri membuat majalah bagi perhimpunan ini pada tahun 1964. Di majalah inilah ia selalu mengemukakan pemikirannya dalam berbagai persoalan. Ia selalu menulis esai yang jenaka dan provokatif dengan topik-topik yang paling disenanginya, yaitu politik Indonesia, masa depan Indonesia, serta Islam dan modernitas. Ia juga berpidato dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar tersebut secara teratur yang membuatnya cepat terkenal di kalangan para pelajar Indonesia di Timur Tengah tersebut.<sup>230</sup>

Di Baghdad bahkan Gus Dur menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di sini kepemimpinan Gus Dur mulai teruji, tetapi ini belum karir politik yang sebenarnya. Kedudukan sebagai ketua sebuah perhimpunan pelajar bukanlah sebuah karir tetapi awal sekaligus pengalaman yang baik bagi sebuah kedudukan yang lebih tinggi yang nantinya akan dijalani.

Tidak cukup sekedar menjadi guru dan narasumber di berbagai forum, Gus Dur kemudian bergabung dengan LSM. LP3ES adalah LSM yang dipilihnya. Aktivitas pertamanya di LP3ES adalah terlibat dalam

<sup>228</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.111

<sup>229</sup> Effendy Choiri dkk menyatakan diantara gelar Gus Dur adalah, guru bangsa, tokoh demokrasi, pejuang HAM, pluralisme dan toleransi antar umat beragama serta Tokoh Proklamasi Sendiri. (Ed) Effendy Choiri dkk (Et,all), *Sejuta Gelar untuk Gus Dur*, (Jakarta : Nawa Mulia (21)10) h., IX dari Salam Editor “ Sejuta Gelar untuk Gus Dur ”

<sup>230</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 92



proyek pengembangan pesantren bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono, dan kemudian dengan dimotori oleh LP3ES, Gus Dur mendirikan P3M. Pada saat ini Gus Dur masih tinggal di Jombang dan bolak-balik Jombang-Jakarta karena tugasnya, sehingga kemudian untuk memudahkan pekerjaannya, Gus Dur pindah ke Jakarta pada tahun 1979, dan mulai merintis pesantren Ciganjur.<sup>231</sup>

Sebagai putra sulung kiai Wahid Hasyim dan cucu kiai Hasyim As'ari dan kiai Bisri Syansuri, Gus Dur mendapat pengawasan ketat dari kiai-kiai senior NU. Lebih dari itu mereka juga ingin Gus Dur, sama seperti ayah dan kakeknya juga bergabung dengan NU. Keterlibatan Gus Dur dengan NU pada awal tahun 1980 ketika dipercaya sebagai wakil Katib Syuriah semakin mendekatkan Gus Dur pada dunia politik. NU sendiri termasuk salah satu empat partai Islam yang berfusi ke dalam PPP (artai Persatuan Pembangunan). Di sini Gus Dur sering berdiskusi dan berdebat dengan serius dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin mengenai masalah agama, sosial dan tentu saja juga politik. Gus Dur juga semakin serius menekuni hobinya menulis di berbagai majalah dan koran dengan berbagai topik, terutama masalah kebudayaan, politik, dan pemikiran keislaman.<sup>232</sup>

Menjadi salah seorang Dewan Syuriah NU bersama dengan kakeknya, kiai Bisri Syansuri yang menjadi ketuanya (Râis Âm), dapat dikatakan sebagai awal dari persentuhannya dengan dunia politik, sebab meskipun NU bukan partai politik tetapi keterlibatannya dengan dunia politik begitu nyata. Saat itu NU memberikan aspirasi politiknya lewat PPP. Banyak pengurus NU yang menjadi anggota partai ini, termasuk Idham Chalid, ketua Dewan Tanfidziah.<sup>233</sup>

Nama Gus Dur semakin terkenal dan tentunya ini semakin menambah kepercayaan orang padanya khususnya di NU, sehingga kemudian Gus Dur terpilih secara aklamasi oleh sebuah tim *ahl hall wa al-'aqd* yang diketuai oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Jabatan ini kemudian kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989, dan muktamar Cipasung,

<sup>231</sup> Tim INCREs, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 20 dan Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 114

<sup>232</sup> Tim INCREs, *Beyond the Symbols...*, h. 21

<sup>233</sup> Idham Chalid bahkan menjadi ketua PPP sejak partai ini didirikan pada tahun 1973. Kiai Bisri Syansuri, kakek Gus Dur juga aktif di PPP dan menjadi Kepala Syuriah (penasehat) PPP. Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 129.

Jawa Barat pada tahun 1994.<sup>234</sup> Kedudukannya sebagai ketua umum PBNU lah nanti yang mengantarkannya terlibat dengan intens dalam politik praktis dengan dibentuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>235</sup>

Saat menjadi Ketua Tanfidziyah NU, organisasi ini membentuk Tim Tujuh dimana Gus Dur termasuk di dalamnya untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Pada tanggal 2 Mei 1982, para petinggi NU menuntut ketua NU, Idham Chalid untuk mengundurkan diri<sup>236</sup>, namun empat hari kemudian, Gus Dur menyebutkan bahwa pengunduran diri Idham Chalid inkonstitusional. Gus Dur justru meminta Idham Chalid untuk tidak mundur. Permintaan ini tentunya mengesankan bahwa Gus Dur itu plin-plan. Belakangan semakin banyak pernyataan-pernyataan dan sikap Gus Dur yang dianggap sebagian orang sebagai plin-plan.

Ketika Soeharto terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1983 untuk masa jabatan keempat kalinya, Soeharto menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. NU merespon ini dengan menugaskan Gus Dur sebagai salah seorang yang akan menyiapkan respon NU terhadap isu ini dari bulan Juni hingga Oktober 1983. Kesimpulan yang diambil Gus Dur adalah NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tahun itu juga agar lebih fokus untuk menghidupkan kembali NU, Gus Dur mengundurkan diri dari PPP.<sup>237</sup>

Meskipun sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik, Gus Dur dengan NU yang dipimpinya menunjukkan citra moderatnya. Ini membuatnya disukai oleh pemerintah, apalagi kemudian pada tahun 1987, Gus Dur mempertahankan dukungannya kepada rezim Soeharto dan

<sup>234</sup>Saat terpilih pertama kali sebagai ketua umum PBNU, terpilih juga KH. Ahmad Shiddiq selaku Rāis Ām Syuriyah PBNU. Mereka memimpin organisasi para ulama yang dikenal dengan sebutan “kaum sarungan” ini. Tim INCREs, *Beyond the Symbols...*, h. 22

<sup>235</sup> PKB, partai yang didirikan oleh Gus Dur-lah yang nantinya mengantarkan Gus Dur untuk menjadi Presiden. Partai ini dideklarasikan di rumah Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, dan difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). PKB adalah satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU. A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam, dan Kebangkitan Indonesia*, (Yogyakarta: KLIK.R, 2007), h. 84

<sup>236</sup> Sikap Idham Chalid yang enggan mundur akhirnya menyebabkan kepengurusan NU terpecah dua ke dalam “kubu Cipete”, yang diketuai oleh Idham Chalid, dan “kubu Situbondo”, yang diketuai KH. As’ad Syamsul Arifin, yang kemudian didamaikan oleh Tim Tujuh dan ibunda Gus Dur, Solichah. Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 157-164.

<sup>237</sup> Bukan hanya Gus Dur yang mundur dari PPP, tetapi Gus Dur juga menilai NU harus memisahkan diri dari PPP, dengan alasan: *Pertama*, NU mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari rezim yang berkuasa yang menggunakan tangan PPP, sehingga tidak ada gunanya bertahan di partai ini, dan akan lebih baik jika memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat (*civil society*); *Kedua*, Gus Dur menganggap adanya hubungan langsung organisasi keagamaan dan partai politik, tidak sehat. Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h. 175-176



mengkritik PPP dalam Pemilihan Umum Legislatif pada tahun itu, dan sebaliknya memperkuat partai Golkar. Pada akhirnya Gus Dur berhasil menjadi anggota MPR RI untuk masa bakti 1989-1993, tetapi ketika pemerintah menjalankan proyek waduk Kedung Ombo yang didanai bank Dunia, Gus Dur mengkritik pemerintah. Kritik ini menyebabkan renggangnya hubungannya dengan pemerintah dan Soeharto.<sup>238</sup>

<sup>3</sup> Pada tahun 1991, Gus Dur bersama beberapa penggiat demokrasi yang terdiri dari berbagai kalangan, khususnya kalangan nasionalis dan non muslim mendirikan Forum Demokrasi, dan Gus Dur menjadi ketuanya untuk masa bakti 1991-1999. Anehnya Gus Dur justru menolak masuk ke dalam organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang saat itu justru menunjukkan hubungannya yang harmonis dengan pemerintah. Gus Dur bahkan menuduh organisasi kaum elit Islam ini sektarian.<sup>239</sup>

Awal krisis finansial yang melanda Asia pada bulan Juli 1997 memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap Indonesia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien Rais, namun Gus Dur terkena stroke pada bulan Januari 1998. Kondisi ini diperburuk dengan terpilihnya kembali Soeharto oleh MPR untuk masa jabatan kelima kalinya. Ketidakpuasan masyarakat semakin dipertunjukkan di mana-mana. Puncaknya pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti dalam aksi protes mahasiswa terhadap Soeharto.<sup>240</sup>

Untuk mengatasi itu, pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur bersama delapan pemimpin komunitas muslim dipanggil Soeharto yang memberikan konsep Komite Reformasi usulannya, tetapi Gus Dur bersama delapan orang tersebut menolak bergabung dengan Komite Reformasi.<sup>241</sup> Gus Dur yang

<sup>238</sup><https://www.biografiku.com/biografi-kyai-abdurrahman-wahid-gus-dur/>, diakses pada Jumat, 8 Pebruari 2019 pukul 10.49 wwib

<sup>239</sup><https://www.republika.co.id/berita/shortlink/99132>, diakses pada Selasa, 12 Pebruari 2019 pukul 08.53 wwib

<sup>239</sup><https://mypresidentmyhero.wordpress.com/2012/06/25/perjalanan-kari-politik-presiden-gus-dur/>, diakses pada Senin, 11 Pebruari 2019 pukul 12.48 wwib.

<sup>240</sup> Menurut laporan Republika, peristiwa 12 Mei 1998 ini menyebabkan empat **108** g mahasiswa Trisakti meninggal dunia karena tertembak peluru tajam, dan mengenai tempat-tempat vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada, karena melakukan demonstrasi menuntut presiden Soeharto turun. Penembakan itu justru dilakukan di kampus, tempat yang sejatinya tempat yang damai, tempat para mahasiswa mengukir masa depannya. Peristiwa yang dikenal dengan Tragedi Trisakti inisampai kini terus diperingati setiap tahunnya. REPUBLIKA.co.id, Selasa, 12 May 2020, 07.11 WIB, diakses pada Selasa, 28 Juli 2020, pukul 08.07 wibb.

<sup>241</sup> Komite Reformasi yang dibentuk presiden Soeharto direncanakan akan diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra yang tidak berhasil mengajak Amien Rais, Gus Dur, Makruf Amin, Cholil Baidowi, Achmad Bagdja, dan Sumarsono. Akhirnya komite yang digagas oleh presiden Soeharto untuk menjaga agar peralihan kekuasaan tetap damai, meskipun dia

berpandangan moderat sebenarnya meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto memenuhi janjinya.<sup>242</sup> Usul ini tidak disukai oleh Amien Rais, orang yang saat itu paling kritis mengkritisi Soeharto. Pada akhirnya sejarah mencatat Soeharto mengundurkan diri setelah situasi ketidakpuasan rakyat yang berakibat pemberontakan dan kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak mampu lagi dia tangani.

Jatuhnya rezim Soeharto sempat menimbulkan euforia politik. Banyak partai-partai politik baru yang muncul untuk menampung aspirasi masyarakat. Selama pemerintahan Soeharto, aspirasi politik hanya boleh ditampung oleh tiga partai: Golkar, PPP, dan PDI, dan kejatuhan Soeharto memberikan ruang yang bebas untuk membentuk partai-partai politik baru. Ketiga partai politik sebelumnya dianggap tidak cukup menampung aspirasi politik mereka. Hal ini juga berpengaruh pada organisasi NU. Pada bulan Juni 1998, sebagian nahdhiyin meminta Gus Dur untuk membentuk partai politik juga, sehingga pada bulan Juli 1998 Gus Dur mengakomodir permintaan itu. Gus Dur menganggap pendirian partai politik diperlukan untuk mengalahkan Golkar dalam pemilihan umum, maka dibentuklah **Partai Kebangkitan bangsa (PKB) dengan Matori Abdul Djalil dan Gus Dur** sendiri Ketua Dewan Penasehat. Meskipun didominasi oleh anggota NU, namun Gus Dur menyatakan bahwa partai ini terbuka untuk umum.<sup>243</sup>

Situasi politik Indonesia masih belum stabil meskipun **16** residen Soeharto sudah mengundurkan diri. Situasi ini direspon oleh **Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X** dengan menyatakan kembali dukungan mereka untuk reformasi. Peristiwa itu terjadi pada bulan November 1998. Pada tanggal 7 Pebruari 1999, PKB, partai politik yang dibentuk oleh Gus Dur menyatakan Gus Dur sebagai calon presiden usungannya.<sup>244</sup>

---

harus demisioner itu, gagal dibentuk. OKEZONE.com, Kamis, 21 Mei 2015, 06.03 WIB, diakses pada Selasa, 28 Juli 2020, pukul 08.15 wibb

<sup>242</sup> “Segala gerak para mahasiswa, agaknya sudah kehilangan momentum karena tidak sesuai dengan perhitungan. Mereka memang berhasil menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan, tetapi memukah mereka mnyusun demokrasi setelah Ia lengser keprabon? Sekali lagi, jawabnya tidak... Perjuangan para mahasiswa, tampaknya hanya berganti-ganti isu dari waktu ke waktu tanpa ada kejelasan kapan akan berahir dan bagaimana kesudahannya” Kritik Gus Dur, dalam Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 139

<sup>243</sup> PKB didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 dengan diketuai oleh Mathori Abdul Jalil. A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam...*, h. 84. Gus Dur memilih Mathori Abdul Jalil sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB karena menganggap bahwa Mathori adalah “seorang strateg yang mampu memadukan keberadaan NU dan kehadiran PKB. Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 20-21

<sup>244</sup> Mohammad Bakir dan Lily Yulianti, “Detik-detik Sebelum Pemilihan Presiden”, dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Perjalanan Politik...*,h. 48



Dalam pemilu yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999 PKB ikut serta dalam Pemilu Legislatif dan berhasil mendapatkan 12% suara, sementara PDI-P berhasil memperoleh 33% suara, dan itu berarti partai ini menjadi partai pemenang dalam pemilu tersebut. Meskipun berhasil memenangkan pemilu, tetapi PDI-P tetap saja pemilik suara mayoritas penuh, karena itu untuk bisa mengusung calon presiden dari partainya, partai ini harus berkoalisi dengan partai lain. Akhirnya PDI-P berkoalisi dengan PKB. Pada sisi lain, Amien Rais membentuk Poros Tengah pada bulan Juli 1999 dan bermaksud menjadi calon presiden usungannya. Gebrakan Amien Rais ini tentu saja memengaruhi komitmen PKB dalam kalisisinya terhadap PDI-P, dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akhirnya Gus Dur berhasil menjadi presiden. Ini adalah puncak karir politik Gus Dur. Pilihan Amien Rais terhadap Gus Dur karena menganggap Gus Dur lah pilihan yang paling tepat mengingat tingkat resistensinya yang kecil, baik dari kelompok pendukung Habibie maupun pendukung Megawati. Artinya, Gus Dur diterima oleh semua pihak.<sup>245</sup>

Meskipun sudah dilamar oleh Amien Rais sebagai calon presiden, tidak serta merta membuat Gus Dur menerima lamaran tersebut. Gus Dur dan juga para ulama NU tidak begitu saja percaya pada pencalonan tersebut. Pengalaman masa lalu bersama Masyumi menjadi pelajaran terbaik. Ketika terjadi ketidakserasian hubungan, maka bisa saja memunculkan persaingan tidak sehat dan itu rentan mengakibatkan rusaknya bahkan putusnya sebuah hubungan politik, karena itu para ulama NU merasa perlu menggelar pertemuan khusus untuk membahas pencalonan tersebut.<sup>246</sup>

Secara pribadi, Gus Dur sendiri merasa perlu menguji apakah pencalonannya benar-benar serius, karenanya Gus Dur sengaja membawa Amien Rais dan kawan-kawan dari Poros Tengah berkeliling pesantren seolah ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima begitu saja pencalonan tersebut tanpa keterlibatan para ulama NU.<sup>247</sup>

Menanggapi pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden, ada empat hal yang dipertimbangkan para ulama NU; Pertama, apakah Gus Dur betul-betul menginginkan pencalonan tersebut; Kedua, apakah Poros Tengah benar-benar serius mencalonkan Gus Dur; Ketiga, jika Gus Dur harus maju, para ulama ingin melihat situasi dan kondisi Sidang Umum (SU) MPR, dan

<sup>245</sup> Mohammad Bakir, 'Ketika Poros Langit Pegang Kendali (3) dalam Irwan Suhanda (ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: KOMPAS, 2010), h. 52

<sup>246</sup> Mohammad Bakir dan Lily Yulianti, "Ketika Poros Langit...", dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Perjalanan Politik*. h. 52

<sup>247</sup> Mohammad Bakir dan Lily Yulianti, "Ketika Poros Langit...", dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Perjalanan Politik...*, h. 52

keempat, situasi dan kondisi umat menjelang dan saat Sidang Umum MPR.<sup>248</sup>

Proses tercapainya kesepakatan bahwa Gus Dur menerima pencalonannya sebagai calon presiden cukup alot. Para ulama masih belum yakin kalau Amien Rais dan kawan-kawan dari Poros Tengah benar-benar serius dengan pencalonan tersebut. Di sisi lain Gus Dur sendiri secara pribadi mendukung Megawati Soekarnoputri, namun setelah melakukan sholat istikharah yang hasilnya positif untuk menerima pencalonan tersebut, Gus Dur dengan tegas menyatakan diri menerima pencalonan tersebut. Gus Dur bahkan mendesak para ulama untuk memberikan keputusan persetujuannya, dan ketika Sidang Umum MPR telah berlangsung beberapa hari sementara persetujuan para ulama belum dia dapatkan, Gus Dur mengatakan, “Dengan atau tanpa restu ulama, saya akan terus maju. Saya lebih cinta demokrasi dibanding kecintaan saya akan semua.”<sup>249</sup>

Ungkapan Gus Dur di atas ditanggapi para ulama dengan mengadakan pertemuan di hotel Acacia, Jakarta yang diikuti oleh sekitar 30 orang ulama, tetapi tetap saja tidak bisa memberikan keputusan. K.H. Abdullah Faqih yang saat itu tidak bisa menghadiri pertemuan akhirnya mengutus K.H. Hasyim Muzadi untuk menemui Gus Dur. K.H. Abdullah Faqih melalui K.H. Hasyim Muzadi memberi pesan: Pertama, jika harus maju, ulama akan mendoakan pencalonan Gus Dur; Kedua, Gus Dur harus menjaga keutuhan di PKB; Ketiga, menjaga hubungan baik warga NU dengan PDI-P.<sup>250</sup>

Mendengar pesan itu, Gus Dur langsung menangis dan memeluk K.H. Hasyim Muzadi, dan berkata: “Sampaikan salam hormat saya kepada kiai. Katakan, bahwa Abdurrahman tetap santri. Sampai kapanpun Abdurrahman tetap santri yang tidak mungkin menentang para ulama.”<sup>251</sup> Dengan restu tersebut, Gus Dur dengan yakin menyatakan maju menjadi calon presiden Republik Indonesia pada Sidang Umum MPR, dan sebagaimana diketahui akhirnya Gus Dur berhasil menjadi presiden setelah mengalahkan Megawati Soekarnoputri.

Berhasilnya Gus Dur menjadi presiden menunjukkan era baru bagi kaum santri. Saatnya santri menjadi presiden dan saatnya santri kaum

<sup>248</sup> Mohammad Bakir, Ketika Poros Langit “Pegang Kendali (3) dalam Irwan Suhanda (ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: KOMPAS, 2010)., h. 53

<sup>249</sup> Mohammad Bakir, Ketika Poros Langit “Pegang Kendali (3) dalam Irwan Suhanda (ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: KOMPAS, 2010)., h. 56

<sup>250</sup> Mohammad Bakir, Ketika Poros Langit “Pegang Kendali (3) dalam Irwan Suhanda (ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: KOMPAS, 2010)., h. 57

<sup>251</sup> Mohammad Bakir dan Lily Yulianti, dalam “Ketika Poros Langit “Pegang Kendali (3)” dalam Irwan Suhanda (ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: KOMPAS, 2010)., h. 57

modernis (Amien Rais) terpilih menjadi Ketua MPR. Ini saat kemenangan politik kaum santri- santri *par excellence*<sup>252</sup>- meminjam bahasa Sukidi. Anggapan selama ini bahwa kaum santri berada di pinggir kekuasaan, tidak boleh berkuasa, diruntuhkan dengan munculnya dua orang santri tersebut di panggung kekuasaan.

Duapuluh bulan menjabat sebagai presiden ada banyak hal yang perlu dicatat dalam masa kepemimpinan Gus Dur. Terlepas apakah Gus Dur dengan segala kelebihan maupun kekurangannya adalah presiden yang gagal atau tidak, tetapi Gus Dur memiliki catatan keberhasilan yang cukup signifikan. Keberhasilan pertamanya bisa dikatakan ketika dengan pandangan demokratis kapasitas kenegarawanannya, Gus Dur memutuskan untuk mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya untuk menghindari pergolakan massa PDI-P yang terlanjur fanatik, emosional dan bergerak secara massif di berbagai daerah Jawa akibat kekalahan Megawati.<sup>253</sup>

Gus Dur juga berhasil meredam potensi ledakan konflik yang siap meledak ke permukaan di beberapa daerah seperti Ambon, Irian, Sambas, Riau, Jakarta sampai pulau Jawa. Pada kondisi ini kearifan, kebijakan yang akomodatif dan responsif terhadap pergolakan politik arus bawah Gus Dur sangat diperlukan. Saatnya Gus Dur membuktikan bahawa *sense of politics*-nya seperti yang selalu dinasihatinya kepada Habibie, dia buktikan sendiri. Gus Dur juga berhasil mengelola konflik secara bijak antara massa PDI-P dengan massa Habibie.<sup>254</sup> Perlu sikap kenegarawan sejati dalam hal itu.

Gus Dur yang pluralis dan demokratis diharapkan mampu tampil sebagai *solidarity maker* di tengah beragam etnis, suku, agama, politik, dan ideologis di negara yang sangat majemuk ini. itu juga lah mungkin alasan sehingga Gus Dur menetapkan libur optional bagi hari raya Imlek bagi masyarakat Tionghoa-Budha, bahkan mengakui Konghucu sebagai sebuah agama<sup>255</sup>- yang di negara asalnya sendiri tidak diakui (kedua hal ini mungkin saja menjadi penyebab menguatnya etnis Tiongoa di negara ini-pen).

<sup>252</sup> Sukidi, Gus Dur Presiden Santri, dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Perjalanan Politik...*, h. 61

<sup>253</sup> Sukidi, Gus Dur Presiden Santri, dalam Irwan Suhanda. (Ed.), *Perjalanan Politik...*, h. 64

<sup>254</sup> Franz Magnis-Suseno, "Gus Dur Telah Pergi", dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Gus Dur Santri...*, h. 3.

<sup>255</sup> Jaya Suprana, yang mengaku sahabat dan mantan murid dalam memoarnya terhadap Gus Dur, mengatakan, "Tidak bisa diingkari pencabutan larangan terhadap penggunaan unsur kebudayaan tradisional Cina mulai dari aksara sampai perayaan TahunBaru Imlek di Indonesia merupakan jasa almarhum Gus Dur yang memaksa bangsa Indonesia kembali ke fitrah falsafah Bhinneka Tunggal Ika sebagai hakikat penjabaran pluralisme. Jaya Suprana, "Gus Dur dan Imlek", dalam Effendy Choirie, dkk. Sejuta Gelar...,h. 391

#### D. Karya-karya Gus Dur

Gus Dur, Sang Guru Bangsa, termasuk penulis yang produktif terutama di masa mudanya. Sebelum beliau menjadi Presiden, Gus Dur banyak menulis di surat kabar dengan tema yang beragam. Tulisan-tulisannya menunjukkan pribadinya yang nasional Indonesia seratus persen, dengan wawasan kemanusiaan universal –meminjam istilah Franz Magnis-Suseno.<sup>256</sup> Ia juga seorang tokoh muslim yang pluralis dan demokrat.

Pemikir Islam, aktivis dan pejuang yang terus berjuang untuk tegaknya kebenaran dan keadilan ini dikenal sebagai orang yang terus menggaungkan nilai-nilai pluralisme, multikulturalisme, dan demokratisme, bukan hanya dalam tulisannya tetapi juga dalam sikap dan kebijakannya. Ini semua kelihatan jelas dalam tulisan-tulisannya sejak dari kepulangannya ke tanah air, tepatnya sejak dia bergabung dengan LP3ES sampai sebelum dia terpilih menjadi Presiden. Setelah jadi Presiden tulisan-tulisannya tidak lagi mewarnai jagat pemikiran di Indonesia tetapi lontaran-lontaran pemikirannya yang dia sampaikan dalam berbagai kesempatan, juga sikap dan kebijakannya jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap nilai-nilai yang sudah diungkapkan di atas. Karya-karya Gus Dur sebenarnya lebih banyak dalam bentuk artikel yang tersebar dalam berbagai majalah, tetapi kemudian dikumpulkan dan dijadikan buku. Berikut adalah karya-karya Gus Dur<sup>24</sup>

1. Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, kumpulan esai yang ditulis Gus Dur pasca lengser dari kursi kepresidenan.
2. Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan, merupakan kumpulan tulisan Gus Dur sepanjang tahun 1980-an sampai 2000-an.
3. Musuh dalam Selimut, Pengantar Editor “Ilusi Negara Islam Ekspansi gerakan Islam Transnasional di Indonesia”.
4. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser: tulisan-tulisan Gus Dur yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan buku dengan judul di atas.
5. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, juga merupakan kumpulan karangan Gus Dur yang sengaja dibukukan oleh KOMPAS sebagai sambutan terhadap terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden.
6. Islam, Negara dan Demokrasi, himpunan tulisan-tulisan Gus Dur di harian Media Indonesia sepanjang 1996-1999
7. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Kumpulan tulisan Gus Dur di majalah TEMPO dasawarsa 1970-an dan 1980-an.

<sup>256</sup> Franz Magnis-Suseno, “Gus Dur Telah Pergi”, dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Gus Dur Santri...*, h.3.



8. Prisma pemikiran Gus Dur: kumpulan tulisan Gus Dur yang dimuat di jurnal Prisma era 70-an hingga 80-an.
9. Gus Dur Menjawab kegelisahan Rakyat, merupakan kumpulan artikel Gus Dur yang dimuat di harian KOMPAS antara tahun 2001 dan 2006.
10. Gus Dur Bertutur, merupakan kumpulan esei Gus Dur di Harian PROAKSI sejak 2 Oktober 2004 s/d 28 Pebruari 2005.
11. Membaca Sejarah Nusantara: Dua Puluh Lima Kolom Sejarah Gus Dur
12. **17**am Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan
13. **Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Lengser**

## BAB IV PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG DEMOKRASI

### A. Makna Demokrasi Islami

Untuk melihat bagaimana Gus Dur memahami atau mendefinisikan demokrasi, perlu dirujuk lebih dulu definisi-definisi yang sudah lebih dulu diperkenalkan oleh para ahli. Secara bahasa (etimologi), kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, negara yang pertama sekali mempraktikkannya, yaitu dari kata “demos” yang berarti rakyat, dan “crates” yang berarti pemerintahan atau “cratos” yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah “keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat”.<sup>257</sup>

Pengertian demokrasi secara terminologi begitu banyak. Istilah ini telah didefinisikan sejak dari filosof Yunani klasik sampai ke masa modern ini. Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya.<sup>258</sup> Robert Dahl, seorang ilmuwan modern mengatakan, demokrasi adalah “suatu sistem politik dimana para anggotanya memandang antara satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat dan memiliki segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri”.<sup>259</sup>

Memulai pandangannya tentang demokrasi, Gus Dur mengatakan bahwa “kata demokrasi memiliki arti yang berbeda-beda bagi bangsa-bangsa yang berbeda. Bagi negara-negara maju, yang diwakili oleh pemikir politiknya, demokrasi dimaknai sebagai demokrasi liberal. Meskipun berbeda bentuk negara, negara kesatuan dengan kekuasaan pemerintahan

<sup>257</sup>Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 110.

<sup>258</sup>Aristoteles membagi tiga bentuk negara; *monarchie*, *oligarchie*, dan *demokrasi*. Kata “monarchie” terdiri dari “monos” yang berarti satu-satunya, dan “archie” asalnya “archein” yang berarti yang berkuasa (*heerschen*), maka *monarchie* berarti kekuasaan yang ada di tangan seorang manusia. Kata “oligarchie” terdiri dari “oligoi” yang berarti sedikit orang (*weinig*), maka *oligarchie* berarti kekuasaan yang ada di tangan beberapa orang. Demokrasi terdiri dari “demos” yang berarti rakyat, dan “cratos” yang berarti kekuatan atau kekuasaan, maka demokrasi berarti kekuasaan yang ada di tangan rakyat seluruhnya. Lihat Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1981), h. 22-23.

<sup>259</sup>Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, terj. A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), dalam “Kata Pengantar”.

pusat yang besar, seperti Perancis, maupun negara federal, seperti Amerika, demokrasi bermakna sama, yaitu demokrasi liberal.<sup>260</sup>

Bagi Gus Dur, perbedaan penerapan demokrasi dengan memberikannya nama tambahan merupakan penyelewengan, seperti yang diungkapkannya, “Meski, seringkali kata demokrasi diselewengkan dengan kata lain, seperti demokrasi rakyat dari kalangan komunis maupundari demokrasi Islam dari kaum “garis keras”, dan demikian menjadi kehilangan makna demokratisnya, kata demokrasi tidak pernah kehilangan arti pendapat berbilang atau bersamaan perlakuan bagi seluruh warga negara di muka Undang-undang serta penegakan kedaulatan hukum”.<sup>261</sup>

Gus Dur, tokoh yang sedang dijadikan sebagai objek kajian ini juga memiliki konsep demokrasi. Konsep Gus Dur tentang demokrasi bukan demokrasi model Barat, dan bukan pula Timur, tetapi demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai martabat kemanusiaan yang bersifat universal yang digali baik dari agama-agama, filsafat, serta tradisi dan budaya nusantara.<sup>262</sup> Bagi Gus Dur, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok, dan yang bersifat derivasi. Nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Lebih lanjut Gus Dur menjelaskan bahwa kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara, dan hak kolektif dari masyarakat.<sup>263</sup>

Gus Dur mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh mereka yang didukung rakyat banyak. Dalam demokrasi, dukungan rakyat banyak (mayoritas) adalah prioritas, berarti akan ada pihak yang kalah. Yang kalah mestinya mengalah ketika diperintah oleh yang didukung oleh suara terbanyak, sementara dia tidak memilih. Nantinya, pihak yang kalah akan menjadi pihak oposisi yang mengajari rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan secara bertahap.<sup>264</sup>

Pandangan Gus Dur tentang demokrasi dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

<sup>260</sup>Abdurrahman Wahid, “Demokrasi dalam Pengertian Kita”, dalam *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 229

<sup>261</sup>Abdurrahman Wahid, “Demokrasi dalam Pengertian Kita” dalam *Kumpulan Kolom...*, h. 230

<sup>262</sup>Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Abdurrahman Wahid Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2010), h. 249-250.

<sup>263</sup>Zainuddin, “Islam Tak Kompatibel dengan Demokrasi?” dalam *Jaringan Islam Liberal*, Jawa Pos, 10 Pebruari 2002 yang dikutip HM. Zainuddin dalam *Jaringan Islam...*

<sup>264</sup>Abdurrahman Wahid, *Abdurrahman Wahid Menjawab Perubahan Zaman: Warisan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: KOMPAS, 2010), h. 136

Pertama, demokrasi berarti menghargai pluralitas, baik dilihat dari segi asal usul etnis, budaya dan agama, serta menuntut toleransi yang sangat tinggi dari semua unsur dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Kedua, demokrasi menempatkan semua warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, perlindungan warga masyarakat dari kelaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan. Ketiga, pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan.<sup>265</sup>

Sejalan dengan itu, Mahfud MD ketika menjelaskan pemikiran Gus Dur tentang demokrasi, menyatakan bahwa ada tiga prinsip untuk membangun Indonesia secara demokratis, yaitu, adanya kebebasan. Boleh sebebas-bebasnya, tetapi jangan sampai merusak keutuhan NKRI. Di dalam kebebasan ada kesamaan perlakuan atau kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, dan ada jaminan kebebasan.<sup>266</sup>

Gagasan demokrasi Gus Dur selalu diarahkan pada penciptaan suasana politik yang menjamin hak-hak manusia, khususnya hak sosial politik. Itu yang Gus Dur dan kawan-kawan perjuangkan melalui Forum Demokrasi. Forum yang diprakarsai oleh Gus Dur ini seakan menjadi pesantren inklusif yang terbuka bagi semua kalangan dan lintas golongan. Forum ini dibuat untuk menegakkan demokrasi, menjaga keutuhan bangsa, meskipun dicurigai oleh pihak pemerintah (Soeharto), dilatar belakangi kesadaran bahwa perikehidupan dan kebangsaan yang utuh hanya bisa dicapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.<sup>267</sup>

Gus Dur melihat bahwa demokrasi berasal dari pemikiran Kosmopolitan, namun kosmopolitanisme ini tidak boleh semata-mata berasal dari Budaya Barat yang murni rasional, tetapi harus pula merujuk pada tata nilai Islam dan tata nilai budaya. Maka demokrasi bagi Gus Dur dipahami sebagai suatu proses yang belum selesai. Bisa dikatakan selesai apabila instruksinya merujuk pada tiga hal yang telah disebutkan yaitu universalisme Islam, budaya nasional, dan bersama-sama menyaring kosmopolitanisme atau rasionalisme Barat.

Demokrasi Islami Gus Dur adalah demokrasi perwakilan (representatif), di mana ada keterwakilan yang jelas. Jika orang awam Kristen dianggap mewakili agama Kristen, maka orang awam Islam pun harus

<sup>265</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: DESANTARA, 2001), h. 179

<sup>266</sup>Cerita Mahfud MD Soal Perjuangan Demokrasi Abdurrahman Wahid, *Republika.co.id*, Ahad, 24 Februari 2019, 19.44 WIB, diakses Rabu, 12 Agustus 2020, 14.19 WIB

<sup>267</sup>Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur...*, h. 238-239



daanggap mewakili orang (kelompok) Islam. *Representativeness* (keterwakilan) nya dalam hal ini proporsional, bukan jumlah.<sup>268</sup>

Dalam hubungannya dengan Pancasila, pandangan demokrasi Gus Dur dipengaruhi oleh pandangan NU atau sama dengan NU dalam melihat Pancasila sebagai dasar negara demokrasi Indonesia. Pandangan NU mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila, yaitu:

**Pertama**, masalah Pancasila adalah masalah duniawi dan tidak memiliki dimensi akhirat, karenanya masalah itu lebih tepat diurus oleh Negara dengan didampingi oleh para ulama syari'at.

**Kedua**, persoalan Pancasila adalah persoalan yang harus dipecahkan di negara ini dan dalam konteks bernegara pula, sehingga tidak tepat untuk menanyakan bagaimana pandangan Pancasila tentang suatu hal, karena itu adalah yurisdiksi dan syari'ah. Setiap upaya untuk mencari legitimasi Negara dalam masalah-masalah keagamaan harus di jauhi sedapat mungkin, demikian pula sebaliknya.<sup>269</sup>

Lebih jauh Gus Dur menjelaskan, "Antara syari'ah dan Pancasila, dalam hal ini pilihan penulis sudah jelas, yaitu dengan membuat hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum nasional kita di masa depan, walaupun berbeda dengan syari'ah".<sup>270</sup> Dari pernyataannya itu tampak jelas, bahwa dalam kehidupan bernegara dengan mempertimbangkan pluralitas bangsa Indonesia, maka Gus Dur memilih Pancasila, dengan catatan menjadikan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum, meskipun itu berbeda dengan syari'at Islam.

Pilihan Gus Dur terhadap Pancasila dibandingkan syari'at Islam sejalan dengan pandangannya bahwa Islam tidak perlu dijadikan asas formal di negeri ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demokrasi Islami Gus Dur bukanlah demokrasi yang berdasarkan hukum Islam secara formal. Pandangannya ini juga sama dengan pandangan ayahnya, KH. Wahid Hasyim yang menyatakan bahwa hukum Islam perlu disandarkan kepada Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, dan bukannya Pancasila yang disandarkan kepada hukum Islam. Wahid Hasyim bahkan mempertahankan supremasi Pancasila dibandingkan hukum Islam (syari'ah).<sup>271</sup>

Sama seperti NU yang bermazhab Ahlussunnah wal jama'ah, maka Gus Dur pun selalu dipengaruhi oleh doktrin mazhab ini. Karenanya ide-ide dan gagasan Gus Dur tentang demokrasi pun tidak terlepas dari prinsip-prinsip universal yang menjadi doktrin mazhab ini, yaitu: *tawasuth*

<sup>268</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999)..., h. 90

<sup>269</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara...*, h. 24

<sup>270</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara...*, h. 36

<sup>271</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara...*, h. 15

21 (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil) dalam berinteraksi dengan orang lain. Doktrin ini menjadi landasan pemikiran dan gerakan Gus Dur dalam menyikapi masalah sosial politik.<sup>272</sup> Tidak heran jika kemudian karena sikap dan pemikiran moderatnya, Gus Dur memperlakukan semua pihak setara, termasuk ketika Gus Dur melontarkan ide agar orang non-muslim pun berhak untuk dicalonkan menjadi Presiden.<sup>273</sup>

Pemikiran demokrasi Gus Dur yang tetap berpedoman kepada ajaran agamanya (Islam) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip universal doktrin Ahlussunnah wal Jama'ah, tetapi tetap dalam bingkai Pancasila, dilatari oleh keyakinannya bahwa Islam adalah agama demokrasi. Gus Dur menjelaskan bahwa ada beberapa alasan Islam disebut sebagai agama demokrasi yaitu : Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan arti bahwa agama Islam berlaku bagi setiap warga negara tanpa memandang apapun. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan, di mana mereka membahas, mengajukan ide dan kemudian membuat sebuah kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan, yang artinya Islam menyuruh setiap umat untuk selalu memperbaiki kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Demokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah Islam dikatakan sebagai agama perbaikan. Demokrasi hanya dapat ditegakkan dengan keadilan. Demokrasi juga merupakan salah satu jati diri dan ciri-ciri sebagai agama hukum.<sup>274</sup>

Dalam praktiknya, demokrasi adalah proses yang ajek dan tidak henti-hentinya, sesuai dengan pengertian yang dinamis dari demokrasi. Itu sebabnya proses demokratisasi harus selalu dan terus diupayakan, karena demokrasi tidak pernah sempurna dan memuaskan. Dengan kesadaran seperti itu, maka mestinya semua pihak dituntut untuk mengupayakan perbaikan terus menerus, agar menghampiri kesempurnaan, dan tidak menyimpang dari tujuannya semula. Ini artinya, demokrasi jangan dipandang sebagai sesuatu yang sudah selesai dan sempurna, malah akan selalu ada dalam bentuk kesementaraan. Dampak dari pernyataan ini memang akan memunculkan sikap *apologi* (pembelaan) ketika sistem tidak memuaskan seseorang. Orang akan dengan mudah melakukan pembelaan dengan dalih demokrasi memang belum selesai, belum sempurna.<sup>275</sup>

<sup>272</sup>Nur Kholisoh, *Demokrasi Aja...*, h.9

<sup>273</sup>Abdurrahman Wahid lebih lanjut menjelaskan, "Orang Islam harus siap mendiskusikan boleh tidaknya seorang calon pemimpin negara dari kalangan nonmuslim.". Demokrasi berarti adanya persamaan hak di muka undang-undang, tanpa kecuali. Jika kaum muslim melontarkan isu demokratisasi, maka pada saat yang sama mestinya juga memberikan kesempatan yang sama bagi orang non-muslim untuk menempati posisi tertinggi itu. Ketidaksiapan kaum muslim membicarakan masalah ini membuat sikap demokratisnya layak dipertanyakan. Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 36

<sup>274</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara ...*,h. 87-88

<sup>275</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 213.

5 Demokrasi sebagai proses juga bermakna kadar pelaksanaan konkret dari prinsip demokrasi itulah yang terpenting. Bisa saja pada satu waktu lembaga legislatif berimbang pengaruhnya dengan eksekutif, sementara pada saat yang lain justru lembaga legislatif melemah atau sebaliknya, padahal sistem ketatanegaraannya sama, penerapan Trias Politikanya sama. Adanya lembaga-lembaga itu tidak serta merta membuat jiwa demokrasi menjadi hidup. Membatasi pengertian demokrasi sekedar sampai adanya lembaga dan menyediakan lembaga resmi sebagai tempat penyaluran aspirasi rakyat, tidak cukup bagi negara besar dan plural seperti Indonesia.

Mengingat pluralnya masyarakat Indonesia, maka Gus Dur menginginkan agar demokrasi di negara ini adalah demokrasi yang beroperasi dalam kenyataan masyarakat yang majemuk: suku, golongan, agama, dan berbagai perbedaan lain, yang semuanya berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan. Demokrasi adalah pengakuan akan adanya perbedaan. Dalam negara demokrasi suara mayoritas adalah penentu keputusan, tetapi pada saat yang sama jangan melanggar hak minoritas dan meniadakan eksistensi kelompok yang kecil. Ini adalah konsensus yang menjadi syarat demokrasi pluralis.<sup>276</sup>

Demokrasi juga membutuhkan demokratisasi, tidak cukup hanya dengan pendirian institusi atau lembaga yang mencerminkan demokrasi, seperti MA, BPK, dan lain-lain yang independen. Institusionalisasi tanpa tradisi, tidak akan menciptakan demokrasi yang benar.<sup>277</sup>

Sifat demokrasi yang terus dalam proses menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan demokrasi bukan pekerjaan yang ringan, apalagi di negara yang sangat plural seperti Indonesia. Perjuangan menegakkan demokrasi sejatinya bukan perjuangan perorangan atau kelompok, karena demokrasi milik rakyat seluruhnya.

## **B. Kualifikasi (Karakteristik) Demokrasi**

Demokrasi sebagai sebuah sistem yang pada umumnya dipraktikkan di negara-negara didunia ini. Definisi demokrasi memang sangat beragam sehingga menyebabkan kualifikasi yang dikemukakan para ahli pun beragam pula. Gus Dur sebagai salah seorang pemikir politik pun juga memberikan kualifikasinya tersendiri. Sebagai seorang yang berasal dari dunia pesantren tetapi sekaligus bersentuhan dengan beragam pemikiran termasuk pemikiran sekuler dan liberal, maka pemikiran Gus Dur merupakan sintesa dari nilai-nilai keagamaan sekaligus kemodernan dalam hal ini termasuk sekularisme dan liberalisme.

<sup>276</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 218

<sup>277</sup>Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab...*, h. 64

Bagi Gus Dur kualifikasi demokrasi juga harus ada di negaranya yang pada dasarnya berbeda dengan bentuk dan pratek demokrasi di negara-negara lain di dunia, yang pada umumnya berada pada dua kutub yaitu demokrasi leberal atau demokrasi sosialis. Demokrasi di negara Indonesia memang sangat unik, yang dinamakan oleh para founding fathers demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal tetapi juga bukan demokrasi sosialis. Kalau bisa dikatakan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berada diantara keduanya, dia tidak liberal (memberikan kebebasan sepenuhnya kepada warganya) tetapi juga tidak sosialis (memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada negara sebagai pemilik kedaulatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakatnya). Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, artinya demokrasi yang pelaksanaannya bersumber dan mewujudkan terlaksananya lima sila dengan Pancasila itu.

Untuk melihat kualifikasi (unsur-unsur) demokrasi menurut Gus Dur, dapat dilihat dari pandangannya tentang alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

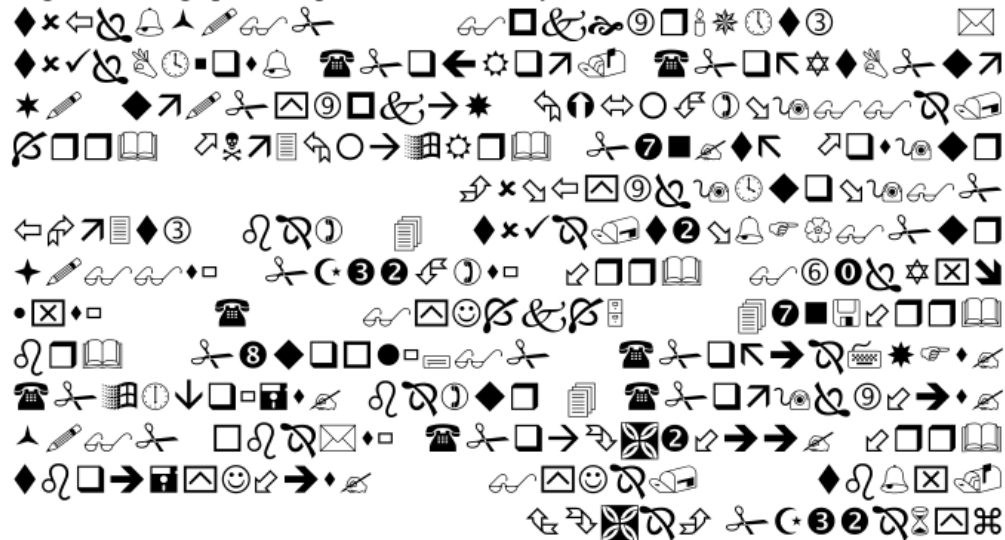
1. Persamaan di muka hukum (*musawwa*), dimana agama Islam yang merupakan agama hukum berarti setiap warga negara dipandang sama untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan.
2. Musyawarah (*syura*), artinya segala persoalan harus dibicarakan dengan pemikiran yang terbuka dan berpendapat secara bebas yang diakhiri dengan kesepakatan bersama.
3. Upaya perbaikan (Islam: *Diinul Islah*), artinya didalam sebuah kehidupan kita harus memiliki sebuah peningkatan yang lebih baik lagi dengan melalui berbagai proses perbaikan. Pada hakekatnya kehidupan di dunia harus mengarah kepada hal-hal yang baik, ini juga merupakan sebuah konsep dari demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu Islam dikatakan sebagai agama perbaikan.
4. Adanya keadilan (*adalah*). Jika Islam menopang sebuah demokrasi maka Islam juga menopang keadilan. Demokrasi sendiri hanya dapat ditegakkan dengan keadilan.
5. Orientasi kesejahteraan, ini merupakan hal yang penting dalam pembentukan keadilan, dimana orientasi kesejahteraan ini yang dapat membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan masyarakat.<sup>278</sup>

Melalui demokrasi, penegakan kedaulatan hukum diakukan secara bertahap – mengikuti diktum ushul fiqh (*legal theory Islam*): *mâ lâ yudraku kulluh, lâ yutraku kulluh* (apa yang tidak dapat diwujudkan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya). Adagium ini menunjukkan bahwa

<sup>278</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h87-89



penegakan hukum bisa dilakukan bertahap, tetapi keadilan sikap terhadap perbedaan etnis, agama, budaya maupun bahasa ibu harus diwujudkan secara serentak, tidak boleh bertahap, karena menyangkut hak-hak sipil warga negara.<sup>279</sup> Lagi pula Alquran sendiri menyatakan bahwa:



30

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika Dia (yang diberatkan dari kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>280</sup>

Kualifikasi yang pertama, persamaan di muka hukum menuntut perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa melihat etnis, agama, budaya, atau hal-hal lain yang merupakan sifat atau keadaan bawaan. Dengan memperhatikan hal ini menurut Gus Dur mestinya warga negara non-muslim pun berhak menjadi Kepala Negara. Kondisi sekarang ini di mana seorang Kepala Negara harus muslim merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, dan pengingkaran terhadap demokrasi. Kenyataannya mayoritas lembaga dan kelompok muslim masih tidak membenarkan Kepala Negara seorang non-

<sup>279</sup>Abdurrahman Wahid, "Tegas, tapi Tidak Keras", dalam *Kumpulan Kolom...*, h. 158

62

<sup>280</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama *Alquran dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, 2019, pdf.h. 134.

muslim. Ini menunjukkan bahwa agama Islam belum dapat berfungsi sebagaiendorong tegaknya demokrasi di Indonesia.<sup>281</sup>

Konsep persamaan ini berdasarkan pandangan bahwa semua manusia sama, diciptakan dari jenis yang sama, dan karena itu memiliki derajat yang sama, yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Hak dan kewajiban manusia juga sama, karena kedudukannya pun sama di depan hukum. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki sejak manusia lahir hanya ditujukan oleh Sang Pencipta j<sup>31</sup>ru untuk saling mengenal, seperti yang dinyatakan di dalam QS Al-Hujarat/49: 13 berikut:



*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*<sup>282</sup>

Musyawaharah sebagai kualifikasi kedua tertera di sila ke-empat Pancasila. Dalam Islam musyawarah (*syûra*) menempati posisi yang penting. *Syûra* inilah yang diterjemahkan sebagai demokrasi, meskipun sebenarnya *syûra* tidak sama persis dengan demokrasi. *Syûra* memiliki pengertian universal, yang dapat dilihat dari sudut:

*Pertama, syûra dalam artinya yang luas dan umum meliputi setiap bentuk tukar pendapat tentang semua objek dan mengenai setiap ketetapan yang dihasilkan setelah mendapat, termasuk mereka yang mengeluarkannya dan karakter dari ketetapan itu*

*Kedua, syûra tidak berbentuk khusus yang terbatas paa kekuasaan para penguasa dan terikatnya orang yang memegang kekuasaan dalam menggunakannya dengan ketetapan wakil-wakil umat yang dikeluarkan dengan syûra. Syûra lebih luas dari pada itu, dan lebih dalam asas-asasnya, karena*

<sup>281</sup> J<sup>62</sup>urrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, 288.

<sup>282</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.755

*syûra merupakan asas dari kemerdekaan pribadi dalam jama'ah yang memberikan haknya yang fitri dalam ikut serta menghasilkan ketetapan-ketetapan secara kolektif.*<sup>283</sup>

Sebagai bentuk pengambilan keputusan yang dianjurkan oleh Allah, perintah melakukan musyawarah dijelaskan oleh Allah bahkan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Qur'an. Ayat yang memerintahkan melakukan musyawarah di antaranya QS. *Ali Imran/3: 159*:



*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad ) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*<sup>284</sup>

Menurut Saidurrahman, ayat ini menjelaskan jika terjadi perbedaan pendapat di antara Rasulullah dan para sahabat atau antara sesama sahabat, maka jalan ke luar yang pertama adalah pernyataan maaf. Kalau hal ini sudah berhasil dilakukan, itu menunjukkan prinsip musyawarah sudah dilakukan. Persyaratan maaf sebelum musyawarah, dimaksudkan agar keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut bisa diterima dengan baik oleh semua pihak, dan musyawarah pun berlangsung dengan baik dan lancar tanpa perlu bertahan dengan pendapat dan pendirian masing-masing. Dalam kehidupan berpolitik, musyawarah selalu diakhiri dengan voting yang diartikan sebagai

<sup>283</sup>Taufiq asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*..., h. 25-26.

<sup>284</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 95

demokrasi yang paling baik.<sup>285</sup> Sikap legawa menerima hasil keputusan musyawarah akan menjaga persatuan tetap utuh.

Kualifikasi ketiga dari demokrasi, upaya terus menerus melakukan perbaikan. Upaya perbaikan terus menerus adalah prinsip demokrasi, karena demokrasi merupakan proses yang berjalan terus dalam upaya untuk memperbaiki kehidupan yang dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga seluruh anggota masyarakat. Ini sama dengan sifat Islam sebagai agama perbaikan, agama inovasi (dînul Ishlah).<sup>286</sup>

Upaya perbaikan yang terus menerus itu, dalam pandangan Islam harus menuju kepada kehidupan yang abadi di akhirat, karena kehidupan akhirat itulah yang lebih baik, dan langgeng, seperti ungkapan dalam QS. Al-A'la/87:17:



“Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal”.<sup>287</sup>

Upaya memperbaiki kehidupan yang dilakukan secara bersama-sama, pihak pemerintah dan rakyat, tidak akan tercapai jika masih terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, Gus Dur menghubungkannya dengan Islam. Gus Dur meyakini bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan toleran sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya, Islam adalah keyakinan yang egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan yang tidak adil karena alasan kelas, suku, ras, gender atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat.<sup>288</sup>

Gus Dur sendiri mengingatkan bahwa dari sudut pandang agama (Islam), diharuskan untuk bersikap adil dalam memutuskan sesuatu. Jangan sampai kebencian terhadap seseorang atau suatu kaum membuat perlakuan tidak adil terhadap orang atau kelompok itu, seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam QS. Al-Mâidah/5: 8:



<sup>285</sup>Saidurrahman, *Tafsir Ayat-ayat Politik*, (Medan: Citapustaka Media, 2013), h. 38

<sup>286</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara...*, 77-8

<sup>287</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,h. 88

<sup>288</sup>Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid”, Pengantar dalam *Prisma Pemikiran...*, h. xxxi





30

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>289</sup>

Kata “adil” secara bahasa berarti lurus<sup>19</sup> jujur, dan tidak khianat. Adil berarti ada di tengah-tengah antara dua hal. Dalam soal keadilan ini, Islam mengenal *al-Kulliyat al-<sup>12</sup>ams* (lima jaminan dasar), yaitu jaminan atas keselamatan fisik/pribad<sup>35</sup>ari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifzhu an-nafs*), jaminan atas keselamatan keyakinan agama, tanpa paksaan untuk berpindah agama (*hifzhu ad-din*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifzhu an-nasl*), keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum (*hifzhu al-mâl*), dan keselamatan hak milik dan profesi (*hifzhu al-<sup>3</sup>qli*).<sup>290</sup>

Jaminan atas keselamat<sup>31</sup> fisik warga negara, mengharuskan adanya pemerintah yang taat hukum, pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), dengan perlakuan adil terhadap semua warga tanpa kecuali. Hanya dengan supremasi hukum lah, persamaan hak dan derajat bisa tercapai, dan ini akan berimbas kepada keadilan sosial yang akan terwujud dengan sebenar-benarnya.

Jaminan dasar terhadap keselamatan keyakinan (agama) menjadi landasan bagi hubungan yang harmonis antarumat beragama, yang dikembangkan atas dasar sikap saling menghormati, dan pada akhirnya muncul sikap tenggang rasa dan saling pengertian. Kalau tenggang rasa dalam hal agama atau keyakinan bisa dibina, maka sikap yang sama akan lebih mudah dilakukan untuk perbedaan politik dan ideologi. Islam sendiri, dengan ajaran tauhid-nya memberikan penghargaan kepada perbedaan pendapat dan keyakinan.

Jaminan dasar terhadap keselamatan keluarga menampilkan sisi moral dari ajaran Islam, di mana kesucian keluarga sangat dijunjung tinggi. Keluarga adalah ikatan sosial yang paling dasar, tidak boleh dijadikan ajang manipulasi untuk tujuan apapun. Kesucian keluarga akan terpancar ke luar, dan menjadi awal pembentukan sikap toleransi. Jika masing-masing keluarga sudah terbiasa untuk bersikap toleran, maka di masyarakat akan muncul toleransi terhadap

77

<sup>289</sup>Lajinah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 216.

<sup>290</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*...h. 4-5, dan Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara*..., h. 180-184

perbedaan-perbedaan, dan ini berkorelasi dengan keimanan. Menjaga keimanan sendiri, tanpa mengganggu keimanan orang lain.

Jaminan dasar selanjutnya adalah jaminan dasar terhadap harta benda (*al-milk, property*). Jaminan ini merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Dalam hal ini lah tampak perbedaan yang paling mencolok dari liberalisme dan sosialisme.

Kelima jaminan dasar di atas je<sup>14</sup> menunjukkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan-perbedaan. Inilah universalitas ajaran Islam, namun universalitas ajaran saja tidak cukup. Watak kosmopolitanisme ajaran Islam juga sama pentingnya. Watak kosmopolitanisme peradaban Islam ini muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik, yang sudah memperlihatkan bentuknya sejak awal Islam ada. Kosmopolitanisme peradaban Islam akan berada pada puncaknya atau pada titik optimal ketika keseimbangan antara keenderungan normatif dan kebebasan berfikir semua anggota masyarakat (termasuk yang non-muslim) tercapai. Ini yang dinamakan kosmopolitanisme yang kreatif.<sup>291</sup>

Yang terakhir adalah jaminan dasar terhadap profesi. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk memilih profesinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kebebasan untuk memilih profesi berarti kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan, sekaligus menanggung sendiri kemungkinan kesuksesan ataupun kegagalannya. Pilihan atas profesi pada sisi yang lain tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang memiliki ukuran-ukurannya sendiri.

Pada akhirnya setelah semua kualifikasi (unsur) demokrasi yang dijelaskan di atas dilakukan, maka akan tercapai unsur yang kelima, yaitu orientasi kesejahteraan. Tidak ada bentuk demokrasi manapun yang tidak berorientasi kesejahteraan. Pada demokrasi yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah kesejahteraan semua anggota masyarakat atau warga negara. *Kulliyat al-khams* di atas juga bermakna tercapainya kesejahteraan ketika kelima jaminan atas hak itu terpenuhi.

Upaya membangun kehidupan bernegara yang demokratis harus dimulai dengan pembangunan DPR yang kuat sebagai perwakilan rakyat agar dapat mengontrol pemerintah supaya tidak menjadi korup dan bertindak sewenang-wenang. Kontrol dari DPR tidak bermaksud untuk melemahkan pemerintah, tetapi agar fungsi *check and balances* dapat berjalan dengan baik dan tepat. Kasus-kasus politik yang terjadi antara DPR dan pemerintah harus diproses dan diselesaikan dengan benar dan adil, karena sistem politik demokratis yang

<sup>291</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h.

sedang dan akan dibangun di negeri ini memang ditujukan untuk memberi jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>292</sup>

Perjuangan menegakkan demokrasi bukan pekerjaan ringan, dan dia tidak akan selesai hanya dalam waktu lima atau sepuluh tahun. Penegakan demokrasi butuh waktu 80 sampai 90 tahun. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk itu: pendekatan politis, dan pendekatan kultural. Pendekatan politis dilakukan dengan menentang penguasa atau menentangnya secara langsung, sementara pendekatan kultural lebih didasarkan pada alternatif-alternatif yang mengutamakan kebersihan perilaku di bidang pemerintahan, melakukan perlawanan tanpa melawan penguasa secara langsung. Hanya dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, proses demokratisasi dapat ditegakkan.<sup>293</sup>

### C. Pluralitas dalam Negara Demokrasi Indonesia

Secara etimologis, pluralisme berasal dari pluralitas yang artinya kebanyakan, kemajemukan, dan keragaman. Kata ini pertama kali digunakan untuk orang-orang yang memiliki beberapa jabatan dan kedudukan di lingkungan gereja. Laotze menjadi tokoh pertama yang menggunakan istilah pluralisme dalam karyanya, metafisica, pada tahun 1841. Namun demikian, dalam konteks filsafat agama, istilah pluralisme digunakan sebagai afirmasi atas kebenaran semua agama.<sup>294</sup>

Para penganut pluralisme agama mengajukan beragam interpretasi dan asumsi teoritis yang berbeda-beda. Interpretasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Banyaknya agama. Interpretasi ini hanya mengakui keberadaan agama-agama yang beraneka ragam di dunia. Adapun perkara agama mana yang benar dan mana yang tidak Bukankah fokus mereka. Persoalan utama mereka berkisar pada tema kerukunan hidup antar umat beragama yang serba majemuk. Interpretasi ini pada intinya tak lain adalah toleransi yang dapat diderivasi dari perlakuan Islam terhadap ahli kitab.
2. Banyaknya agama yang benar. Interpretasi ini menegaskan bahwa semua agama itu benar, sejajar, sama rata. Tak ada agama yang lebih utama di atas agama lain.
3. Banyaknya agama tak murni. Interpretasi ini mengklaim semua agama yang berbeda-beda itu mengandung sekeping hakikat murni namun tak satupun yang benar secara mutlak dan sepenuh-penuhnya.

<sup>292</sup>Abdurrahman Wahid, *Abdurrahman Wahid Menjawab...*, 50

<sup>293</sup>Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab...*, h. 10-11.

<sup>294</sup>Muhammad Hasan Qordan Qaramaliki, *Alquran dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Sadra Press, 2011), h. 3.

4. Paling sempurna agama tertentu. Interpretasi ini mengakui Setiap agama sebagai kebenaran, namun percayai agama tertentu-khususnya- agama tradisional mereka sendiri-sebagai yang paripurna dan punya sederet keunggulan khas.
5. Banyak isme yang benar. Ini model radikal dari sekian interpretasi pluralisme. Dalam klaimnya, bukan hanya semua agama yang beraneka ragam itu berada di atas kebenaran, malah semua paham atheistik dan materialistik seperti komunisme, juga diklaim nilai kebenarannya.
6. Inklusivisme. Dalam interpretasi ini, kaum pluralis menolak apapun bentuk hakikat kebenaran semua agama selain agama nya sendiri. Kendati demikian, mereka percaya bahwa semua umat beragama selain mereka sepanjang komit pada agamanya masing-masing, niscaya berada dalam naungan Rahmat, Karunia, dan kasih sayang Tuhan. Mereka merupakan penganut tulus penanti Tuhan dari agama-agama yang lain.<sup>295</sup>

Adalah fakta bahwa keanekaragaman ada di seputar kehidupan manusia dimanapun dia berada. Fakta keanekaragaman tampak jelas dalam semua segi kehidupan sosial bahkan politik. Individu mengungkapkan preferensi berbeda-beda, barangkali bahkan pertimbangan 'reflektif' berbeda-beda (maksudnya, berdasarkan pengetahuan yang memadai, dipertimbangkan dengan matang, dan 'imparsial' dengan sepantasnya) ketika harus mengatur kehidupan personal dan kolektifnya sendiri-sendiri. Seperti diakui John Rawls, yang memiliki relevansi politik khusus ialah fakta bahwa orang 'berbeda pandangan mengenai prinsip-prinsip yang mendefinisikan aturan-aturan dasar asosiasi mereka'<sup>296</sup>

Dalam pandangan Budhy M<sup>37</sup>awar-rachman, penolakan terhadap pluralitas dilatarbelakangi beberapa persepsi. Pertama, sementara pluralitas diakui sebagai sunnatullah, pluralisme dianggap sebagai ancaman, yaitu ancaman terhadap akidah. Pengakuan terhadap pluralitas dianggap akan melemahkan iman. Kedua, pluralisme dianggap juga sebagai ancaman terhadap identitas, sebab dalam pluralisme, identitas akan lebih ke dalam monolitas masyarakat. Dasar pemikirannya adalah dalam pluralitas kebenaran mutlak akan diganti<sup>22</sup>ngan kebenaran relatif. Kebenaran tidak lagi tunggal, melainkan plural. Ketiga, ancaman terhadap eksistensi agama akan timbul dengan diakuinya kebenaran semua agama, sehingga dikuatirkan akan terjadi sinkretisasi agama-agama yang akan melahirkan agama publik (*public religion*) yang meramu ajaran semua agama.<sup>297</sup>

<sup>295</sup>Muhammad Hasan Qardan Qaramaliki, *Alquran ...*, h. 4-5.

<sup>296</sup>Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, terj. Derta Sri Widowatie, (Ba<sup>37</sup>ng: Nusa Media, 2012), h. 546,

<sup>297</sup>M. Dawam Rahardjo, "Kata Pengantar" dalam Budhy Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. L.



29 Untuk memahami pluralisme tidak cukup hanya dengan memahami bahwa masyarakat kita majemuk, beranekaragam baik dari sisi 58 suku, adat istiadat, maupun agama, yang justru hanya akan menunjukkan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Pluralisme juga merupakan suatu keharusan bagi keselamatan manusia mengingat betapa pluralnya masyarakat kita seperti yang sudah diungkap di atas.<sup>298</sup>

Dalam hubungannya dengan agama, ada tiga sikap berkenaan dengan pluralisme dalam teologi agama-agama, yaitu: eksklusivisme, inklusivisme, dan paralelisme. Pembagian sikap ini pada awalnya dimunculkan ketika melihat wacana pluralisme dalam tradisi pemikiran Kristiani, tetapi hal yang sama juga bisa dipergunakan untuk menganalisis sikap keberagaman umat Islam terhadap wacana pluralisme tersebut.

Pertama, sikap eksklusif. Sikap ini yang paling dominan ada di kalangan umat beragama, termasuk Kristiani dan Muslim. Dalam teologi Kristiani, 95 pandangannya adalah Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14: 6).<sup>299</sup> Di kalangan Islam beberapa ayat yang biasa dianggap sebagai ungkapan 40 eksklusifitas Islam, di antaranya adalah:

“Hari ini orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Janganlah kamu takut kepada mereka; takutlah kepada-Ku. Hari ini Ku sempurnakan agamamu bagimu dan Ku-cukupkan karunia-Ku untukmu dan Ku-pilihkan Islam menjadi agamamu”<sup>300</sup>

Kedua, sikap Inklusif. Menurut paradigma ini kehadiran penyelamatan (*the salvific presence*) dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain dibedakan dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi inklusif artinya percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus. Jika paradigma ini dipergunakan untuk menilai Islam, maka Islam inklusif menegaskan sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut al-Islam (ketundukan dan sikap pasrah), tidak berarti bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka adalah Islam dan mereka adalah muslim, tetapi mereka percaya bahwa agama semua nabi adalah satu. “Para

<sup>298</sup>Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,” 32 publikasi 10 Agustus 1999.

<sup>299</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44.

<sup>300</sup>Q.S. al-Ma'idah/5: 3.

nabi adalah saudara satu ayah; ibu mereka banyak, namun agama mereka satu".<sup>301</sup>

**Ketiga, sikap Pluralisme.** Paradigma ini percaya bahwa setiap agama (agama-agama lain di luar Kristen) mempunyai jalan keselamatannya sendiri. Klaim bahwa Kristianitas adalah satu-satunya jalan (sikap eksklusif), atau yang melengkap atau mengisi jalan yang lain (sikap inklusif), keduanya harus ditolak, demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Islam pluralis adalah pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusif. Menurut paradigma ini, "perbedaan antara Islam dan Kristen (dan antar agama secara umum) diterima sebagai perbedaan dalam meletakkan prioritas antara perumusan iman dan pengalaman iman". Para penganut Islam pluralis ini beranggapan bahwa setiap agama pada dasarnya distruktur oleh dua hal itu: perumusan iman, dan pengalaman iman. Islam mendahulukan perumusan iman (tauhid), dan pengalaman imannya mengikuti perumusan iman tersebut, sementara Kristen mendahulukan pengalaman iman, sementara perumusan iman akan mengikuti pengalaman iman.<sup>302</sup>

Selain teori Pluralisme yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini mencoba menyandingkan teori pluralisme Agama Alwi Shihab. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pluralisme sebagai kerangka interaksi sosial merupakan konsep yang maha penting. Kemajemukan merupakan bagian dari sunnatullah, baik itu dari sisi ras, kebangsaan, agama dan pemikiran keagamaan. Pluralisme hendak merawat kemajemukan tersebut dalam rangka menciptakan harmoni kehidupan. Peradaban manusia tidak akan berkembang bahkan hancur tanpa adanya stabilitas dan harmoni. Akan tetapi ketika ide dan paham pluralism disandingkan dengan agama dan paham keagamaan, muncul kontradiksi-kontradiksi yang kadangkala sulit untuk didamaikan. Karena itu, ada batasan pluralism sebagaimana diungkapkan Alwi Shihab memiliki persamaan dengan ajaran Islam. Persamaan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>303</sup>

#### **10. Keharusan saling mengenal.**

Keharusan saling mengenal menurut pandangan Islam dan Alwi Shihab tidak ada perbedaan yang mendasar. Keduanya menerima bahwa keharusan saling mengenal itu adalah suatu yang sangat dianjurkan bagi umat muslim dan non muslim bahkan saling mengenal bersifat universal, atau semua manusia pasti memerlukan kebutuhan saling mengenal. Dengan saling mengenal juga dapat memberikan pengetahuan baru dari orang lain, bertukar informasi, saling menjaga dan banyak lainnya. Begitu pentingnya sebuah silaturahmi sampai Islam menetapkan bahwa saling mengenal ini

<sup>301</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis....*, h. 47.

<sup>302</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis....*, h. 48-49.

<sup>303</sup>Khoiriyah, *Pluralisme Agama Dalam Perspektif Alwi Shihab, Digital Library UIN Sunan Ampel, 2015.*



**10** berhukum sunat, yang artinya akan mendapatkan pahala di akhirat di samping dari manfaat yang di dapat di dunia.

#### **10** Keberagamaan keyakinan.

Alwi Shihab dalam keberagamaan keyakinan menyatakan, bahwa ide keberagamaan keyakinan yang direalisasikan dalam bentuk kesiapan untuk saling membuka diri dan berdialog dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat. Dan dalam tataran praktisnya, Alwi menekankan peran penting Islam sebagai agama mayoritas dan kaya dengan sekte untuk memelopori upaya-upaya tersebut. Apalagi, pula sebagai agama formal, Alwi memang mengajarkan kebebasan beragama, yang merupakan pintu pluralisme dan kemanusiaan. Sedangkan keberagamaan keyakinan yang dikembangkan Alwi Shihab di Indonesia, adalah pluralisme agama yang menolak sinkretisme dan bersyarat, yaitu keharusan adanya komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing, yang disandarkan pada ayat Al-Qur'an. Namun, kemudian muncul pertanyaan mengenai sejauhmana batasan "committed" yang beliau maksud, mengingat faktanya Islam bukan sekedar agama ritual seperti halnya agama lain, melainkan merupakan "*ad-din*" (sistem hidup) yang diantaranya mengatur tentang pola hubungan yang jelas antara Islam-non Islam, Muslim dan non-Muslim di dalam masyarakat Islam.<sup>304</sup>

Keberagaman keyakinan dalam Islam dan Alwi Shihab merupakan suatu keniscayaan. Keduanya memiliki pemikiran yang sama tentang keberagamaan keyakinan sebagai jalan satu-satunya kebenaran. Paham ini menegaskan bahwa agama dapat membawa seseorang menuju Tuhan. Tuhan hanya menerima amal sholeh dan keberagamaan yang benar. Semakin banyak seseorang berbuat baik maka akan semakin besar peluang dia mendapatkan syurga, tak peduli apapun agamanya. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap Agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan, tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama.

#### **10** Keberagamaan etnis.

Alwi Shihab dalam memaknai keberagamaan etnis adalah suatu kecenderungan alamiah untuk melakukan kekerasan, kehausan untuk dominasi, keinginan untuk membalas dendam, keuntungan material, kemauan untuk merampas hak orang lain, adalah sebab-sebab jahat dan zalim. Dengan ringkas, agresi adalah terlarang. Bagi Alwi, perang-perang yang dilakukan nabi Muhammad saw. Menunjukkan sifat-sifat khusus perang Islam, yaitu adil dalam motifnya, defensive dalam permulaannya,

**37**

<sup>304</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Jakarta: Mizan, 1998), h. 41.

10

tinggi dalam cara pelaksanaannya, damai dalam tujuan akhirnya, dan berperikemanusiaan dalam memperlakukan mereka yang dikalahkan.

Allah Swt. telah memberikan jalan keluar untuk menyikapi keberagaman tersebut, yaitu pandanglah keberagaman sebagai rahmat yang harus disyukuri, dan anggaplah keragaman merupakan nikmat dari Allah. Artinya, dengan adanya keberagaman kita bisa saling mengenal, berdialog, menguji argument, dan saling mempertajam pikiran dalam mengembangkan kehidupan. Karena jika tidak ada keberagaman, agama akan berjalan ditempat, artinya agama akan stagnan dan tidak mempunyai ruang untuk memperluas pen<sup>10</sup>ahuan

Dengan demikian, pluralisme adalah sebuah keniscayaan dan kehendak Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah keniscayaan kita untuk tetap bersikap tasamuh atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau Agama dengan kita, apapun itu namanya. Penolakan terhadap pluralisme bisa dipandang sama dengan penolakan terhadap realitas dan sekaligus menolak kehendak Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sebenarnya ingin agar eksistensi pluralitas manusia dan alam semesta benar-benar dipikirkan dan direnungkan dalam-dalam oleh manusia.

Konsep pluralisme Alwi Shihab dibagi menjadi menjadi beberapa un<sup>50</sup>inti, yakni:<sup>305</sup>

1. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah *keterlibatan aktif* terhadap kenyataan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai di mana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar di mana kita berbelanja. Tapi seseorang dapat dikatakan menyandang sifat <sup>18</sup>sebut ( aktif) apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.
2. Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun interaksi positif antara penduduk, khususnya di bidang agama sangat minim.
3. Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan realitivisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berfikir seseorang

<sup>305</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, h. 41.



atau masyarakat. <sup>36</sup> Konsekuensi dari relativisme agama <sup>36</sup> doktrin agama harus dinyatakan benar. Seorang pluralis paling tidak menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulan terhadap pihak lain.

4. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme yaitu menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari berbagai agama untuk dijadikan <sup>36</sup> bagian integral agama baru tersebut. Konsep pluralisme di atas apabila hendak diterapkan di Indonesia maka harus bersyarat satu, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra <sup>10</sup> dialognya, tapi juga harus *committed* terhadap agama yang dianutnya. Sejuahmana batasan "*committed*" yang beliau maksud, mengingat faktanya Islam bukan sekedar agama ritual seperti halnya agama lain, melainkan merupakan "*ad-din*" (sistem hidup) yang diantaranya mengatur tentang pola hubungan yang jelas antara Islam-non Islam, muslim dan non-muslim di dalam masyarakat <sup>58</sup> at Islam.

Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati <sup>10</sup> mitra dialognya, tapi juga harus *committed* terhadap agama yang dianutnya. Sejuahmana batasan "*committed*" yang beliau maksud, mengingat faktanya Islam bukan sekedar agama ritual seperti halnya agama lain, melainkan merupakan "*ad-din*" (sistem hidup) yang diantaranya mengatur tentang pola hubungan yang jelas antara Islam-non Islam, Muslim dan non-Muslim di dalam masyarakat Islam.

Pluralisme adalah suatu pandangan yang tidak hanya berbicara tentang pentingnya menghargai keragaman, namun ia juga adalah sebuah bentuk kontribusi aktif dalam keragaman itu sendiri. Bagi Gus Dur, kerag<sup>9</sup>man adalah sebuah sunnatullah yang telah didesain dan ditetapkan oleh Tuhan agar manusia dapat saling belajar satu sama lain untuk saling mengisi dan saling menyempurnakan. Di mata Gus Dur, pluralisme bukanlah suatu konsep yang negatif sebagaimana yang sering dituduhkan orang karena secara substansi, pluralisme sejalan dengan nilai Islam, Pancasila, dan juga konstitusi negara di mana ketiganya memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan. Karena itu, gagasan pluralisme dapat menjadi tawaran untuk mengawal Indonesia ke depan agar terhindar dari mengerasnya paham radikalisme agama.

Komitmen Gus Dur terhadap pluralisme yang diwujudkan dalam bentuk pembelaan terhadap kaum minoritas sebenarnya telah Gus Dur tunjukkan jauh sebelum ia menjadi presiden. Gagasan pluralisme yang diusung oleh Gus Dur adalah suatu gagasan yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari suatu proses pergumulan yang cukup panjang, yang diwarnai oleh persinggungan dengan berbagai tradisi pemikiran.

Pluralisme yang diusung Gus Dur bukanlah suatu pandangan yang bermaksud ingin menyamakan semua agama. Gus Dur menyadari bahwa setiap agama tentu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing.

Konsep pluralisme Gus Dur dapat dilihat dari sepak terjang pemikiran dan tindakannya yang sering menimbulkan kontroversi. Relevansi pluralisme Gus Dur dalam konteks keindonesiaan tercermin dalam tindakannya sebagai berikut:

### **1. Tionghoa dan Kong Hu Cu di Indonesia**

Gus Dur adalah seorang yang konsisten dalam membela hak-hak kaum minoritas yang tertindas. Jasa besar Gus Dur dalam pembelaannya terhadap diakuinya agama Kong Hu Cu di Indonesia tidak akan pernah terlupakan untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tionghoa. Gus Dur memulai langkah penting dalam kehidupan negara bahwa semua warga negara mesti dilakukan dengan adil dan setara.

### **2. Gus Dur dan Ahmadiyah**

Gus Dur dalam menegakan pluralisme di Indonesia adalah pembelaannya terhadap kelompok aliran Ahmadiyah. Warga Ahmadiyah sangat menghormati jasa besar Gus Dur terhadap mereka. Gus Dur dengan lantang menyatakan, "Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah". Pernyataan itulah yang dilontarkan Gus Dur ketika aliran Ahmadiyah menjadi bulan-bulanan kelompok radikal. Bahkan ia menawarkan rumahnya di Ciganjur untuk berlindung, jika pemerintah dianggap tidak lagi bisa melindungi mereka. Gus Dur tidak membela keyakinan Ahmadiyah, tetapi membela hak warga minoritas yang harus tetap dilindungi oleh negara. Menurutnya, itu adalah amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, kenyataannya Ahmadiyah terus-menerus menjadi sasaran kekerasan dan persekusi. Menteri Agama Suryadharma Ali bahkan secara diskriminatif mengeluarkan pernyataan agar Ahmadiyah dibubarkan. Kasus Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia menurut Gus Dur adalah sebagian tantangan dari begitu banyak hal-hal rumit yang harus dihadapi oleh umat Islam. Tetapi merespon dengan kekerasan sesuatu yang tampak dalam pandangan bangsa ini. Kaum muslimin tidak hidup di dunia ini sendiri dalam kesergaman, melainkan ditakdirkan oleh Allah untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki paham lain dalam kemajemukan.

### **3. Terorisme di Indonesia**

Gus Dur tanpa lelah mengupayakan terwujudnya perdamaian dunia. Tindak kekerasan walaupun atas nama agama dinilainya sebagai tindakan terorisme. Gus Dur mengancam keras pengeboman di Bali dan pertikaian berbau SARA di Maluku, Poso, Aceh, dan Sampit. Tindakan-tindakan



destruktif tersebut sangat bertentangan dengan Islam, karena Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Tindakan kekerasan atas nama agama disebabkan sikap para pelakunya yang mementingkan institusi atau lembaga keislaman yang diyakininya superior. Narsisme Islam tersebut akan merasa terancam dengan cara hidup dan kemajuan peradaban Barat. Karena tidak dapat membuktikan secara pasti dan masuk akal klaim superioritasnya, mereka mengambil cara-cara kekerasan dan terorisme. Terorisme juga dapat didorong oleh rasa frustrasi terhadap ketidakadilan sosial dan KKN yang merajalela. Dengan demikian, pemberantasan terorisme harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan KKN oleh birokrasi negara.

Gus Dur menganjurkan untuk membuka dan menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan damai di tengah-tengah masyarakat. Salah satu buah pemikiran yang begitu mencolok dari Gus Dur adalah pandangannya tentang terorisme. Terorisme pada umumnya dilakukan oleh kalangan radikal Islam yang melakukan terror mengatasnamakan Islam, dan terjadi karena kekeliruan memahami Islam, yang bersumber dari dangkalnya pemahaman. Dalam bukunya yang berjudul *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, Gus Dur menuturkan bahwa dalam perspektif kelompok Islam Radikal, Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah agama, namun juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia.

Indonesia merupakan negara plural dengan ragam budaya, suku, etnis, dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu keragaman agama, etnis, maupun budaya membutuhkan sikap yang arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat tanpa melihat dan membedakan latar belakang satu sama lain. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka negatif terhadap kelompok lain. Konsekuensi menjadi masyarakat dari sebuah negara majemuk adalah menghadirkan sikap penghormatan atas pluralitas tersebut.

Dalam negara plural Indonesia tidak bisa dinafikan bahwa hubungan antar umat beragama mestinya juga didasari sikap tulus. Perbedaan agama memang seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan antar anak bangsa. Beberapa konflik yang terjadi di negara ini pun seringkali ditengarai sebagai konflik agama, meskipun setelah ditelusuri lebih jauh ternyata pemicunya lebih banyak adalah faktor kecemburuan sosial dan masalah-masalah ekonomi. Itu sebabnya menurut Gus Dur masalah pokok dalam hal hubungan antarumat beragama adalah pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. Pengertian yang ada selama ini masih sekedar saling menghormati, belum tumbuh rasa saling pengertian

yang tulus. Karenanya yang dibutuhkan untuk keutuhan bangsa ini adalah rasa saling memiliki (*sense of belonging*).<sup>306</sup>

Memana pada hakikatnya, sebuah masyarakat heterogen yang sedang tumbuh akan sulit untuk mengembangkan sikap saling pengertian yang mendalam antar etnis, budaya, bahasa ibu, dan agama yang berbeda. Jika pun terjadi saling pengertian, itu masih pengertian yang semu, masih bersifat nominal semata, masih pada tahap sekedar kurangnya kesalahpahaman. Pola hubungan harmonis seperti ini tidak memiliki daya tahan yang ampuh terhadap berbagai tekanan yang ada, baik dari perkembangan politik, ekonomi, dan budaya. Kerukunan yang rapuh ini bisa diistilahkan dengan Perang Dingin, seperti yang terjadi antara negara-negara adikuasa yang di permukaan kelihatan hidup berdampingan secara damai.<sup>307</sup>

Untuk tegaknya pluralisme dalam masyarakat bukan hanya terletak dalam pola hidup berdampingan secara damai, karena di Indonesia masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan disintegrasi. Harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme, yaitu dengan adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus, sehingga hubungan antar kelompok masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Banyak perkembangan yang terjadi, baik di bidang ideologi politik dengan mengambil wujud sebagai negara Islam, maupun di bidang hukum. Hukum agama pada masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fiqh dengan disistematisasi ke dalam beberapa mazhab. Seiring dengan itu muncullah keinginan untuk menyeragamkan pandangan dengan menampilkan wujud baru yaitu formalisme Islam. Dalam situasi seperti ini Gus Dur secara kritis mempertanyakan tentang kehidupan kaum muslimin yang berada di luar negara Arab akar-akar budayanya. Menurutnya realita itu semua menimbulkan tuntutan untuk membalik arus perjalanan Islam di negeri Indonesia. Suatu perubahan dari formalisme berbentuk Arabisasi total menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan Indonesia sendiri, dalam mengembangkan kehidupan beragama Islam di Indonesia.

Gus Dur memberikan beberapa ilustrasi mengenai istilah kata 'shalat' yang bisa diganti dengan kata 'sembahyang', karena sebenarnya kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Untuk itu, Gus Dur menggunakan istilah Pribumisasi Islam, maksudnya yang 'dipribumikan' adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan

<sup>306</sup>Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab...*, h. 16.

<sup>307</sup>Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab...* h. 15



6

peribadatan formalnya. Islam tetap Islam dimana saja berada. Tidak berarti semua harus disamakan 'bentuk luarnya'.

Gagasan Gus Dur tentang Pribumisasi Islam ini menjadi wacana yang ramai dibicarakan oleh banyak kalangan, baik di internal NU maupun di kalangan yang ada di luar NU termasuk di kalangan akademisi. Sebagai seorang tokoh intelektual yang memiliki latar belakang akademisi, kampus tentunya bukan hal yang asing baginya. Salah satu keberhasilan Gus Dur dalam mewacanakan transformasi nilai-nilai Islam di kalangan akademisi adalah karena kemampuannya dalam menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang sedang trend dan populer di kalangan kampus. Hal inilah yang membuat kalangan akademisi dapat menerima ide dan gagasannya tentang Pribumisasi Islam dan demokrasi.

Konsep tentang Pribumisasi Islam berangkat dari kebutuhan untuk menggambarkan realitas keberagaman umat yang membentuk suatu identitas keislaman semenjak Islam datang di nusantara. Gagasan tentang Islam Indonesia yang dilontarkan Gus Dur merupakan upaya kontekstualisasi Islam berhadapan dengan upaya sebagian muslim yang hendak menghilangkan konteks keindonesiaan dalam dakwah Islamnya, hingga idealitas Islam universal di dunia Arab yang merujuk pada simbolisasi budaya Arab tidak berusaha untuk didialogkan atau tidak diskusikan dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan tersendiri.

Ide-ide Gus Dur tentang Pribumisasi Islam memberikan pengaruh cukup luas terutama di kalangan NU, dan di tengah masyarakat idenya ini membuat Gus Dur dilabeli beragam penilaian. Beliau menguraikan tentang perubahan-perubahan besar dalam sejarah Islam. Dalam artian bukan ajarannya, melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri yang meliputi kelembagaannya.

Gus Dur menggambarkan ambivalensi hubungan agama sebagai sistem normatif dan kebudayaan sebagai kultur yang selalu berubah. Agama seharusnya memiliki keharusan menumbuhkan aturannya ke dalam aturan sosial. Sementara kebudayaan merupakan hasil perkembangan cara hidup manusia yang memiliki unsur-unsur tetap namun dengan fluktuasi-fluktuasi tertentu dari zaman ke zaman. Hal ini berbeda dengan manifestasi agama yang sering menggantungkan diri kepada kebudayaan, seperti manifestasi momen sakral melalui ikon, patung, lukisan, atau prosesi penyaliban Isa Almasih, hingga perayaan 10 Muharram dalam rangka memperingati cucu Nabi Muhammad Sayyidina Husein yang terbunuh Karbala. Dalam hal ini agama membutuhkan kebudayaan untuk membentuk keterikatan kultural antara pemeluk dengan ajaran normatif, serta media komunikasi bagi bahasa Wahyu atas realitas masyarakat.

Ada dua pendekatan metodologis yang digunakan oleh Gus Dur dalam Pribumisasi Islam yang merujuk dalam upaya menciptakan akomodasi agama terhadap kebutuhan lokalitas di masyarakat, yaitu<sup>5</sup>:

1. Mengacu pada akomodasi adat oleh Ushul fiqih. Gus Dur menyatakan: "Pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi atau sinkretisme sebab Ia hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Jadi, bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman Nash atau hukum agama, dengan tetap memberikan peranan kepada usul fiqih atau teori hukum agama dan kaidah fiqih atau kaidah hukum agama.
2. Akulturasi mistisisme. di sini terdapat kesinambungan metode dakwah Gus Dur dengan Wali Songo yang menggunakan tasawuf sebagai media akulturasi dengan agama pra Islam. Dalam sejarahnya, Islam disebarkan di tanah Jawa oleh para wali melalui dua pendekatan yaitu akomodasi Syariah/ hukum perdagangan adat serta terciptanya akulturasi antara sufisme dengan tradisi mistik Hindu Jawa sehingga membuat Islam mampu merengkuh geokultural di Jawa. Di pesisir, Islam mewujudkan diri dalam syariah logika dagang dan sistem patron-client ulama (Kyai), sedangkan di pedalaman/ agraris, Islam menampakkan isi batinnya berupa tasawuf, kultur keyakinan Hindu animisme masih kuat disana.

Pribumisasi Islam merupakan suatu upaya untuk menampik tafsir tunggal Islam sama dengan Arab atau Arabisasi. Pribumisasi Islam sangat menghargai nilai-nilai lokal dalam praktek Islam sehari-hari. Islam tidak selalu Arab karena umat Islam tumbuh di kultur masing-masing termasuk Indonesia. Salah satu aktualisasi Pribumisasi Islam adalah menolak berdirinya negara<sup>23</sup>ologi di Indonesia.

Gagasan pribumisasi Islam secara geneologis dilontarkan pertama kali oleh Gus Dur pada tahun 1980-an. Semenjak itu, Islam pribumi menjadi perdebatan menarik dalam lingkungan para intelektual; baik intelektual senior (tua) dengan intelektual muda. Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Bukankah arabisme atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah berarti mencabut akar budaya kita sendiri? Dalam hal ini, pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan

untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.<sup>308</sup>

Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini melintas antara agama dan budaya.

Pada konteks selanjutnya, akan tercipta pola-pola keberagamaan (Islam) sesuai dengan konteks lokalnya dalam wujud “Islam Pribumi” sebagai jawaban dari “Islam Autentik” atau “Islam Purifikatif” yang ingin melakukan proyek arabisme di dalam setiap komunitas Islam di seluruh penjuru dunia. “Islam Pribumi” justru memberi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama (Islam) di setiap wilayah yang berbeda-beda. Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak ada lagi anggapan Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut.<sup>309</sup>

Sebagai contoh, dapat dilihat dari praktik ritual dalam budaya populer di Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Kuntowijoyo, menunjukkan perkawinan antara Islam dan budaya lokal cukup erat. Upacara Pangiwahan di Jawa Barat, sebagai salah satunya, dimaksudkan agar manusia dapat menjadi wiwoho, yang mulia. Berangkat dari pemahaman ini, masyarakat harus memuliakan kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Semua ritual itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu bersifat mulia. Konsep mengenai kemuliaan hidup manusia ini jelas-jelas diwarnai oleh kultur Islam yang memandang manusia sebagai makhluk yang mulia.<sup>310</sup>

“Islam Pribumi” sebagai jawaban dari Islam autentik mengandaikan tiga hal. *Pertama*, “Islam Pribumi” memiliki sifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk menginterpretasikan ajaran. Dengan demikian, Islam akan mengalami perubahan dan dinamika dalam merespons perubahan zaman. Kedua, “Islam Pribumi” bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan terhadap ajaran dasar agama (Islam), tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respons kreatif secara intens.

<sup>308</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 111.

<sup>309</sup>Khamami Zada dkk., “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia”, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 14 (Jakarta: Lakpesdam, 2003), h. 9-10.

<sup>310</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), h. 235.



11

Ketiga, “Islam Pribumi” memiliki karakter liberatif, yaitu Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Dengan demikian, Islam tidak rigid dalam menghadapi realitas sosial masyarakat yang selalu berubah.

Dalam konteks inilah, “Islam Pribumi” ingin membebaskan puritanisme dan segala bentuk purifikasi Islam sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif Islam. Karena itulah, “Islam Pribumi” lebih berideologi kultural yang tersebar (spread cultural ideology),<sup>311</sup> yang mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural yang memusat, dan mengakui ajaran agama tanpa interpretasi, sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak akan ada lagi praktik-praktik radikalisme yang ditopang oleh paham-paham keagamaan ekstrem, yang selama ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian.

Permasalahannya apakah, Islam pribumi dapat dipandangabsah dalam perspektif doktrin Islam. Pengabsahan ini penting menyangkut sosialisasi dan internalisasi Islam pribumi sebagai wacana pembebasan umat di kalangan umat Islam sendiri. Kelompok puritan Islam telah menuduh Islam pribumi sebagai pengejawantahan dari praktik bid’ah yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Lebih lanjut, kelompok ini berkeyakinan ahli bid’ah adalah sesat (*dhalalah*). Dalam sejarah Islam Jawa telah direkam bagaimana upaya-upaya penguasa Islam waktu itu dalam memberangus praktik sufi<sup>24</sup> yang mereka tuduh telah menyimpang dari ortodoksi Islam.

Pro-ke<sup>63</sup>ra mengenai konsepsi Islam pribumi ini tidak bisa dihindarkan. Pada 8-9 Maret 1989 sekira 200 kiai berkumpul di Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon untuk “mengadili” Gus Dur. Dari sini muncul beberapa kubu yang saling berhadapan dalam menyikapi wacana yang digulirkan oleh Gus Dur terkait dengan gagasan Islam pribum<sup>33</sup>a.

Tetapi sebagaimana diakui Gus Dur sendiri, ia bukanlah yang pertama yang memulai. Ia adalah generasi pelanjut dari langkah strategis yang pernah dijalankan oleh Wali Songo.<sup>312</sup> Dengan langkah pribumisasi, menurutnya Wali Songo berhasil mengislamkan tanah Jawa, tanpa harus berhadapan dan mengalami ketegangan dengan budaya setempat.

Semenjak kehadiran Islam di nusantara, para ulama telah mencoba mengadopsi kebudayaan lokal secara selektif. Sistem sosial, kesenian, pemerintahan yang sudah pas tidak diubah, termasuk adat istiadat yang banyak dikembangkan dalam perspektif Islam. Hal ini yang memungkinkan

<sup>311</sup>Zada dk<sup>24</sup> *IslamPribumi*”, h. 12.

<sup>312</sup>Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006),h. 284.



14

budaya nusantara tetap beragam, walaupun Islam telah menyatukan wilayah ini secara agama. Dari segi cara berpakaian, mereka masih memakai pakaian adat, dan oleh ulama setempat dianggap sebagian telah cukup memenuhi syarat untuk menutup aurat. Kalangan ulama perempuan dan istri para kiai memakai pakaian adat, sebagaimana masyarakat setempat yang lain.

Strategi ini dijalankan disamping memperakrab Islam dengan lingkungan setempat, juga memberikan peluang bagi industri pakaian adat untuk terus berkembang, sehingga secara ekonomi mereka tidak terganggu dengan kehadiran Islam, kalau bisa justru dikembangkan. Pada periode ini Islam sangat kental dengan warna lokal, sehingga setiap Islam daerah bisa menampilkan keIslamannya secara khas berdasarkan adat mereka. Di situ, keislaman benar-benar menyatu dengan kenusantaraan atau keindonesiaan, tidak hanya dari segi adat istiadat, tapi juga pemikiran dan aspirasi politiknya yang berorientasi kebangsaan bukan keislaman.

Islam pribumi yang telah dilontarkan Gus Dur ini sesungguhnya mengambil semangat yang telah diajarkan oleh Wali Songo dalam dakwahnya ke wilayah Nusantara sekitar abad 15 dan 16 di pulau Jawa. Dalam hal ini, Wali Songo telah berhasil memasukkan nilai-nilai lokal dalam Islam yang khas keindonesiaan. Kreativitas Wali Songo ini melahirkan gugusan baru bagi nalar Islam yang tidak hanya meniru Islam di Arab. Tidak ada nalar Arabisme yang melekat dalam penyebaran Islam di Nusantara. Para Wali Songo justru mengakomodir Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan.<sup>313</sup> Misalnya yang dilakukan Sunan Bonang dengan mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa dzikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transcendental. “Tombo Ati” adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan Sunan Bonang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan pandawa-kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara *nafy* (peniad) dan *ithbât* (peneguhan).

Begitu pula yang dilakukan Sunan Kalijaga yang memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh apabila diserang pendiriannya lewat purifikasi. Mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan, jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta Baju Takwa, Perayaan Sekaten,

55

<sup>313</sup>Zainul Milal Bizawie, “Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan Antropologis Pribumisasi Islam”, dalam Jurnal *Tashwirul Afkar*, No. 14 (Jakarta: Lakpesdam, 2003), h. 51.

<sup>14</sup> Grebeg Maulud, Layang Kalimasada, lakon wayang petruk jadi raja. Profil pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin serta pari diyakini sebagai <sup>24</sup>nya Sunan Kalijaga.

Sementara Sunan Kudus mendekati masyarakat kudu dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu Budha. Hal itu terlihat dari arsitektur masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran atau padusan wudhu yang melambangkan delapan jalan Budha, adalah sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. <sup>14</sup>

Itulah yang dilakukan Wali Songo dalam dakwah Islam ke Nusantara. Dengan tidak melakukan purifikasi ajaran secara moral, melainkan melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi sosio-budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak melakukan aksi perlawanan atau penolakan terhadap ajaran baru yang masuk. Dengan demikian, Islam pribumi sebagai bagian dari pertarungan wacana merupakan kelanjutan dari gagasan-gagasan sebelumnya dengan semangat dan tantangan yang sama berarti. Tantangan yang dihadapi Islam pribumi adalah <sup>6</sup>universalisasi Islam dalam segala bentuknya yang mengarah pada arabisme Islam.

Ada dua tulisan Gus Dur yang berkaitan langsung dengan tema pribumisasi Islam. Pertama, artikel “Salahkah jika dipribumikan” yang berbentuk tulisan kolom di majalah Tempo pada 16 juli 1983, dan kedua, “Pribumisasi Islam”, sebuah antologi dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh. Gagasan “pribumisasi Islam” dimaksudkan Gus Dur sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya dengan norma (*syariat*), sebagaimana juga menjadi persoalan dalam ushul fiqh.

Menurut Gus Dur, tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan akan membuatnya tidak gersang.<sup>314</sup> Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memang mempunyai wilayah tumpang tindih, sebagaimana filsafat dan ilmu pengetahuan. Seseorang tidak akan bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Di antara keduanya (agama dan budaya) terjadi tumpang tindih dan sekaligus beda.

“Pribumisasi Islam” dengan demikian, menurut Gus Dur adalah suatu pemahaman yang mempertimbangkan kebuyuhan-kebutuhan lokal didalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. “Pribumisasi Islam” bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari

<sup>314</sup>Tim INCRoS, *Beyond the Symbols...*, h. 43.

6 budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan qawâ'id al-fiqh. Di sini, wahyu dalam pandangan Gus Dur harus dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan.<sup>315</sup>

Dalam proses ini pembauran Islam dengan budaya menurut Gus Dur tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keislamannya. Alquran harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam salat, sebab hal ini telah merupakan norma. Sedangkan terjemahan Alquran hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan Alquran itu sendiri. Proses pergulatan dengan kenyataan kebudayaahn tidaklah dimaksudkan mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama 6 am. Oleh karena itu yang dipribumikan sebagai fokus. Menurut Gus Dur, Islam harus tetap Islam di manapun saja. Nar33n tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Dalam hal ini harus ada titik temu antara Islam dan budaya.<sup>316</sup> Salah satu lontarannya sebagai implementasi gagasan "pribumisasi Islam", yang menimbulkan kontroversi, yaitu 6 ssalamualaikum yang disamakan oleh Gus Dur dengan ahlan wa sahlan. Artinya, kata Gus Dur, al-salâm 'alaykum bisa diganti dengan "selamat pagi" atau "apa kabar". Gagasan "pribumisasi Islam" ini karuan saja membuat geger di kalangan NU. Sampai akhirnya sekitar 200 kiai berkumpul di pondok pesantren Darut Tauhid Arjawina 87 un Cirebon untuk mengadili Gus Dur.

Gus Dur menggunakan istilah "Pribumisasi Islam", karena kesulitan mencari kata lain. Domestikasi Islam, baginya, terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengebirian pendirian. Gagasan Gus Dur tersebut dilata 19 keresahannya atas adanya golongan-golongan yang mendesakkan agar hukum agama diseragamkan dan difor 19 lisir; harus ada sumber pengambilan formalnya, Alquran dan Hadis. Pandangan kenegaraan dan ideologi politik tidak kalah di tuntutan harus universal. Yang benar hanyalah pandangan Sayyid Qutb Abû al-Alâ al-Mawdûdî atau Ayât Allâh Khumayni. Pendapat lain, yang sarat dengan latar lokal masing-masing, mutlak dinyatakan 19n salah, karena itu harus segera dipurifikasi.

Dalam keadaan demikian, berarti kehidupan kaum Muslim tercabut dari akar-akar budaya lokalnya, terlepas dari kerangka kesejarahan masing-masing tempat. Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazair, Islam dibuat menentang nasionalisme Arab yang juga masing-masing simpang siur warna ideologinya. Kemudian Gus Dur menggelitiknya dengan pertanyaan:

<sup>315</sup>Tim INCRoS, *Beyond the Symbols...*, h. 44.

<sup>316</sup>Tim INCRoS, *Beyond the Symbols...*, h.44.



<sup>19</sup> “Bagaimana melestarikan akar budaya-budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini?”<sup>23</sup>

Menurut Gus Dur yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan Alquran Batak dan Hadis Jawa. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Yang menjadi agenda Gus Dur adalah berpikir tentang bagaimana melestarikan agama Islam sebagai budaya, melalui upaya melayani dan mewujudkan kepentingan seluruh bangsa. Gus Dur tidak sepenuhnya sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pribumisasi merupakan arena kontestasi, tempat dipertarungkannya makna dan digugatnya ideologi kemapanan.

Pribumisasi tidaklah relevan dihadapkan dan dibedakan dengan proses inkulturasi, akulturasi, konvergensi, ataupun kontekstualisasi, karena pribumisasi dapat berupa proses-proses, tergantung watak lokal masing-masing. Proses-proses perubahan kebudayaan tersebut tidak Selalu bersifat sinkronis, tetapi juga diakronis. Maka sebuah proses inkulturasi adalah upaya membuat seorang individu dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam kebudayaan zaman dan tempat. Inkulturasi mencapai hasil terbaik jika berjalan lancar, luwes dan bebas. Pertimbangan harus menggabungkan tradisi dengan cipta, supaya nilai-nilai dapat diasimilir secara dinamis, terbuka bagi peningkatan lebih lanjut. Warisan kebudayaan tidak dipartisipasikan sebagai beban, melainkan sebagai pengayaan modal individu. Di sinilah letak perbedaan inkuturalisasi dengan indoktrinasi dan sosialisasi. Dalam dua proses terakhir, tidak peduli ada interiorisasi nilai, cukuplah meniru secara lahiriah. Karena itulah, inkluturalisasi harus dihindarkan dari dua eksek itu. Dalam konteks Islam pribumi, aspek univ<sup>32</sup>isme Islam terkait dengan kenyataan terjadinya kosmopolitanisme Islam. Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya<sup>35</sup> n heterogenitas politik. Kosmopolitanisme itu bahkan menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad.<sup>317</sup>

#### <sup>1</sup> D. Islam dan Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>318</sup> Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai

<sup>317</sup>Abdurrahman<sup>124</sup> id, *Islam Kosmopolitan...*, h. 9

<sup>318</sup>Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*, (Malang: Setara press, 2009), h. 2.



13

kesejahteraan(kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>319</sup> Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik-pun khususnya di dunia Barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik,<sup>320</sup> namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai *polity* yang baik. Walaupun begitu, harus diakui pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>321</sup> Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>322</sup> Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkapkan bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

89

<sup>319</sup>Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), h. 2.

<sup>320</sup>Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 14.

<sup>321</sup>Gabriel A. Almond, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2003), h. 3.

<sup>322</sup>Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 16.

1 Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.<sup>323</sup> Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).<sup>324</sup>

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>325</sup> Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (*polity*) untuk membuat suatu keputusan politik.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsifungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan.<sup>326</sup> Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari kerangka kerja sistem politik sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya yaitu (1) sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijaksanaan), (2) penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan (3) penetapan 1 yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara keseluruhan.<sup>327</sup> Dari pendapat tersebut, maka sistem politik menunjukkan adanya unsur, (1) pola yang tetap antara hubungan manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, (2) kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan immateril untuk menjadi kesejahteraan atau membagikan dan mengalokasikan

<sup>323</sup>Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h. 18.

<sup>324</sup>Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 16. 13

<sup>325</sup>Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

<sup>326</sup>Sukarna, *Sistim Politik*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 16.

<sup>327</sup>Sukama, *Sistem Politik...*, h. 16

1 nilai-nilai negara secara mengikat, (3) penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal, dan (4) fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar.<sup>328</sup>

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara.<sup>329</sup> Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat diartikan sebagai satu-kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengatur relasi antara negara dengan masyarakatnya maupun negara dengan negara lainnya.

Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

#### 1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.

#### 2. *Input-output*

*Input* merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, *dukungan* merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari *tuntutan* maupun *dukungan* masyarakat. *Output* terbagi menjadi dua, yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai *tuntutan* dan *dukungan* yang masuk. Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

#### 3. Diferensiasi dalam Sistem

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan DPR. Tetapi, KPU.

13

<sup>328</sup>Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 20-21.

<sup>329</sup>Sukarna, *Sistim Politik*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 14-15.

**1** lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama, yaitu memproduksi undang-undang, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi pekerjaannya.

#### 4. Integrasi dalam Sistem

Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.<sup>330</sup>

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya.<sup>331</sup> Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut:

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun internasional.
2. Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
3. Kapabilitas regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan.
4. Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Petunjuk tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukan oleh atau bergantung pada kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat.
5. Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional).
6. Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik

**13**

<sup>330</sup>Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 20-22.

<sup>331</sup>Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), h. 162.



1 dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional.<sup>332</sup>

Teori proses politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.<sup>333</sup> Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri.<sup>73</sup>

Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling berposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari.<sup>334</sup>

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.<sup>335</sup> Dalam interaksi antara satu sama lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai *input* dan *output*. *Input* itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. *Input* ini kemudian diolah menjadi *output*, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.<sup>336</sup> Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif.

<sup>332</sup>Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajaw Pers, 2016), h. 300-305.

<sup>333</sup>Sukmana Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 179.

<sup>334</sup>Irianto Maladi Agus, *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian* Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2015), h. 7.

<sup>335</sup>Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 15.

<sup>336</sup>Almond dalam Hijri S Yana, *Politik Pemekaran Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2016), h. 21.

<sup>46</sup> Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.<sup>337</sup> Fokus dari teori *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (*material resources*).<sup>338</sup> Dengan demikian, bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sehingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik.

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar dari kata *sâsa-yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *al-Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: "Tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan "Cara"<sup>94</sup> pengendalian menuju tujuan tersebut.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".<sup>339</sup> Dari kata ini terlihat tujuan *siyasah* adalah untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan semua orang yang berada dalam lingkup perundang-undangan itu.

Secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Pengertian *siyasah* lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan politik menurut *syara'*, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi "netral".

<sup>337</sup>Sukmana Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 179.

<sup>338</sup>Sukmana Oman, *Konsep dan Teori...*, h. 179

<sup>339</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Anshar, 1977), h. 4-5.

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: *"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak parakhalifah."* (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Jelaslah bahawa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (yaitu kaum Muslim)." (Hadis Riwayat Thabrani).*

Hubungan politik dengan Islam sangat dekat, dan bersifat timbal balik. Islam adalah *din wa daulah* sekaligus, sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa pemikir muslim. Sejumlah kerangka pemikiran dibutuhkan bagi pengembangan pemikiran negara dalam pandangan Islam, yaitu:

*Pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama, dengan politik. Dengan demikian diperlukan parameter yang jelas bagi pemikiran politik dalam pandangan Islam, agar proses berpikir kaum muslimin justru tidak menjadi gangguan bagi perkembangan negara-negara berkembang.*

*Kedua, Pemikiran di bidang politik, sama seperti pemikiran di bidang lain dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam masa pembangunan, paling tidak menjadi kaca perbandingan bagi teori-teori lain di luar teori Islam, termasuk teori-teori yang dibangun atas ideologi Pancasila.*

*Ketiga, dapat dilihat dari keharusan pemeliharaan keseimbangan antara pemikiran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sudah jelas, bahwa untuk sebagian bidang kehidupan, kepada Islam telah diajukan tuntutan untuk merumuskan pandangan positif dan konstruktif.<sup>340</sup>*

Lebih lanjut, dalam melihat wacana pemikiran negara dalam Islam, Gus Dur mengatakan bahwa ditinjau dari sudut toeritis dibagi ke dalam dua jenis pemikiran, yaitu pe5ikiran idealistis dan pemikiran realistik. Pemikiran idealistis merumuskan kerangka Negara yang sepenuhnya berdasarkan wawasan Islam. Islam adalah konsep kenegaraan yang harus diwujudkan secara penuh (*in toto*). Sebaliknya, ke5angka pemikiran realistik tidak begitu tergodanya untuk membangun konsep negara ideal menurut wawasan Islam, tetapi lebih tertarik untuk memecahkan masalah perumusan konsep negara berdasarkan perkembangan historis di negara-negara tersebut. Semua ini dilator belakangi tidak adanya bentuk baku yang ditinggalkan Muhammad

<sup>340</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan....*,54-55.



Saw. baik melalui ayat maupun hadis (dalil naqli). Apa yang dilakukan Muhammad pada saat memimpin Madinah adalah kebutuhan pada saat itu.<sup>341</sup>

Teori ini bisa disejajarkan dengan dua teori (pendekatan) lain dalam melihat hubungan negara dan agama dalam Islam, yaitu pendekatan integralistik dan pendekatan empiris (*tariqah istiqraiyyah*). Pendekatan integralistik meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang utuh dan bulat, memiliki konsep-konsep kehidupan yang lengkap termasuk masalah pembentukan negara. Dasarnya adalah perintah Allah “masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh (*kaffah*)”. Dalam hal ini Gus Dur mengatakan bahwa perintah agar masuk ke dalam Islam itu tidak menunjuk sebuah model masyarakat manapun. Begitu juga dengan QS. Al-Mâidah ayat 3 yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna diturunkan. Kalimat ini tidak melarang pengembangan wawasan baru secara terus menerus dalam Islam. Justru kemampuannya untuk menerima pengembangan secara terus menerus itulah yang menunjukkan hakikat kesempurnaan ajaran Islam.<sup>342</sup> Sementara pendekatan empiris sama dengan pemikiran realistik, lebih mendasarkan pandangannya pada apa yang terjadi berdasarkan pengalaman negara-negara bersangkutan. Kebutuhan merumuskan konsep negara disesuaikan dengan pengalaman dan kebutuhan masing-masing negara.

Untuk menjembatani itu, Gus Dur mengajukan sebuah pendekatan lagi, yaitu pendekatan prinsipil. Pada pendekatan ini, dari ajaran dan sumber-sumber pemikiran Islam ditarik sejumlah prinsip universal, yaitu perlunya penegakan kedaulatan hukum, persamaan hak dan kedudukan di mata hukum bagi semua warga negara, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak untuk merumuskan konsep terbaik. Islam tidak hanya berfungsi sebagai hipotesis operatif, tetapi juga sumber inspiratif bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>343</sup>

### **E. Islam dan Demokrasi Indonesia**

Keberadaan nilai-nilai Islam pada dasarnya selalu berhubungan dengan realitas yang terjadi didalamnya. Proses pergumulan antara ajaran Islam dengan realitas sosial masyarakat berdasarkan perspektif sosial ada dua kemungkinan yang akan dilihat yaitu ajaran Islam akan terpengaruh terhadap lingkungan sosial dan budaya kultural masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk realitas yang baru. Kemungkinan yang selanjutnya yaitu sebaliknya bahwa ajaran Islam dipengaruhi akan realitas perubahan sosial sehingga sistem ajaran melakukan penyesuaian dalam mengaktualisasikan dirinya. Dengan demikian konsep ajaran Islam

<sup>341</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 56

<sup>342</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 60-61

<sup>343</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 62



berupaya sebagai fasilitatif yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan dengan berbagai potensi dasar sistem ajaran agar berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam menghadapi era globalisasi. Jadi ajaran Islam harus dapat mengambil peran dengan globalisasi yang melanda zaman sekarang, hal ini berarti arus globalisasi bukan untuk menyatukan diri melainkan sebagai dinamisator.

Penjelasan tersebut di atas memberikan kesan bahwa jika ajaran Islam melakukan arus yang berlawanan dengan pembaharuan maka akan menghambat perkembangan intelektual kaum muslim itu sendiri. Walaupun modernisasi merupakan keharusan, ajaran Islam mempertahankan jati diri ke-Islaman sebagai suatu proses yang berlaku pada sosial kehidupan masyarakat tanpa tergeser arus modernisasi sehingga kehilangan identitas. Hal ini berarti, ajaran Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan memberi takaran arus modern berdasarkan kesesuaian dengan pedoman dan ajaran nilai-nilai Islam agar bisa direformasi, diadopsi dan dikembangkan. Jadi memodernisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, mempunyai jalan-jalan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim itu sendiri. Dalam perjalanan sosial budaya kehidupan masyarakat, manusia akan menghendaki kemajuan dalam kehidupan yang menimbulkan gagasan bagi manusia itu sendiri untuk melakukan pengembangan kebudayaan melalui pembaharuan.

Dalam mempelajari dan mengkaji Islam, terdapat dua pendekatan secara garis besar yaitu mempelajari Islam agar menjadikan umatnya menjadi umat beragama yang benar sehingga dapat menginternalisasi ke dalam kehidupannya. Selanjutnya mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan. Jadi dalam konteks sosial masyarakat, aspek yang kedua merupakan hal yang paling penting dalam modernisasi sosial dan kebudayaan, karena tujuan utama dari modernisasi adalah untuk membangun masyarakat rasional. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi dalam Islam muncul ketika bangsa Barat mengalami masa kemajuan. Jadi, di sinilah sosial dan kebudayaan masyarakat Islam terjadi berbagai pola modernisasi barat dengan memasukkan nilai-nilai modernisasi Barat, ada yang menerimanya dengan mengadopsi seluruhnya, dan sebagian ada yang memilah sesuai dengan tatanan nilai-nilai Islam.

Demikian juga jika membahas agama dalam konteks demokrasi, maka persoalan-persoalan empirik tidak dapat dihindari karena pola kehidupan manusia tidak dapat menolak perubahan yang dihadapinya. Yang menjadi permasalahannya adalah bukan karena pada basis empiriknya, tetapi dalam hal ini agama dan demokrasi pada dasarnya terdapat perbedaan. Telah diketahui bersama bahwa agama (*samawi*) berasal dari wahyu, sedangkan demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah perlu adanya bukti-bukti historis, padahal

hal ini merupakan suatu kendala dalam mencarinya. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan berpolitik mengenai hubungan simbiosis mutualisme antara agama dan demokrasi yang secara eksplisit mampu dijelaskan. Jadi, walaupun kedua konsep tersebut memiliki basis empirik yang berbeda, tetapi hal tersebut tidaklah merupakan suatu perkara yang mendasar dalam mempertemukan kedua konsep tersebut. Antara agama dan demokrasi mempunyai sifat yang dialektis jika dikaitkan, maksudnya dalam berdemokrasi terjadinya pendewasaan dalam kehidupan beragama, sedangkan dalam beragama kehidupan demokrasi diberi dukungan yang positif.

Berdasarkan itu, dapat dilihat bahwa setiap agama pada dasarnya mengandung konsep kemanusiaan sebagai cermin atas pengakuan secara apresiatif dan konstruktif terhadap manusia. Alquran merupakan sumber autentik dalam ajaran Islam yang menjelaskan secara kompleks yang apresiasi dan konstruktif tentang konsep kemanusiaan. Dengan tataran etis-teologis demikian inilah Islam sesungguhnya merupakan agama yang mendukung pelaksanaan demokrasi, dalam hal ini tidak saja terkandung nilai etik demokratis, tapi juga nilai Instrumental dengan mana nilai-nilai etik demokrasi dapat diaktualisasikan. Jika dilihat berdasarkan sejarah sosial kebudayaan Islam, sendi-sendi bangunan substansi demokrasi telah dicanangkan lebih dulu. Tetapi seiringan dengan berjalannya masa, maka rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam menyebut *syûra*, yang pada umumnya dianggap merupakan padanan kata demokrasi, meskipun harus diakui demokrasi berbeda dengan *syura*. Menurut An-Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyûrah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.<sup>344</sup> Perbedaan kedua hal ini berdasarkan hadis ketika Rasulullah saw. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, “Kalau kalian berdua sepakat pandangan dalam suatu musyawarah- kata teknis yang dipakai Nabi dalam hadis ini adalah *masyûrah*- “aku tidak akan menyalahinya.” Qardhawi lebih spesifik menyatakan bahwa musyawarah adalah unsur asasi sistem kebijakan politik, sosial dan ekonomi masyarakat muslim.<sup>345</sup>

Taufiq Muhammad asy-Syawawi menyatakan bahwa dalam definisi *syûra* terkandung sesuatu yang harus ditetapi, sedangkan *masyûrah* (memberikan pendapat), dan *istisyarah* (meminta pendapat) adalah sesuatu yang fakultatif

<sup>344</sup>Taqi ad-Din, *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, yang dikutip Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 52

<sup>345</sup>*Ibid.*, h. 52

dipandang dari segi keharusan menetapinya. Meskipun istisyyarah dan syura (musyawarah) berbeda, tetapi bukan berarti di antara keduanya tidak ada hubungan, karena kedua istilah ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk dari *masyûrah* dan *syûra* dalam arti yang luas. Secara umum *syûra* lazim diartikan sebagai sesuatu yang mencakup segala bentuk pemberian advis (pendapat) dan musyawarah (bertukar pendapat), dan dalam arti sempit, *syûra* terbatas pada ketentuan-ketentuan yang harus ditetapi.<sup>346</sup>

Praktik musyawarah sudah dilembagakan sejak masa Nabi saw. Muhammad bahkan pernah mengangkat empat belas orang laki-laki dari kaum Anshor dan Muhajirin sebagai tim musyawarah, yang bisa dibandingkan dengan lembaga-lembaga pengambil keputusan di masa modern. Rasulullah selalu mengajak musyawarah tim ini setiap kali ada hal penting yang ingin dibicarakan dan diputuskan, sebagai bagian dari perintah Allah Swt. Nabi sendiri menyebut mereka dengan *uli al-amr* (pemegang komando) yang bertugas bukan hanya sebagai teman musyawarah Nabi, tetapi juga berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum di tengah-tengah masyarakat. Tradisi ini dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Di masa Abu Bakar, lembaga kesukuan sebagai bagian dari tradisi dimanfaatkan sebagai tim musyawarah, yang terdiri dari pemimpin suku, dan orang-orang terkemuka Madinah.<sup>347</sup>

Di masa Umar ibn Khaththab, anggota musyawarahnya adalah sahabat-sahabat terkemuka dari kalangan Muhajirin dan Anshor, yang dikenal dengan sebutan "*qurra*". *Qurra*' ini adalah orang yang suka berperang, praktisi hukum, dan kelompok politik yang memiliki kepentingan umum. Kegiatan musyawarah pada masa Umar bahkan benar-benar terlembaga dengan baik, dan terdiri dari tiga jenis musyawarah, yaitu musyawarah umum, khusus, dan terbatas. Musyawarah yang dilakukan Umar bukan hanya melibatkan anggota tetap majelis, tetapi juga masyarakat umum. Di masa Umar juga pernah terjadi pengambilan keputusan berdasarkan voting ketika menyelesaikan kasus tanah Sawad di Irak.<sup>348</sup>

Uşman dan Ali pun juga melembagakan musyawarah sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Musyawarah yang paling terkenal di masa Uşman adalah musyawarah mengenai terbunuhnya raja Persia, Hurmuzan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menduga raja Hurmuzan bersekongkol dan terlihat dalam pembunuhan bapaknya, Umar ibn Khatthab. Atas kejadian ini, Uşman ibn 'Affan mengundang anggota musyawarah untuk memutuskan nasib Ibnu Umar, yang akhirnya diwajibkan untuk membayar denda (*diyât*),

<sup>346</sup>Taufiq Muhammad asy-Syawî, *Syura bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin Z.S. (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 15-16.

<sup>347</sup>Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 56

<sup>348</sup>Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan...*, h. 58

dan karena Ibnu Umar tidak mampu membayar *diyât* tersebut, maka Uşman mengangkat dirinya menjadi wali Ibnu Umar dan kemudian membayar *diyât* tersebut. Begitulah kebijakan dan kebijaksanaan pemimpin yang dekat dengan Alquran. Begitu juga dengan ‘Ali ibn Abi Thalib. Karena musyawarah-lah, akhirnya peristiwa *tahkim* terjadi, dan ‘Ali ibn Abi Thalib justru terdepak dari jabatan khalifahnyanya.<sup>349</sup>

Musyawarah yang dijalankan dalam Islam tunduk pada prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*, sehingga menjadi tanggungjawab bersama merubah kemunkaran yang dilakukan oleh *ulil amri*, dan memastikan prinsip pengawasan atas kerja pemerintah.<sup>350</sup> Seorang pemimpin (ulil Amri) justru harus diawasi sehingga dapat dipastikan bahwa dia tidak melakukan kemunkaran. Pengawasan bahkan pemilihan pemimpin, dalam sejarah Islam dilakukan oleh lembaga yang menjadi perwakilan rakyat, yaitu *Ahlul Aqdi wal Hilli*, yang berwenang memilih pemimpin (imamah), dan *Ahlul Ikhtiyar*, yang merupakan lembaga legislatif.<sup>351</sup>

Secara historis, syura juga dianggap sebagai teknis suksesi dalam pemilihan al-khulafa’nar-rasyidin, namun hilang setelah sistem berubah menjadi monarki dalam masa dinasti Umayyah, dan dilanjutkan ke dinasti-dinasti setelahnya. Syûra bahkan juga dianggap merupakan wadah partisipasi politik masyarakat dengan sistem representatif,<sup>352</sup> jika dibandingkan dengan demokrasi.

#### Perbandingan Sistem Normatif Syûra dan Demokrasi<sup>353</sup>

Sistem Normatif	Syûra	Demokrasi
Konsep tentang masyarakat	Cenderung monisme kelompok dan gagasan	Pluralisme, syarat konflik, pluralisme gagasan, dan tidak terbatas
Pemilik kedaulatan	Tuhan bersama rakyat	Rakyat
Karakter kedaulatan	Terbatas oleh syari’at	Bebas dan tidak terbatas oleh norma apapun, kecuali kesepakatan rakyat
Posisi rakyat dan penguasa dalam politik	Pelaksana kehendak Tuhan	Pelaksana kehendak rakyat

<sup>349</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan...*, h. 59-60

<sup>350</sup> Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 39

<sup>351</sup> Lihat Imam Al-Wawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 14-15

<sup>352</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan...*, h. 236-237

<sup>353</sup> Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan...*, h. 238



Legitimasi kekuasaan	Pemilihan yang bebas atau sistem lainnya yang memungkinkan	Pemilihan yang bebas
Pergantian kekuasaan	Melalui pemilihan umum atau musyawarah elite	Mutlak oleh rakyat melalui pemilihan umum
Pendekatan kelembagaan	Mempertahankan dan menegakkan syari'at	Kontrol kekuasaan
Tanggung jawab penguasa	Kepada Tuhan atau syari'at	Kepada rakyat

Syûra dan demokrasi memang selalu dibandingkan. Sebagian ilmuwan muslim menganggap syûra adalah demokrasi Barat, di antaranya Yusuf Qardhawi dan Ismail Anshari, tetapi sebagian yang lain jelas-jelas membedakan keduanya. Syura tidak sama dengan demokrasi, karena ada perbedaan prinsipil di antara keduanya, bahkan Nabhani menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur.<sup>354</sup>

Gus Dur sendiri memang tidak membandingkan antara syûra dengan demokrasi, tetapi antara syari'at dengan demokrasi, tetapi dapat dipahami bahwa syari'at yang dimaksudkannya adalah sistem pemerintahan yang didasarkan syari'at Islam yang dalam tulisan di atas dinamakan syûra.

*Salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi demokratisasi di kalangan lembaga dan kelompok keagamaan adalah perbedaan hakekat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh kitab sucinya. Ini berarti hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebebasan ajarannya sendiri. Apalagi kalau hal-hal normatif itu dituangkan dalam bentuk hukum agama (syari'at) dalam Islam dan hukum Canon di kalangan gereja Katolik. Hukum agama itu bersifat abadi, karena ia berlandaskan kitab suci yang abadi pula. Mengubah hukum agama berarti pula membatasi keabadian kitab suci, dan dengan sendirinya mengusik mutlaknya kebenaran yang dibawakan agama yang bersangkutan....Demokrasi, sebaliknya dari ajaran agama, justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat, dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama.*<sup>355</sup>

Perbedaan lain antara syari'at dengan demokrasi adalah: demokrasi menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka Undang-

<sup>354</sup>Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan ...*, h. 55

<sup>355</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan ...*, h. 285-286

undang, tanpa membedakan etnis, budaya, maupun hal-hal lain yang merupakan bawaan sejak dia lahir, sementara setiap agama cenderung untuk mencari perbedaan atas hal tersebut, paling tidak perbedaan agama dan keyakinan.<sup>356</sup>

Dari pernyataan Gus Dur, demokrasi sebagai proses kelihatan bahwa Gus Dur tetap menganggap sistem ini adalah yang terbaik, bahkan ketika dibandingkan dengan ideal negara Islam. Tentu saja ini dalam konteks Indonesia, mengingat betapa plural (majemuk) nya masyarakat Indonesia. Gus Dur tidak **5**enyetujui pendirian negara Islam, karena menurutnya demokrasi bukan hanya selaras dengan Islam, tetapi demokrasi atau prinsip musyawarah (*syûra*) merupakan bagian dari nilai-nilai substantif Islam, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian Kualifikasi Demokrasi Islami.

Islam dan demokrasi adalah sejalan, bahkan pemikiran Gus Dur tentang demokrasi pun berangkat dari paradigma Islam. Paradigma keislaman menyatakan bahwa supremasi hukum adalah kondisi yang harus ada jika ingin mewujudkan keadilan, dan demokrasi salah satu cirinya adalah berbasis hukum. Keadilan sendiri merupakan salah satu *weltanschauung* Islam, di samping *syura* dan *musawa* (persamaan).<sup>357</sup>

**5** *Weltanschauung* Islam di atas merupakan bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam bisa dibedakan menjadi dua: nilai dasar, dan kerangka operasionalnya. Nilai-nilai dasar adalah yang mendasari kel**19**upan masyarakat, yaitu *weltanschauung* yang sudah dijelaskan di atas. Prinsip operasionalisasi nilai-nilai dasar ini sudah dirumuskan dalam kaidah fiqh *tasharruful imam 'ala ra'iyatihi manuthun bil mashlahah* (tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka).<sup>358</sup> Artinya, pemerintah atau pemegang kekuasaan harus menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, dan persamaan. Itu menunjukkan Islam dan demokrasi berjalan seiring.

Dalam proses demokratisasi di Indonesia, perlu dipertany**3**kan bagaimana mencari bentuk kenegaraan yang tepat dan cocok yangi akan memberikan tempat kepada agama tetapi tidak dengan mematikan yang lain. Perkembangan situasi di tanah air telah membuktikan bahwa proses demokratisasilah yang bisa memenuhi harapan itu, yang bisa mempersatukan perbedaan kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Peran Islam di sini, karena penganut Islam merupakan mayoritas adalah memperjuangkan proses itu, sehingga dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Demokrasi bisa menjadi tumpuan harapan dari mereka yang

<sup>356</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, 286-287

<sup>357</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 122

<sup>358</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 122

menolak pengagamaan negara, dan sebaliknya juga memberikan tempat untuk agama.

Meskipun Islam sejatinya bisa memberikan peran positif kepada proses demokratisasi di negeri ini, tetapi perlu dipertanyakan lagi apakah umat Islam sudah siap untuk berdemokrasi, karena demokrasi menghendaki kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya yang satu iman dengannya. Demokrasi juga menuntut kesediaan untuk memberi dan menerima. Tidak ada orang yang bisa memaksa seseorang untuk menanggalkan agamanya, tetapi bahwa masyarakat juga memberikan tempat kepada yang bukan agama, tidak bisa dihindari. *Take and give*. Itulah demokrasi.<sup>359</sup>

Gus Dur percaya bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara, dalam soal bentuk negara menurutnya tidak mempunyai aturan baku<sup>360</sup>. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarki. Jika ingin menerobos konsep politik dilematik maka konsep negara dirumuskan kembali tentang kedudukan agama dalam kehidupan berbangsa.

Jadi terlihat bahwa dengan pengalaman intelektual beliau dan gagasan yang diimplimentasikan dalam kebijakan beliau memberikan indikasi bahwa setiap perubahan dari pemikiran manusia tidak selamanya sempurna. Jadi disini terlihat bahwa Gus Dur menginginkan para kaum intelektual Islam untuk merespon dan memberikan solusi dengan perkembangan yang menghalau umat manusia. Jadi Gus Dur menginginkan menciptakan dan membudayakan penanaman nilai-nilai Islam hingga mampu mewujudkan *civil society*.

Untuk melihat hubungan Islam dengan demokrasi, perlu dipaparkan lebih dulu perkembangan perpolitikan, dan kenegaraan di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia mengalami 3 (tiga) periode (masa), yaitu masa orde lama, orde baru dan orde reformasi. Ketiga masa ini sebenarnya penyumbang dan saling melengkapi perkembangan sistem politik di Indonesia dari masa ke masa. Di mana kelebihan dan kekurangan<sup>112</sup>g terdapat dalam sistem politik orde lama di perbaiki dan disempurnakan dalam sisten<sup>112</sup>olitik orde baru. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi. Adapun perkembangan antar sistem politik Indonesia dari masa ke masa, sebagai berikut, yaitu:

### 1. Masa Orde Lama

<sup>359</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, h. 325

<sup>360</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001) h. 103



Di masa awal terbentuknya negara Indonesia, merupakan kebutuhan untuk menetapkan sistem pemerintahan yang akan dilakukan di negara ini. terlalu lama hidup di bawah penjajahan, tidak membuat para pemuda tidak merencanakan sebuah kemerdekaan bagi negara yang dicintainya. Bangsa Indonesia yang sudah lama memperjuangkan kemerdekaan, menempuh perjanjian demi perjanjian, dan perjuangan fisik menghadapi Belanda, benar-benar sudah berkorban jiwa dan raga. Ketika kemudian Jepang menggantikan Belanda menjajah Indonesia, bangsa Indonesia sempat memiliki harapan besar karena Jepang masuk dengan membawa janji persaudaraan. Mereka mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia.

Herbert Feith mengatakan bahwa Jepang sebenarnya sudah menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada September 1944, ketika Jepang sedang menghadapi Sekutu. Jepang memang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia secara administratif pada bulan Maret 1945, tetapi kemerdekaan yang dijanjikan tidak kunjung datang, sampai kemudian peristiwa Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 15 Agustus 1945 dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaannya.<sup>361</sup> Dalam proses pendirian negara tersebut, perdebatan panjang tentang bentuk negara akhirnya menghasilkan kompromi politik antara golongan nasionalis dengan golongan Islamis berupa dasar-dasar negara merdeka yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa jelas menunjukkan peranan agama yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun kata itu sudah mengalami pemenggalan tujuh kata yang tertulis dalam Piagam Jakarta.

Perdebatan itu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada dasawarsa 1930-an, M. Natsir (mewakili kelompok Islamis) sudah terlibat perdebatan dengan tokoh-tokoh nasionalis, seperti Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka tentang bentuk negara Indonesia jika sudah merdeka. Kalangan Islamis menginginkan Indonesia akan menjadi negara Islam, sementara kelompok nasionalis menolaknya.

NU yang diwakili KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, dan Zainal Arifin, meskipun ulama ternyata bisa menerima pandangan golongan nasionalis, bahkan ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945, yang tidak menjadikan<sup>61</sup> Islam sebagai bentuk formal negara. Kegiatan NU dalam berbagai kegiatan nasional untuk menyongsong lahirnya kemerdekaan berujung pada Resolusi Jihad pada bulan Oktober 1945 yang mewajibkan umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, dan itu dianggap *jihad fi sabilillah*. Penerimaan Indonesia bukan hanya sebagai



61 tanah air dan bangsa 61 tetapi juga negara, diteruskan dengan tahap berikutnya, yaitu penerimaan Presiden republik Indonesia sebagai *waliyyul amri dharuri bisysyaukah* (pemegang kekuasaan temporer atau pemerintahan)..<sup>362</sup> Keputusan NU menerima bentuk negara demokrasi Indonesia dengan pertimbangan: negara tidak harus berbentuk negara Islam, asal tidak bertentangan dengan Islam.<sup>363</sup> Ini berarti proses penerimaan negara Indonesia dilegitimasi secara hukum Islam.

Sebelum pertentangan bentuk negara antara kaum nasionalis dengan Islamis, kondisi penjajahan yang dialami bangsa Indonesia berbeda dengan India dan Burma yang dijajah oleh Inggris. Inggris memberi kesempatan pada negara jajahannya kehidupan yang lebih baik, dan dipersiapkan pendidikannya, karena memang dipersiapkan untuk menyelenggarakan negara sendiri ketika nanti sudah merdeka. Belanda memperlakukan Indonesia dengan sangat kejam. Selain hasil bumi yang dihabisi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pun sangat sedikit. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kesempatan untuk itu..<sup>364</sup>

Setelah berhasil memproklamkan kemerdekaannya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Herbert Feith mengulas dengan rinci perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama di masa Orde Lama, sejak awal negara ini terbentuk sampai beberapa kali perubahan kabinet. Feith juga menjelaskan dalam beberapa kali perubahan kabinet, Indonesia menerapkan demokrasi konstitusional, meskipun umur kabinet itu memang singkat, karena banyaknya persoalan politik yang dihadapi. Kabinet Hatta hanya berjalan sejak Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950, dan dilanjutkan dengan kabinet Natsir pada September 1950 sampai dengan Maret 1951. Dalam masa-masa ini, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana konstitusi merupakan hal yang paling 73 ntng. Kabinet parlementer berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.<sup>365</sup>

Sebelum demokrasi Terpimpin diberlakukan Soekarno pernah menyatakan bahwa generasi kepemimpinan berikutnya disebut sebagai demokrasi Terpimpin, apa maksud dari pernyataan ini? Dalam catatan sejarah peralihan antara demokrasi Parlementer ke demokrasi Terpimpin dituliskan sejak tahun 1959, namun istilah demokrasi Terpimpin sudah dinyatakan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1957 ketika banyak tokoh mulai gelisah tentang warna demokrasi Indonesia.<sup>366</sup>

<sup>362</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 342.

<sup>363</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*,h. 109

<sup>364</sup> Herbert Feith, *The Decline...*, h. 3

<sup>365</sup> Herbert Feith, *The Decline...*,h.578

<sup>366</sup>Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita, Ibid*, h. 82.

Dalam pidatonya dengan judul “Respublika Sekali Lagi Respublika” pada sidang pleno konstituante di Bandung 22 April 1959, Soekarno menyerang konstituante karena mempraktikkan cara-cara demokrasi Liberal, sambil menawarkan solusi mengembalikan demokrasi Indonesia pada bentuk demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah bentuk relevan untuk Indonesia, dan bukan sebagai kamufase kediktatoran dan sentralisme seperti paham Komunis, dan berbeda pu<sup>119</sup> dengan demokrasi Liberal. Pondasinya sesuai pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, seperti rapat suku yang dipimpin ketua adat, jadi tidak sekedar dalam bidang politik, melainkan dalam sosial, dan ekonomi.<sup>367</sup>

Demokrasi Terpimpin men<sup>65</sup>at tentangan banyak kalangan, seperti Deliar Noer mengatakan bahwa demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya.<sup>368</sup>

Karena menganggap dirinya sebagai ayah dalam konteks bernegara, sehingga Soekarno memiliki kebijakan sendiri sebagai orang yang tidak akan berpihak pada siapapun. Sikap demikian diterapkannya dalam berpolitik tanpa partai, dengan tujuan independensi tanpa adanya unsur-unsur mendiktenya.

Perinsip ini kemudian membuat Soekarno banyak ditentang oleh banyak lawan-lawan politiknya, entah lupa atau tidak sadar, jelasnya dengan menerapkan politik tanpa partai mengakibatkan dirinya masuk dalam lingkaran pencidera demokrasi. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kesepakatan dari konstituante ditegaskan oleh Hatta bahwa anjuran untuk bergabung dengan partai politik bagi penghuni konstitusi negara (3 November 1946).

Kritikan Hatta mendapat dukungan dari M. Natsir dan Ki Hadjar Dewantara—pemimpin Taman Siswasecara pedas menyatakan demokrasi Terpimpin tidak ada bedanya dengan “*liederschap*” (kepemimpinan). Hatta pada tahun 1961 menulis dalam bentuk brosur dengan judul, “*Demokrasi Kita*” isinya menentang ketetapan Presiden Soekarno tentang demokrasi

<sup>367</sup>Mubarak, *Demokrasi dan Kediktatoran...*, h. 74.

<sup>368</sup>De<sup>43</sup>n demikian kekeliruan sangat besar dalam demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai penting dalam demokrasi, yaitu abs<sup>43</sup>me dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ru<sup>68</sup> kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif. Lihat Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, h. 131.

Terpimpin, di dalamnya sangat banyak bertentangan dengan asas-asas kesepakatanberdemokrasi.<sup>369</sup>

## 2. Masa Orde Baru

Orde Baru berhasil memperoleh simpati sangat besar dari masyarakat Indonesia, keberhasilan figur perwira tentara Soeharto menumpas habis ideologi Komunis di Indonesia sampai anak cucunya hingga ke akar-akarnya dianggap prestasi luar biasa,<sup>370</sup> termasuk di dalamnya Soeharto mampu menjinakkan usaha kudeta oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965.<sup>371</sup>

Berbondong-bondong masyarakat menumpukan harapan besar atas koreksi total tidak hanya dalam segi politik, tapi juga sosial terlebih kembalinya kondusif hidup beragama, berbangsa, dan bernegara.<sup>372</sup> Semua lapisan masyarakat menyambut era baru demokrasi, terkecuali segelintir orang Komunis yang terancam kehidupannya karena agenda politik Soeharto menghabisi ideologi Komunis di Indonesia.<sup>373</sup>

Gebrakan mulainya Orde Baru terjadi dalam banyak sektor, paling menjadi sorotan adalah mengembakan fungsi UUD akibat penyelewengan masa Soekarno, di antaranya ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah dibatalkan, dan jabatan pemimpin negara kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Selain itu kebijakan-kebijakanhasil ketentuan masa Orde Lama kembali mengalami koreksi dengan ditetapkannya MPRS No. XIX/1966 untuk peninjauan kembali produk legislatif demokrasi Terpimpin.<sup>374</sup>

Semangat mengembalikan fungsi UUD pada tempatnya dan kembali menempatkan Pancasila sebagai asas tertinggi dan tunggal bagi semua golongan dalam bernegara menjadikan sistem pemerintahan pada periode ini adalah demokrasi Pancasila, sesuai UUD 1945, dan Ketetapan-ketetapan MPRS.<sup>375</sup>

<sup>369</sup>Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita*, *Ibid*, h. 82.

<sup>370</sup>Penumpasan ideologi Komunis di Indonesia memakan korban kurang lebih lima ratus ribu jiwa. Selengkapnya. Lihat David Jenkins, “*Runtuhnya Sebuah Rezim*,” dalam Edward Aspinal, *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, Penerjemah A. Wisnu Hardana (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 103.

<sup>371</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>372</sup>Inu Kencana, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 115.

<sup>373</sup>Noer, *Perkembangan Demokrasi Kita*, *Ibid*, h. 85.

<sup>374</sup>Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, *Ibid.*, h. 133.

<sup>375</sup>S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Satu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 8.



- 43 Berikut beberapa rumusan tentang Demokrasi Pancasila:<sup>376</sup>
- Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
  - Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
  - Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Ketika membicarakan Demokrasi Pancasila, Gus Dur membandingkannya dengan demokrasi liberal. Menurutnya, di masa ini praktik-praktik demokrasi liberal masih dilakukan, bahkan meluas meskipun di lingkungan sendiri, skala kecil. Meskipun skalanya kecil, tetapi gugusan tindakannya memiliki frekuensi tinggi dan masif, seperti yang tampak dalam perilaku kelembagaan masyarakat. Menurut visi Pancasila, persaingan memang dibolehkan bahkan didorong, tetapi harus dilakukan dengan kesopanan, dan dengan suasana saling memberi dan menerima antara pihak-pihak yang bersaing, karena yang menang nantinya harus juga mewakili kepentingan semua pihak, termasuk yang kalah. Dengan kata lain, persaingan adalah bagian dari proses pencapaian konsensus yang berwatak integralistik.<sup>377</sup>

Perbedaan lain, demokrasi liberal mendukung kontradiksi sebagai sendi budaya politiknya, sementara demokrasi Pancasila justru menolaknya, setidaknya menurut penafsiran dokumen-dokumen resmi negara. Pada sisi yang lain, demokrasi liberal yang mendasarkan diri pada liberalisme bukan hanya menampilkan dirinya sistem politik yang serba kontradiktif tetapi juga falsafah hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia. Demokrasi liberal menuntut supremasi hukum, perlakuan sama di muka hukum atas semua warga negara tanpa memandang asal usul, etnis maupun agama, bahkan melindungi kaum minoritas. Tujuan dan nilai-nilai yang mulia itu, juga dimiliki Pancasila. Artinya, seseorang yang Pancasila-lais bisa juga sekaligus berpandangan liberal.<sup>378</sup>

Begitu juga dengan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, itu diputuskan melalui pandangan agama. Ini dirumuskan secara formal oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tahun 1983, setahun sebelum muktamar berlangsung. Diputuskan juga bahwa Pancasila adalah asas NU, sedangkan Islam adalah akidahnya. Antara akidah dan asas dipisahkan. Ada dualisme legitimasi, legitimasi negara, dan agama.<sup>379</sup> Pada

<sup>376</sup>Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Ibid.*, h. 134.

<sup>377</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 58

<sup>378</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 60

<sup>379</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 109



Muktamar di Asembagus (Situbondo) pada tahun 1984, NU memutuskan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, menggantikan Islam, padahal sebelumnya organisasi ini adalah organisasi yang secara resmi ditetapkan sebagai organisasi Islam.<sup>380</sup> keputusan ini untuk menyahuti kebijakan Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai dan organisasi.

Ada beberapa alasan mengapa NU menerima dan mempertahankan Pancasila sebagai asasnya. Pertama, secara organisatoris Muktamar NU telah memutuskan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final, sebagai upaya mendirikan negara bagi kaum muslimin. Kedua, dari sisi substansi, jika suatu negara telah memberikan wewenang kepada kaum muslimin untuk menegakkan tauhid (*li i'la'i kalimatillah hiya al-ulya*/meluhurkan asma Allah yang agung), negara itu sudah harus ditaati. Negara Indonesia, dengan ini sudah menjamin pelaksanaan tauhid, sehingga tidak ada alasan untuk menolak negara Indonesia dengan dasar Pancasila.<sup>381</sup>

Meskipun NU dan Gus Dur sendiri sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pemerintah, itu tidak menyebabkan Gus Dur dan NU tidak mematuhi peraturan kenegaraan. Gus Dur adalah orang yang kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik di masa pemerintahan Soeharto. Forum Demokrasi yang didirikannya bersama beberapa tokoh lain bahkan hanya sempat mengadakan satu kali pertemuan besar. Kekecawaannya pada pemerintahan Soeharto karena Gus Dur menilai demokrasi yang dijalankan pemerintahan ini sebagai “demokrasi seolah-olah”. demokrasi yang secara eufimistis disebut demokrasi Pancasila.<sup>382</sup> Demokrasi yang berlabel Pancasila, tetapi tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi, tidak patut didukung, seperti yang diungkapkannya: “Sebuah pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang melindungi kebebasan mengeluarkan pendapat, berorganisasi, berserikat, serta pemerintahn yang menjamin kesamaan di depan hukum. Tidak demikian, dengan pemerintahan yang ada sekarang... Karena pemerintahan sekarang tidak menjalankan aspek demokrasi dalam pemerintahan...”<sup>383</sup>

Pemerintah Orde Baru juga bertindak otoriter. Dalam pandangan Gus Dur: “Otoriterisme yang berlangsung sekarang bukanlah warisan suatu kultur atau buah suatu kepribadian bangsa, tapi akibat dari suatu pranata yang bekerja di luar kontrol yang berlangsung selama belasan malah

<sup>380</sup>Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom...*, h. 127

<sup>381</sup>Nur Khalik Ridwan, *Negara Bukan-bukan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 62-

<sup>382</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 164.

<sup>383</sup>Nur Khalik Ridwan, *Negara Bukan-bukan...*, h. 69

puluhan tahun sebagai fakta politik yang bisa disaksikan dengan mata telanjang.”<sup>384</sup>

Di masa Soeharto tepatnya di dua puluh lima tahun pertama pemerintahan Orde Baru, hubungan Islam dan sistem kekuasaan memperlihatkan perkembangan gerakan Islam yang berlawanan arah. Di satu pihak, Islam sebagai kekuatan politik formal digusur dari panggung politik akibat kebijakan “dealiranisasi” (sejak 1973-1984 secara bertahap) pemerintah, sementara di pihak lain kekuatan informal politik Islam justru menguat. Gerakan Islam saat itu dapat berada di dalam sistem sekaligus sebagai korektor di luar sistem.

Gerakan-gerakan Islam tersebut terpolarisasi menjadi dua bentuk gerakan. Gerakan politik formal yang masuk dalam sistem kekuasaan merasa penting untuk masuk ke dalam sistem, baik sebagai pelaku langsung maupun hanya sebagai perumus kebijakan. Kelompok ini mementingkan keharmonisan dengan pemerintah, meskipun harus menomorduakan proses demokratisasi politik, contohnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kelompok kedua, lebih mengutamakan pengembangan kemampuan melakukan perubahan tanpa harus masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kiprah utamanya ditekankan pada transformasi intern kehidupan warganya, sementara tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Ini yang dilakukan NU.<sup>385</sup>

Selama tiga puluh dua tahun masa kekuasaannya, Soeharto telah menorehkan banyak hal, banyak prestasi, tetapi banyak pula kelemahan bahkan tindakan otoriterinya, sampai kemudian dia dilengserkan dari tampuk kekuasaannya. Penggulingan rezim Soeharto sudah dimulai tahun 1997, ketegangan sosial luar biasa hingga mengakhiri karir politiknya sebagai pemimpin bangsa. Pemicu terbesar adalah mulai terjadinya krisis ekonomi di Asia, negara Asia Tenggara sebelum Indonesia adalah Thailand terlebih dahulu merasakan dampak krisis moneter, hingga merembet ke Indonesia dan kesetabilan ekonomi benar-benar terguncang, akibatnya kerusuhan di berbagai daerah tidak dapat dihentikan.<sup>386</sup> Puncaknya terjadi unjuk rasa besar-besaran oleh para pemuda pembaharu, para mahasiswa yang berhasil menduduki DPR RI di Senayan pada akhir Mei 1998M.<sup>387</sup>

<sup>384</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 4

<sup>385</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h.186-187

<sup>386</sup>Himpitan ekonomi memaksa Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan hutang dengan IMF – International Monetary Fund – (15 Januari 1998 disaksikan oleh direktur IMF Michel Camdessus dengan melipat tangan), akibat terus merosotnya nilai tukar rupiah dan mulai melambungnya harga di pasaran. Pemerintah juga mengambil langkah menutup beberapa aktifitas perbankan, dan mulai berfikir ulang untuk membatalkan mega proyek besar yang direncanakan sebelumnya. Lihat Aspinal, ed., dkk., “*Pendahuluan*,” h. 9.

<sup>387</sup>Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (Elang Mulyana, Hery Hartanto, Hendriawan, Hafidhin Royan, Sofyan Rahman, Tammu Abraham Alexander

### 3. Pasca reformasi

Tahun 1998 adalah babak baru, demokrasi Indonesia tidak lagi dipaksa dengan satu asas tunggal Pancasila, melainkan reformasi total, semangat timbul bukan lagi koreksi total, tetapi penggantian total terhadap apapun berbau dan beraliran rezim Orde Baru. Tumpuan besar setelah krisis moneter mencekik masyarakat diharapkan ada solusi untuk itu.

Masa ini adalah masa terberat dalam sejarah, transisi tidak hanya dalam bidang politik, namun pemimpin baru diharapkan mampu menyelesaikan problem ekonomi dan berbuat menghidupkan lembaga hukum untuk mengadili Soeharto, keluarga, dan kaki tangannya.<sup>388</sup>

Lagi-lagi rakyat dibuat kecewa, penggantian total atas rezim berbau Soeharto hanya sekedar wacana dan omong kosong. Banyak elite politik berkepribadian ganda, tadinya sangat tunduk dengan Soeharto tiba-tiba menentang Soeharto. Sistem demokrasi Reformasi memang berbeda dengan rezim demokrasi Soeharto, tapi pelaku di dalamnya tetap orang-orang Soeharto.

Pidato Soeharto tentang pengunduran dirinya 21 Mei 1998 adalah hari kebangkitan nasional kedua bagi masyarakat Indonesia, kepemimpinan tertinggi kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Ing B.J. Habibie sesuai aturan tertulis pada Pasal 7 UUD 1945 yang menjelaskan apabila Presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh wakilnya.<sup>389</sup>

Reformasi berhasil merombak beberapa keputusan konstitusi Orde Baru menjadi lebih demokratis, di antaranya mengembalikan sistem pemilu pada multi partai, yang tadinya Orde Baru menggebiri partai peserta pemilu dengan tiga partai politik, masa Reformasi diikuti lebih dari tiga puluh partai, yang dimulai dari pemilu tahun 1999, 2004, dan tahun 2009. Adanya keputusan pencabutan Dwi fungsi ABRI, ABRI semula ikut dalam

---

Bulo, Fero Prasetya) pada tanggal 12 Mei 1998 seluruh elemen masyarakat Indonesia murka. Akibatnya, tragedi ini diikuti dengan peristiwa anarkis di Ibukota dan di beberapa kota lainnya pada tanggal 13-14 Mei 1998, selengkapnya lihat Keith B. Richburg, "Syuhada Tak Disengaja: Penembakan Empat Mahasiswa Yang Menggubah Sebuah Bangsa", dalam Edward Aspinal, ed., dkk., *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Penerjemah A. Wisnu Hardana (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 138.

<sup>388</sup>Sampai sekarang tidak ada penjelasan tentang status hukum Soeharto dan harta korupsinya, lembaga hukum seolah-olah digiring untuk tidak mempopulerkan dan memperkarakan kejahatan Soeharto, dan rakyat secara perlahan dibuat amnesia. M. Fadjoel Rachman, "Merayakan Matinya Reformasi", dalam M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan* (Depok: Koekoesan, 2007), h. 120.

<sup>389</sup>Detik-detik prosesi pelantikan Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto bisa dibaca pada Peter Waldman, dkk., "Perubahan Yang Menempatkan Soeharto di Luar Arena", dalam Edward Aspinal, ed., dkk., *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Penerjemah A. Wisnu Hardana (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 227.

percaturan politik dan ikut duduk dalam parlement dikembalikan pada tugas pokoknya, yaitu menjaga keamanan negara dan dilarang ikut aktif dalam politik praktis berada dalam konstitusi.<sup>390</sup>

Pasca Reformasi mengalami pergantian empat Presiden, dimulai Prof. Dr. Ing B.J. Habibie,<sup>391</sup> KH. ‘Gus Dur,<sup>392</sup> Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono.<sup>393</sup> Keempat pemimpin negara *pasca* Reformasi tidak sesibuk Soekarno dan Soeharto yang memberikan label demokrasi pada masa kepemimpinannya.

Demokrasi Reformasi tetap menjadi identitas hingga sekarang, hal ini menandakan bahwa Reformasi tidak sekedar momentum peralihan sebuah kekuasaan, melainkan juga transisi kebangsaan yang sangat memiliki nilai-nilai nasionalisme, karena tidak sedikit nyawa dan kerugian materi untuk memperjuangkan Reformasi, untuk itu sampai sekarang belum ada kata yang pantas menggantikan nama demokrasi Reformasi ke bentuk lain.<sup>394</sup>

Gus Dur sendiri adalah tokoh yang anti terhadap sekularisme, yang dipahami sebagai paham yang menolak keberadaan agama, karena Gus Dur sangat mencintai keyakinan dan tradisi agamanya. Di sisi lain, ia juga konsisten menolak bentuk formalisme agama karena hal tersebut akan mereduksi makna agama hanya sebatas kepentingan ideologis dan platform politik yang sifatnya sempit. Selain itu, formalisme agama juga rentan terhadap praktik diskriminasi yang menempatkan kaum non-muslim sebagai warga kelas dua, sehingga akan bertentangan dengan prinsip persamaan yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam. Selain melandaskan gagasan

<sup>390</sup>Selengkapnya tentang Dwi fungsi ABRI bisa dibaca pada Yuddy Chrisnandi, “10 Tahun Reformasi TNI”, dalam Yuddy Chrisnandi dan Amir, ed., *Beyond Parlemen: Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional* (Jakarta: Transwacana, 2007), h. 181.

<sup>391</sup>Kepemimpinan Habibie berakhir akibat kebijakannya yang kontroversial, yaitu mengizinkan Timor-Timur mengadakan referendum dengan kesimpulan lepasnya Timor-Timur dari Indonesia.

<sup>392</sup>KH. ‘Abdurrahman Wahid mulai kehilangan dukungan politik ketika adanya wacana pembubaran DPR dan MPR-RI. Pelengseran Abdurrahman Wahid dengan isu pembubaran DPR dan MPR-RI tidak berjalan mulus. Lawan politiknya bekerja keras hingga akhirnya terdapat temuan pansus tentang kasus Bulogate/Brunei Gate, karena kasus ini Abdurrahman Wahid lengser. Catatan khusus, bahwa sampai sekarang kasus Bulogate/Brunei Gate yang menjadi alasan lengsernya Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Lihat pada Kencana dkk., *Sistem Politik Indonesia*, h. 128.

<sup>393</sup>Dua nama terakhir sukses memimpin negara Indonesia, sukses dalam artian masa kepemimpinannya tidak sampai dilengserkan secara paksa oleh rakyat, bahkan presiden Susilo Bambang Yudoyono berhasil memimpin Indonesia dua periode.

<sup>394</sup>Cita-cita demokrasi Reformasi sangat besar, peralihan kepemimpinan diharapkan mampu menunjang sektor-sektor strategis dalam negara, sehingga rakyat tidak lagi dikorbankan dalam kepentingan golongan. Kini lebih dari sepuluh tahun Reformasi, banyak cita-cita Reformasi yang belum terealisasikan, selain semakin berangsur-angsur baik nama-nama politisi masa Orde Baru



9 pluralismenya pada Alquran dan Pancasila, Gus Dur juga menggunakan konstitusi sebagai landasan legal-formal terhadap gagasannya tersebut. Menurutnya, sudah saatnya hukum menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Untuk itulah Gus Dur kerap mengkritik berbagai pihak yang sering melegalkan aksi kekerasan atas nama agama karena bersandarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di era kepemimpinannya, Gus Dur memperkenalkan gagasan modern, seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia (HAM), khususnya di kalangan anak muda NU. Di Era kepemimpinan Gus Dur, NU berhasil mengalami booming intelektual di tahun 90-an. NU juga tumbuh menjadi salah satu gerakan masyarakat sipil yang aktif mempromosikan dan memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Gus Dur berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang sempit, melainkan agama yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai gagasan dan perkembangan modern, karena sesungguhnya, Islam adalah ajaran yang kosmopolit. Menurutnya, sejarah telah merekam bahwa watak kosmopolitanisme Islam yang ditandai dengan keterbukaan lahir karena adanya ruang ekspresi yang bebas untuk melakukan dialog yang dialektis antar berbagai ragam pemikiran. Selain itu, kosmopolitanisme Islam juga lahir dari adanya proses serap-menyerap yang dilakukan kaum Muslim terhadap peradaban lain yang telah maju dan mapan, seperti peradaban Yunani, sehingga Islam di masa lalu berhasil meraih puncak peradaban tertinggi.

Gus Dur cenderung menolak pendirian negara Islam karena menurutnya Indonesia telah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi negara yang penuh dengan keragaman, sehingga keragaman tersebut harus terus dipupuk dan dirawat bukan untuk dihancurkan demi tetap menjaga indahnya taman kebhinekaan. Dalam konteks Indonesia, Islam tak seharusnya menjadi satu-satunya alternatif, melainkan ia harus menjadi salah satu elemen yang dapat memperkaya dan memberi warna pada keindonesiaan. Menjadikan Islam sebagai satu-satunya alternatif kebenaran terhadap yang lain berarti ia telah menjadi eksklusif. Penerapan Syariat Islam tidak seharusnya dipaksakan oleh negara, karena persoalan agama adalah urusan privat masing-masing pemeluk agama. Negara tidak berkewajiban untuk menghukum para individu yang melanggar ajaran agamanya, sebaliknya pelanggaran terhadap ajaran agama seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi antara para penganut agama dengan Tuhan.

Di mata Gus Dur, untuk menjadi muslim yang baik, seseorang tak perlu ikut berjuang mendirikan negara Islam. Menurutnya, ada lima syarat menjadi muslim yang baik berdasarkan ayat-ayat suci dalam Alquran yang

apabila diperjuangkan, maka seseorang sudah dapat digolongkan sebagai muslim yang baik dan taat, meskipun tak ikut mendukung pendirian negara Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain: menerima prinsip-prinsip keimanan, melaksanakan rukun Islam secara utuh, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan juga bersikap sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.<sup>395</sup>

Gus Dur dikenal sebagai salah satu tokoh yang selalu berani dan nekad melawan arogansi kalangan Islam radikal. Menurut pendapat para ahli, Islam radikal memiliki karakteristik, yakni pertama, mereka berpendapat bahwa Islam bukan hanya agama (*din*), melainkan juga negara (*daulah*) dan dunia (*dunya*), sehingga mereka menganggap bahwa Islam yang kaffah belum terwujud bila kekhalifahan Islam belum didirikan. Mereka menolak dengan tegas dasar negara Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Kedua, mereka cenderung menafsirkan teks agama secara literal dan legal-eksklusif berdasarkan kepentingan ideologis dan platform politik mereka. Siapapun yang berbeda dengan penafsiran mereka, maka akan dimusuhi dan dianggap sebagai sesat dan kafir. Ketiga, mereka cenderung menjadikan masa lalu sebagai zaman yang ideal dan juga menjadikan kaum salaf terdahulu sebagai referensi utama dalam berislam. Keempat, kalangan Islam radikal cenderung sangat anti terhadap pluralisme dan juga anti terhadap berbagai gagasan modern yang dianggap tidak Islami. Kelima, mereka cenderung memaksakan apa yang mereka yakini dan dalam batas tertentu, mereka tak segan-segan menempuh jalan kekerasan demi menegakkan keyakinan mereka, termasuk pada sesama kaum muslim.<sup>396</sup>

Gus Dur kerap memasang badan melawan arogansi kalangan Islam radikal karena dalam banyak kasus, mereka sering melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap kalangan minoritas, salah satunya adalah kaum Ahmadiyah. Aksi kekerasan pada kaum Ahmadiyah oleh kalangan Islam radikal terjadi karena didorong oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dalam Islam. Akibatnya, berbagai fasilitas masjid, sekolah, dan rumah milik kaum Ahmadiyah dibakar dan dirusak oleh kalangan Islam radikal yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI). Celakanya, pemerintah yang seharusnya

35

<sup>395</sup>M. Syafi'I Anwar, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Membingkai Potret Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid", dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. xvii

<sup>396</sup>M. Syafi'I Anwar, dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda...*, h. xxi

menjadi pelindung warganya, hanya tinggal diam, untuk tidak mengatakan melakukan pembiaran terhadap aksi vandalis tersebut.

Melihat kejadian tersebut, Gus Dur tak tinggal diam. Ia mengancam keras FPI dan juga berbagai elemen Islam radikal lainnya karena telah membatasi kebebasan beragama suatu kelompok yang telah dijamin oleh undang-undang dan juga telah mencabik-cabik kebhinekaan negeri ini. Sebagai bentuk perlindungannya terhadap kaum Ahmadiyah, ia menawarkan rumahnya di Ciganjur sebagai tempat berlindung bila negara tak mampu lagi melindungi mereka. Di kesempatan lain, ia berpesan kepada ratusan anggota Anshor, sayap kepemudaan NU, agar tetap konsisten membela dan melindungi hak-hak kaum minoritas.

Karena pembelaannya yang konsisten terhadap hak-hak kaum minoritas, maka Gus Dur sering menjadi target pengkafiran oleh kalangan Islam radikal. Namun dengan slogan hidupnya 'gitu aja kok repot', Gus Dur tetap jalan terus menegakkan pendiriannya membela kalangan minoritas. Gus Dur meyakini bahwa pandangan kaum Islam radikal bukanlah pandangan mayoritas umat Islam Indonesia. Baginya, mayoritas umat Islam Indonesia adalah umat yang sangat moderat, toleran, dan lebih memilih menjadi silent majority, yang terwakili dalam ormas NU dan Muhammadiyah. Sebaliknya, kalangan Islam radikal adalah kelompok yang minoritas, hanya saja mereka hobinya teriak-teriak menjual dan mengatasnamakan umat Islam.

#### **F. Nilai<sup>7</sup> Nilai Demokrasi dalam Islam**

Demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi memiliki pengertian yang banyak, akan tetapi prinsipnya sama sebagaimana awal kemunculannya pada zaman Yunani Kuno, yakni pemerintahan di mana rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan dan kebijakan sehingga hak-hak rakyat tidak diabaikan. Dengan kata lain demokrasi dengan singkat dan padat di rumuskan sebagai "*government of the people, by the people, for the people*" (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Tujuan demokrasi paling hakiki dari sistem demokrasi adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap dasar-dasar manusia sebagai makhluk, baik individu maupun anggota kelompok sosial yang berdaulat dan bermartabat.

Jika demokrasi dengan sistem pengambilan keputusan diserahkan kepada rakyat demi kepentingan bersama dengan menjamin eksistensi hak-hak dasar manusia, maka demokrasi tidak ada masalah dengan Islam. Demokrasi kompatibel dengan Islam. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, dalam bernegara. Tujuan pokoknya adalah menyelenggarakan kebaikan dan mencegah keburukan dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan. Nilai-nilai demokrasi yang bisa digali dari



sumber Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dalam Islam sebagai berikut:

1) keadilan dan musyawarah; 2) kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat; 3) kebebasan adalah hak penuh bagi semua warga Negara; 4) persamaan di antara sesama manusia khususnya persamaan di depan hukum; 5) keadilan untuk kelompok minoritas; 6) undang-undang di atas segalanya; 7) pertanggung jawaban penguasa kepada rakyat. Oleh karena itu, seperti dikatakan Ahmad Syafii Maarif, mayoritas umat Islam menerima demokrasi sebagai bagian dari nilai yang prinsip-prinsipnya sesuai dengan Islam. Dan karena itu pula umat Islam harus berusaha untuk mendorong terjadinya demokrasi di dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jauh sebelum adanya *Declaration of Human Right* yang di terapkan oleh PBB sebagai dasar bersama penghormatan terhadap manusia, Islam sejak 15 abad yang lalu telah memuat nilai-nilai kemanusiaan universal baik yang tertera dalam Alquran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Nilai-nilai universal kemanusiaan, secara tegas dinyatakan dalam pidato Rasulullah yang terkenal ketika Beliau melakukan haji wada. Islam adalah agama yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa manusia sebagai manusia tidak di lihat dari ras, etnis, bahasa, dll. Melainkan dilihat dari ketakwaannya. Karena itulah Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Karena tingginya penghormatan Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, maka hak-hak dasar manusia yang suci dilindungi oleh Islam. Hak-hak itu meliputi

1. **Hak hidup** adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi. Itu merupakan anugerah yang di berikan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada yang berhak mencabut hak tersebut kecuali Allah yang memberinya. Karena itu usaha-usaha yang bisa mencabut hidup seseorang merupakan pelanggaran. Untuk melindungi hak tersebut Allah berfirman dalam QS. **Al-Maai'dah : 32** dan **QS. Al-Israa' : 33**.
2. **Hak milik**, Islam melindungi harta yang dimiliki baik secara individu maupun kolektif. Setiap usaha pengambilan kepemilikan secara tidak sama merupakan bentuk pelanggaran. Allah berfirman dalam **QS. Al-baqarah : 188**.
3. **Hak kehormatan**, manusia adalah makhluk mulia. Secara fitrah ia harus di hormati dan dihargai. Setiap tindakan yang menurunkan harkat dan martabatnya adalah bentuk pelanggaran. Allah melarang manusia saling menghina, mencela dan mencaci maki yang akan mencederai kehormatannya. Demikian pula Allah melarang manusia membuka aib dan keburukan yang lain. Demikianlah firman Allah SWT **QS. Al-Hujuraat : 11-12**.
4. **Hak persamaan**, manusia dalam Islam dipandang sama. Manusia dilahirkan menurut fitrahnya sesuai dengan keputusan Allah. Di sisi



Allah, manusia tidak dilihat dari ras, gender, kulit, kebangsaan dan lain-lain, melainkan dari ketakwaannya. Firman Allah SWT dalam **QS. Al-hujuraat : 13, QS. Al-israa' : 70, QS. Ali Imran : 195**. Dan masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang berbicara menegaskan prinsip persamaan tersebut, **QS. An-nisaa' : 32, QS. An-nahl : 58-59**. Hak persamaan di bedakan dalam 3 jenis, yaitu : 1) persamaan hak dalam hukum; 2) persamaan hak dalam memperotes penyelewengan; 3) persamaan kedudukan dalam pemerintahan.

5. **Hak kebebasan**, Islam menyatakan bahwa setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah atau suci. Karena itu, manusia memiliki kebebasan yang di sesuaikan dengan prinsip keadilan. Islam adalah agama yang secara inheren menegaskan mengenai prinsip kebebasan manusia yang di bawa sejak lahir. Karena itu segala bentuk penindasan yang salah satunya adalah perbudakan harus dihapuskan. Namun demikian kebebasan sifatnya terbatas sesuai dengan fitrah keterbatasan manusia itu sendiri. Prinsipnya dalam Islam adalah kebebasan yang tidak mengingkari kebebasan itu sendiri. Dengan kata lain kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang bisa mengantarkan kepada terciptanya kemaslahatan bagi semua orang. Terdapat dalam firman Allah : **QS. At-Taubah : 71** dan **QS. Al-Hajj : 41**. Bentuk-bentuk kebebasan meliputi, 1) kebebasan berekspresi; 2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; 3) kebebasan beragama; 4) kebebasan bermusyawarah; 5) kebebasan berpindah tempat.

Titik tolak pemikiran Gus Dur bukan dengan mengagungkan modernisme, tetapi mengkritik modernisme yang diuniversalkan dengan menggunakan pisau tradisionalisme Islam. Gaya pemikiran seperti ini tampak jelas ketika Gus Dur menjelaskan soal universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam. Dalam persoalan universalisme Islam misalnya, Gus Dur tidak perlu merujuk secara langsung kepada Alquran atau hadis, sebagaimana sering digunakan kelompok Islam modernis, tetapi merujuk pada teori dalam *ushûl al-fiqh* yang disebut *al-dharûriyat al-khamsah* (lima hal dasar agama).<sup>397</sup>

Kelima<sup>22</sup> dasar itu adalah, pertama, *hifz al-dîn* yang dimaknai Gus Dur sebagai keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan berpindah agama. Kedua, *hifz al-nafs*, yang dimaknai sebagai keharusan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Ketiga, *hifz al-'aql*, pemeliharaan atas kecerdasan akal. Keempat, *hifz al-nasl*, keselamatan keluarga dan keturunan. Dan kelima, *hifz al-mâl*, keselamatan hak milik, properti dan profesi dari gangguan

<sup>397</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, h. 3-8

dan pengurusan di luar prosedur hukum.<sup>398</sup> Dari penjelasan ini sebenarnya Gus Dur sudah menggunakan term Islam klasik, kemudian diberi makna kontekstualnya. Term *hifz al-dîn*, misalnya, semula sekadar diberi makna memelihara agama, dalam arti orang Islam tidak boleh keluar dari Islam dan memeluk agama lain. Akan tetapi, di tangan Gus Dur, term ini menjadi spirit untuk melakukan pembelaan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Demikian juga dengan term *hifz al-'aqlî*, yang dalam fiqh klasik selalu dicontohkan dengan larangan meminum minuman keras, tetapi di tangan Gus Dur *hifz al-'aqlî* dikaitkan dengan keharusan untuk memelihara dan mengasah kecerdasan.

Dengan demikian, bagi Gus Dur, universalisme Islam itu tercermin dalam ajaran-ajarannya yang mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Karena itu, pemerintah harus menciptakan sebuah sistem pendidikan yang benar, dan ruang untuk memperoleh informasi dibuka lebar.

Dengan memberi makna demikian, konsep universalisme Islam seperti menjadi sangat inklusif dan terbuka dengan berbagai kemungkinan perkembangan modern. Islam juga tampak menjadi agama yang terbuka. Dari sinilah Gus Dur kemudian merumuskan konsep kosmopolitanisme Islam.

Sebenarnya kosmopolitanisme Islam sudah terjadi sejak masa-masa awal perkembangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan kebersediaan Islam untuk berinteraksi dan menyerap unsur-unsur lain di luarnya. Ke-24-bukaan itulah yang memungkinkan kaum Muslim selama sekian abad menyerap berbagai macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari peradaban lain.<sup>399</sup> Kosmopolitanisme peradaban Islam, bagi Gus Dur, muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, heterogenitas politik dan kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad.<sup>400</sup> Wata-20 kosmopolitanisme dan universalisme ini digunakan Gus Dur untuk melakukan pengembangan 20-hadap teologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamâah atau yang biasa disingkat Aswaja dala-20-menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masyarakat.

Jika selama ini paham Aswaja, terutama di lingkungan NU, hanya terkait dengan masalah teologi, fiqh, dan tasawuf, bagi Gus Dur, pengenalan Aswaja harus diperluas cakupannya meliputi dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat. Tanpa melakukan pengembangan itu, Aswaja akan sekadar menjadi muatan doktrin yang tidak mempunyai relevansi sosial.

<sup>398</sup>Syaiful Anri, Kesehatan Abdurrahman Wahid Ambruk di Jombang (Liputan 6 Online edisi 30-12-2009). 21-5.

<sup>399</sup>Abdurrahman 21-hid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, h. 4.

<sup>400</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, h. 9.

Dasar-dasar <sup>20</sup>um kehidupan bermasyarakat yang dimaksud Gus Dur adalah, pertama, pandangan manusia dan tempatnya dalam kehidupan. Kedua, pandangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, pandangan ekonomis tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat. Keempat, pandangan hubungan individu dan masyarakat. Kelima, pandangan tentang tradisi dan dinamisasinya melalui pranata hukum, pendidikan, politik, dan budaya. Keenam, pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat. Ketujuh, pandangan tentang asas- asas internalisasi dan sosialisasi yang dapat dikembangkan dalam konteks doktrin formal yang dapat diterima saat ini.

Dengan kerangka pengembangan Aswaja yang diajukan Gus Dur ini, terlihat sekali upayanya agar Aswaja tidak menjadi doktrin yang baku dan beku, tetapi doktrin yang dinamis. Gus Dur seolah ingin mengatakan kalau Aswaja ingin menjadi doktrin yang hidup, tidak ada pilihan lain kecuali harus mau berinteraksi secara terbuka dengan perkembangan realitas sosial.

Gus Dur dalam melakukan kritik terhadap Arabisme Islam ini tidak hanya terbatas, bagaimana Arabisme Islam ini akan mendangkalkan pemahaman serta refleksi terhadap tradisi, tetapi bahwa Arabisme Islam ini dihubungkan dengan ekonomi (munculnya bank- bank syari'ah) dan pengaruhnya terhadap ekonomi orang-orang kecil, HAM.

Dalam politik Gus Dur terlebih dahulu menjelaskan tentang arti politik itu sendiri, menurutnya politik menurut Islam harus transformatif, di mana Islam harus mampu melakukan diferensiasi, harus mengubah masyarakat sebab risalah Nabi Muhammad SAW merupakan risalah transformatif dan emansipatif. Bagi Gus Dur, politik itu penting, namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam arti memberi peluang pada rakyat untuk menyatakan pendapat dan pikirannya secara jujur. Gerakan-gerakan yang memberi respons terhadap perubahan sosial sejak awal harus mengacu kepada struktur sosial yang lebih adil untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan gerakan tersebut tidak perlu ikut dalam percaturan politik yang hanya akan memperkuat status quo. Gus Dur berargumen:

Alquran dengan indahny merumuskan fungsi tersebut dengan dua ayat. Pertama telah ada bagi kalian keteladanan sempurna dalam diri Rasulullah, bagi mereka yang mengharapkan rida Allah swt. di akhir nanti serta yang senantiasa sadar akan keagungan Allah swt, dalam hal apakah Rasulullah saw menjadi keteladanan sempurna (*uswah hasanah*)? Dalam fungsi Beliau yang disebutkan dalam firman Allah swt "Tidaklah Aku utus engkau (wahai Muhammad), melainkan sebagai pembawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan jagad raya seisinya, untuk tugas penyejahteraan kehidupan itu, manusia diciptakan dengan kelengkapan yang sempurna (*ahsan taqwim*) sebagai makhluk. Dengan demikian, ia mampu mengembangkan kepribadian, dan melalui pengembangan kepribadian itu



lahirlah pola hubungan antar- manusia yang dinamai pergaulan masyarakat<sup>401</sup> at”.

Wujud Islam sebagai pandangan hidup memerlukan sebuah pengejawentaaan dalam bentuk masyarakat yang berstruktur, karena pada hakikatnya bentuk itulah yang merupakan konkretisasi pergaulan masyarakat. Dengan begitu, menjadi tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama. Dengan<sup>4</sup> ngkapan lain, bentuk yang paling mungkin dicapai adalah yang bukan berbentuk utopis yang ditawarkan melalui idealisme sebuah kontruk Islam. Selanjutnya Gus Dur mengatakan bahwa:

*“Kalau memang Nabi Muhammad SAW menghendaki berdirinya sebuah Negara Islam, maka mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi hanya memerintakan bermusyawarahlah kalian dengan persoalan. Masalah terpenting itu bukannya dilembagakan secara konkret melainkan dicukupkan dengan sebuah diktum saja, yaitu masalah mereka harus (haruslah) dimusyawarahkan di antara mereka. Mana ada negara dengan bentuk itu”.*<sup>402</sup> <sup>4</sup>

Dengan demikian tidak adanya bentuk yang baku dari sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat-ayat Alquran maupun Hadis. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil naqli tetapi pada kebutuhan masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut Gus Dur menyatakan:

*“Islam tidak mengenal doktrin tentang kenegaraan, doktrin Islam tentang negara adalah, doktin tentang keadilan dan kemakmuran, selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Saya kira tidak perlu doktrin Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi negara Islam. Karena Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan”.*

Dengan demikian, jelas bahwa bagi umat Islam yang penting ialah pengaturan sebab konsep dasar Islam tentang masyarakat adalah hukum bukan *dawlah* (negara), dalam Alquran kata-kata *dawlah* itu tidak ada. Jadi, istilah kenegaraan dalam Alquran tidak memakai *dawlah*. Pengertian kenegaraan dalam arti istilah geografis adalah menggunakan kata *baldah*.

55

<sup>401</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Islam dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 74.

6

<sup>402</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 16.



4

Untuk menguatkan pendapat tersebut Gus Dur menggambarkan sejarah pemerintahan Islam awal yang disebut sebagai dinasti:

“Nabi Muhammad ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan pemimpin umat atau komunitas melalui wahyu. Setelah itu, Nabi tidak merumuskan apa-apa lagi. Terjadi konflik untuk menyelesaikan masalah kepemimpinan. Akhirnya Abû Bakr dibaiat menjadi pemimpin. Tatkala Abu Bakr sakit hendak meninggal, dia menitipkan pesan agar Umar bin Khatab menggantikan kepemimpinannya. Ketika Sayyidina Umar akan mati, ia berpesan agar menunjuk tujuh orang Dewan Pemilih termasuk Abd. Allah anaknya, namun dengan catatan Abd Allah tidak boleh dipilih. Akhirnya yang menjadi khalifah adalah Uşman bin Affan, kemudian ia dibunuh, dan tidak jelas pesannya. Begitulah nasib para penggantinya. Dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada masa awal itu yang ada hanya dinasti. Lalu bentuk negara awal yang Islami itu yang bagaimana? Karena berbentuk dinasti, maka institusionalisasi (kelembagaan) politiknya cenderung mempertahankan status quo”.<sup>403</sup>

Gus Dur menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok yaitu persoalan suksesi kekuasaan (penggantian), dan ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep yang *istikhlâf*. Kadang juga memakai sistem *ahl al-hall wa al-‘aqd* (sistem formatur). Padahal perihal suksesi adalah permasalahan yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Tiga model (*istikhlâf*, *bay‘at*, dan *ahl al-hall wa al-‘aqd*) ini terjadi hanya dalam tempo tiga belas tahun. Padahal kalau memang Islam mempunyai konsepnya, tentu tidak akan demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang paling takut dengan Rasulullah.<sup>404</sup>

Dengan demikian, Islam memang sengaja tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanyalah komunitas agama. Umat Islam adalah sebaik-baiknya umat yang berada di antara sesama manusia (khayr ummat bukan dawlah). Hal ini berarti, yang terpenting baginya adalah berlakunya hukum Islam di masyarakat.

Bagi Gus Dur, Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai. Pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai untuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu, sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Karena pada analisis terakhir, manusialah yang menjadi objek

63

<sup>403</sup>Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gusdur: Pribunisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 235.

<sup>404</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, 86-87

4

upaya penyejahteraan hidup itu. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut. Terkait dengan apa yang selama ini menjadi perdebatan mengenai ideologi negara, dikatakan:

“Kita tidak usah mencari-cari negara yang ideal karena memang tidak ada yang ideal. Islam tidak menyebutkan tentang soal negara ideal, dan juga tidak mengharuskan. Allah meridai Islam sebagai agamamu, bukan sebagai sistem pemerintahan. Islam menjadi besar kalau ia tidak menampakkan wajah politik melainkan mengutamakan wajah moralnya, atau dengan kata lain Islam mengutamakan politik sebagai institusi. Menurut pengakuannya; “Saya lebih melihat kepada pencapaian cita-cita Islam yang sebenarnya, yakni keadilan, kemakmuran dan kesamaan di antara semua umat manusia. Kalau kita masih menginginkan bahwa Islam harus lebih dari yang lain, itu tidaklah islami. Justru bertentangan dengan Islam”.<sup>405</sup> Firman Allah yang sering dijadikan landasan bagi gagasan Negara Islam:



<sup>405</sup>Abdurrahaman Wahid, *Tabayun...*, h. 236.



40

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu 71 rbuatan fasik. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu”.<sup>406</sup>

6

Firman Allah ini selalu dijadikan dalil bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna yang hanya dapat terwujud dalam sebuah sistem kenegaraan yang “berbau negara”.<sup>407</sup>

Seandainya tanpa negara, apakah Islam tidak dapat terwujud dengan sempurna? Permasalahannya menjadi jelas bagi kita semua; benarkah asumsi dasar bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam sebuah bentuk kenegaraan tertentu? Jika jawabannya positif kita harus mendirikan negara Islam sebagai “perintah agama” yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka pengingkaran terhadap perintah semacam itu, berarti pembangkangan yang harus dihukum dan ditindak. Sedangkan kelalaian untuk melasanakannya merupakan pengingkaran terhadap kewajiban agama. Ini adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh kaum Muslimin di manapun mereka berada.

Gus Dur berpandangan, tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam, berdasarkan ketiadaan konsepnya dalam nash Alquran. Karena dalam Alquran tidak ada konsep *dawlah* (negara, pemerintahan), dan tidak diaturnya model suksesi yang tetap. Padahal suksesi adalah persoalan yang sangat penting dalam suatu konsepsi model pemerintahan. Dengan begitu, maka menjadi jelas bahwa tidak ada konsep teori kenegaraan, yang berbeda dari konsep-konsep yang lainnya.

Secara teoretis menurut Gus Dur, terdapat dua model pemikiran tentang negara dalam pandangan Islam. Pertama, adalah pemikiran idealistik yang dalam kerangka pemikirannya telah secara sadar dirumuskan sebuah kerangka negara yang sepenuhnya berdasarkan wawasan Islam. Dalam pandangan ini, Islam merupakan sebuah konsep kenegaraan yang harus diwujudkan secara penuh, dalam sebuah bangunan masyarakat yang seratus persen islami. Kedua, jenis pemikiran realistik yang tidak begitu tergoda oleh

77

<sup>406</sup>Lajnah Pentash 111 Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.144

<sup>407</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute 2006), h. 13.



6 bangunan utopis dari sebuah negara ideal menurut wawasan Islam. Pikiran ini lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis negara dapat ditampung dalam Islam.<sup>408</sup>

Gus Dur mendasarkan pemikirannya tentang konsepsi Islam dan negara dengan menggunakan metode fungsionalisme (struktural). Sebab baginya, perumusan hubungan yang tepat antara relasi agama dan negara harus menggunakan sudut pandang fungsional,<sup>409</sup> yaitu keharusan membacanya dalam suatu kerangka, bahwa antara agama dan negara mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Karena itu, meski pada dasarnya antara agama dan negara mempunyai fungsi yang berbeda, namun antara satu dan yang lainnya tidak bisa saling menegasikan, atau dengan kata lain, yang satu tidak bisa hidup dengan tanpa kehadiran yang lainnya. Dengan begitu, pola yang digunakan Gus Dur adalah metode keseimbangan dengan menekankan pada terciptanya keharmonisan.

Selain menolak diberlakukannya agama sebagai “ideology alternatif”, Gus Dur juga menolak diberlakukannya agama sebagai sebuah suplemen (pelengkap) dalam negara, yang justru akan mengakibatkan kecilnya penghargaan negara terhadap hak asasi manusia dan tidak mendukung tegaknya kedaulatan hukum serta kecilnya ruang gerak bagi kebebasan berbicara dan berpendapat. Dengan posisiya yang bersifat suplementer, hubungan agama dan negara justru akan bersifat manipulatif, yaitu sekadar menyediakan simbol-simbol agama sebagai legitimasi bagi kekuasaan.<sup>410</sup>

42

Pribumisasi Islam adalah bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari masyarakat tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Gus Dur, Arabisme atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya sendiri. Lebih dari itu, Arabisme belum cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam (Islam pribumi) adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi yang demikian memang tidak terhindarkan.<sup>411</sup>

6

Pribumisasi Islam bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh

<sup>408</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*,h. 55-56.

<sup>409</sup>Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 74

<sup>410</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*,h. 249.

<sup>411</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 111-113



23 variasi pemahaman nassh dengan tetap memberikan peranan kepada *ushul fiqh* dan *qawâ'id al-fiqh*.

Berdasarkan hal tersebut Gus Dur dalam mengimplementasikan konsep demokrasi secara teologi, memandang agama merupakan kebenaran dalam membentuk kesalahan terhadap pemeluknya. Yang esensi dalam hal ini seluruh keyakinan pemeluk agama sama dalam kehidupan berdemokrasi, karena agama merupakan pencerminan dari teologia yang benar dan ketaatan yang saleh. Jadi dalam hal ini Gus Dur tidak mempermasalahkan mengenai nilai kepercayaan masing-masing. Hal tersebut diserahkan saja pada para teolog dari masing-masing agama dan keyakinan, karena hal tersebutlah semua agama akan mampu memperjuangkan terjadi proses demokratisasi secara bersama-sama dalam kehidupan beragama.

Dalam kehidupan berdemokrasi terkadang dihadapkan dengan kedaulatan hukum hanya dapat ditegakkan sebagian saja. Terdapat ketakutan hukum yang tidak akan dapat dikenakan kedaulatan hukum itu karena kuatnya mereka. Begitu juga, ada pihak yang tidak terkena sanksi Undang-Undang (UU), karena bukti-bukti hukum yang ada tidak cukup untuk menjamin diseretnya mereka ke meja hijau. Disinilah terlihat bahwa Islam menganut konsep demokrasi. Dalam hal ini, Gus Dur menggunakan ketentuan teori hukum Islam, yaitu *mâ lâ yudraku kulluh, lâ yutraku kulluh* (apa yang tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, tidak ditinggalkan yang terpenting).<sup>412</sup>

Selama penegakan hukum berjalan, dan persamaan perlakuan di muka Undang-Undang dilaksanakan serta kemerdekaan pers ditegakkan, selama itu pula tetap demokratis. Dengan demikian tentu saja, nilai-nilai agama menjadi pondasi moralitas dalam rangka memperjuangkan, menegakkan, dan menebarkan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam hal ini, Gus Dur membuat suatu benang merah bahwa tanpa adanya tali kekang nilai Agama dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi tentu saja akan menghalalkan segala cara yang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Jadi pada dasarnya prinsip kekuasaan rakyat yang merupakan fondasi demokrasi, harus berkesusaian dengan dengan prinsip kekuasaan Allah yang merupakan fondasi pokok dan ideal dalam legislasi Islami. Hal inilah yang ingin diarahkan oleh Gus Dur dalam berdemokrasi, bahwa Islam dan Negara merupakan suatu hal yang tidak boleh dipisahkan, bukan berarti wajib menjadikan Negara menjadi Islam tetapi pengamalan pemeluknya dalam sendi-sendi bernegara dengan melihat keberagaman dalam negara tersebut. Berdasarkan sosial kebudayaan historisnya dapat dilihat bahwa keterlibatan para ulama dalam kancah perpolitikan sangat beraneka ragam, baik dalam

<sup>412</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, h. 45

pengurus struktural partai politik, sebagai calon legislatif dan eksekutif, dalam dukungan suara dan kampanye baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah tentu akan berpengaruh dengan segala eksistensinya telah terjadi pergeseran peran, baik dalam fungsi, tanggung jawab, kiprahnya, juga pada mindsetnya. Intinya adalah kiprah ulama tidak hanya dilihat dari kegairahannya dalam mentransformasi nilai-nilai agama pada masyarakat, juga pada gigihnya dalam perjuangan social politiknya saja.

Peran keagamaan ulama di Indonesia sangatlah kompleks, yakni sebagai pemimpin ritual keagamaan, sebagai pendiri atau pengasuh pondok pesantren, sebagai guru/pemimpin tarekat. Terjadinya perubahan sosial masyarakat disebabkan proses berlangsungnya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang diikuti oleh berbagai implikasi di bidang ekonomi, geografis, budaya, dan psikologisnya, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian ulama akan terbentur dengan budaya masyarakat hedonis tersebut, jadi ulama akan dituntut lebih fleksibel dan akomodatif, namun juga diperlukan strategi dinamis agar dakwah agamanya bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Seorang ulama yang terlibat dalam politik kekuasaan, akan muncul dengan sebutan ulama politik maka karisma ulama akan semakin memudarnya di masyarakat. Sebaliknya ulama, yang tidak berpolitik akan berdampak dengan lunturnya loyalitas yang dahulu sudah terpatri dan tertanam sangat kuat. Tetapi dalam pandangan masyarakat akan menilai positif keterlibatan kyai dalam dunia politik dengan asumsi bahwa ulama yang ikut politik diharapkan dapat menekan berbagai penyelewengan kekuasaan dan menjembatani persoalan-persoalan umat. Ulama yang masuk dalam politik dan kekuasaan sudah tentu memiliki alasan, salah satu alasan historis adalah peran ulama dalam melawan Belanda dan memperjuangkan 96 merdeka Indonesia. Yang terpenting adalah politik bagi ulama adalah menanamkan nilai-nilai moral untuk pencerdasan dan penguatan umat dan masyarakat.<sup>413</sup>

Ulama merupakan pengemban amanah kekuatan kultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ulama

---

<sup>413</sup>Ketika Gus Dur dicalonkan, dan akhirnya berhasil menjadi Presiden dianggap sebagai angin segar bagi iklim keagamaan di Indonesia. Bagaimana tidak, sepanjang sejarah Indonesia, baru Gus Dur lah Presiden yang berlatar belakang santri. Ada harapan yang cukup positif bagi perkembangan Islam di Indonesia yang bernuansa substantif neo-modernistik yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi perkembangan pada umumnya di Indonesia. Abd. A'la, "Kemenangan Gus Dur Angin Sejuk bagi Iklim Keagamaan di Indonesia", dalam Abdul Munir Mul Khan, *Perjalanan Politik...*, h. 19-20

akan berorientasi pada pemeliharaan dan berpegang pada proses internalisasi ajaran agama dengan tidak harus menghancurkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam kultur lokal, agar tidak terjadi kebangkitan resistensi pada ajaran agama yang diintroduksi. Dengan demikian tampak jelas pengaruh ulama terhadap politik kekuasaan, selain sebagai jembatan bagi masyarakat terhadap pemerintah, ulama juga sebagai kontrol kendali terhadap pemerintah agar tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Dengan demikian peran ganda ulama dalam kehidupan sosial politik adalah kerangka teologis yang berakibat pada aksi sosial politik yang dihasilkannya. Jadi seorang ulama muncul dengan pengembangan kepribadian yang terbuka dan memiliki komitmen. Maka tidaklah mengherankan jika sosok Gus Dur tampil sebagai ator politik dengan memperjuangkan konsep demokrasi dalam perspektif Islam yang ditawarkan dengan pribumisasi Islam atau pluralismnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Islam dan demokrasi sesungguhnya berjalan beriring, sehingga Gus Dur dengan tegas mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan alasan:

1. Islam adalah agama hukum, jadi dalam hal ini dalam memberlakukan hukum dalam Islam tidak memandang kelas, baik pemangku jabatan tertinggi bahkan sampai masyarakat miskin dan jelatapun mendapat perlakuan hukum yang sama. Dengan demikian maka hukum dalam Islam dengan langgeng berjalan dalam kehidupan umat Islam.
2. Pada dasarnya yang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam memiliki asas permusyawaratan. Hal tersebut merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan Nabi hingga sekarang, dan konsep ini telah <sup>12</sup> jelaskan dalam Alquran. Jadi tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka hingga pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan.
3. Islam selalu menganjurkan pada pemeluknya bahwa untuk memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan di akhirat, jadi kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap tetapi harus terus ada peningkatan menjadi kehidupan lebih baik.<sup>414</sup>

Gus Dur selalu memberikan konsep dalam Islam dalam menyuarakan ide demokrasinya. Hal ini dapat dilihat bahwa Gus Dur mengungkapkan kaidah Fiqh: "*Darul Mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih...*" menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kebaikan. Apabila berlawanan antara yang *mafsadah* dan *maslahah* itu, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari eksperimentasi demokrasi pada dasarnya adalah bukan untuk kekuasaan. Jadi yang menjadi esensi dari tujuannya dari demokrasi adalah untuk

<sup>414</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara...*, h. 87-89

mewujudkan masalah bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan kekuasaan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan dari cita-cita tersebut.<sup>415</sup>

Dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan bentuk penerapan nilai-nilai universal Islam dalam konteks modern. Jadi dalam mengimplementasikan ayat-ayat Alquran perlunya reinterpretasi sesuai dengan kontekstualnya agar nilai-nilai universalnya dapat diterapkan dalam situasi yang terus berubah. Jadi Gus Dur meyakini bahwa umat Islam perlu merespon isu-isu modern yang dihadapi sekarang, tidak bisa selalu bertahan dengan tradisi Islam. Jadi terlihat bahwa pemikiran Gus Dur tentang teologi demokrasi merupakan responnya terhadap isu demokrasi dari perspektif Tradisi Islam. Pemahaman Muslim tentang teologi demokrasi menurut Gus Dur tidak perlu bertentangan dengan ekspresi mengenai demokrasi dari konsep dari non-Muslim. Hal ini karena pada dasarnya dalam sektor publik, pernyataan tentang pernyataan keberagaman boleh dipahami secara berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing kelompok. Ajaran dalam Agama Islam sebagai agama universal merupakan sistem ajaran yang kompleks yang mencakup semua aspek kehidupan. Tetapi dalam hal ini dalam sistem ajaran masih membutuhkan berbagai interpretasi sesuai dengan zaman dan tempat karena permasalahan yang dihadapi dalam perjalanan zaman umat tidak sama. Jadi agar dapat mengimplementasikan ajaran Islam secara produktif dan fungsional, maka dalam hal ini masih membutuhkan proses transformasi tuntutan ralitas yang dihadapi umat Islam. Jadi, ikhtiar mempribumikan nilai-nilai ajaran Islam yang diganangkan oleh Gus Dur yang hanya berlaku pada wilayah-wilayah tertentu. Walau demikian perlu dipahami bahwa ajaran Islam tetap universal meskipun dalam hal ini pesan-pesan dari ajaran Islam masih harus dipertemukan dengan tuntutan budaya lokal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijtihad masih berlaku pada saat sekarang ini, karena dalam memperoleh petunjuk-petunjuk operasional bagi kehidupan, masih diperlukan konsep baru dari nilai-nilai Islam sebagai mekanisme intrepertasi dan reaktualisasi nilai-nilai ajaran Islam tekstual. Berdasarkan ini, Gus Dur menganggap penting untuk mempertimbangkan dimensi-dimensi lokal, konstektual dan temporal terhadap nilai-nilai dari ajaran Islam itu sendiri.<sup>416</sup>

Paradigma pemikiran Gus Dur ini secara substantif dapat dikatakan mendekati pemikiran Abduh dalam menangkap esensi Islam yang mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan aktual masyarakat. Berdasarkan pandangan Abduh, dalam mencanangkan komitmen terhadap tegaknya

<sup>415</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 118

<sup>416</sup>Dimensi lokal itulah yang akhirnya melahirkan konsep Pribumisasi Islam. Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, h. 120-122



Islam, tidak bisa dipadankan dengan menjaga teks-teks Alquran saja, tetapi yang diutamakan adalah menangkap makna Alquran dengan tujuan agar makna dari Alquran relevan dengan konteks kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Hal inilah yang disepakati oleh Gus Dur bahwa Islam merupakan agama yang memberi ruang pembebasan bagi pemeluknya. Dalam konteks sejarah bahwa Islam hadir untuk memperbaiki ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat budaya Arab. Melalui Alquran sebagai sumber pokok dalam Islam memberi penjelasan terhadap kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat.

Jadi Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang moralitas yang sangat memperhatikan pada signifikan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Ini yang membuat Gus Dur memberi penegasan bahwa dalam bernegara Islam tidak dapat dipaksakan sebagai ideologi, maksudnya adalah menolak ajaran Islam sebagai fungsi suplementer agama dalam negara maupun fungsi alternatif agama sebagai ideologi tunggal negara.

Berdasarkan uraian dari hal tersebut di atas jelas bahwa Islam memberikan kebebasan dan memberlakukan keadilan bagi setiap pemeluknya. Hal ini merupakan dasar-dasar dalam demokrasi, dengan demikian maka jelaslah bahwa dalam Islam mengajurkan untuk hidup demokrasi dengan tidak mementingkan kepentingan individu tetapi kepentingan kemaslahatan umat tanpa menghilangkan dari esensi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Tetapi hal yang terpenting adalah ajaran nilai-nilai Islam diinterpretasikan dalam konteks kehidupan umat sesuai dengan masa dan tempatnya.<sup>417</sup>

Perdebatan kewarganegaraan di dalam khazanah Islam bahkan belum selesai pada Aras yang lebih mendasar. Kesetaraan warga negara, hingga saat ini dalam diskursus keilmuan Islam persamaan warga negara (*Equality*) di dalam negara bangsa bahkan di dalam dunia Islam sekalipun masih diperdebatkan antara mereka yang berpandangan ideologis teokratis dengan mereka yang berpandangan ideologi sekularisme dan di lain pihak ada yang berpandangan kultural reinterpetatif. Mereka yang mendasarkan pandangan pada ideologi teokratis umumnya hendak membedakan antara warganegara Islam dan non Islam berdasarkan pada doktrin Ortodoks *zimmi dan ummah*. Meskipun mereka mengakui adanya konsep negara bangsa yang berlaku. Konsep negara bangsa yang mereka terima tidak menghapus keharusan supermasi muslim atas muslim dengan kata lain, diskriminasi di dalamnya.

---

<sup>417</sup>Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur...*, h. 54

Sementara mereka yang berpandangan sekuler ideologis mau memaksakan perubahan paradigma Islam ke dalam paradigma kemodernan yang notabene berasal dari Barat. Dalam hal ini adalah doktrin HAM ke dalam sistem pemahaman Dasar Islam. Bahkan mereka mau menempatkan sebagai syarat yang tidak bisa dihindari bagi Islam guna merespon kemodernan tersebut. Sedangkan pandangan kultural reinterpretatif ingin membangun argumen membangun argumen bagi kesetaraan (*Equality*) warga negara atau kewarganegaraan melalui penelusuran jauh ke belakang mengenai panggilan pemikiran dan praktik Islam klasik, proses dialektika dengan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat kontemporer untuk merespon dinamika kemodernan tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan metodologi Islam Post-tradisionalisme. Gus Dur sebagai ulama dan intelektual pendorong gerbong gerakan sosial dalam dunia Islam berada di garis tersebut. Dalam praktiknya ciri-ciri tersebut di Indonesia menandai karakter Islam Nusantara.

Istilah Islam post-tradisionalisme atau Islam post tradisional pernah digunakan oleh antropolog Ernest Gellner dalam sebuah tulisannya di jurnal *Daedalus* yang terbit 1973 yang diterbitkan oleh MIT press atas nama American Academy of arts and sciences. Di dalam tulisannya Gellner tampaknya hendak menunjukkan kepada kolega orientalisnya bahwa Islam kini tidak monolitik, melainkan sangat plural tidak seperti anggapan mereka waktu itu, namun, pluralitas Islam itu menghadapi berbagai tantangan modern, bukan hanya dalam pandangan teologi, tetapi juga dalam Politik perdagangan dan kepemimpinan.

Islam Post tradisional adalah salah satu dari mereka yang sukses melampaui dan menjawab tantangan kemodernan dan tanpa kehilangan jati diri sebagai masyarakat Islam dan sekaligus berbasis pada tradisi Timur. Yang dimaksud dengan Islam post tradisionalisme bagi Gellner adalah, kurang lebih sebagaimana siasat komunitas Islam itu menghadapi tuntutan kemodernan yang bukan hanya pada aras filosofis dan pandangan, melainkan juga praksis kehidupan tanpa harus meninggalkan tradisi dan keyakinan yang asasi bagi mereka.<sup>418</sup>

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami masa perubahan pemerintahan menjadi reformasi. Hal tersebut berimplikasi sangat luar biasa terhadap sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi kehidupan sosial politik di Indonesia sangat terbatas, otoritas<sup>25</sup> dan represif, dengan runtuhnya dinasti Orde Baru yang bertahan selama selama 32 tahun akhirnya ruang kehidupan sosial politik yang lebih terbuka dan bebas berbagai dimensi kehidupan sosial politik.

<sup>418</sup>Ahmad Suaedi, *Abdurrahman Wahid; Islam Nusantara dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 80-81.

Dengan kehidupan demokrasi, dalam mengekspresikan pemikiran dan kehendak dalam kehidupan sosial politik masyarakat menjadi lebih mudah dan bebas. Kehidupan demokratis dan sikap kritis merupakan sesuatu yang langka pada masa Orde Baru karena dianggap subversif, sedangkan pada masa reformasi kebebasan warga negara untuk berkumpul, berorganisasi dan berserikat lebih terjamin dengan tujuan untuk memajukan negara dan bangsa.<sup>419</sup> Di era reformasi terjadi perubahan dalam iklim perpolitikan di Indonesia. Berkompetisi untuk mendapatkan dan mempengaruhi kekuasaan seluruh partai politik yang menaungi setiap masyarakat memiliki kebebasan yang sama dalam berpartisipasi, menjadi sesuatu yang biasa.

Dalam kehidupan berdemokrasi harus memegang teguh suatu pondasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maksudnya adalah dalam pengelolaan suatu negara rakyat berperan aktif, dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian maka kedudukan setiap warga negara sama dari perspektif kedudukan dan hak dan diberi kebebasan dalam konsep memilih ataupun dipilih. Jika dikaitkan dengan politik, maka konsep demokrasi dapat dimaknakan sebagai ekspresi kebebasan berpendapat.

Hal yang paling penting dalam demokrasi adalah dengan konsep kewarganegaraannya, dalam hal ini pemerintah yang menganut konsep demokrasi memberikan akses dan tanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya. Jika dalam konteks Indonesia bahwa demokrasi yang ingin diwujudkan di Indonesia adalah demokrasi yang berfondasi pada politik dan ekonomi, maksudnya adalah dalam demokrasi politik sejalan dengan demokrasi ekonomi dalam mewujudkan warga negara merdeka dalam persamaan dan persaudaraan. Karena itu setiap warga negara tidak diperlakukan dengan tidak adil, tetapi harus mendapat perlakuan sama, disisi lain warga negara harus menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang bersama dan penguasa berhak untuk bertindak dengan kewenangan serta melindungi negara dari ancaman-ancaman luar.<sup>420</sup>

Dengan kebebasan dalam berdemokrasi, maka dalam hal ini masyarakat muslim dapat lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya dalam naungan partai politik Islam. Berdasarkan konteks historisnya, dengan kehadiran Islam melalui partai politik tampaknya tidak pernah lepas perjuangan umat Islam dalam membangun dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah model Islam politik jika dikembangkan dalam konteks negara Islam maka dalam hal ini akan kurang relevan, hal ini karena perkembangan kondisi yang perlu diperhatikan yang terjadi dalam sebuah negara.

<sup>419</sup>Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 5

<sup>420</sup>Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (Jakarta; LP3ES, 1993), h. 8-9.

Sebagai bahan perbandingannya dapat dilihat di Iran misalnya, Iran merupakan negara Islam dalam konteks sosiologis masyarakatnya lebih relevan dipimpin oleh seorang kepala negara yang memiliki kriteria seorang Mullah atau memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memahami Islam dan keIslaman melebihi di atas rata-rata. Jadi dengan konsep ini, seandainya dalam hal ini kepemimpinan Iran bukan orang yang memahami Islam secara lebih, maka pemimpin memiliki penasehat para ahli Islam sehingga menempati posisi penting di Republik Islam Iran.<sup>421</sup>

Dalam hal ini, hadirnya Gus Dur memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia dan membawa konsep keIslaman dengan nilai kontekstualnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang banyak berkiprah dalam bidang perpolitikan di Indonesia Pasca era reformasi, Gus Dur berkuasa dalam pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahannya beliau menerapkan sistem demokrasi dengan tujuan membuat seluruh warga negara berdaya tanpa dibedakan. Gus Dur memberikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi dan pluralisme dalam kebersamaan. Pandangan beliau dalam konteks nasional selalu menjadi perdebatan dan mengundang kontroversi. Baik di bidang pendidikan, kebangsaan, persatuan, pluralitas, keagamaan, hingga hal-hal kecil.

Berbicara tentang politik Gus Dur, tidak terlepas dari dinamika perkembangan politik Indonesia itu sendiri. Politik yang diimplimentasikan oleh Gus Dur membawa pada pergerakan yang luwes dan jangka panjang. Politik yang dikembangkan merupakan nuansa pengembangan menuju dalam perbaikan serta tidak disertai dengan dogmatis<sup>422</sup> mengikuti suatu pola yang baku dan tertutup.<sup>423</sup>

Jadi, dalam pandangan Gus Dur, masyarakat Islam tidak perlu ada di negeri ini, tetapi yang perlu diperjuangkan adalah umat Islam yang kuat dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan setiap Muslim. Umat Islam diharapkan mampu berperan di masyarakat untuk memperkokoh hubungan antara masyarakat, sebagai contoh melalui penanganan peradilan, santunan, harta waqaf, memimpin shalat jamaah dan berbagai upacara perayaan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dengan peran ini maka umat Islam mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, hal inilah yang akan berpengaruh dalam bidang politik. Jadi umat Islam perannya tidak hanya

16

<sup>421</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 285.

<sup>422</sup>Pada dasarnya sikap dogmatis merupakan suatu sikap yang menjadi pedoman utama bagi seseorang dengan kepercayaan yang diyakininya yang mutlak tidak dapat diubah lagi.

3

<sup>423</sup>Muhammad A.S. Hikam. *Abdurrahman Wahid Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid*. KOMPAS. Jakarta. h. 165.



untuk ibadah saja tanpa ikut andil dalam pemerintahan, disisi lain dengan pondasi yang kuat melalui ibadah tersebut dapat ditanamkan dalam kehidupannya yang akan mempengaruhi perlakuannya terhadap bidang yang dilakoninya.

Umat Islam dapat memainkan perannya dengan nuansa keberagaman dengan membentuk kepribadian umat Islam yang menghormati otoritas negara dalam seluruh aspeknya serta bergantung kepada negara untuk pelimpahan jabatan tertentu. Konsep demokrasi yang diimplimentasikan oleh Gus Dur dapat diberikan makna sederhana yaitu adalah mewujudkan secara nyata kebaikan umum melalui suatu kekuatan dan kemampuan kolektif dari satu negara. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam disertasi ini, dengan tujuan untuk menganalisis decara mendalam konsep demokrasi Gus Dur yang penulis istilahkan demokrasi Islami..

### **G. Umat Beragama Dalam Negara Demokrasi**

Keberagaman agama di dunia merupakan sebuah fakta tak terbantahkan atau lebih sering disebut dengan pluralitas agama. Pluralitas merupakan sebuah Sunnatullah. Hal ini haruslah disadari oleh setiap manusia, bahwa mustahil di era kondisi saat ini tidak bersinggungan atau berinteraksi dengan orang lain yang berbeda keyakinan atau agama. Sikap yang muncul sebagai upaya menjalankan ajaran agama di masing-masing penganut agama cenderung memunculkan sikap eksklusif, merasa paling benar dan paling hebat. Hal ini kerap menimbulkan rasa ketidaksenangan dan kecaman dari penganut agama lain yang merasa disalahkan. Sikap seperti ini dalam kondisi interaksi yang heterogen-pluralis tidak akan bisa diterima karena akan menimbulkan konflik antar penganut agama yang yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar.

Berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa agama menjadi motor penggerak kekerasan serta konflik yang berkepanjangan. Ini merupakan hasil dari interaksi yang eksklusif dalam sikap keberagamaan. Kekerasan atas nama agama adalah justifikasi teologis yang dibenarkan oleh sebagian penganut agama, sepertinya tidak ada jalan lain dalam meredam konflik yang terjadi antar umat beragama di dunia ini. Contoh kasus Poso di Indonesia, di Timur Tengah melibatkan umat Islam dan non Islam. Di India Hindu dengan Buddha, dan banyak lagi meskipun agama bukanlah satusatunya faktor konflik, tetapi agama sangat berperan di dalamnya.<sup>424</sup>

Dalam upaya memperkecil konflik antar umat beragama, berbagai pakar dan ahli perbandingan agama khususnya yang peduli terhadap kajian

---

<sup>424</sup>Syahrin Harahap, "Prolog: Agama-Agama dan Masa Depan Bersama," dalam Arifinsyah, *DialogGlobal antar Agama Membangun Budaya Damai dalam Kemajemukan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), 2.

dan studi agama-agama berupaya mencari konsep yang mampu memberikan pemahaman baru akan arti pentingnya kebersamaan dan keharmonisan antar umat beragama. Oleh karena perbedaan agama adalah kehendak Tuhan, Tuhanlah yang menghendaki makhlukNya bukan hanya berbeda dalam realitas fisik, melainkan juga berbeda-beda dalam ide, gagasan dan berkeyakinan.<sup>425</sup>

Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan inti dari semua agama, dan menghormati hak orang lain untuk melaksanakan dan memilih agama yang diyakininya adalah tanggung jawab setiap pemeluk agama apapun itu. Pluralisme agama menjamin hak kebebasan beragama di Indonesia, karena pluralisme agama yang sejatinya adalah pengakuan terhadap kepercayaan orang lain yang berbeda.

Pluralisme agama adalah salah satu isu yang ditawarkan oleh para ahli perbandingan agama dalam melakukan pendekatan studi agama-agama. Isu ini semakin hangat diperbincangkan dalam kajian dan studi agama-agama karena isu ini muncul dan berkembang di dunia barat dan merupakan hasil dari kultur akademik barat. Islam dalam hal memberikan respon terhadap isu ini memiliki warna yang beragam. Pro-kontra terus bergulir khususnya di Indonesia, wacana pluralisme agama akhir dekade ini cukup mendapat apresiasi baik yang mendukung maupun yang menolak, sehingga menambah khazanah wawasan pemikiran Islam Indonesia. Wacana pluralisme agama di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri karena isu ini tidak terlepas dari perdebatan yang cukup menegangkan urat leher bagi mereka yang peduli terhadap isu-isu pemikiran modern dalam Islam, baik mereka yang mengusung maupun yang menolak.<sup>426</sup>

Pemikiran Gus Dur yang menggabungkan pemahaman Islam tradisional dan pemikirannya yang modern bertujuan untuk membawa Islam maju dan berkembang dalam modernitas yang terjadi di Indonesia. Dalam hal teologi, ia tidak dapat berkompromi dan dengan yakin menegaskan bahwa agama Islam adalah keyakinan yang paling benar. Akan tetapi dalam kehidupan sosial, dengan tegas ia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam memperoleh peradilan. Tidak ada mayoritas dan minoritas, karena menurut Gus Dur semua berhak menunjukkan identitas

<sup>425</sup>Husien Muhammad, *Prolog untuk Argumen Pluralisme Agama, membangun Toleransi Berbasis Alqur'an* (Jakarta: Kata Kita, 2009), xvi.

<sup>426</sup>Interpretasi lain tentang pluralisme dilihat dari dimensi sosial agama dan kehidupan agama. Artinya, segenap penganut agama bisa hidup berdampingan secara damai dalam sebuah masyarakat yang pluralistik. Secara sosiologis menurut Umar Hasyim pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa manusia adalah berbedabeda, beragam dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Surya Adi Sahfutra, *Gagasan Pluralisme Agama Abdurrahman Wahid Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan*, Jurnal Religi, Vol. X, No. 1, Januari 2014. H. 94-95

masing-masing. Dengan kemantapannya terhadap agama Islam, Gus Dur tidak pernah ragu terhadap sepaik terjang pemikiran dan tindakannya yang sering menimbulkan kontroversi dan hujatan dari berbagai pihak.

Di tengah maraknya politisasi agama yang cenderung mereduksi agama dan menjadikannya hanya sebagai stempel untuk melegalisasi kekerasan, Gus Dur dengan segala kemampuannya tampil menjadi garda terdepan melawan adanya kecenderungan tersebut. Gus Dur memilih menyebarkan 'Islam ramah' yang pro terhadap pluralisme sebagai antitesis terhadap 'Islam marah' yang anti terhadap pluralisme. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan gagasan pluralisme, maka sejak tahun 1970-an. Gus Dur telah giat menyebarkan berbagai gagasannya melalui seminar, dialog dan juga tulisan yang tersebar di majalah, surat kabar, buku, dan jurnal akademik.

Bagi Gus Dur, pluralisme adalah sebuah pandangan yang menghargai dan mengakui adanya keragaman identitas, seperti suku, agama, budaya, ras, dll. Pluralisme bukanlah ide yang ingin menyamakan semua agama sebagaimana yang selama ini sering dituduhkan, karena setiap agama tentu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Pluralisme, demikian Gus Dur, tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan seharusnya menjadi sarana bagi manusia untuk memahami anugerah Tuhan agar tercipta toleransi dan harmoni di tengah kehidupan.<sup>427</sup>

Gus Dur sering menganalogikan pluralisme ibarat sebuah rumah besar yang terdiri atas banyak kamar dan setiap orang memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Saat di dalam kamar, setiap orang dapat merawat dan menggunakan kamarnya serta berhak melakukan apapun di dalam kamarnya. Namun ketika berada di ruang tamu atau ruang keluarga, maka setiap penghuni kamar wajib melebur untuk menjaga kepentingan rumah bersama. Semua penghuni kamar wajib bekerjasama merawat, menjaga, dan melindungi keseluruhan bagian rumah tersebut. Ketika terjadi serangan dari luar, maka mereka tanpa mempermasalahkan asal kamar harus bersatu melawan para penyerang yang ingin merusak keberadaan rumah tersebut. Bila dihubungkan dalam konteks negara, maka seluruh warga negara yang menjadi penghuni rumah NKRI wajib merawat, menjaga, dan melindungi rumah besar NKRI yang telah dibangun di atas fondasi Pancasila dan keragaman identitas primordial.<sup>428</sup>

Gus Dur meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Islam adalah ajaran yang sempurna, dalam arti bahwa Islam telah menetapkan berbagai prinsip umum secara lengkap dan komprehensif agar dapat menjadi acuan

<sup>427</sup>Maman Immanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 145

<sup>428</sup>Moh. Mahfud MD, *Belokan Pluralisme Abdurrahman Wahid*, Koran Sindo 27 Desember 2014.

9

dan panduan bagi manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Gus Dur juga meyakini bahwa Islam adalah sebuah agama atau ajaran yang memuat nilai-nilai luhur dan universal yang selalu cocok dengan berbagai situasi dan kondisi. Untuk itu, dalam setiap kesempatan, Gus Dur selalu menekankan pada umat Islam agar tidak menjadikan perbedaan sebagai bencana, melainkan sebagai sebuah anugerah dan kekuatan yang harus disyukuri untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurutnya, perbedaan bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama adalah lahirnya perpecahan dan perselisihan akibat adanya perbedaan.<sup>429</sup> Untuk memperkuat pandangannya, Gus Dur sering mengutip QS. Ali Imran [3]: 103:



Artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.<sup>430</sup>

Selain mengutip ajaran Alquran dalam menyebarkan gagasan pluralisme, Gus Dur juga menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis terhadap gagasannya tersebut. Menurutnya, Pancasila tak seharusnya dipertentangkan dengan Islam karena isi Pancasila sangat sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam. Dengan kata lain, Pancasila adalah bentuk pbumian ajaran Islam (pribumisasi Islam) dalam konteks keindonesiaan.

<sup>429</sup> n. Mahfud MD, *Koran Sindo*.

<sup>430</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 84



<sup>9</sup> Pancasila di mata Gus Dur adalah sebuah ikh<sup>9</sup>ar politik yang sangat visioner oleh para pendiri bangsa karena orientasinya sangat jauh ke depan. Pancasila adalah suatu jalan tengah (kompromi) antara sekularisme dan formalisme agama (Islam).<sup>431</sup>

Gus Dur menyatakan bahwa, sejak lahirnya setiap agama memiliki kekhususannya sendiri, yang secara mendasar harus ditundukan kepada kepentingan bersama <sup>5</sup>eluruh bangsa. Agama harus berorientasi pada pandangan-pandangan mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undangundang dan solidaritas hakiki antara sesama umat manusia. Dalam upaya ini, tiap-tiap agama harus dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk per<sup>5</sup>apaian sejumlah nilai-nilai universal. Hal ini diwujudkan secara nyata seperti penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum dan kebebasan menyatakan pendapat.<sup>432</sup>

Gus Dur menyatakan, pluralisme selalu paralel dengan dimensi kemanusiaan, karena itu tidak bisa ditolerir adanya kekerasan dalam kehidupan lebih-lebih membawa bendera agama. Pluralisme yang di gagas oleh Gus Dur berkaitan dengan gagasan kebangsaannya. Pluralitas dalam kehidupan berbangsa menurutnya, terutama sekali berbentuk dalam penyamaan hak-hak dan status antara golongan mayoritas dan golongan minoritas agama dalam kehidupan berbangsa.<sup>433</sup>

Kehidupan dalam konteks pluralisme agama yang serba multi iman harus disandarkan pada kesadaran pentingnya menjalin kerjasama antar satu pemeluk, kelompok agama dengan pemeluk agama lain. Kesadaran ini tidak hanya sebatas penerimaan keberadaan agama orang lain sebagai sebuah realita semata. Jika setiap agama dan keyakinan berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan roda kehidupan, menyelesaikan masalah sosial-politik dengan konsepnya sendiri tentu akan terjadi benturan konsep, kepentingan bahkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan gesekan antar dan inter umat beragama, bagi mereka yang merasa bahwa konsepnya yang paling benar dan pantas untuk dipakai. Dari kesadaran pluralisme agama dan terwujudnya sikap toleransi yang aktif memungkinkan dibukanya dialog yang lebih baik antar dan inter umat beragama, khususnya mendialogkan hal-hal yang bersifat kebersamaan, pencarian solusi atas masalah bersama dan membangun konsep bersama untuk kemaslahatan umat manusia tanpa melihat apa agama dan keyakinannya.

<sup>431</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. 118 <sup>16</sup> <sup>81</sup>

<sup>432</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan* (The Wahid Institute, Jakarta, 2007), h. 287.

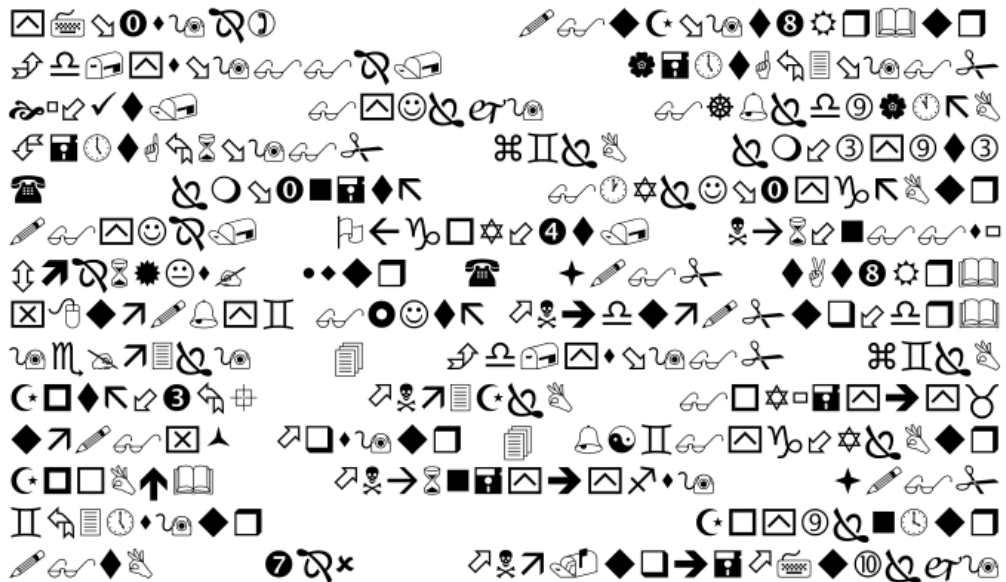
<sup>433</sup>Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1999), h. 60.

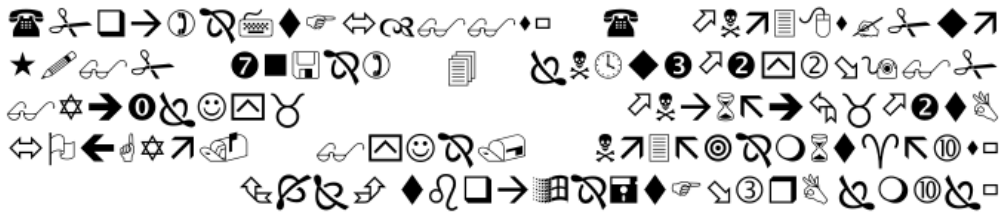
Adapun perbedaan akidah/kepercayaan tidak perlu diperdebatkan atau dipersamakan secara total, karena setiap agama masing-masing memiliki kepercayaan yang dianggap benar. Oleh karena itu, Gus Dur mengatakan bahwa keyakinan masing-masing tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan. Karena kenyatannya memang berbeda. Gus Dur menambahkan bahwa dengan demikian sudah jelaslah bahwa untuk dapat bekerjasama antar satu penganut agama dengan penganut agama yang lain adalah dengan membuka ruang dialog, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kehidupan masyarakat.

Menurut Gus Dur setiap agama memiliki keharusan untuk menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, walaupun bentuknya berbeda-beda. Disinilah, nantinya menurut Gus Dur terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran/akidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi. Karena ukuran materi menggunakan bukti-bukti kuantitatif, seperti tingkat penghasilan rata-rata warga masyarakat ataupun jumlah kepemilikan misalnya, sedangkan yang tidak, seperti ukuran keadilan, dapat diamati secara empirik dalam kehidupan sebuah sistem kemasyarakatan.

32

Kemajemukan adalah murni kekuasaan Allah SWT, bukan berarti Ia tidak bisa menciptakan umat yang satu. Karena dengan ini manusia diuji kesalehannya, untuk dapat menghormati dan menghargai ciptaan-Nya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Keragaman merupakan sunatullah, maka tidak ada sikap lain bagi muslim terhadap pluralitas kecuali menerima sepenuhnya. Seperti yang tertulis dalam Alquran QS. al-Maidah ayat 48:

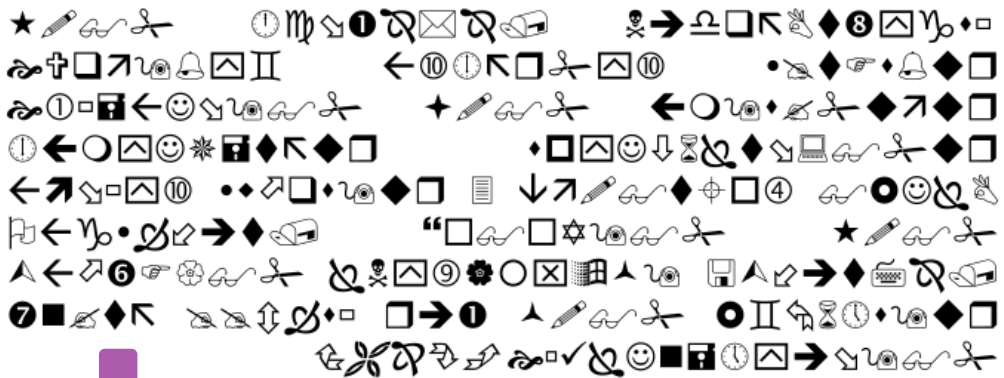




Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.<sup>434</sup>

12

Pluralisme merupakan sebuah keharusan bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini dan merupakan kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Allah menciptakan umat yang majemuk karena di situ terletak kekuatan penyeimbang dan mekanisme pengawaasan antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 251:



93

mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah

62

<sup>434</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., h.156



53

*memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.*

Tuhan telah menciptakan manusia dalam keragaman dan dalam kesatuan sehingga memungkinkan untuk menjalin toleransi antara keadaan bersatu dan kenyataan berbeda. sifat kasih sayang Tuhan telah mendorongnya untuk mengajarkan agama kepada manusia sebagai wadah untuk menemukan dan mempertahankan kemanusiaannya. setiap agama tentu menjadi pendukung dan pembela kelestarian kemanusiaan karena dalam ajaran setiap agama di nyatakan bahwa agama itu sendiri merupakan fitrah manusia.

Semua manusia menyadari bahwa keragaman dan perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima dan dihadapi, walaupun terkadang sikap yang kurang tepat terhadap keragaman yang ada sering menjadi sumber konflik. oleh karenanya, manusia dituntut untuk mencari titik-titik tertentu yang memungkinkan adanya titik temu Atau paling tidak kebersamaan sehingga terbuka peluang untuk tumbuhnya sikap toleran dalam menyikapi pluralitas.

Untuk dapat ke tingkat kebersamaan antara manusia perlu diarahkan pandangan tingkat lebih tinggi dan mendalam, sehingga perbedaan-perbedaan yang biasanya berada pada ranah material dan simbolis dapat terlampaui. salah satu dimensi yang mencakup universalisme manusia ialah kemanusiaan itu sendiri, dan hal itu tentu saja bukan pada tingkat material Tetapi lebih pada dimensi historis dan cita-cita masa depannya. paling tepat untuk menggambarkan dan menerangkan hakikat kemanusiaan tersebut adalah agama, sebab agama tidak hanya berbicara dalam ranah materi manusia, tetapi sampai pada tingkatan yang terinti dari manusia itu yaitu kemanusiaannya. Persoalan kemanusiaan harus dilihat sebagai persoalan seluruh agama. Sebab orang yang beragama semestinya memberikan keselamatan bagi orang lain. Agama-agama harus menyadari bahwa tugasnya menyelamatkan umat manusia tidak dapat lagi dilakukan secara sendiri-sendiri.<sup>435</sup>

Dengan demikian penghormatan atas pluralitas dalam kehidupan adalah suatu keharusan. Hal ini berimplikasi pada keharusan manusia untuk menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lainnya dalam membangun dan memecahkan masalah bersama. Dengan demikian dalam kontak sosial ada kecenderungan menerima dengan tulus atas perbedaan itu disertai

<sup>435</sup>Sahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2011), h. 104.



12

dengan dialog untuk mengambil nilai lebih. Pluralisme adalah sebuah kontrak sosial dalam hubungan antar masyarakat, di mana manusia diwajibkan berhubungan baik.

## H. Konstruksi Pemikiran Demokrasi Gus Dur

### 1. Menilai Posisi Gus Dur Ditinjau dari Paradigma Politik Islam

Islam adalah sebuah unit budaya yang khas dan mandiri. Pemikiran politik mengkaji ihwal pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya, serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki. Pemikiran politik berusaha menjelaskan konsep keadilan yang dijalankan dalam hubungan antar manusia, khususnya antara yang berkuasa dan yang dikuasai, dan distribusi barang secara adil kepada masyarakat. Kajian ini mempersoalkan mengapa ada negara dan apa yang seharusnya dilakukan dan menjadi tujuan suatu negara.

Meskipun konsep keadilan dan teori tentang negara merupakan tema penting dalam pemikiran politik, tetapi tidak semua pemikir politik membicarakan hal ini. Diantara pemikir politik Islam yang mengkaji persoalan pembentukan dan tujuan negara adalah Ibnu Abi Rabi'. Ibnu Abi Rabi' mengatakan bahwa bahwa kebutuhan-kebutuhan yang mendorong manusia untuk berkumpul dan membentuk negara adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan reproduksi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan.<sup>436</sup>

Berbeda dengan teori tentang negara yang pada pemikir politik modern tidak lagi dijadikan sebagai pusat kajian, konsep keadilan tampaknya masih menjadi tema yang banyak dibicarakan terutama di kalangan pemikir politik Islam. Konsep keadilan bahkan menjadi syarat utama bagi pada umumnya pemikir politik Islam klasik untuk memilih dan menentukan kepala negara.

Pemikiran politik Islam pada dasarnya sama seperti pemikiran politik Barat, membicarakan hal-hal yang dianggap menjadi tema-tema penting dalam politik dan penyelenggaraan negara. Meskipun begitu pemikiran politik Islam memiliki kekhasan sendiri. Pemikiran politik Islam membentuk suatu bagian penting dalam sejarah intelektual manusia secara umum. Pemikiran ini terdiri atas sebuah tradisi yang koheren dan berkelanjutan, terpisah dari tradisi Barat dan memiliki logikanya sendiri.

Pada umumnya pemikir politik Islam terbagi ke dalam tiga kelompok <sup>56</sup>ma, yaitu: *kelompok pertama*: dengan kecenderungan tradisionalnya dan semangat anti Barat berpendirian bahwa Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap

<sup>436</sup>Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik....*, h. 338.

dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik. *Kelompok kedua* sebaliknya beranggapan bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama yang lain yang hanya menguji hubungan antara manusia dengan Tuhan; sedangkan soal tata hidup bermasyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang lain terserah sepenuhnya kepada umat tentang cara atau pola pengaturan yang akan dipakainya. *Kelompok ketiga* tidak sependapat dengan kelompok pertama maupun kedua, tetapi berpendapat bahwa di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral bagi kesejahteraan manusia, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat dibebaskan memilih sistem mana yang terbaik.<sup>437</sup>

Paradigma ini digunakan untuk menilai keberadaan Gus Dur dalam peta pemikiran politik Islam, apakah termasuk dalam kelompok pertama, kedua ataukah ketiga. Setelah melakukan penelitian, maka disimpulkan bahwa pemikiran demokrasi Gus Dur termasuk dalam kategori ketiga, meskipun dalam banyak hal pemikiran Gus Dur sekuler. Alasan menempatkan Gus Dur dalam kategori ketiga adalah karena pemikiran Gus Dur tidak pernah benar-benar memisahkan agama dan negara, justru pemikiran demokrasi dipengaruhi dan berlandaskan pemahannya akan ajaran-ajaran demokrasi dalam Islam. Dengan tegas Gus Dur bahkan mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi.

## 2. Arkeologi Pemikiran demokrasi Gus Dur.

Untuk memahami pemikiran Gus Dur, perlu ditelisik lebih dulu arkeologi pemikirannya. Arkeologi dalam kamus filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, *archaeo*, yang berarti purbakala, sedangkan logi berasal dari kata *logos*, yang berarti ilmu, jadi arkeologi berarti ilmu purbakala. Secara istilah arkeologi berarti ilmu purbakala yang menggali dan mempelajari tentang aktus-aktus atau sisa-sisa suatu fosil-fosil, anatomi, dan kultural dari bangsa kuno dan hewan kuno.<sup>438</sup> Melalui arkeologi, sejarawan menggali aktus-aktus purbakala untuk menguraikan kontinuitas-kontinuitas suatu peradaban manusia dari suatu periode lampau dengan periode sekarang sehingga akan terungkap relasi-relasi masa lalu yang membentuk sebuah evolusi dari suatu peradaban menuju peradaban lain.

Arkeologi ternyata tidak hanya bisa mengungkap masa lalu peradaban manusia melalui aktus-aktus yang ditinggalkannya tetapi bahkan cara kerja arkeologi bisa juga dipergunakan untuk menelisik keberadaan sebuah pemikiran pada masanya, sehingga ada arkeologi pengetahuan.

<sup>437</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Aliran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1991), h. 205.

<sup>438</sup>Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.



Menurut Foucault, arkeologi pengetahuan adalah ilmu purbakala yang didasarkan pada pandangan bahwa di setiap zaman terdapat sebuah apriori historis, yang tidak lain merupakan sistem pemikiran pada setiap zaman atau periode tertentu, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu syarat dan cara untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Arkeologi dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan, karena pengetahuan yang dimaksud dalam gagasan Foucault merupakan bagian dari episteme pada arkeologi atau suatu sistem pemikiran (*apriori historis*) yang ada dalam periode 105entu. Arkeologi pengetahuan tidak menentukan pemikiran. Ia hanya ingin 105entukan dan mendefinisikan diskursus yang dipraktikkan, memperlihatkan cara-cara diskursus dalam membentuk aturan-aturan yang diterapkan dalam operasi diskursus.<sup>439</sup>

Meskipun arkeologi pengetahuan diinspirasi oleh arkeologi, tetapi Foucault membedakan dengan tegas keduanya. “Arkeologi klasik menggunakan paham evolusi, kontinuitas, dan totalisasi, sementara arkeologi pengetahuan justru memperlihatkan diskontinuitas dalam praktik-praktik diskursif dan menentukan serta mendefinisikan regulitas-regulitas diskursus. Suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah diskursus dapat dipahami dari mekanisme prosedur-prosedur yang teratur bagi berlangsungnya produksi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan-pernyataan.” Oleh Foucault, wacana dan praktik-praktik kemudian dikelompokkan kembali agar bisa mengembalikan fungsi dokumen-dokumen yang bisa berbicara pada monumen-monumen yang bisu. Arkeologi akan masuk dalam monumen-monumen tersebut untuk membentuk seri-seri secara baru.<sup>440</sup>

Gagasan arkeologi pengetahuan memuat prinsip-prinsip diskursus, yaitu:

1. Arkeologi pengetahuan berusaha mengungkapkan seluruh kontradiksi-kontradiksi yang terdapat di dalam setiap diskursus pemikiran, tidak memilih antara esensi dan permukaan.
2. Arkeologi pengetahuan berusaha mengkomparasikan sebuah diskursus, bukan mempengaruhi antara satu dengan lainnya.
3. Arkeologi pengetahuan berusaha menampilkan perbedaan-perbedaan secara utuh, sementara kesamaan-kesamaan yang mungkin ditemukan hanya dilihat sebagai bentuk transformasi dan bukan kesamaan.<sup>441</sup>

Menggunakan cara kerja arkeologi untuk memahami dasar pemikiran seseorang, dan latarbelakang kemunculannya sekaligus memahami jejak keberadaannya pada masanya peneliti yakin akan mampu mengungkap latar

<sup>439</sup>Michael Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Basabasi, 2019), h. 92

<sup>440</sup>Michael Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Basabasi, 2019), h. 92

<sup>441</sup>Michael Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Basabasi, 2019), h.209-210

belakang, jejak pemikiran, sekaligus konstruk pemikiran tokoh penting sekaligus unik, Gus Dur.

Dengan menggunakan arkeologi pengetahuan, dipahami bahwa jejak hidup Gus Dur begitu luas dan berwarna. Pertemuannya dengan berbagai macam orang dengan beragam karakter dan latarbelakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran membuat Gus Dur juga memiliki khazanah pemikiran yang luas. Keluasan pemikirannya kelihatan dari tulisan-tulisannya yang mampu membicarakan bermacam persoalan dan dari sudut pandang yang beragam pula. Masalah keagamaan yang sudah pasti dia kuasai, sosial politik yang dipahaminya melalui buku-buku yang digelutinya dan kenyataan yang dihadapinya, bahkan masalah seni dan kebudayaan yang diminatinya sejak kecil.

Kemampuannya membicarakan dan mengulas berbagai khazanah pemikiran yang beragam tersebut tidak terlepas dari latarbelakang pendidikan sekaligus kultur dimana Gus Dur lahir dan bertumbuh, kemudian menua. Latarbelakang kultur dan pendidikan Gus Dur adalah perpaduan antara kultur pesantren yang ketat dan sarat dengan nilai-nilai kepatuhan, religiusitas, sekaligus harmoni, bergabung dengan pendidikan modern yang dia terima baik di sekolah maupun dari pergaulannya dengan teman-teman ayahnya ketika masih remaja yang liberal dan sekular.<sup>442</sup>

---

6

<sup>442</sup>Jika Dilacak dari segi kultural Abdurrahman Wahid melintasi tiga model lapisan budaya, yaitu cultural dunia pesantren, cultural budaya Timur Tengah, dan budaya Barat yang terinternalisasi dalam pribadi Abdurrahman Wahid membentuk sinergi. Lihat Tim INGRES, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Abdurrahman Wahid*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 38



Pendidikan pesantren telah membentuk Gus Dur menjadi sosok yang religius, tradisional<sup>443</sup> (sesuai dengan model pendidikan yang lazim berlaku di pesantren-pesantren), patuh kepada pemimpin, sekaligus harmonis dengan orang dan kelompok lain meskipun berbeda dengan diri dan pandangannya. Pesantren, tempat dimana Gus Dur<sup>86</sup> menghabiskan sebagian besar hidupnya adalah pesantren<sup>86</sup> yang ber-*manhaj* Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sebagaimana NU menjadikan Ahlus Sunnah wal Jama'ah juga sebagai *manhaj*-nya, tempat dimana Gus Dur mempelajari sekaligus mengajarkan ilmu-ilmu agama yang diharapkan menyelamatkan kehidupan dunia sekaligus akhirat. Pesantren dan NU, dua hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan Gus Dur.

Pada sisi yang lain, Gus Dur juga sempat mengenyam pendidikan umum (sekular), dan bergaul dengan banyak kalangan dengan berbagai latarbelakang bahkan ateis. Kesempatannya untuk bergaul dengan berbagai latarbelakang tersebut sedikit banyak memengaruhi cara berpikir dan bertindakya. Tidak heran jika kemudian pemikiran-pemikiran Gus Dur bahkan sering dianggap keluar dari pakem- *out of the box*. Latarbelakang ini juga membuat Gus Dur berpikir rasional, terbuka, dan toleran, dan itu ditunjukkan dengan bagaimana Gus Dur sangat menghargai perbedaan bahkan pemihakannya kepada kelompok minoritas begitu tinggi. Sikap ini juga merupakan hal yang sering dikritik terutama dari kalangan muslim.

---

<sup>443</sup>Dikotomi modernis-tradisonalis lazim dilekatkan kepada individu dan organisasi-organisasi keagamaan bahkan sejak perang kemerdekaan dulu. Islam modernis sebagian besar dianut oleh Muhammadiyah, dan kaum tradisonalis mayoritas pengikutnya menjadi anggota NU. Modernisme berawal dari gerakan yang bertujuan mengubah perilaku dan pikiran kaum muslimin dalam menghadapi kemodernan dan pada saat yang sama tetap menjadi muslim yang taat pada ajarannya. Gerakan yang dipengaruhi oleh pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Abduh di dunia Islam ini menjelang akhir abad ke-XX terbagi menjadi dua, yakni kaum mayoritas yang moderat tetapi tidak kritis, dan kaum minoritas yang konservatif namun kritis. Sebaliknya kaum tradisonalis adalah mereka yang tetap konservatif secara budaya dan pada umumnya berasal dari pedesaan dan pesantren. Banyak dari mereka yang setelah lulus dari pesantren dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, menjadi garda terdepan pemikiran progresif dan reformasi agama, dan meneliti kembali Islam secara kritis karena kemampuan bahasa Arabnya yang baik. Ini banyak dilakukan oleh IAIN dan LSM-LSM NU yang mengawinkan pemikiran kritis modern dengan pengetahuan Islam. Ungkapan tradeisonalisme Islam sebagaimana dilekatkan kepada NU saat itu "sering dipahami sebagai penggabungan antara pandangan dunia Jawa yang bersifat mistik, yaitu pandangan dunia abangan dan priyayi, dengan ajaran, doktrin, dan praktik dasar Islam " Sementara itu sebagian besar kaum modernis tumbuh dengan pengetahuan teologi yang terbatas karena mereka tidak mempelajari bahasa Arab dan teks-teks klasik. Lihat Greg Barton, *Biografi Abdurrahman Wahid*,...h. 67-69.

Melihat latarbelakang dari dua kondisi yang bertolakbelakang tersebut-unsur-unsur tradisional yang menyatu dengan pengalaman hidup bersama masyarakat bawah dan pesantren, dan pengetahuan kemajuan yang diperoleh atas pergaulan dan bacaannya yang luas, menghasilkan sosok yang mendorong “gerbong tradisionalisme pesantren dan NU ke kemajuan tanpa meninggalkan basis tradisionalisme dengan seluruh ciri-ciri asalnya itu sendiri. Dalam waktu yang sama, harus melampaui kemajuan yang ada di depannya.”<sup>444</sup>

Zainal Arifin Thoah<sup>445</sup> menyimpulkan sikap dan pemikiran Gus Dur: *Pertama*, Gus Dur dapat dipandang sebagai murni orang Jawa yang menekankan hidupnya pada harmoni, keseimbangan, dan keselarasan, yakni harmoni antara manusia dengan Tuhan-nya, dengan sesamanya (yang masih hidup maupun yang sudah meninggal), dan dengan alam sekitarnya. Sebagai orang Jawa, Gus Dur konsisten memperjuangkan itu sepanjang hidupnya meskipun ia harus merelakan diri untuk tidak menjadi apa atau siapa.

*Kedua*, Gus Dur juga dapat dipandang sebagai murni orang Arab, karena silsilah-nya memang menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki darah keturunan Arab. Alam padang pasir Arab “membentuk manusia-manusianya menjadi orang yang keras, pantang menyerah, otoriter, berkemauan kuat, memegang teguh prinsip, dan sebagainya. Di sisi lain, alam padang pasir juga membentuk manusia- manusianya hidup berkelompok atau kabilah sehingga penuh solidaritas, kelembutan kasih sayang, adil, menegakkan musyawarah, dan sebagainya.”

*Ketiga*, Gus Dur juga dapat dipandang sebagai orang yang meniti jalan tengah, antara Jawa dan Arab, dan bisa mengambil keduanya. Dari sisi ini, maka yang muncul adalah sikap independensi, totalitas, dan otentisitas.

Pada sisi yang lain, kultur yang mewarnai kehidupan Gus Dur tidak terlepas dari NU, organisasi yang dilahirkan dan dibesarkan oleh kakek, ayah bahkan dia sendiri. Karenanya, Gus Dur secara struktural dan kultural sekaligus adalah orang yang sangat mencintai NU, dipengaruhi dan memengaruhi NU. Untuk menggambarkan keterlibatannya dengan NU perlu dilihat pergerakan NU dalam konstelasi politik Indonesia, terutama setelah Khittah 26 di Munas Alim Ulama 1983 dan Mukhtar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. “Peneliti Islam asal Belanda, Martin van Brunessen menyatakan, bahwa kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan Islam modernis dan salafi lain membangun elan vital untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi dengan menengok ke kehidupan nabi

<sup>57</sup>Ahmad Suaedy, *Abdurrahman Wahid Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka, Penyelesaian Konflik Aceh & Papua 1999-2001*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 91.

<sup>445</sup>Zainal Arifin Thoah, *Jagadnya Abdurrahman Wahid: Demokrasi, Pluralisme, Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2010), h. 120-121.



Muhammad saw. 14 abad sebelumnya dengan mendasarkan kepada Alquran dan Hadis secara murni sembari mengabaikan seluruh tradisi dan warisan Islam klasik (*turâs*) dalam perjalanan panjang sejarah umat Islam. NU dan pesantren justru mengambil langkah sebaliknya, bahwa itu hanya kembali pada setengah abad atau 50 tahun lebih sedikit lamanya. Itupun kembali pada tradisi sendiri di tanah nusantara atau Indonesia sekarang, dengan seluruh warisan kebudayaan, peradaban, serta metodologi dan *turâs* yang dimilikinya”<sup>446</sup>

NU, menurut Greg Barton adalah organisasi tradisionalis Islam yang menggabungkan dunia Jawa yang bersifat mistik, yaitu pandangan dunia abangan dan priyayi, dengan ajaran, doktrin, dan praktik dasar Islam. Organisasi ini beserta metode berpikirnya memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh Gus Dur. Ini dapat dilihat dari pandangan-pandangan Gus Dur maupun NU yang menggunakan *manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.<sup>447</sup>

Greg Barton juga menyimpulkan bahwa corak berpikir Gus Dur, yaitu:

1. Dididik untuk bersikap terbuka dan selalu mempertanyakan sesuatu secara intelektual di keluarga.
2. **18**besarkan dalam dunia sufistik Islam tradisional Indonesia.
3. **Dipengaruhi oleh orientasi budaya masyarakat Indonesia modern yang mengarah pada pluralisme dan egalitarianisme.**<sup>448</sup>

Corak pemikiran itu bisa dilihat dari sisi **pemahaman keagamaan dan ideologi.** Gus Dur memahami deng**3** baik bahkan bersentuhan langsung dengan beragam pemikiran sejak dari yang tradisional, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler. Dari segi kultural, Gus Dur mengalami bagaimana hidup di tengah budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa basi, dan sebaliknya di tengah budaya Barat dia pun mampu be**3** daptasi dengan budaya yang terbuka, modern dan lib**16**l. Dari sisi ini, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya: Pertama, dunia pesantren yang sangat hirarkis, tertutup dan penuh dengan etika yang serba formal; Kedua, dunia Timur yang terbuka dan keras; Ketiga, budaya Barat yang liberal, rasional dan sekuler. Semua lapisan kultural ini terinternalisasi dalamkepribadian

<sup>446</sup>Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Abdurrahman Wahid: Demokrasi, Pluralisme, Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2010), h. 117-118.

<sup>447</sup>Greg Barton, *Biografi Abdurrahman Wahid...*, h.67. Tradisi Manhaj Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah berpangkal pada 3 panutan, mengikuti paham Al 'As'ri dan Al-**78** turidi dalam bertauhid, mengikuti salah satu mazhab Fiqh yang empat, dan mengikuti **78**a yang ditetapkan Al-Junaid Al-Bagdadi dalam bertarekat dan bertasawuf. Lihat Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 155-156

<sup>448</sup>Greg Barton, *Biografi Gur Dur...*, h. 135.

Gus Dur, hampir tidak ada yang dominan memengaruhi Gus Dur. Justru ketiga lapisan budaya itu bersinergi satu sama lain.<sup>449</sup>

Persentuhannya dengan pemikir juga begitu luas dan beragam, mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang radikal dan liberal. Luar biasanya Gus Dur mampu bertoleransi dengan itu semua, dan menjadikannya sebagai sosok yang unik dengan pernyataan-pernyataan dan pemikirannya yang sering bertolakbelakang dengan pandangan umum, sehingga sering disalahpahami.

Dalam bidang kemanusiaan, pemikir Barat dengan filsafat humanismenya sangat memengaruhi Gus Dur. Pada sisi lain, sikap humanis yang ditunjukkan oleh para pengasuhnya di pesantren, seperti kiai Fatah dari Tambakberas, K.H. Ali Ma'shum dari Krapyak, dan kiai Chudhori dari Tegalrejo juga turut membentuk pribadi dan pemikiran Gus Dur.<sup>450</sup>

Penggunaan akal secara optimal dan wahyu Ilahi merupakan proporsional menjadi titik tekan pemikiran Gus Dur. Dengan cara ini "Gus Dur mengajak kita untuk memahami agama sebagai suatu penghayatan yang syarat dengan nilai-nilai budaya. Agama dan budaya harus senantiasa saling memberi dan menerima. Dengan budaya suatu agama akan dijalani dengan perasaan/emosi yang memungkinkan seseorang untuk merasa yakin atas kebenaran, dan dengan intelektual yang memungkinkan seseorang bersikap rasional. Perpaduan antara rasionalitas dan keyakinan yang teguh terhadap kebenaran ajaran agama diharapkan akan membentuk kesalehan sosial yang menjadi penggerak perubahan sosial ke arah kesejahteraan dan kedamaian."<sup>451</sup>

Gus Dur adalah seorang intelektual bebas, atau mungkin juga "intelektual organik"- meminjam istilah Antonio Gramsci, yang berangkat dari tradisi akademik pesantren sehingga tulisan-tulisannya cenderung bersifat reflektif, bumi, terkait dengan dunia penghayatan realitas, bahkan senantiasa bermotifkan transformasi. Referensi formal akademis dan pengikatan diri terhadap satu metodologi tidak begitu penting, terpenting substansi yang disampaikan.<sup>452</sup>

Kekayaan intelektual Gus Dur juga didapatkan dari persentuhannya secara langsung dengan akademik dan sosial politik Timur Tengah dan Barat. Tradisi pesantren yang begitu kental mewarnai pemikiran, sikap, dan perilakunya dipertemukan dengan pengetahuan dan pengalaman hidup di

<sup>449</sup>Marzuki, *Peta Intelektualisme dan Tema Pokok Pemikiran Abdurrahman Wahid*, <https://fahmina.or.id>

<sup>450</sup>Tim INGRES, *Beyond The Symbols : Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Abdurrahman Wahid*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 9 dan Greg Barton, *Biografi Abdurrahman Wahid...*, h. 51.

<sup>451</sup>Tim INGRES, *Beyond The Symbols...*, h. xxiii

<sup>452</sup>Tim INGRES, *Beyond The Symbols...*, h. 36



Timur Tengah dan Barat membuat Gus Dur berpikir kosmopolit dan progresif.<sup>453</sup>

Semua latarbelakang yang diungkap di atas menjadikan Gus Dur bukan sekedar mampu merepresentasikan ide-idenya secara produktif yang pada umumnya ditulis dalam bentuk tulisan-tulisan pendek, tetapi juga menjadi tokoh yang gerakan politiknya diakui kawan maupun lawan. Bagi sarjana politik, pemikiran dan perilaku politik menjadi khazanah bagi dinamika pemikiran politik di Indonesia. Menurut Munawar Ahmad, gaya politik yang “nyeleneh” Gus Dur menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik yang khas ketika melakukan interaksi dan advokasi politik. Gaya tersebut dipandang oleh sebagian ahli politik tentang NU sebagai bentuk anomali, yang justru menjadikan posisi NU menjadi kuat dalam proses bargaining dengan negara atau yang lainnya.<sup>454</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Ahmad Suaedy, dan juga tercantum dalam bukunya dinyatakan bahwa tradisi kultural pesantren dan Nahdlatul Ulama dengan asas Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) nya paling berperan membentuk cara dan pola berpikir Gus Dur. Lebih lanjut Suaedy menjelaskan bahwa ASWAJA yang dipraktikkan oleh NU adalah ASWAJA yang khas nusantara (Indonesia), karena memperhatikan dan mempertimbangkan tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam Indonesia.<sup>455</sup>

“Metodologi Gus Dur tidak bisa diukur dengan metodologi yang sana dan sini (metodologi atau teori tertentu). Metodologi Gus Dur adalah metodologinya sendiri dan NU itu sendiri, yaitu ASWAJA”. Itulah keunikan Gus Dur. Gus Dur tidak terpaku pada teori tertentu, meskipun dari kecil Gus Dur sudah mengenal beberapa teori dari Barat, tetapi itu tidak menyebabkan Gus Dur terlalu terpengaruh olehnya. Begitu juga dengan kultur Arab yang sempat digelutinya ketika Gus Dur menempuh pendidikannya, baik di Mesir maupun Baghdad.<sup>456</sup>

35

<sup>453</sup> Agus Maftuh Abegebriel, “Mazhab Islam Kosmopolitan Abdurrahman Wahid” *Pengantar dalam Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h.xix

<sup>454</sup> Munawar Ahmad, *Ijihad Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 2.

<sup>455</sup> Ahmad Suaedy menulis buku Abdurrahman Wahid, *Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka, Penyelesaian Konflik Aceh & Papua 1999-2001*, yang semula adalah disertasinya. Penulis berkesempatan mewawancarai beliau disela-sela kesibukan beliau sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia di ruang kerjanya pada Selasa, 3 Desember 2019. Sebagai salah satu orang dekat Abdurrahman Wahid semasa Abdurrahman Wahid masih hidup, Suaedy memahami dengan baik pemikiran dan kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid, dan tentunya metode berpikir yang menyampaikan Abdurrahman Wahid pada kesimpulan tertentu pada masalah tertentu.

<sup>456</sup> Wawancara penulis dengan Ahmad Suaedy

Dengan menggunakan arkeologi pengetahuan Michael Foucault, disimpulkan bahwa gagasan-gagasan demokrasi Gus Dur dan pada umumnya gagasan-gagasannya yang lain berada di antara pertentangan atau kontradiksi gagasan-gagasan. Sebagai contoh gagasan (pemikiran) demokrasi Gus Dur yang bukan condong kepada liberal sekuler-nya Barat, tetapi tidak juga Islam ideologis. Pemikiran demokrasi Gus Dur berangkat dari kondisi plural dan multikultural Indonesia, sehingga baginya yang penting adalah substansi Islam itu sendiri, bukan ideologi<sup>457</sup> atau formalitasnya.

Latar belakang mengapa Gus Dur sampai kepada pemikiran seperti itu, adalah karena Gus Dur sangat memahami pemikiran Barat yang sekuler tetapi tidak terpengaruh padanya, meskipun banyak orang menilai Gus Dur sekuler, dan pada sisi yang lain menjadikan Islam sebagai titik tolak atau sumber inspirasi pemikirannya, tetapi tidak ingin Islam ditampilkan dalam bentuk formalnya mengingat kondisi pluralnya bangsa Indonesia., bisa dilihat dari pernyataan beberapa orang yang mengenal Gus Dur, seperti Agus Abegebriel, A. Muhaimin Iskandar, dan KH. Cholil Bisri.

Agus Maftuh Abegebriel menyatakan bahwa Gus Dur lebih mementingkan pemahaman “Mâ haula al-Nass” (*around the text*), dan tidak berhenti pada “mâ fi al-Nass (*in the text*). Ini tercermin dari pandangan-pandangan Gus Dur yang senantiasa memahami teks keagamaan lengkap dengan setting sosial dan politik yang melingkupinya.<sup>458</sup>

Pemikiran Gus Dur pada dasarnya merupakan terjemahan ajaran syari’at dan pengembangan tradisi pesantren,<sup>459</sup> “berangkat dari keinginan untuk menunjukkan bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang dipertahankan kalangan kiai pesantren dengan kitab-kitab klasik sebagai muqarrarnya, masih sangat dan tetap relevan sebagai pijakan kehidupan masyarakat modern.”<sup>460</sup>

Muhaimin Iskandar juga menjelaskan bahwa pemikiran Gus Dur berangkat dari kedua perangkat metodologi berpikir, yaitu *ushul al-fiqh* dan

<sup>457</sup>Islam ideologi maksudnya adalah Islam yang mapan, yang tidak berubah, dan itu adalah dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri, seperti akidah, dan ibadah, dan ini urusan masing-masing umat Islam itu sendiri. Dalam kehidupan bernegara yang perlu ditampilkan bukan ideologi yang bersifat mengikat seperti itu, karena masing-masing orang akan menampilkan ideologinya masing-masing, sehingga akan menimbulkan pertentangan antar pribadi dan golongan. Wawancara dengan Ahmad Suaedy

<sup>458</sup> Agus Maftuh Abegebriel, “Mazhab Islam Kosmopolitan Abdurrahman Wahid”, Pengantar dalam Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. xxv

<sup>459</sup>A. Muhaimin Iskandar, *Abdurrahman Wahid, Islam, dan Kebangkitan Indonesia*, (Yogyakarta: KLIK, 2007), h. 12

<sup>460</sup>Ungkapan KH. M. Cholil Bisri dalam A. Muhaimin Iskandar, *Abdurrahman Wahid, Islam...*, h. 12-13



*qaidah fiqhiyah*, ditambah ajaran moral.<sup>461</sup>Perangkat inilah yang membuat Gus Dur selalu berpikir dan berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsanya, tanpa membedakan asal usul maupun agama, meskipun seringkali tanggapan yang diterimanya negatif, terutama ketika Gus Dur membela kaum minoritas Konghucu.

Pandangan senada juga disebutkan oleh Abd.A'la yang menyatakan bahwa benang merah gagasan Gus Dur mengacu kepada Islam yang berdimensi substansial, yang dapat dilihat dari pandangannya mengenai Alquran yang harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan kehidupan sosio kultural yang terus berkembang.<sup>462</sup>

Bagi Gus Dur, Islam adalah agama kasih sayang dan toleran sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya, Islam adalah keyakinan yang egaliter, yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan yang tidak adil karena alasan kelas, suku, ras, gender, atau alasan primordial lainnya. Islam adalah keimanan yang mengakui bahwa dalam pandangan Tuhan, semua manusia adalah setara, bahkan status muslim dan non-muslim pun setara. Itu karena Gus Dur meyakini bahwa nilai-nilai yang mendasari demokrasi dan liberalism adalah nilai-nilai universal.<sup>463</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluasan pemahaman Gus Dur sangat luas, hampir di segala bidang. Tidak heran, karena memang Gus Dur dibesarkan dan bersentuhan dengan berbagai kondisi kehidupan sosial masyarakat, keilmuan, dan budaya.<sup>464</sup> Keluasan pemikiran karena bersentuhan dengan ragam budaya dan pengalaman itu, membuat pemikiran Gus Dur progresif. Hal ini karena komitmen dan kemauannya dalam beradaptasi secara berkelanjutan terhadap penerapan nilai-nilai keagamaan untuk secara tepat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkembang. Karena sikapnya ini, Gus Dur sering dicap liberal, meskipun Gus Dur tidak pernah memperdulikannya, bahkan Gus Dur menyatakan bahwa nilai-nilai inti Islam adalah liberal.<sup>465</sup>

Pemikiran liberalnya bisa dilacak dari kegemarannya membaca buku-buku Barat. Secara formal, Gus Dur memang belum pernah belajar di Barat, tetapi karena sejak muda ia telah mendalami pemikiran-pemikiran Barat, dan kemudian dipengaruhi pendidikan yang bercorak liberal dan sekuler yang

<sup>461</sup>A. Muhaemin Iskandar, *Abdurrahman Wahid, Islam...*, h. 116-17

<sup>462</sup>Abd. A'la, "Kemenangan Abdurrahman Wahid Angin Sejuk Bagi Iklim Keagamaan", dalam Irwan Suhanda (Ed.), *Perjalanan Politik Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: KOMPAK, 2010), h. 20

<sup>463</sup>Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. xxxi

<sup>464</sup>Greg Barton, "*Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid*" dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU-Negara*, Terj. Tim LKiS (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 167.

<sup>465</sup>Greg Barton, "*Liberalisme...*", h. 167.

dia terima di Baghdad, maka tidak heran jika kemudian corak berpikirnya-pun liberal. Corak pemikiran liberalnya inilah yang memengaruhi setiap kebijakan yang beliau putuskan. Demikian juga dalam persoalan politik. Abduraahman Wahid dipengaruhi pemikiran Al-Afghani, terutama tentang konsep masyarakat ideal. Konsep/pemikiran tentang masyarakat ideal ini telah dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten para pemikir Muslim modern sejak al-Afghani (1837-1897)<sup>466</sup> hingga Sayid Qutb(1906-1966)<sup>467</sup> dan al-Maududi<sup>468</sup>.

5 Dari semua pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa konstruk pemikiran Gus Dur terbangun berdasarkan tiga nilai, yaitu: universalisme Islam, kosmopolitanisme Islam, dan Pribumisasi Islam. Universalisme Islam adalah nilai-nilai kemanusiaan di dalam Islam yang bersifat universal karena ditetapkan sebagai tujuan utama syariat. Nilai kemanusiaan itu terdapat di dalam perlindungan atas 5 hak dasar manusia yang meliputi perlindungan atas hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak berkeluarga. Begitu pentingnya ajaran ini sehingga Gus Dur menyebutnya sebagai nilai universal di dalam Islam. Sedangkan kosmopolitanisme Islam adalah keterbukaan Islam terhadap kebenaran dan peradaban lain, sejak filsafat Yunani kuno hingga pemikiran Eropa modern. Kosmopolitanisme Islam merupakan pra-syarat bagi terwujudnya universalisme Islam. Hal ini logis sebab perjuangan penegakan hak-hak dasar manusia di zaman modern membutuhkan alat-alat kemodernan, baik itu alat pengetahuan maupun sosial politik. Sifatnya bisa meredakan Islam dengan rasionalitas Barat. Kemodernan Islam bagi Gus Dur tidak dalam rangka pembaratan atau westernisasi, melainkan universalisasi Islam.

Jika kedua nilai tersebut sama-sama bersifat global, sebab makna Universe (universalisme Islam) dan Cosmos (kosmopolitanisme Barat) adalah semesta, maka pribumisasi Islam terkait dengan lokalitas. Sedangkan dua pemahaman yang perlu dijelaskan dalam pribumisasi Islam. Pertama, manifestasi ajaran Islam melalui kultur lokal. Dalam konteks ini ajaran Islam yang universal didakwahkan dengan meminjam bentuk budaya lokal pra Islam. Kedua, kontekstualisasi Islam. Dalam konteks ini, Pribumisasi Islam

<sup>466</sup>Jamaluddin Al-Afghani, Pelopor pembaharu didunia Islam mengemukakan bahwa kebangkitan Islam dalam bidang politik dan agama tergantung pada pengadopsian pemerintahan konstitusional a<sup>76</sup> republik (Asas konstitusional adalah salah satu konsep kharismatik demokrasi) Lihat Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Nabi hingga Masa Kini*, (Jakarta: Seti<sup>76</sup>bi, 2006), h. 549

<sup>467</sup>Sayyid Qutb menolak pandangan bahwa Islam harus belajar dari Barat mengenai pembangunan masyarakat dan politik. Antony Black, *Pemikiran Politik...*, h. 578

<sup>468</sup>Abu A'la al-Maududi adalah salah seorang pemikir modern menyebutkan bahwa legislative adalah lembaga yang tidak berhak membuat undang-undang yang bertentangan dengan tuntunan Tuhan dan Rasul-Nya. Lihat Ija Sutanta, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 271

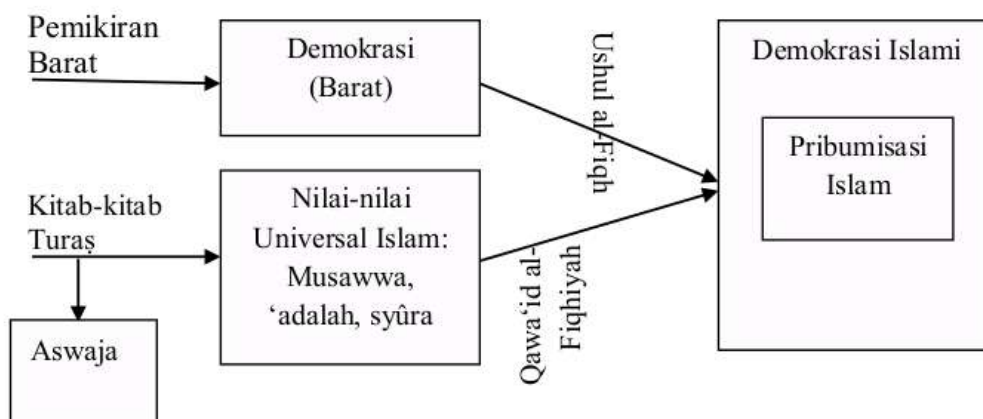


5 merupakan upaya Gus Dur dan para ulama NU untuk mengakomodasi kebutuhan realitas memanfaatkan prosedur keilmuan yang disediakan oleh nash dan 5 fiqh.

Gus Dur melihat bahwa demokrasi berasal dari pemikiran Kosmopolitan. namun kosmopolitanisme ini tidak boleh semata-mata berasal dari budaya Barat yang murni rasional, tetapi harus pula merujuk pada tata nilai Islam dan tata nilai budaya. Demokrasi bagi Gus Dur dipahami sebagai suatu proses yang belum selesai. Bisa dikatakan selesai apabila 5 instruksinya merujuk pada tiga hal yang telah disebutkan, yaitu universalisme Islam, budaya nasional, dan bersama-sama menyaring kosmopolitanisme atau rasionalisme Barat.<sup>469</sup>

Didalam sebuah pertemuan Islam dan kosmopolitanisme di Barat, Gus Dur memiliki gagasan tentang berbagai 5 ndangan dunia (*weltanschauung*) Islam dengan membangun 3 nilai yaitu *syura* (demokrasi), *'adalah* (keadilan), dan *musawah* (persamaan). Ketiga nilai tersebut secara intrinsik merupakan sebuah tradisi Islam dan Barat. Oleh karena itu, *syura* merupakan sebuah pertemuan dengan ide demokrasi, *'adalah* merupakan pertemuan dengan gagasan keadilan sosial, sedangkan *musawah* merupakan pertemuan dengan prinsip persamaan didepan hukum. Maka ketiga nilai Islam di 5 as diperjuangkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Gus Dur kemudian menggunakan kaidah *tasharuf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan seorang pemimpin tergantung pada kemaslahatan rakyat) sebagai prinsip operasional, yang artinya tolak ukur demokrasi, keadilan dan persamaan adalah kemaslahatan rakyat sebagai legitimasi bagi pemimpin politik.

Jika digambarkan, maka konstruk pemikiran Gus Dur adalah:



## BAB V IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DEMOKRASI ISLAMI ABDURRAHMAN WAHID

### A. Implementasi pada Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Gus Dur adalah salah seorang dari banyak orang NU (Nahdlatul Ulama) yang mempunyai kapabilitas personal mumpuni dalam banyak bidang, cukup mewakili pandangan dunia (*world-view*) dari kultur NU.<sup>470</sup> Gus Dur bisa dikatakan sebagai sosok multidimensi yang melampaui sekaligus mengayomi beraneka ragam identitas dan pemikiran. Bagi *nahdliyin*, Gus Dur adalah figur yang mempunyai watak mengayomi, membimbing, serta memperteguh kasih sayang atas sesama.<sup>471</sup>

Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menampilkan laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat perlindungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Gus Dur mengungguli calon presiden lainnya, yaitu Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan lewat pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden sesudah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden lewat pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang pada mulanya mengusung Gus Dur menjadi presiden yaitu PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P.

Hal senada diungkapkan Bapak Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman RI, penulis buku “Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka”, beliau mengatakan:

*Awal mula Abdurrahman Wahid melanjutkan cita-cita reformasi dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang pada mulanya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yaitu PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P”.*<sup>472</sup>

<sup>470</sup> Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Mutub, 2003), h. 15

<sup>471</sup> Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur...*, h. 28

<sup>472</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman RI, penulis buku “Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka”, pada tanggal 03 Desember 2019.

Kebijakan-kebijakan Gus Dur ketika menjadi Presiden tidak bisa dipisahkan dari pandangannya tentang demokrasi yang jauh sebelumnya sudah dia perkenalkan. Pemikiran yang kemudian diimplementasikannya itu, di antaranya:

1. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial

Di awal pemerintahannya, Gus Dur membubarkan dua departemen yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan susunan pemerintahan. Selain itu, pemerintah menilai bahwa program-program kedua departemen tersebut bisa ditangani oleh masyarakat sendiri, karenanya harus diserahkan kepada masyarakat.

Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa lebih-lebih media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu jika masih dibiarkan ada, justru akan menjadi kontraproduktif.<sup>473</sup>

Lagi pula paradigma penerangan yang menempatkan posisi pemerintah dalam keadaan yang lebih tahu, lebih dominan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika Departemen Penerangan dibubarkan dengan pertimbangan keberadaan departemen tersebut tidak lagi produktif, bhkan kontraproduktif, maka pembubaran Departemen Sosial justru karena ingin mengembalikan apa yang selama ini ditangani masyarakat, kembali ke masyarakat. Departemen Sosial dibubarkan bukan karena Gus Dur tidak peduli kepada masyarakat, justru itu merupakan strateginya untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang diinginkannya.

2. Membentuk Departemen Kelautan.

Seiring dengan pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, Gus Dur beserta jajarannya membentuk departemen baru, yaitu departemen Eksplorasi Laut lewat Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Penjelasan tentang tugas dan kegunaan termasuk lapisan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000.<sup>474</sup>

<sup>473</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Perjalanan Politik...*, h. 78-79

<sup>474</sup> Agus N. Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 64



Pembentukan departemen Kelautan dan Perikanan ini dianggap mempunyai nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar justru belum mendapat perhatian yang layak pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, beragam aktivitas ekonomi yang tentang segera bersama dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut lewat pemanfaatan bioteknologi.

3. Melakukan Amendemen UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amendemen pada UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amendemen berikut tentang hirarki pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amendemen ini sekaligus membuat perubahan pelaksanaan proses pemilihan anggota legislatif. Pasal 18 amendemen ini menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kotamemiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya tentang pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati secara demokratis. Pasal ini dipertegas lagi di dalam Pasal 19 dalam Perubahan UUD 1945 (amandemen) yang juga mengatur soal pemilihan umum untuk DPR.<sup>475</sup>

4. Reformasi di Bidang Hukum dan Pemerintahan.

Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan dilakukan dengan mereformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini pada masa pemerintahan sebelumnya sering dimanfaatkan untuk melanggar kekuasaan, bahkan melakukan tindakan represif pada gerakan demokrasi. Pemisahan TNI dan Polri termasuk merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam merawat kedaulatan Negara Republik Indonesia dari ancaman kapitalis asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam merawat keamanan dan ketertiban.

Dalam pembahasan ini, maka langkah strategis yang diambil Gus Dur adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan

<sup>475</sup>Syailendra Persada (Ed.), 4 Kali Amendemen UUD 1945, Ini Perubahannya, TEMPO.CO, Senin, 12 Agustus 2019, 08.02 WIB, diakses pada Sabtu, 15 Agustus 2020, 08.25 Wibb. <https://nasional.tempo.co>



wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan Gus Dur telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999. Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh Gus Dur dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.

Dengan kebijakan semacam ini, Redefinisi dan reaktualisasi peran TNI itu benar-benar diimplementasikan secara riil oleh Pemerintahan sipil. TNI tidak bisa lagi memeralat kepolisian untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan politik maupun keamanan. Reposisi ini merupakan aspek yang paling penting untuk mengembalikan keseimbangan sipil dalam rangka menciptakan demokrasi.

Gus Dur memberikan contoh cara menunjukkan amanat ketika ia mendekap kuat ABRI (TNI sekarang). Gus Dur mengetahui langkah yang akan disumpah-serapahi orang jika melakukan cara yang salah. Akan tetapi di dalam tulisannya, “ Jika itu tidak dilakukan terlebih dahulu, maka struktur TNI sekarang tidak mendukung proses demokrasi. Tanpa dukungan mereka tidak banyak hal yang dapat dilakukan pad saat reformasi pada saat itu yang di katakan orang yang seharusnya berjiwa status quo”. Sebab itu kita harus menghormati institusi TNI sekaligus menggunakan kedaulatan hukum untuk menegakkan tiang demokrasi.

5. Menuntaskan masalah KKN.

Masalah lain yang menjadi pekerjaan berat pemerintahan Presiden Gus Dur adalah upaya untuk menyelesaikan beragam kasus KKN yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama kasus-kasus KKN yang dituduhkan kepada Soeharto dan keluarganya. Sayangnya, kasus yang melibatkan Soeharto tidak dapat dilanjutkan karena alasan kesehatan, sehingga proses hukumnya tidak berjalan dengan semestinya. Kendati proses hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan Agung memutuskan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa dalam masalah sebagian yayasan yang dipimpinnya.<sup>476</sup>

6. Menuntaskan masalah konflik Aceh dan Papua.

<sup>476</sup>Status Soeharto Berubah Menjadi Tedakwa, Hukum Online, Kamis, 3 Agustus 2000. <https://m.hukumonline.com>, diakses pada Sabtu, 15 Agustus 2020, 08.35 wibb

Gus Dur dalam upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua tidak berhenti pada pengakuan dan penghormatan eksistensial. Gus Dur bergerak lebih jauh dengan aksi konstitusional untuk mengakomodasi nilai-nilai dan aspirasi mendasar dari keduanya. Suatu legitimasi yang baru setelah terjadinya transformasi melalui apa yang kemudian disebut sebagai undang-undang otonomi khusus. Akomodasi dan *inserting* mereka ke dalam keseluruhan sistem telah memberikan kedudukan baru bagi mereka dalam konteks status kewarganegaraan mereka dalam suatu sistem kenegaraan yang berwajah multikulturalis alias Bhinneka Tunggal Ika.

Seluruh konseptualisasinya mereka lakukan sendiri dengan independen dan partisipatif dalam suatu perdebatan yang tidak kalah seru di antara mereka karena berbagai kecenderungan di dalamnya. Konseptualisasi tersebutlah yang kemudian mengantarkan pada pemilihan otonomi atas kesadaran mereka sendiri, tentu dengan pengawalan masyarakat sipil yang kuat yang terbentuk bersamaan dengan dinamika dan dialektika kebebasan dan jaminan rasa aman yang melahirkan pilar utama tersebut. Transformasi tersebut berupa terserapnya hampir seluruh aspirasi masyarakat Aceh dan Papua ke dalam undang-undang otonomi khusus kecuali aspirasi Merdeka atas kesadaran mereka sendiri. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut di DPR, substansi dan tahapan-tahapannya dikawal oleh suatu gerakan sipil yang terkonsolidasi, dalam partai politik dimana di dalam yang terbentuk kaukus anggota lintas fraksi dalam parlemen dari kedua wilayah Aceh dan Papua tersebut.<sup>477</sup>

Meskipun gejolak masyarakat Papua sudah lama terjadi pada masa Orde Baru, pengaruh momentum reformasi yang dikenali dengan kalahnya Soeharto pada 21 Mei 1998 agak terlambat pada tuntutan merdeka secara terbuka di Papua dibandingkan dengan cepatnya perkembangan gerakan perubahan di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Gus Dur telah memiliki hubungan baik dan dekat dengan sejumlah penguasa di Papua, terutama pemimpin agama, intelektual dan LSM jauh sebelum menjadi Presiden.<sup>478</sup> sejak awal Gus Dur memperjuangkan kesatuan RI dan menentang separatisme dengan mneguesia ideologi anti kekerasan.

Presiden Gus Dur menetapkan GAM sebagai usaha dialog sejajar untuk mencari solusi damai, meskipun aspirasinya berseberangan 180 derajat. Sebagai seorang Presiden memasukkan mereka ke dalam

<sup>477</sup> Ahmad Suaedy, *Gus Dur...*, h. 79

<sup>478</sup> Wawancara Pdt. Karel Phil Erari, 16 Agustus 2014; 22 Agustus 2014. wawancara Manuel Kaisiepo, 17 Februari 2017

sistem kewarganegaraan dalam proses dialog tersebut. Yang ditunjukkan bagian ini ialah bahwa Visi Gus Dur seperti yang dijelaskan sebelumnya ditindaklanjuti dalam praktik *Policy-Marketing* bahwa visi kewarganegaraan proses pembalikan cara negara dalam merespon konflik lebih karena perubahan arti sebelumnya.<sup>479</sup>

7. Penghargaan terhadap pluralisme.

Pluralism dapat diartikan sebagai paham yang mengtolerasi adanya ragam pikiran, kebudayaan, peradaban serta agama atau keyakinan. Gus Dur sendiri sangat menghargai pluralitas, kemajemukan, liberalisme dan juga toleransi yang begitu tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Gus Dur, liberalisme merupakan falsafah hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas kehidupan.<sup>480</sup> Pluralisme ialah paham yang memberikan ruang nyaman bagi paradigma perbedaan sebagai salah satu entitas mendasar kemanusiaan orang muslim. Sedangkan menurut Parsudi Suparlan mengatakan bahwa multikulturalisme ialah sebuah ideologi yang mengangungkan perbedaan kultur, atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralism kultur sebagai corak kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan politik pluralism berarti adanya pergantian dan penyebaran kekuasaan dengan otoritas yang terbagi secara luas dalam struktur-struktur kekuasaan.

Ideologi yang eksklusif tidak bisa diterima sebagai suatu tatanan ideologi di Indonesia yang penduduknya plural. Inilah yang membedakan Gus Dur dengan politisi Islam lainnya yang masih menggunakan agama sebagai satu-satunya referensi pemikiran untuk segala bidang garapan. Gus Dur lebih melihat Islam sebagai sumber moralitas bagi penganutnya.<sup>481</sup> Meskipun agama bisa mempengaruhi moralitas politik, tetapi agama adalah sebuah kehidupan yang seharusnya dibebaskan dari permainan politik. Keberagaman seharusnya dibarengi dengan komitmen untuk demokrasi, sehingga kehidupan politik yang banyak dikemudikan agama turut menjadi demokratis.

Berkaitan dengan ini, dalam praktiknya ide Gus Dur untuk memperlakukan orang sama tanpa membedakan unsur-unsur primordial, akhir-akhir ini justru memperlihatkan fenomena yang bertolak belakang. Politik identitas justru menguat. Politik identitas

<sup>479</sup>Ahmad Suaedy, Gus Dur, *Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka Penyelesaian Konflik Aceh & Papua 1999-2001*. Jakarta; PT.Gramedika Pustaka Utama. 2018. h.217

<sup>480</sup> Nur Kholisoh, *Demokrasi Aja Kok Repoat*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya 2012), h, 58

<sup>481</sup> Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur...*, h. 243

muncul pada awal tahun tujuh puluhan untuk menunjuk aksi-aksi politik <sup>101</sup>; berdasarkan suatu identitas. Menurut Franz Magnis Suseno, politik identitas adalah usaha politik untuk mengakhiri situasi terhina, terabaikan, dan semua yang menunjukkan <sup>101</sup> perasaan diperlakukan tidak adil. Jadi, tujuan awal politik ini bukan suatu sasaran politik, ekonomi, atau tindakan administratif, tetapi mendapatkan keadilan, pengakuan identitasnya, dan berakhirnya penghinaan, namun akhir-akhir ini politik identitas lebih ditujukan untuk kepentingan politik. Pada tahun 2020 ini Pilkada akan digelar di 270 daerah, termasuk Medan. Penggunaan politik identitas pada Pilkada pastinya akan menjadi momok politik (*political spectre*) karena akan memicu terjadinya polarisasi masyarakat.<sup>482</sup> Pengelompokan berdasarkan kesukuan atau agama, akan menjadi dasar pemilihan, meskipun mungkin calon yang diusung tidak memiliki kapasitas yang cukup. Pilihan-pilihan subjektif seperti ini akan melahirkan pemimpin yang bisa jadi sebenarnya belum layak untuk dijadikan pemimpin, tetapi karena keberpihakan kepada identitas yang sama, maka pilihan menjadi tidak lagi rasional, dan itu akan menghasilkan proses demokratisasi yang tidak kita harapkan. Dalam kaitannya dengan pemikiran dan sikap demokrasi Gus Dur, ini bukan hal yang diinginkan Gus Dur. Gus Dur bahkan dikenal sebagai orang yang menghilangkan sekat-sekat primordial seperti itu, bahkan calon presiden dari <sup>108</sup>ngan non-muslim pun pernah diusulkannya.

8. Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM  
Kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur, termasuk salah <sup>3</sup>tu prestasi Gus Dur. Peran besarnya dalam hal ini adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 Nopember 2000. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum bagi penuntasan kasus-kasus HAM, sehingga Perwira Tinggi ABRI (termasuk Wiranto), Polri dan pemimpin sipil pun tidak luput dari Undang-undang ini. Undang-undang ini juga menjadi salah satu dasar didirikannya peradilan Ad Hoc HAM di masa Megawati.<sup>483</sup>

9. Mengangkat kaum minoritas.

Gus Dur memang dikenal sebagai orang yang kepeduliannya sangat tinggi terhadap kelompok minoritas. Dengan alasan ini, juga alasan

<sup>482</sup> Wartika, Politik Identitas: Ancaman dalam Pilkada 2020. <https://jurnalintelijen.net>, 15 Januari 2015, diakses pada Jum'at, 28 Agustus 2020, 11.09 Wibb

<sup>483</sup> Agus N.Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 110.



HAM, maka Gus Dur mengusulkan mencabut TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 tentang pelarangan Marxisisme dan Leninisme. Usulannya yang sangat kontroversial ini membuka luka lama korban-korban PKI. Gus Dur dengan alasan memberikan keadilan kepada kelompok minoritas, menginginkan ketetapan itu dicabut karena persamaan derajat tercederai dengan ketetapan itu. Lebih dari itu, Gus Dur juga menganggap pembubaran PKI dan pelarangan pengembangan ideologi komunisme marxisme sudah usang alias *out of date*.

Gagasannya ini mendapat tantangan hebat, termasuk dari kalangan Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi berikut mengakibatkan Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa rancangan dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR tahun 2000.<sup>484</sup>

10. Membuka hubungan dagang dengan Israel.

Selain kasus komunisme, konflik Gus Dur dengan organisasi masa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya selagi ia terpilih menjadi Presiden adalah gagasannya untuk terhubung pertalian dagang dengan Israel. Gagasannya berikut mendapat tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka pertalian dagang bersama dengan Israel serupa saja bersama dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyerukan supaya penjajahan di atas dunia dihapuskan.

11. Pejuang Demokrasi jauh sebelum menjadi Presiden.

Forum Demokrasi (FORDEM) yang dikemukakan beliau seakan menjadi pesantren inklusif yang terbuka bagi semua kelompok dan lintas komunitas. Pada masa reformasi saat ini forum demokrasi tidak begitu penting dan bersejarah akan tetapi berbeda jika dibandingkan dengan situasi jamannya yaitu pada saat pemerintahan orba bertahta. Kelompok atau komunitas yang berani keluar dari *mainstream* yang dikemukakan oleh penguasa ialah orang atau komunitas yang dikatakan benar-benar berani karena taruhannya ialah nyawa atau presensi diri. Dan ancaman pada saat itu terhadap Gus Dur ialah dihadap dan diburu-buru seperti pembengkang negara.

Gus Dur mendirikan forum Demokrasi karena panggilan ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan agar bermusyawarah sebagai demokrat sekaligus menjadi gerakan prodemokrasi yang dijadikan

<sup>484</sup> Agus N. Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 117-119

sebagai figur oposisi-loyal terhadap pemegang kekuasaan. Ia menjadi penentang yang terhadap penguasa yang buruk dan absolut tetapi tetap setia kepada tujuan bersama, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Kebhinnekaan. Hal tersebut merupakan hakikat Demokrasi yang dicintai Gus Dur.

Jauh sebelum jadi presiden, Gus Dur memang sering memerankan dirinya sebagai aktor kritis terhadap negara. Perjuangannya yang gigih menegakkan demokrasi, dan pemikirannya yang di luar kebiasaan umum<sup>3</sup> selalu diposisikan sebagai sosok politik dari negara, sehingga beliau dianggap sebagai satu-satunya sosial politik paling Independen di Indonesia. Presiden Soeharto dengan kalangan Tentara dan Birokrasi dipandang sebagai sayapnegara, oleh sebab itu Abdurahman Wahid dengan NU dan kalangan Pro Demokrasi dianggap sebagai sayap masyarakat sipil.

Komentar-komentar dan gerakannya selalu menghiasi halaman-halaman media massa berbanding lurus dengan penampilan negara yang kian hegemonik. Keberaniannya<sup>28</sup> menentang arus utama negara dan dalam hal-hal tertentu juga harus masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya, serta kesetiiaannya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan menjadikannya sebagai tokoh yang populer dan disegani. Beliau pernah terpilih menjadi tokoh terpopuler sebanyak 3 kali, *pertama*, tokoh tahun 1989 oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat; *kedua*, tokoh tahun 1990 oleh Majalah Editor, dan *ketiga* tahun 1999 oleh surat Kabar Kompas. Lebih dari itu ia juga pernah menerima penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dari Filipina Pada 31 Agustus 1993. Inilah merupakan bukti pengakuan nasional dan internasional terhadap peran dan kontribusinya dalam proses kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat demokratis, terbuka, dan toleran.<sup>485</sup>

Hal yang luar biasa dari Gus Dur pengakuan dari Dr. J Kritiyadi di dalam *Beyond The Symbols* ialah bahwa Gus Dur akan mengambil resiko apa saja<sup>44</sup> dalam menegakkan suatu demokrasi. Kritiyadi mengetahuinya sebagai seorang yang bisa saja mengorbankan ketenangan dirinya untuk sesuatu yang ia yakini untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Dalam suatu kepentingan para peserta dan pendukung Fordem yang bertujuan untuk keutuhan bangsa Indonesia. Para pendukung Fordem ingin kesadaran bangsa dan rakyat Indonesia selalu terjaga dan tercerahkan agar tetap bergerak dalam proses menuju masyarakat yang lebih berkembang dan lebih maju. Disadari oleh forum tersebut, bahwa ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh

6

<sup>485</sup> Tim Inces, *Beyond of The Symbols; Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 32.

itu hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam keadaan demokratis. Atau sebaliknya, keadaan tidak adanya demokratisasi, keadaan kurang kebebasan, hanya akan menjadi sumber tumbuhnya sikap-sikap cugai mencurigai, dan sikap melupakan norma-norma dan acuan umum.<sup>486</sup>

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak lepas dari akumulasi beragam ide dan keputusannya yang kontroversial, seperti yang dijelaskan di atas, bahkan organisasi dan partai politik Islam yang pada mulanya mendukungnya kalau NU dan PKB, menarik diri. Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS tentang pelarangan komunisme dan ide pembukaan pertalian dagang bersama dengan Israel, pertalian Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan DPR dan bahkan bersama dengan sebagian menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan berikut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa mengimbuhkan info yang dapat diterima oleh DPR.

Pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan mengakibatkan DPR mengajukan hak interpelasinya. Kepercayaan masyarakat pada Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis sejalan bersama dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan pemanfaatan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana perlindungan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut.<sup>487</sup>

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan ini dikuatkan dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk memberi peringatan kepada Presiden yang sudah melanggar haluan negara y<sup>80</sup>u melanggar UUD 1945 P<sup>80</sup>l 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tidak terima terhadap isi memorandum yang menyatakan bahwa Gus Dur dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum

<sup>486</sup>J. Kristiadi, "Sang Politikus Pembangun Demokrasi, dalam Tim INCRoS, *Beyond The Symbols...*, h. 156-157

<sup>487</sup> Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur? Misteri di Balik Pelengserannya*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 207-208

kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000.<sup>488</sup>

Rapat DPR berikutnya dilakukan untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden pada memorandum pertama. Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas sejalan bersama dengan ancaman presiden pada DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka Presiden bakal mengumumkan kondisi darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang artinya pula bakal terjadi pergantian bagian DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil alih tindakan hukum pada sejumlah orang khusus yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. Situasi ini termasuk meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden lebih-lebih yang tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada pengrusakan dan pembakaran beragam layanan lazim dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap menolong DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunai yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir kontrol ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001. Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Presiden Abdurrahman Wahid memastikan bahwa ia tidak bakal mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata aturan MPR, sehingga tidak sah dan ilegal.

Menyadari posisinya yang terancam, presiden seterusnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat berikut

---

<sup>488</sup> Tempo.Co, Selasa, 28 Oktober 2003, 09.45 WIB, Presiden Resmi Tidak Menerima Isi Memorandum, <https://nasional.tempo.co>



seterusnya disebut Dekrit Presiden. Secara lazim dekrit berikut memuat tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyiapkan pemilu dalam selagi satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.<sup>489</sup>

Sayangnya dekrit tersebut tidak dapat ditunaikan lebih-lebih gara-gara TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan beberapa langkah penyelamatan tidak melakukan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri berkesinambungan untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Sikap TNI dan Polri berikut ikut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa bersama dengan agenda pandangan lazim fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan bersama dengan pemungutan suara untuk terima atau menampik Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh bagian MPR yang hadir terima dua keputusan tersebut. Presiden dianggap sudah melanggar haluan negara gara-gara tidak hadir dan menampik untuk mengimbuahkan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.<sup>490</sup>

Demokrasi menurut pendapat bagi Gus Dur merupakan suatu proses, dan proses itu sudah dijalani Gus Dur sendiri, baik saat masih sebagai orang biasa, pemimpin organisasi, untuk kemudian menjadi Presiden, dan akhirnya melalui proses demokrasi juga dia dilengserkan dari jabatannya, terlepas apakah proses itu cacat hukum atau tidak. Semua proses demokrasi, diingatkan Gus Dur agar jangan dijadikan alasan, seperti yang dilakukan kaum *apologis* untuk melalaikan sistem demokrasi. Demokrasi sebagai proses juga mengandung makna bahwa pelaksanaan konkrit menurut prinsip demokrasi itulah yang menjadi hal penting. Dalam kondisi efektif, itu dilakukan oleh lembaga-lembaga mekanisme demokrasi, tetapi bukan berarti bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang tidak melalui lembaga itu tidak boleh disalurkan. Hak rakyat untuk menyatakan dan menyatukan pendapat

<sup>489</sup> Irwan Suhanda (Ed.), *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jakarta; Kompas Media Nusantara, 2010), h. xix

<sup>490</sup> Agus N. Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 239

5 secara langsung, tetap merupakan bagian penting dalam mekanisme demokrasi.

Membatasi pengertian demokrasi sekedar sampai adanya lembaga, dan menunjukkan penyaluran cita-cita hanya melalui suatu badan yang diresmikan, akan tetapi tidak mencukupi melihat tingginya pluralisme rakyat kita. Demokrasi yang diinginkan berjalan dengan kenyataan kemajemukan rakyat merupakan adanya berbagai golongan dan kelompok ke-28 besar kecil yang berbeda dan bahkan merlawanan yang dilihat dari suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan atupun penggabungan dengan dasar yang sama-sama behak untuk dipertimbangkan cita-citanya dan membuat suatu keputusan politik.<sup>491</sup>

Ketika Gus Dur menjadi presiden, maka pengaruhnya di kalangan rakyat menjadi amat kuat. Setelah tidak menjadi presiden, pengaruhnya tidak banyak berkurang dan Gus Dur tetap menjadi faktor utama dalam jagad politik. Di awal pemerintahannya, Gus Dur ialah sebuah resultan politik. Akan tetapi, tanpa menjadi presiden pun, Gus Dur sesungguhnya tetap orang besar. Ia intelektual yang memiliki integritas, punya komunitas kultur NU dan partai politik. Gus Dur bukan saja sosok pemimpin yang hanya bisa dijelaskan dalam perspektif *trait theory*. Dalam persepektif tersebut, orang besar itu dilahirkan. Ia adalah sosok yang sangat disiplin didunia keintelektualnya. Ia menjadi penjelajah di dunia wacana, berdiskusi, dan beraktivitas sosial. Ia krisis terhadap metodologi pembelajaran perkuliahannya sewaktu di Mesir.

Sejak awal Gus Dur konsi-20n dengan pendekatan sosio- kultural. Yaitu, suatu pendekatan yang mengutamakan sikap mengembangkan pandangan dan perangkat kultural, serta dilengkapi oleh upaya membangun sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang sudah ada. Hal ini didasarkan pada 84 insip kaidah figh: “*al muhafadhah ‘ala al-qadiimis-shaalih wal akhdzu bi al-jadiidi al-ashlah*” yaitu memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. “*tasharrafu al imam ‘ala ar-ra’yah manuutun bi al mashlaha*” bahwa kebijaksanaan pemimpin atau kepala pemerintahan haru mengikuti kesejahteraan rakyatnya. Yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan islam atau nilai-nilai pesntren itu sendiri, diletakkan dalam fungsinya sebagai inspirasi. Islam atau nilai-nilai pesantren itu sendiri, diletakkan dalam fungsinya sebagai inspirasi moral, serta dijadikan tenaga komlementer untuk kehidupan kebangsaan. Gus Dur secara stabil, menolak Islam dijadikan

<sup>491</sup> Zainal Arifin Thoah, *Jagadnya Gus Dur...*, h.240

sebagai ideology dan sistem alternatif, apalagi sebagai faktor tandingan yang bersifat disintegrasi terhadap kehidupan kebangsaan.<sup>492</sup>

Pada sisi pemikiran, sejak terpilih sebagai Ketua Umum *Tanfidhiyyah* PBNU pada tahun 1984, Gus Dur telah menjadi salah seorang intelektual muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Hal ini bukan saja didukung oleh posisinya di NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, melainkan juga karena percikkan-percikkan pemikirannya yang progresif tentang Islam, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi.

Sisi politik yang ditanamkan Gus Dur adalah prinsip-prinsip egalitarian, equality dan keadilan. Semua itu merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dibuktikannya dengan cara merombak kultur yang sudah menjadi tradisi di kalangan NU, misalnya merombak hubungan Kyai dan santri yang sangat *rigid* dan memiliki hirarki yang cukup ketat. Diakui oleh semua pihak mempunyai andil yang amat besar dalam soal-soal keagamaan. Dia mempunyai visi kemanusiaan yang sangat longgar, universal, dan tidak mempunyai ikatan-ikatan primordial sehingga ia bisa dan bebas bergaul dengan siapa saja.

Salah satu produk pemikiran yang mencerminkan kepribadian dan seluruh jalan pemikiran Gus Dur adalah tentang finalitas Pancasila sebagai ideologi negara. Baginya jika sebuah negara berwatak pluralis, maka tatanan pemikiran dasarnya pun harus mampu menghargai dan beranjak dari pluralitas tersebut. Ideologi yang eksklusif tidak bisa diterima sebagai suatu tatanan ideologi di Indonesia yang penduduknya plural. Inilah yang membedakan Gus Dur dengan politisi Islam lainnya yang masih menggunakan agama sebagai satu-satunya referensi pemikiran untuk segala bidang garapan. Gus Dur lebih melihat Islam sebagai sumber moralitas bagi penganutnya. Meskipun agama bisa mempengaruhi moralitas politik, tetapi agama adalah sebuah kehidupan yang seharusnya dibebaskan dari permainan politik. Keberagaman seharusnya dibarengi dengan komitmen untuk demokrasi, sehingga kehidupan politik yang banyak di kemudikan agama turut menjadi demokratis.

Gus Dur bisa disebut sebagai tokoh yang paling lama bertahan di jajaran elit Indonesia paling berpengaruh. Gus Dur sampai saat ini masih tetap memainkan peranan penting dalam politik Indonesia. Gus Dur mulai masuk dalam percaturan politik dan kebangsaan Indonesia sejak awal 1970-an ketika ia baru pulang belajar dari Baghdad. Pada awalnya Gus Dur tampil sebagai sosok budayawan dan cendekiawan rakyat yang pemikiran dan sikapnya menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat di tengah dinamika



pembangunan nasional, kemudian tampil sebagai pemimpin umat dengan menjadi Ketua Umum PBNU selama 15 tahun, dan akhirnya menjadi pemimpin politik dengan menjadi Presiden RI dan juga Ketua Dewan Syura DPP PKB.

Sejak terpilihnya Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU (1984) mulai membawa Gus Dur ke atas panggung nasional. Ditangan Gus Dur, posisi Ketua Umum PBNU menjadi sesuatu yang amat strategis. Pada tahun 1991 Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi<sup>493</sup> dan mulai muncul menjadi tokoh utama masyarakat sipil.

Mengapa Gus Dur bisa bertahan sedemikian lama dalam percaturan politik Indonesia?

**Pertama**, Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa memasuki dunia politik memerlukan kesabaran dan kesedihan untuk menjadikannya sebagai proses perjuangan jangka panjang. Dalam proses tersebut, kekuasaan harus dibangun dengan investasi sosial dan kultural yang cukup. **Kedua**, Gus Dur membangun jalur politiknya sebagai cendekiawan rakyat. Sebagai seorang cendekiawan, kekuatan politik Gus Dur bukan semata mata pada kepiawaian maneuver politik yang diperagakan, tetapi lebih pada kekuatan struktur pengetahuan yang dibangun untuk menjelaskan yang terjadi dan bagaimana proyeksi masa depannya. **Ketiga**, Gus Dur ialah tokoh yang selalu menjaga hubungan baik dengan semua kalangan. Bagi Gus Dur politik ialah silaturahmi. Meski ia diperlakukan secara tidak adil oleh presiden Soeharto dimasa lalu, ia tetap berhubungan baik dengan penguasa Orde Baru tersebut. **Keempat**, Gus Dur ialah sosok yang mempunyai semangat hidup yang luar biasa, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Semangat dan kepercayaan diri itu menjadikan Gus Dur mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi termasuk masalah usia dan kesehatan. **Kelima**, dalam beberapa kasus, Gus Dur mengungkapkan bahwa politik ialah hal yang tidak untuk dikomunikasikan.<sup>494</sup>

Gus Dur seringkali melontarkan gagasan perihal prinsip-prinsip negara Pancasila yang modern dan humanis kerakyatan agar setiap warga mempunyai hak hidup secara politik, dan beliau juga mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXXV tahun 1966 yang berkaitan dengan kasus 1965, yang berimplikasi mendiskualifikasi mantan orang-orang PKI, dan orang-orang yang oleh penguasa.

<sup>493</sup>Forum ini dari semula dimaksudkan sebagai perwujudan keprihatinan, dengan menyediakan “ajang” yang terbuka untuk mencari jalan ke luar dari keprihatinan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang menyangkut persoalan demokrasi dan demokratisasi. Karena itu, forum ini sebenarnya tidak mengenal keanggotaan. Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan...*, h. 212.

<sup>494</sup>A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan kebangkitan Indonesia*, (Yogyakarta: KLIK 20070), h. 21-27



Oposisi Gus Dur yang paling berkesan di hati anak-anak muda NU khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ialah oposisi demokrasi kerakyatan yang dilakukannya terhadap rezim Soeharto. Oposisinya dilakukan dalam banyak hal: kasus Kedungombo, menjadi ketua Fordem, melawan rekayasa rezim Soeharto dalam Muktamar Cipasung pada tahun 1994. Menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden yang oleh Gus Dur diubah menjadi loyalitas kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam apel akbar tahun 1992.

Sejumlah warisan kebijakan Gus Dur sewaktu menjadi presiden yang hanya sementara juga sangat berkesan, terutama usulnya untuk mencabut TAP MPRS No. XXXV tahun 1996 yang merupakan warisan kebijakannya yang dimaksudkan untuk menjaga martabat bangsa Indonesia, tetapi sekaligus kontroversial, dapat disimpulkan:<sup>495</sup>

1. Mengganti jabatan-jabatan politik yang selalu diduduki orang-orang militer dan memasukkan orang-orang sipil kedalam jabatan-jabatan tersebut.
2. Perubahan staf Sospol menjadi Staf Teritorial. Dengan perubahan ini profesionalisme militer dinaikkan dengan cara mengurangi peran militer dari persoalan non-militer.
3. Memisahkan jabatan Menhan dengan Menkopolkam, dan penempatan orang sipil di jabatan Menham.
4. Revisi pemindahan TNI-POLRI yang gagasan awalnya sudah muncul di kalangan TNI, tetapi sampai tahun 1999, POLRI masih berada di bawah komando ABRI.
5. Penghapusan hak prerogatif militer dengan menghapus Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan dan Pemantapan Nasional) yang dulu menjadi pengganti Komantip (Komando Operasi Pemulihan dan Keamanan).
6. Penghapusan kebijakan *Litsus* (meneliti seseorang terlibat PKI atau tidak) yang seringkali dijadikan alat rezim Orde Baru untuk menekan lawan-lawannya.
7. Pengakuan Konghucu dan tradisi orang-orang Tionghoa sehingga hak-hak mereka kembali setelah sekian lama dibatasi pada saat rezim Soeharto.

Dalam hal ini Gus Dur mengajarkan kepada manusia-manusia Indonesia agar bersikap teguh dalam memegang prinsip sehingga kita dapat menjadi Negara beradab dan bermartabat. Diantara warisan Gus Dur yang paling berharga untuk bangsa Indonesia, dan akan terus menjadi sumber inspirasi bagi manusia-manusia kreatif Indonesia ialah tulisan-tulisannya.

<sup>495</sup> Nur Khalik Ridwan, *Negara Bukan-bukan...*, h. 18-19.

Warisan Gus Dur ini akan terus dikenang, dibaca, dan dimaknai oleh manusia-manusia kreatif Indonesia.<sup>496</sup>

Secara sengaja Gus Dur meminta Wiranto mundur ketika ia tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara Eropa. Inilah cara Gus Dur untuk menepis kekhawatiran masyarakat internasional bahwa otoritas sipil di Indonesia tidak sanggup mengendalikan kekuatan militer, penyokong utama kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Apalagi permintaan mundur itu dilakukan di tengah upaya masyarakat internasional mendorong pengadilan HAM internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM di Timor timur. Upaya untuk membebastugaskan Wiranto dari jabatannya itu, Presiden Gus Dur dengan gagasannya itu, ingin mengembangkan tradisi baru bahwa jika ada pejabat negara yang melakukan pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum lainnya, lebih baik jika yang bersangkutan mengundurkan diri agar memudahkan pemeriksaan. Dalam konteks ini, Presiden Gus Dur sedang berusaha membangun budaya dan etika baru dalam sistem politik nasional. Langkah itu pun merupakan bagian penting untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional.<sup>497</sup>

Salah satu prestasi yang sangat besar dan patut di catat selama Gus Dur menjadi Presiden adalah penghapusan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Baskorstanas) dan lembaga penelitian khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 tentang penghapusan Baskorstanas dan Litsus yang selama orde baru menjadi alat represif negara. Kebijakan ini merupakan cermin gagasan besar .

Presiden Gus Dur untuk meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan masyarakat. Kedua lembaga yang di masa lalu menjadi instrumen rezim otoriter ini dinilai tidak tepat lagi berada di alam politik baru yang demokratis. Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan perannya tidak jelas.

Sejak Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat, tak henti-hentinya Gus Dur menembakkan kejutan, mulai dari ide “berkerabat” dengan Israel, Pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/1966, sampai pencopotan menteri, Reshuffle kabinet, “Buloggate”, hingga mutasi di tubuh TNI (Tentara Negara Indonesia).

Dalam acara wisuda sarjana dan Dies Natalis ke-19 Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur, pada tanggal 25 Maret 2000, Gus Dur

<sup>496</sup>Nur Khalik Ridwan. *Negara Bukan-bukan...*, h.19

<sup>497</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik...*, h. 96-97

menyatakan “saya secara pribadi setuju penghapusan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966. Alasannya, ya karena terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak komunis, lalu masuk dalam daftar itu”<sup>498</sup>

Kebijakan Abdurrahman wahid saat menjadi Presiden yang mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat dan partai politik. Kita dapat memahami alasan Gus Dur untuk mencabut larangan penyebaran komunisme. Yakni bahwa kalau kita ingin mengembangkan demokrasi seharusnya tidak ada ideologi apapun dilarang berkembang di Negeri ini, namun masalahnya, apakah pencabutan itu sudah saatnya dilakukan saat ini, karena larangan terhadap komunisme berkembang di Indonesia muncul setelah kegagalan kudeta PKI pada tahun 1965. sebelumnya PKI pernah melakukan pemberontakan tahun 1948 di Madiun.<sup>499</sup>

Pemberontakan dan kudeta merupakan tindakan yang tidak demokratis. Jika larangan tersebut komunisme yang berlaku selama ini di anggap tidak demokratis, maka hal itu selayaknya dipahami bahwa tindakan yang tidak demokratis tersebut didorong oleh tindakan PKI yang juga tidak demokratis di masa lalu. Namun tindakan PKI yang tidak demokratis itu tidak boleh membuat kita untuk juga bersikap tidak demokratis secara terus-menerus.

Jika kita berpikir tentang perkembangan demokrasi di Indonesia untuk jangka panjang ke depan, pemberontakan dan kudeta tidak bisa dijadikan untuk melarang komunisme selamanya. Karena negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka jika orang-orang komunis kembali melakukan tindakan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara seperti pemberontakan dan kudeta, mereka harus diadili yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, pernyataan Gus Duryang ingin mencabut Tap MPRS tentang larangan komunisme harus di lihat sebagai gagasan tentang pengembangan demokrasi dalam jangka panjang. Ini berarti cepat atau lambat larangan itu akan di cabut, karena tidak sesuai dengan proses demokrasi yang sedang berjalan.

Ada tiga kontribusi besar Gus Dur bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. *Pertama*, Gus Dur menjadi pelopor bagi pemecah kebekuan berfikir umat islam Indonesia. *Kedua*, gagasan-gagasan Gus Dur secara tidak langsung juga telah membuka jalan baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia sehingga tidak lagi terpaku pada satu jalan yang selama ini

<sup>498</sup> Panji Masyarakat No. 01 Tahun IV, 26 April 2000, h. 53

<sup>499</sup> Teba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, Cet I, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2001, h.8

ditempuh, yaitu politik. *Ketiga*, gagasan-gagasan Gus Dur juga mempunyai kontribusi dalam mendorong demokratisasi di Indonesia.<sup>500</sup>

Gerakan demokrasi di Indonesia sudah menjadikan suara vokal Gus Dur sebagai salah satu sarana perjuangan. Hal itu tentu bukanlah sebuah kebetulan melainkan menyatu dengan kesadaran perjuangan Gus Dur sebagai seorang intelektual organik.<sup>501</sup>

Dalam konteks kewarganegaraan bineka, ketika kelompok terdiskriminasi setelah diangkat dan disetarakan dengan warga negara lain dengan melibatkan institusi negara, terjadi proses pembebasan dan kesetaraan. Namun, pengakuan lebih memberikan dampak pada politik dan psikologis dalam kedudukan sebagai manusia dan warga negara. Dampak itu akan berhenti jika tidak ada lanjutan berupa aksi dari pemerintah dalam bentuk yang lebih konkrit, dari yang bersifat fisik seperti pelibatan pada even politik secara nyata hingga non fisik, seperti jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul serta rasa aman untuk menyampaikan aspirasi yang mereka inginkan.

Ketetapan MP/100/I/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, “Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing- masing.” Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, “TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.” Ayat (2) berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan.”<sup>502</sup>

Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil Gus Dur adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan Gus Dur telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999. Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh Gus Dur dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.

<sup>500</sup> A. Effendy Choirie, dkk., *Sejuta Gelar...*,h. 153-156

<sup>501</sup> A. Effendy Choirie, dkk., *82 juta Gelar...*,h. 154

<sup>502</sup> Tap ini dipertegas lewat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI oleh Presiden Megawati, yang menyatakan tugas dan kewajiban Polri terpisah dengan TNI hingga sekarang. TAGAR NEWS, Fakta-fakta Sejarah Pemisahan TNI dan Polri, 05-10-2019. <https://www.tagar.id>



Dengan kebijakan semacam ini, redefinisi dan reaktualisasi peran TNI itu benar-benar diimplementasikan secara riil oleh Pemerintahan sipil. TNI tidak bisa lagi memperlambat kepolisian untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan politik maupun keamanan. Reposisi ini merupakan aspek yang paling penting untuk mengembalikan keseimbangan sipil dalam rangka menciptakan demokrasi.

Gus Dur memberikan contoh cara menunjukkan amanat ketika ia mendekati kuat ABRI (TNI sekarang). Gus Dur mengetahui langkah yang akan disumpah-serapahi orang jika melakukan cara yang salah. Akan tetapi di dalam tulisannya, “ Jika itu tidak dilakukan terlebih dahulu, maka struktur TNI sekarang tidak mendukung proses demokrasi. Tanpa dukungan mereka tidak banyak hal yang dapat dilakukan pada saat reformasi pada saat itu yang di katakan orang yang seharusnya berjiwa status quo”. Sebab itu kita harus menghormati institusi TNI sekaligus menggunakan kedaulatan hukum untuk menegakkan tiang demokrasi.<sup>503</sup>

Selama Gus Dur menjadi Presiden, ketegangan Gus Dur dengan DPR terus mengalami intensitas dan eskalasi yang semakin memanas, misalnya pada kasus buloggate dan bruneigate yang dijadikan komoditas politik oleh musuh-musuhnya lewat pembentukan Pansus (Panitia Khusus) yang ditugasi untuk mengusut kedua kasus tersebut. Kasus buloggate yang melibatkan aliran pengucuran dana yanatera bulog sebanyak Rp 35 miliar kepada beberapa orang tertentu, termasuk Suwondo yang diduga merupakan orang terdekat Presiden. Sedang kasus Bruneigate melibatkan pemberian hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak Sultan Brunei kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Para musuh Gus Dur menuduh dirinya tidak melaporkan pemberian hadiah itu kepada publik dan ia dianggap telah melanggar sumpah jabatan. Dan sebaliknya, Gus Dur mengatakan bahwa uang tersebut adalah hibah dari pihak Sultan Brunei kepada dirinya sebagai pribadi.<sup>504</sup>

Ketegangan Gus Dur dengan DPR ditandai dengan dikeluarkannya memorandum I dan memorandum II oleh DPR, walaupun Gus Dur menuduh Pansus sebagai ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran Negara. Atas dasar hasil-hasil kerja Pansus, DPR menyatakan bahwa Gus Dur “dapat diduga terlibat dalam kasus bullogate dan bruneigate.” Dengan mengambil kesimpulan bahwa Gus Dur sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. Bagi Gus Dur, Logika DPR itu terasa aneh karena sesuatu yang masih

<sup>503</sup> A.Efendi Choir<sup>53</sup>kk. *Sejuta Gelar...*, h.173

<sup>504</sup> Ismail Faisal. *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur Dan Struktur*, Cet. I, Yogyakarta: LESFIYogya 2002., h. 14

bersifat dugaan, tetapi telah dimanipulasi sebagai “sungguh-sungguh melanggar haluan Negara.”<sup>505</sup>

Gus Dur sendiri dengan kasus buloggate dan brunei gatenya belum di bawa ke pengadilan, karena secara hukum Gus Dur belum dinyatakan bersalah. Selama pemerintahan Gus Dur bertahan 22 bulan, banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang mengalami delegitimasi politik dan sosial yang mengakibatkan Gus Dur lengser dari jabatannya, diantaranya adalah: Kebijakan Presiden Gus Dur yang menghapus Departemen Sosial dan pembubaran Departemen Penerangan. Dalam pandangan Gus Dur Departemen sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan, seperti korupsi dan dana bantuan kemanusiaan yang tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial, sedangkan Departemen Penerangan di anggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa Orde Baru. Berikut kebijakan Gus Dur:

1. Dicaputnya Tap MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme di seluruh wilayah Indonesia.
2. Membuka hubungan dagang (bukan hubungan diplomatik) dengan Negara zionis Israel
3. Pencopotan beberapa menteri dan bongkar pasang kabinet. salah satunya adalah Kwik Kian Gie dari Fraksi PDI-P, Laksamana Sukardi dari Fraksi PDI-P, Yusuf Kalla dari Fraksi GOLKAR, Bambang Soedibjo dari PAN, Jend. Wiranto (TNI/Menko polkam) dan Hamzah Haz dari Fraksi PPP, yang kemudian di susul dengan Susilo Bambang Yudhoyono (TNI/Menko Polsoskam) dan Yusril Ihza Mahendrata dari Fraksi PBB.
4. Sikap Gus Dur yang sering meninggalkan Megawati Soekarno putri (Wapres), terutama dalam hal kebijakan memberhentikan beberapa menteri dan mengangkat para penggantinya.
5. Hubungan Gus Dur yang tidak harmonis dengan DPR- MPR.
6. Tindakan Gus Dur yang melakukan penggantian Kapolri dalam waktu yang relatif singkat.
7. Ancaman Gus Dur untuk memberlakukan dekrit Presiden apabila kompromi politik antara dirinya (sebagai Presiden) dengan para pemimpin partai politik tidak tercapai.
8. Penolakan para pemimpin partai-partai politik (terutama PDIP, Golkar, PAN, PBB, dan PK) terhadap tawaran kompromi yang diajukan oleh Gus

<sup>505</sup>Dalam sebuah diskusi Gusdurian, Jumat, 4 Januari 2013, mantan Ketua MK, dan mantan menteri pada Kabinet Gus Dur mengatakan bahwa Sidang Istimewa yang dilakukan MPR untuk memakzulkan Gus Dur cacat hukum. Agus N. Cahyo, *Salah Apakah...*, h. 239-241

Dur untuk mencairkan kebekuan dan kebuntuan politik akibat ketegangan yang berkepanjangan antara Gus Dur dan para musuh politiknya.

9. Dukungan TNI/Polri (sebagai institusi) yang dari waktu ke waktu kian menyusut terhadap Gus Dur. Akan tetapi setelah Gus Dur melakukan tindakan pencopotan terhadap Menko Polkam Wiranto, Kapolri Rusdiharjo dan Suroyo Bimantoro dan kemudian Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan TNI/Polri semakin menipis dan bahkan tidak ada sama sekali. Ini terbukti bahwa TNI/Polri tidak akan mendukung apabila Gus Dur mengeluarkan dekrit.

Dalam kasus Aceh dan Papua<sup>506</sup> setidaknya mulai November 1999 hingga akhir 2000 beliau dihina oleh partai politik di DPR dan militer, memperlihatkan bukan saja kembalinya perdebatan terbuka dan substansial di antara mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat dan tanpa ancaman aparat keamanan, pesan tersebut juga menuntun disepakatinya pilihan otonomi oleh mereka sendiri tanpa paksaan apalagi ancaman dari pemerintah. Mereka tidak lagi menuntut merdeka. Keputusan ini merupakan keputusan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat dan tanpa ancaman dari aparat keamanan. konsekuensinya adalah rumusan aspirasi yang telah mereka rumuskan sendiri untuk diakomodasi ke dalam suatu sistem negara.

Kewarganegaraan bhineka yang terkonseptualisasikan dan dipraktikkan oleh Gus Dur tersebut tidak muncul tiba-tiba, melainkan memiliki landasan historis dan metodologis yang kuat, yaitu Islam post-tradisional. yang dimaksud Islam post tradisional adalah suatu metodologi yang memiliki akar historis ke Islam klasik *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Aswaja) dan tradisi yang hidup di masyarakat. metodologi ini mendasari pemikiran aksi Gus Dur ketika menyelesaikan konflik Aceh dan Papua Dalam kedudukannya sebagai ulama, bangsa dan sekaligus sebagai Presiden RI.

Pada dasarnya dalam menjadikan negara Islam dalam negara yang memiliki kehidupan yang beragam akan mendatangkan konflik, maka dalam hal ini yang menjadi solusi ketika umat Islam melakukan pembaharuan adalah dengan menganut pola nasionalisme.<sup>507</sup>Dengan demikian, dalam

<sup>506</sup> Ahmad Suady menggambarkan dengan detil di bukanya *Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Binika: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001* bagaimana Gus Dur mengupayakan penyelesaian konflik Aceh dan Papua yang menyebabkan kedua propinsi itu tidak jadi melepaskan diri dari NKRI.

<sup>507</sup>Pada dasarnya nasionalisme yang dimiliki oleh suatu warga negara akan mengalami kemajuan yang selanjutnya akan menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Berkembangnya suatu bangsa jika pendidikan yang dibentuk berdasarkan tujuan Nasional bukan untuk kepentingan sekelompok saja. Hal inilah yang mendorong negara islam untuk mengembangkan sikap nasionalisme karena sebelumnya umat Islam terpecah-pecah sehingga persatuan tidak tercapai. Pada masa itu umat islam terkelompok-kelompok dengan berbagai negarakecil sehingga mudah dikuasai oleh negara lain. Umat



15 pandangan Gus Dur bahwa Islam adalah agama fitrah, dalam hal ini selama suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan-tujuan dalam Islam. Gus Dur dalam persepektif NU yang merupakan wah 15 Ahlu al-Sunnah Wal Jamaah, bahwa pemerintah dalam pandangannya dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari normal formal eksistensinya, negara Islam atau bukan.

## B. Implementasi di Bidang Keagamaan

Pemikiran demokrasi Gus Dur terutama dan pertama sekali pasti diimplementasikan ke organisasi yang dibesarkan dan sekaligus membesarkannya, dan kemudian ke PKB, partai yang dibidannya kelahirannya. NU pasca Gus Dur, akan banyak diwarnai oleh tiga karakteristik generasi. *Pertama*, ialah ulama (kiai). Bukan tidak banyak generasi NU yang bercita-cita meneruskan tradisi para *salafus-shalih*, yakni dengan jalan mendirikan pondok pesantren atau yayasan pendidikan Islam. *Kedua*, ialah politikus, dengan menyimpulkan kejadian pemilu dan sidang umum MPR di era reformasi, jadi kita tahu pesantren pun juga mencetak kader-kader politikus atau negarawan yang ulung. Dan *ketiga*, ialah kaum muda kritis-progresif. Lapisan atau generasi ini meski tidak terlalu banyak, namun gerak dan gebrakannya banyak mewarnai NU. Membayangkan NU pasca Gus Dur, yaitu NU di masa depan ialah gambaran jam'iyah yang memenuhi tradisionalisme namun apresiatif dan inovatif terhadap perubahan.

Di tanah air sendiri, konflik, kekerasan dan pertumpahan darah telah ada sejak zaman prakolonial sampai era reformasi sekarang. Setelah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, selama 5 tahun pertama Indonesia tak pernah hilang dari yang namanya konflik disertai kekerasan. Sejumlah konflik dan kekerasan terjadi yang berkaitan dengan separatisme, peranan agama dalam negara sekuler .

Konflik-konflik yang di kemukakan oleh para pengamat sebagai konflik komunal, konflik suku, konflik sosial, konflik politik, dan konflik

---

Islam mendapati kenyataan bahwa mereka terdiri dari berbagai bangsa yang berbeda latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaannya. Mereka pun hidup bersama dengan orang-orang yang beragama lain tapi sebangsa. Inilah yang juga mendorong perkembangannya rasa nasionalisme di dunia Islam. Memasukkan modernisasi pada aspek Nasionalisme tujuannya adalah untuk menyatukan umat Islam yang telah terpecah. Dapat dikatakan bahwa aspek nasionalisme merupakan sintesa dari jalan tengah kegagalan aspek westernisasi dan Islamisasi di Turki. Berdasarkan konsep ini maka tidak heran Abdurrahman Wahid memahami konsep modernisasi ini, maksudnya beliau melakukan modernisasi melalui pemerintahan dengan tujuan untuk menyatukan 15 bangsa yang terpecah. Pemikirannya dibidang negara, beliau memberikan gambaran bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang 15 ara, dalam soal bentuk negara menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001) h. 103.



agama. Beberapa konflik serius dan sangat merugikan bangsa dan negara adalah konflik etnis, anatara lain : 1. Suku melayu berhadapan dengan suku madura di Sambas (1996-1997, 1999, dan 2001), 2. Penganut agama Kristen Timur melawan BBM (Buton, Bugis, Makasar) pendatang di kota-kota kupang dan Soe ( bagian barat Timor Timur (1999). Konflik ini berakhir dengan Konflik agama, 3. Kristen Ambon melawan BBM di Ambon (1999). Konflik ini juga berakhir dengan konflik agama. Konflik di antara berbagai etnis di Maluku Utara (2000). Begitu pun konflik ini, berakhir dengan konflik agama, 4. Konflik diantara berbagai kelompok di Poso Sulawesi Tengah (2001). Di tanah air sendiri, konflik dengan kekerasan dan pertumpahan darah sudah ada sejak zaman prakolonial hingga era reformasi sekarang ini.<sup>508</sup>

Sejumlah peneliti menilai bahwa rezim Orde Baru dibangun di atas landasan kekerasan antikomunisme, kejam dalam memperlakukan perbedaan pendapat, serta brutal dalam menangani pemberontakan. Kekerasan telah menjelma menjadi satu dari tiga tonggak yang menyokong kekuasaan Soeharto, disamping kinerja ekonomi dan manipulasi ideologi.<sup>509</sup>

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah partai politik yang lahir bersama-sama partai lain pasca Orde Baru. Kelahiran PKB adalah fenomena yang tersendiri, dengan dua alasan faktual: Pertama, sebagai pendatang baru, PKB bisa langsung masuk dalam tiga besar perolehan suara pada pemilu 1999. Posisi ketiga bisa kembali dipertahankan pada pemilu 2004. Kedua, sejak berdiri sampai saat ini, PKB merupakan partai politik yang paling dinamis.

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ialah partai politik yang didirikan bersama partai lain setelah Orde Baru. Orde Baru memulai langkahnya dengan langgam liberal, sehingga pikiran-pikiran kritis dapat ditenggang secara demokratis, demikian juga kebebasan pers terjamin.<sup>510</sup> Tetapi dibandingkan dengan partai politik lain yang didirikan di era reformasi, PKB bisa dibilang kejadian yang tersendiri. Oleh karena itu ada 2 alasan faktual dengan pernyataan itu. *Pertama*, sebagai partai pendatang baru, PKB langsung masuk dalam tiga besar perolehan suara pada pemilu 1999. posisi ketiga tetap bisa dipertahankan pada pemilu tahun 2004. *Kedua*, sejak berdiri sampai saat ini PKB ialah partai politik yang sangat dinamis. Konflik internal, berupa dualisme kepemimpinan merupakan fenomena yang biasa.

<sup>508</sup> Ahmad Nurholish, *Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, (Jakarta: PT..Elex Media Komputindo, 2015), h.4.

<sup>509</sup> Syafa'atun El Mirzanah & Limantia Sihaloho, dkk., *Pluralisme, Konflik, dan perdamaian; studi bersama antar-iman* (Yogyakarta: Interfidie dan The Asia Foundation, 2002) h. 9

<sup>510</sup> Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur...*, h. 6

Para pemimpin dan kader PKB selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan optimisme yang kuat untuk membuat PKB sebagai partai besar dan berpengaruh di masa yang akan datang. Tingkat kemampuan dan pengetahuan kelembagaan yang luar biasa mampu membuat PKB berkembang dalam keadaan konfliktual dan mengkonsolidasi pengetahuan kolektif di tengah arus konsumerisme dan tidak lepas dari moral sosial kultural yang dimiliki partai PKB yang didirikan pada 23 juli 1998. yang membuat PKB menjadi partai yang kapasitas dan kelembagaan yang luar biasa. *Pertama*, PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara langsung memproklamasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945 ialah sudah final. Keputusan PKB tentang status NKRI karena dasar Negara ini memiliki rujukan sejarah yang kuat dan belandaskan hukum agama (fiqih) yang kuat. *Kedua*, PKB merupakan partai politik yang mempunyai basis kultur yang kuat dalam sejarah gerakan sosial dan gerakan Islam Nusantara sejak dulu. Sebagai partai politik yang dilahirkan oleh NU, PKB ialah mata rantai perjuangan rakyat dimasa lalu menjadi ikatan yang menghubungkan pemikiran keagamaan yang elah dilembagakan oleh pesantren-pesantren sejak dahulu. *Ketiga*, PKB memiliki pemimpin tinggi yang disegani sebab kedalaman pemikiran sosialnya, keluasan pengetahuan politiknya dan tingginya pengaruh PKB sepanjang sejarah Indonesia.<sup>511</sup> Sebagai partai politik, PKB memandang perlu untuk melakukan konsolidasi pengetahuan dan gerakan.

Partai yang dikendarai oleh Gus Dur ini didirkannya untuk menjadi partai untuk semua umat. Konsep dan sikap eksklusif yang pada umumnya menjadi ciri partai Islam kurang cocok dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hanya sikap inklusif lah di mana keberagaman merupakan suatu kesatuan yang berada dalam suatu wadah yang sama, yang bisa diterima semua pihak dengan terbuka. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa, kemunculan partai yang dibentuk oleh organisasi ulama justru bersikap terbuka terhadap berasaskan Islam, adalah implementasi sikap dan pemikiran demokrasi pluralis Gus Dur. Dapat dikatakan bahwa pasca reformasi merupakan kebangkitan Islam.

Oleh karena itu dapat diuraikan kontribusi dan pengaruh pemikiran politik Gus Dur terhadap partai Islam antara lain.<sup>512</sup>

---

<sup>511</sup>A.Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia* cet DPP PKB, (Yogyakarta), h.8

<sup>512</sup>Nurhasim, *Masa*, h. 277.

1. Gus Dur memberikan suatu pengajaran yang berharga bahwa harus adanya suatu sikap toleransi terhadap pemahaman keberagaman yang ada di Indonesia, juga memahami konsep pluralism dalam hal keyakinan.
2. Sebagai suatu pemegang kebijakan, Gus Dur merupakan pengayom bagi masyarakat yang minoritas, menjadikan kelompok sekuler sebagai bagian kelompok yang digalang dalam kekuatan serta menyerap berbagai kalangan minoritas.
3. Ketika Gus Dur menjadi Presiden, sudah memberikan warna perpolitikan Indonesia yang demokrasi. Dapat dilihat ketika beliau menjadi Presiden, banyak kebijakan-kebijakan dan peraturan yang diterapkan sebelumnya yang merugikan kaum minoritas di hapus oleh beliau.
4. Partai yang didirikan oleh Gus Dur<sup>16</sup> menetapkan Pancasila sebagai dasarnya, karena pada dasarnya prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Sisi politik yang ditanamkan Gus Dur adalah prinsip-prinsip *egalitarian*, *equality* dan keadilan. Semua itu merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dibuktikannya dengan cara merombak kultur yang sudah menjadi tradisi di kalangan NU, misalnya merombak hubungan Kyai dan santri yang sangat *rigid* dan memiliki hirarki yang cukup ketat. Diakui oleh semua pihak, Gus Dur mempunyai andil yang amat besar dalam soal-soal keagamaan. Dia mempunyai visi kemanusiaan yang sangat longgar, universal, dan tidak mempunyai ikatan-ikatan primordial sehingga ia bisa dan bebas bergaul dengan siapa saja.

Seperti dikatakan KH. M. Cholil Bisri dalam pengantar buku *Membangun Demokrasi* (1999), pemikiran Gus Dur berangkat dari keinginan untuk menunjukkan bahwa ajaran *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* yang dipertahankan kalangan kiai pesantren dengan kitab-kitab klasik sebagai *muqarrar*-nya, masih sangat dan tetap relevan sebagai pijakan kehidupan masyarakat modern.<sup>513</sup>

Upaya yang dilakukan Gus Dur dalam hal ini adalah agar melakukan rekonsiliasi ajaran nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya setempat dengan tujuan agar budaya tersebut tidak hilang. Dapat dilihat bahwa, dalam hal ini konsep pribumisasi Islam yang beliau gagas merupakan suatu kebutuhan dengan upaya agar dapat hidup dengan polarisasi antaraagamadengan budaya setempat. Dalam implimentasinya bahwa pribumisasi Islam ini harus tetap pada sifat Islamnya, bukan tujuan untuk

<sup>513</sup>A. Muhaimin Iskandar, *Islam dan Kebangkitan ...*, h. 12

sinkretisme. Jadi disini Gus Dur bertujuan **5**ar pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat untuk **mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama**. Jadi, dengan demikian konsep inilah yang menjadi pondasi dalam partai yang beliau kendarai dalam berpolitik sehingga tidak mengherankan jika dalam wadah partai beliau banyak warna yang tanpak. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa dalam merumuskan merubah hukum agama bukan berarti merubah hukum itu sendiri.

Hampir bisa dikatakan bahwa kaum Nahdliyin, terkhusus orang yang bergabung dengan Ormas NU dan PKB, akan menanggung akibat negatif sesudah tergesernya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari jabatan kepresidenan. PKB layaknya seperti ayam yang telah kehilangan induknya sampai-sampai langkah yang diambil terkesan bimbang dan panik.kebingungan itu seharusnya tidak perlu terdengar keluar, sangat terlihat memalukan dan tidak etis membuka diri sendiri di hadapan masyarakat banyak.

Pencabutan Motori Abdul Djalil (MAD) selaku ketua umum DPP PKB dan Abdul Kholiq (fungsionaris PKB), kesudahannya tersebar sampai menerbitkan dua kubu yang melibatkan langsung dalam konflik PKB,yaitu kubu tandingan bentukan MAD melawan kubu formal yang dipimpin Alwi Shihab.

Sekalipun akhirnya PKB mengikuti jejak MAD, yang mengakui kebenaran hasil SI MPR dan melelehkan pembekuan FKB di DPR dan MPR, kedua kubu tetap bersikeras pada pendapat masing-masing. Kubu MPR menggertak dan menggelar perundingan yang luar biasa pada oktober mendatang sebagai bandingan Mukernas PKB yang telah berakhir.

Setelah Gus Dur tergeser, sepatutnya PBNU dan PKB dengan jujur “ makna jujur terhadap diri sendiri”, terhadap umat Nahdliyin, terhadap seluruh bangsa Indonesia, dan jujur kepada Allah SWT melakukan intropeksi diri, rekonsiliasi dalam rangka melaksanakan konsolidasi, baik kedalam maupun keluar.dengan melakukan autokritik akan diperoleh hasil yang dapat dijadikan pedoman untuk mengadakan perbaikan-perbaikan.

Terdapat dua masalah pokok dalam rangka melaksanakan autokritik tersebut.*Pertama*, susah dilawan bahwa para ulama NU telah mempersiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik Gus Dur, bahkan para ulama NU ketika berkumpul di suatu ponpes di kawasan Tangerang yang memaksa agar Presiden Gus Dur segera mengeluarkan Dekrit. Jatuhnya Soeharto menjadikan pemerintahan yang dipimpinnya tidak lagi memiliki legitimasi sospol yang membuat produk-produknya tidak lagi sah. Sistem kepartaian yang sederhana sudah tidak lagi menjadi sistem multipartai. Yang diantaranya memiliki ormas Onderbouw yang menjaring masyarakat bawah. Apabila ditinjau dari konteks sosial politik seharusnya Khittah NU sudah



tidak relevan, tetapi terdapat nilai dan norma yang terdapat di dalamnya yang bermanfaat sepanjang masa. Yaitu berpolitik merupakan hak individu setiap warga *Nahdliyin* dan amanah untuk memegang teguh akhlakul karimah bila mempergunakan hak berpolitiknya tersebut. Para ulama NU harus mengambil prakarsa sebagai peneguh dalam proses autokritik dan istilah dalam rangka konsolidasi Syuriah PBNU, Dewan Syura PKB, ditambah para ulama khos dan ulama-ulama sepuh lainnya.

Dalam konteks politik, akhir-akhir ini politik identitas kelihatannya menguat. Dalam beberapa kali Pemilu yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada fenomena yang sepertinya berlaku umum di negara ini. Dalam Pemilu itu, calon-calon Kepala Daerah yang biasanya diwakili oleh tim suksesnya melakukan kampanye justru dengan menguatkan identitasnya, baik dari segi agama maupun etnis. Para pemilih pun cenderung memilih berdasarkan persamaan identitas dengannya. Begitu juga pemilihan calon anggota legislatif.

*Kedua*, Gus Dur ingin memilih salah satu dari dua peran, sebagai aktor politik dan sebagai pemikir. Kedua peran itu tidak bisa di satukan dalam diri seorang pemimpin, termasuk pada Gus Dur, penyatuan dua peran tersebut akan menghasilkan racun dan situasi dilematis.

Beberapa contoh dapat dilihat, Bung Karno yang berpendapat bahwa konfrontasi terhadap Malaysia harus berjalan sampai revolusi selesai. Tapi realitas politik memperlihatkan kebanggaan rakyat untuk permusuhan dengan sesama saudara sendiri. Hasan Al-Bana pemikir pembaru Islam di Mesir pada akhirnya di tembak mati oleh seorang yang tidak dikenal itu karena menggabungkan kedua peran tersebut.<sup>514</sup>

Wacana tentang agama dalam pemerintahan Gus Dur, seolah-olah tidak akan pernah ada habisnya. Perbincangan hal tersebut, akan senantiasa aktual dan faktual seiring dengan banyaknya tokoh-tokoh pemikiran keagamaan yang *notebena* lahir dari dunia pesantren, seperti Gus Dur. Dalam bahasa Arab modern, *din* (bentuk plur alnya adalah *adyan*) yang berarti “agama”. Di lihat dari asal katanya, *din* berarti “tunduk”, “patuh”, atau “taat”.

Pada saat ini tampak sangat erat hubungan agama dan proses demokratisasi. Dimana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Di Indonesia juga demikian, para pemimpin gerakan agama silih berganti memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan kemudian demokrasi, ketika sistem pemerintahan semakin lama menjadi semakin otoriter, berbagai kegiatan dikembangkan di kalangan agama yang dimulai dari tingkat paling bawah, penumbuhan masyarakat yang demokratis.

<sup>514</sup>M. Rofiq Madji. *Jurus Dewa Mabuk ala Gus Dur. Kumpulan rekam jejak KH. Abdurrahman Wahid di Media Massa*. Jawa Timur; Pustaka Tebuireng 2012. h.438

17

Dari mulai kebebasan berpendapat hingga masalah pencemaran lingkungan secara massif, gerakan agama langsung terlibat dalam penegakan demokrasi. Banyak lembaga keagamaan berkiprah untuk meneliti dan mengkaji asal-usul sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis.<sup>5</sup>

Dalam pandangan Gus Dur, untuk dapat melakukan transformasi interen, agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, persamaan kedudukan semua manusia di muka Undang-Undang dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui upaya ini, tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal yang akan mendudukan hubungan antar agama pada sebuah tataran baru. Dan tataran baru itulah adalah tahap pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu dalam bentuknya yang paling konkret seperti penanggulangan kemiskinan, penegakkan kedaulatan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila sebuah agama telah memasuki tataran baru itu, barulah ia berfungsi melakukan pembebasan (*tahrir, liberation*).<sup>515</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, nama Abdurrahman wahid atau nama akrabnya Gus Dur, sangat populer di kalangan tokoh-tokoh agama, baik Islam atau non-Islam. Gus Dur adalah orang yang cerdas dan terus terang, namun tidak jarang kecerdasannya itu justru mengantarkannya pada kesulitan. Walaupun demikian, pemikirannya dalam hal keagamaan dan juga politiknya, telah berkembang konsisten selama lebih dari tiga dekade, dan yang lebih penting lagi, Gus Dur hidup dan bertindak secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada keyakinan keagamaannya itu.

Ini artinya, sepiantas memang terkadang sulit membaca apa yang dilakukannya pada suatu saat,<sup>14</sup> tapi kalau diletakkan sikapnya dalam konteks yang lebih luas, Gus Dur adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal, yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.

Sebelum Gus Dur menjadi Presiden, ia mempunyai sikap yang toleran terhadap semua agama. Kebenaran “mutlak” hanyalah milik Allah, kebenaran yang ada pada manusia adalah kebenaran “relatif”. Pandangan seperti itu menjadikan Gus Dur berjiwa toleran terhadap agama dan keyakinan apapun, apalagi agama-agama samawi. Gus Dur berkeyakinan bahwa agama dan keyakinan tidak bisa dipaksakan.<sup>516</sup>

9

<sup>515</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, Cet I, Jakarta : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 1999, h.168

<sup>516</sup> Nur alam Bakhtir, K.H.A, *99 Keistimewaan Gus Dur*, Cet. I, Jakarta : Kultura (Gaung Persada Press Group), 2008, h. 23

Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. Marwan Dasopang, Anggota DPR RI Fraksi PKB, beliau mengatakan:

*“Ketika PKB dirumuskan menghindari istilah-istilah yang berbau agama, sehingga dari situ nanti bias kita menangkap sebetulnya arahnya kemana. Kenapa menghindari istilah agama? Umpamanya begini, dulu PKB itu mau di sebutkan Partai Kebangkitan Umat, tapi umat itu ada bahasa agama. Ummatan. Ada bermacam-macam sehingga Gusdur menyampaikan tidak penting kalau mengaitkan politik dengan agama, apa yang ditangkap dari situ, Gusdur menghindari memformalkan agama sebagai institusi negara dengan politik. Kenapa begitu? Karna jika agama yang di formalkan sebagai institusi Negara dan politik itu nanti akan gaduh, karna pemahaman terhadap agama ini sepertinya itu punya kebebasan, itu ditandai baik dari segi fiqih, tasawuf itu banyak pandangan, ulama-ulama punya pandangan masing-masing yang tidak bisa disamakan maka kita mengenali beberapa ulama-ulama fiqih yang antara satu ulama dengan ulama yang lain sebetulnya guru sama murid tapi melahirkan pemikiran yang berbeda, kalau agama ini dijadikan sebagai institusi itu akan kacau, karna yang menjadi landasan itu yang mana? Sehingga akan muncul kegaduhan karena bukan paham yang dijadikan sebagai institusi. Maka negara harus membiarkan agama cukup sebagai pembimbing moral.”<sup>517</sup>*

Berdasarkan pandangan ini, Gus Dur tidak setuju jika Islam dijadikan sebagai ideologi alternatif. Untuk itu, dalam formasi tatanan sosial dan kultural masyarakat, Islam harus ditampilkan atau dijadikan sebagai unsur yang komplementer. Jika Islam dijadikan sebagai ideologi dalam membangun negara, maka akan memberi kesan bahwa negara memiliki wajah tunggal. Ini bisa menjadi jalan bagi perpecahan di tengah-tengah masyarakat,<sup>518</sup> yang konsekuensinya berdampak pada kekakuan terhadap perkembangan masyarakat Islam. Alih-alih memperlihatkan wajah Islam yang ramah, kondisi akan bahkan memperlihatkan moral umat Islam dalam perspektif sosial semakin jauh dari tuntunan Islam<sup>519</sup>. Pernyataan ini tampaknya tidak berlebihan, karena ajaran dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk dapat memberikan rahmat bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan alam. Jadi, *rahmatan lil'alamin* tidak akan tercapai jika umat Islam tidak membuka diri terhadap perjalanan masa, dan tidak terbuka terhadap keragaman.

<sup>517</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Marwan Dasopang, Anggota DPR RI Fraksi PKB, pada tanggal 02 Desember 2019.

<sup>518</sup>Tafik Ahmad, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 174.

<sup>519</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 32.



Dengan demikian, melalui peran umat Islam dalam perpolitikan dengan konsep pribumisasi Islam maka akan dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan. Dalam perspektif budaya Gus Dur memberikan kritik terhadap konsep Arabisasi, hal ini karena orang yang terlalu fanatik keislamannya dalam konsep budaya, seakan-akan jika tidak kearaban seolah-olah menjadi tidak Islami atau ke-Islaman seseorang akan berkurang karenanya.<sup>520</sup> Hal seperti demikian tersebut karena memberikan rasa kurang percaya diri terhadap menghadapi kemajuan dari negeri Barat yang menganut paham sekuler. Maka dalam benak umat Islam, langkahnya adalah mengkonstruksi konsep Arabisasi dalam kehidupan yang diyakini sebagai langkah untuk Islamisasi. Perlu dipahami bahwa Arabisasi bukanlah Islamisasi. Maka dalam hal ini, Wahyu Allah swt agar dipahami dengan membuat suatu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa untuk menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat factor-faktor konstektualnya, termasuk dalam hal ini dilihat dalam kesadaran hukum dalam bernegara.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan kepercayaan mereka yang beragama Konghucu lewat Keputusan Presiden No. 6 th. 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengusahakan mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama, tetapi di sisi lain ia justru mengambil alih sikap yang berseberangan bersama dengan sikap partai politik pendukungnya lebih-lebih dalam kasus komunisme dan kasus Israel. Presiden Abdurrahman Wahid sangat memahami pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas, tetapi toleransinya yang tinggi terhadap hal ini justru merupakan salah satu titik awal munculnya beragam aksi penolakan pada kebijakan dan gagasan-gagasannya, termasuk ketika Gus Dur melontarkan ide kontroversial yaitu ide untuk mencabut Tap.MPRS No.XXV th. 1966 tentang larangan pada Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.<sup>521</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak prinsipil manusia itulah yang membuat Gus Dur sangat menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama yang diwujudkan dengan melegalisasi Konghucu menjadi agama, meskipun di negeri asalnya Konghucu hanya dianggap

15

<sup>521</sup> Ahmad Nurcholis, *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 196



falsafah hidup. Menurut Gus Dur penganut Konghucu, yang pada umumnya etnis Tionghoa di Indonesia memperlakukannya sebagai agama, karena itu mereka harus juga diberi kebebasan untuk menganutnya. Pembelaannya terhadap etnis Tionghoa diwujudkan dalam bentuk Keppres No.6 tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati dengan menjadikan Imlek sebagai hari besar agama di Indonesia, dan ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keppres No. 19 tahun 2002.<sup>522</sup>

Dalam hal ini, hadirnya Gus Dur memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia dan membawa konsep keIslaman dengan nilai kontekstualnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang banyak berkiprah dalam bidang perpolitikan di Indonesia pasca era reformasi, bahkan sempat berkuasa dalam pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahannya beliau menerapkan sistem demokrasi dengan tujuan membuat seluruh warga negara berdaya tanpa dibedakan. Gus Dur memberikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi dan pluralisme dalam kebersamaan. Pandangannya tentang masalah-masalah nasional selalu menjadi perdebatan dan mengundang kontroversi, baik di bidang pendidikan, kebangsaan, persatuan, pluralitas, keagamaan, hingga hal-hal kecil.

Sejalan dengan pemikiran dan keinginannya untuk menegakkan demokrasi, maka Gus Dur juga berkiprah dalam persoalan keagamaan, yang dilakukannya baik sebagai pribadi maupun sebagai Nahdliyin, bahkan pemimpin NU. Bersama Nahdlatul Ulama (NU), kiprahnya di bidang keagamaan pada akhirnya mendorongnya untuk terlibat politik praktis. Gus Dur sebagai politisi dilakoninya sebagai anggota MPR, terlibat aktif di Partai Politik (PPP), sampai kemudian mendirikan PKB, tetapi aktivitas politik yang dilakukannya bukan berdiri sendiri. Pada saat yang sama, itu berimbas kepada gerakan aktivitasnya di bidang keagamaan.

Untuk melihat pemikiran dan aktivitasnya di bidang keagamaan, perlu dibicarakan lebih dulu tentang NU, karena dengan organisasi inilah implementasi pemikiran demokrasi di bidang keagamaan dilakukannya. Jika ingin melihat tempat Nahdlatul Ulama atau (NU) dalam konfigurasi kelompok-kelompok strategi bangsa saat ini, NU merupakan bagian dari organisasi atau gerakan Islam (*Islamic movement*). Oleh sebab itu kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana nasib gerakan Islam di bawah rezim Orde Baru sejauh usia dua puluh lima tahun yang pertama. Pengamatan terhadap konstelasi sosial politik pada era itu akan menunjukkan sebuah interaksi yang sangat menarik jika di lihat dari sudut pandang proses perkembangan dan pemisahan berbagai isu utama yang timbul. Dari berbagai gambaran yang timbul dari dinamika hubungan atau gerakan-gerakan Islam dan

<sup>522</sup>Ahmad Nurcholish, *Peace Education...*, h. 202

pemerintahan , hubungan internal antara gerakan Islam sendiri, hubungan eksternal dengan gerakan-gerakan Islam dari luar negeri, dan hubungan gerakan-gerakan non-pemerintahan didalam negari maupun diluar negeri.

Tetapi sebelum memasuki berbagai sudut pandang tinjauan seperti itu, terlebih dahulu mengenal perkembangan dasar dalam hubungan Islam dan negara dalam masa Orde baru. Ada sebuah gambaran mengatakan sangat menarik di bahas dalam kurun waktu tersebut, yaitu adanya perkembangan yang berlawanan arah sebagai akibat ambivalensi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Islam. Partai-partai politik yang bedasarkan aliran seperti NU, PSII, Perti, Parmusi (yang menghasilkan penggabungan partai-partai islam itu ke dalam partai persatuan pembangunan). dapat dilihat sebagai kekuatan politik formal Islam bersama golonga lain habis tergusur dari panggung politik nasional. Hal ini perlu dilihat, karena sebenarnya implementasi pemikiran demokrasi Gus Dur berkaitan antara bidang politik dengan keagamaan.

Demokrasi yang dilakukan selama Orde Baru ialah demokrasi semu, karena pilar-pilar demokrasi tidak bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Yang artinya, keberadaan pilar-pilar demokrasi tidak menjamin terlaksananya demokrasi di suatu Negara. Negara disebutkan demokratis apabila semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dan luas dalam proses terbentuknya demokrasi.

Tetapi saat terlihat terdapat gerakan-gerakan Islam sebagai politik informal juga berkembang dalam masa yang sedikit lebih lama yaitu sekitar 20 tahun, karena memerlukan legitimasi bagi program-program pembangunan, pemerintah Orde baru memperoleh legitimasi dari berbagai pihak termasuk dalam gerakan-gerakan islam. Responsasi yang kontruksi dari gerakan-gerakat islam telah memungkinkan tumbuhnya ketergantungan persial di pihak memungkinkan tumbuhnya ketergantungan parsial di pihak pemerintahan kepada gerakan-gerakan itu, seperti dalam masalah keluarga berencana, lingkungan hidup, perbaikan gizi keluarga, pemeliharaan stabil keadaan sosial politik dan perkembangan hukum nasional. Ketergantunga itu menjadi semakin nyata dengan terjadinya dinamika intensif dalam hubungan internal pemerintahan antara berbagai pusat.

Akibat dan ambivalensi itu dapat dilihat sekrang meskipun disatu sisi terjadi penipisan kelompok formal politik Islam, namun di pihak lain kekuatan kepemimpinan non-formal Islam justru semakin meningkat, karena ia kemudian dapat berada di dalam sistem, sekaligus sebagai kotektor diluar sistem. Ini meupakan proses yang tidak terduga sebelumnya kekuatan gerakan Islam, meskipun tidak formal sudah imbang dengan ABRI. Terlepas dari itu, dinamika yang terjadi dalam perjalanan menuju posisi inilah yang menarik untuk di simak. Karena didalamnya tersembunyi pola-pola yang digunakan untuk memproyeksikan perkembangan politik berbagai gerakan

Islam di masa datang. Juga akan terungkap strategi yang di pakai oleh pihak-pihak yang saling berbeda, kalau tidak di katakan saling berlawanan di antara berbagai gerakan islam sendiri. Atau lebih tepat lagi ia juga akan menampilkan mana yang mengembangkan dengan sadar strategi tertentu dan mana yang hanya terbawa arus tanpa memiliki strategi apapun.<sup>523</sup>

Dapat dikatakan bahwa Gus Dur merupakan seorang ulama pluralis, neomodernis. Pada dasarnya tujuan utama Gus Dur tampil sebagai actor utama dalam perpolitikan di Indonesia untuk mengajarkan umat Islam bahwa dalam menjalan nilai-nilai ajaran Islam perlu suatu aturan yang dapat mengayomi semua umat. Dalam hal ini, melalui pendewasaan politik memberikan jalan agar kebijakan dapat diambil dengan memainkan peran sebagai aktor politik.<sup>524</sup>

Gus Dur merupakan sosok pemikir Islam aktivis dan pejuang yang tampat ragu berjuang untuk tegakkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan individu dan basis sosial politik yang jelas yaitu NU dimana semua itu menjadikan disegani oleh kekuatan konverensif yang berupa mengganggu dan menghalangnya.

Pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap Gus Dur sangat lah bagus orang-orang dengan latar belang yang berbeda dan tanpa tau dan mengenal Gus Dur secara pribadi. Bagi mereka Gus Dur ialah tokoh pembela kaum minoritas, Gus Dur pejuang islam moderat dan pejuang demokrasi, bagi masyarakat ia adalah seorang tokoh besar yang mendunia. Perkembangan Islam di Indonesia Toleransi terhadap keyakinan lain, perlindungan terhadap kaum-kaum minoritas dan demokrasi juga merupakan topik yang bisa membuat bicara sampai berjam-jam.

Gus Dur tidak pernah membedakan tingkatan sosial. Warga NU yang menikah atau meninggal dunia dicoba untuk disembahyangkan. Meskipun ia harus masuk ke pemukiman yang sempit atupun menempuh perjalanan berjam-jam.

Pandangan Luthfi Hasan Ishaq terhadap seorang Gus Dur merupakan seorang ulama tokoh nasional yang cukup berani dan terbuka dalam menyatakan berbagai pandangan tentang Islam dan umat Islam. Dalam pandangannya yang sangat beragam itu, walaupun berbeda PKS cukup bisa memahaminya. Pandangannya yang sangat beragam tentang Islam dan umat Islam itu lebih dihargai dan cukup bisa kami pahami.

Ketua GERINDRA (Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya sangat dekat dengan

<sup>523</sup>Abdurrahman **22**hid, *Islam Kosmopolitan...*, h.316

<sup>524</sup>Gainun Naim. *Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008), h. 245

beliau, bahkan bisa dikatakan sejak masih kecil. Tempat tinggal Prabowo dengan Gus Dur sangatlah dekat. Sebagai guru bangsa beliau sebagai pengayom bagi semua unsur di Indonesia. Pemikirannya sangat berani walaupun kadang sulit diikuti.<sup>525</sup>

Pencapaian pemerintahan Gus Dur dalam bidang keagamaan yang paling krusial, tetapi sekaligus kontroversial adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan kepercayaan mereka yang beragama Konghucu lewat Keputusan Presiden No. 6 th. 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Gus Dur mengusahakan kurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama tetapi di segi lain ia justru mengambil alih sikap yang berseberangan bersama dengan sikap partai politik pendukungnya lebih-lebih dalam kasus komunisme dan kasus Israel. Sikap Presiden Gus Dur yang condong menolong pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak group minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya beragam aksi penolakan pada kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam kasus komunisme, Presiden Gus Dur melontarkan ide kontroversial yaitu ide untuk mencabut Tap.MPRS No.XXV th. 1966 tentang larangan pada Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

Gagasan berikut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi berikut mengakibatkan Presiden Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa rancangan dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR th. 2000.

Selain kasus komunisme, benturan Presiden Gus Dur bersama dengan organisasi masa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya selagi ia terpilih menjadi presiden adalah gagasannya untuk terhubung pertalian dagang bersama dengan Israel. Gagasannya berikut mendapat tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka pertalian dagang dengan Israel serupa saja bersama dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyerukan supaya penjajahan di atas dunia dihapuskan.

Bagi kelompok seperti minoritas keturunan Tionghoa, Gus Dur juga memberi ruang hidup yang lebih terhormat sebagai bagian dari bangsa

---

<sup>525</sup>Zuhairi Miswari. *Gus Dur Santri Par Excellerence*. Jakarta, PT.Kompas Media Nusantara;2010. h.30



Indonesia. Pada era Gus Dur kebudayaan Tionghoa diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Tak ada lagi dikotongi dikalangan masyarakat masyarakat Tionghoa di Indonesia perihal pilihan antara mengambil pendekatan 'Asimilasi' atau 'Integrasi' seperti pada era Presiden Soekarno. Berbagai aksara Cina, yang pada era Presiden Soeharto sangat ditabukan kecuali untuk surat kabar Indonesia beraksara Cina, tidak ikut mengalami 'penghitaman' kebalik oleh kejaksaan agung.

Gus Dur juga melindungi kaum-kaum minoritas yang menganut agama atau kepercayaan di luar kelompok aliran utama agama-agama besar. Tidak mengherankan jika Gus Dur melindungi kaum Ahmadiyah yang sering di bawa-baea dan tidak di beri ruang hidup dan berkembang oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menginginkan 'pemurnian agama'.

Suatu hal amat kontroversial, Gus Dur bahkan menjadi anggota masyarakat epistemik agama Yahudi. bagi Gus Dur, mereka yang menganut agama samawi keturunan Nabi Ibrahim adalah bersaudara. Ini sesuai dengan rukun Iman, Islam yang mengakui kitab-kitab Allah dari Turan, Zabur, Injil sampai Al-Qur'an. Ini juga sesuai dengan makna dari surat Al-Kafirun 'bagimu agamamu bagiku agamaku', tanpa harus mengkafir-kafirkan mereka yang tidak menganut agama Islam.<sup>526</sup>

Kejatuhan pemerintahan Presiden Gus Dur tidak lepas dari akumulasi beragam ide dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari beragam organisasi massa dan partai politik Islam yang pada mulanya mendukungnya kalau NU dan PKB. Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Gus Dur hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS tentang pelarangan komunisme dan ide pembukaan pertalian dagang bersama dengan Israel, pertalian Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan DPR dan bahkan bersama dengan sebagian menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan berikut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa mengimbulkannya info yang dapat diterima oleh DPR.

Fundamentalisme yang populer belakangan ini di percayai tidak bertahan lama. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok radikal agama ini dinilai Gus Dur hanya memanfaatkan waktu yang tersisa saat memanfaatkan dana dari luar negeri. Radikalisme itu tidak akan mengancam pluralisme selama rakyat Indonesia masih meyakini UUD 1945.

Bagi kalangan minoritas, Gus Dur dianggap sebagai pembela utama eksistensi mereka. Masyarakat Papua, etnis Tionghoa, atau umat Nasrani

<sup>526</sup>A.Efenndi Choirie dkk. *Sejuta Gelar...*, h.164

menganggap Gus Dur sebagai pembela di tengah tentangan dan ancaman politis masyarakat dan Negara. Menurut Gus Dur pembelaan terhadap kelompok minoritas bukan perjuangan gampang. Oleh sebab itu kelompok minoritas yang selama ini tersisih harus terus diperjuangkan sesuai dengan amanat UUD 1995. Mereka kelompok minoritas hanya ingin diperlakukan seperti manusia. UUD 1995 telah menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa di lihat dari pandangan agama, etnis maupun agama.

Memang mayoritas bangsa Indonesia yang notabene nya beragama islam masih di cengkam oleh kemiskinan dan kebodohan sehingga mudah di pengaruhi untuk berpindah ke agama lain secara mudah. Keadaan logis yang kenyataannya itu sebanya adalah keharusan bagi gerakan islam untuk memajukan umat mereka.<sup>527</sup>

### C. Implementasi Pada Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Posisi kontroversial Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sosok yang fenomenal seperti tidak ada habis-habisnya di sorot publik. Begitulah pesan yang bisa di ambil dari antusiasnya keramaian masyarakat kepda dirinya, bebera saat sesudah menyatakan resmi keluar dari istana kepresidenan.

Sebagian masyarakat antara lain diwakili Goenawan Mohammad bahkan secara antusias menyambut keluarganya dari 'kerangkeng struktural' kembali habitat kultural dengan menyatakan, dilengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan misal menjadi bisa momentum simbolis untuk memberdayakan atau membangun kembali perjuangan rakyat yang otentik, yaitu sebuah perjuangan yang benar-benar lahir apresiasi sejati rakyat, bukan hanya sekedar perjuangan semua yang mengatas namakan rakyat seperti yang sering di lontarkan dalam banyak retorika elit politik selama ini .

Proses kelengseran dirinya sebagai presiden bukanlah sesuatu yang memalukan sehingga tidak usah menundukkan kepala ketika keluar dari istana namun malah bisa menjadi semacam *blessing in disguise*. Dia tidak lagi disibukkan dengan urusan Birokrasi Formalistik, dan leluasa meneruskan cita-cita perjuangan Demokrasi, tentu dengan gaya dan pola yang telah lama di bangun selama ini sebagai sosok pejuang demokrat berbasis kultural.

Menurut kolumnis Sumanto al- Qurtuby, Gus Dur ialah seorang pemimpin, meminjam baha yang tertuang dalam Serat Wulangreh, yang memiliki karakter seperti samudra yang luas. Gus Dur seperti semar dalam

---

<sup>527</sup> Arief Nurrachman, *Islam Kultur Ala Gus Dur*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,2020), h.72

seni perwayangan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada setiap manusia dari berbagai golongan, kelas dan ideology apapun.<sup>528</sup>

Dalam pandangan Maman Imanulhaq Faqih, selaku orang yang sering dekat dengan beliau. Ada tiga hal dari sekian banyak hal yang ajarkan Gus Dur kepada kita demi tegaknya kebangsaan dan kemanusiaan. *Pertama*, Gus Dur mengajarkan tentang demokrasi dan keadilan sosial. Namun, dalam menjalankan demokrasi, Gus Dur berpesan tidak hanya berhenti pada tataran procedural, tetapi harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. *Kedua*, Gus Dur mengajarkan tentang pluralism (kebhinekaan). Sebagaimana yang kita ketahui bangsa ini terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama. Karena itu, sejak semula baksa ini dibangun atas dasar kebhinekaan tersebut. Bagi Gus Dur kebhinekaan terus terjaga, konstitusi yang menjamin kebebasan dan keragaman harus di tegakkan. Dengan adanya konstitusi yang menjamin keragaman, pihak-pihak mayoritas yang sering melaksanakan diskriminasi tidak akan terjadi lagi. *Ketiga*, Gus Dur mengajarkan tentang perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan bangsa tidak akan pernah terwujud tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Gus Dur, agama Islam ialah agama yang melektakkan nilai-nilai kemanusiaan itu, Islam bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lain untuk membangun persatuan bangsa.<sup>529</sup>

Salah satu diantara sekian banyak harapan besar yang ingin diletakkan banyak orang ke pundak Gus Dur dalam proses demokratisasi adalah kemampuan potensialnya untuk membangun gerakan oposisi yang efektif terhadap pemerintah. Sebagaimana diakui banyak kalangan, track record Gus Dur selama ini terutama sebelum menjabat sebagai presiden adalah sosok yang identik sebagai tokoh oposan yang cukup disegani, terutama ketika sikap oposisinya itu dilakukan dari luar ranah kenegaraan.

Masyarakat masih ingat betul bagaimana kekuatan oposisi Gus Dur pada zaman rezim Soeharto dan BJ. Habibie. Setelah diperhitungkan karena selain kapasitas pribadi Gus Dur yang secara Intelektual, ia juga mendapat dukungan yang cukup signifikan, baik dari basis massanya secara luas maupun dari kalangan LSM pada lingkungan terbatas. Selain itu, masyarakat saat itu juga begitu percaya kepada Gus Dur, terutama kepada konsistensinya memerangnya segala tindakan yang dianggap bisa berpotensi membunuh benih-benih demokrasi, seperti sikap sektarianisme, militerisme, tirani mayoritas atas minoritas, politisasi agama pada wilayah kenegaraan, dll.

Pada akhirnya, waktu itu kebanyakan orang begitu percaya untuk menempatkan Gus Dur sebagai figur yang paling pantas ditempatkan di

<sup>528</sup>Sumanto Al-Qurtuby, *Semar Dadi Ratu: Mengenang Gus Dur Kala Jadi Presiden* (Semarang: eLSA, 2010), h. 177-180

<sup>529</sup>Maman Imanulhaq Faqih, *Fatwa dan Canda Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010) h. x-xiii

2 gerbang depan oposisi sebagai penimbang sekaligus pengontrol pemerintah. Douglas E. Ramage (1995:45) merangkum posisi Gus Dur saat itu sebagai seorang oposan yang potensial dengan menyatakan, *'Wahid is not only leader of NU (the largest non-governmental islamic organization in the world) but he is also a provocative religious and political thinker and a leading proponent of secular democracy in indonesia'*.

Gerakan oposisi menjadi hanya sekedar gerakan parsial dan seporadis. Bahkan kalangan LSM yang seharusnya menjadi penerus perjuangan Gus Dur sebagai fasilitator oposisi nonstruktural seperti tidak bisa meneruskan tradisi oposisi yang dirintis selam ini oleh Gus Dur bahkan pada titik tertentu menjadi mitra kerja Gus Dur di pemeritahan. Setelah Gus Dur kembali ke habitatnya harapan itu muncul kembali, dengan simbolis itu sudah dilakukan dengan banyaknya tokoh LKS maupun masyarakat informal yang sowan dan menyetarakatan Gus Dur pada detik-dekik terakhir pemeritahannya. Sebuah catatan penting tampaknya harus mengemukakan berkaitan dengan menempatkan Gus Dur kembali sbagai tokoh oposan jangan diniatkan sbagai dari skenario 'politik balas dendam' terhadap lawan-lawan politiknya yang sedang berkuasa saat ini, termasuk didalamnya pihak-pihak yang terlibat skenario pelengseran dirinya.

Gerakan oposisi Gus Dur harus ditempatkan sebagai oposisi sejati, yang tidak hanya punya target kekuasaan semata-mata, tetapi ia harus ditempatkan dalam bingkai lebih besar, yaitu membangun sebuah mekanisme fungsi control terhadap Negara yang memang punya kecenderungan menyimpang. Dalam narasi besar pergerakan demokrasi, oposisi yang dirintis Gus Dur ialah sebuah basis pergerakan yang mencoba melakukan stimulasi edukatif kepada masyarakat agar terbiasa dengan tradisi berdemokrasi yang fair dan elegan.

Harapan seperti ini terasa wajar dibebankan kepada Gus Dur mengingat kita tidak dapat berharap tertalu banyak kepada elite politik lain yang sedang ada di lingkaran dalam struktur kekuasaan, dengan memperhatikan fenomena betapa asyiknya waktu mereka dihabiskan untuk urusan bagi-bagi kue kekuasaan.<sup>530</sup>

Dilihat dari sejarah perjalanan hidupnya ada tiga kontribusi yang di lakukan oleh Gus Dur bagi kemajuan umat islam dan bangsa Indonesia: *Pertama*, Gus Dur menjadi pelopor bagi pemecah kebekuan befikir umat islam indonesia. Pola pikir Gus Dur tentang modernisasi telah menjadi energi utama dalam melawan kemudahan berfikir. Gerakan pemikiran ini memicu perkembangan dialektika berfikir yang sangat produktif dikalangan umat islam Indoneisa. Diaeletika berfikir tersebut

86  
<sup>530</sup>Abdul Murnir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*, ( Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara;2010) h. 276



masuk terus berlangsung hingga saat ini. Gebrakan-gebrakan pemikiran Gus Dur terbukti mampu membangkitkan potensi berfikir umat Islam Indonesia. *Kedua*, gagasan-gagasan Gus Dur secara tidak langsung juga telah membuka jalan baru lagi perjuangan umat Islam Indonesia sehingga tidak lagi teroukai pada satu jalan yang selama ini ditempuh yaitu politik. *Ketiga*, gagasan-gagasan Gus Dur juga memiliki kontribusi dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, toleransi, oposisi, musyawarah, suatu masyarakat madani dan lain-lain merupakan intelektual yang maha besar bagi proses penyebaran ide-ide dan perkembangan demokrasi di Indonesia.<sup>531</sup>

Akhirnya di akhir tulisan ini, penulis akan mengutip kata-kata Gus Dur berkaitan dengan demokrasi di Negara tercinta ini:

“Kita tidak akan menjadi bangsa besar dan kuat tanpa memiliki Negara besar, makmur, berkeadilan, dan demokratis. Hanya dengan keuletan dan ketahanan moral membuat diri berani menghadapi aneka kekuatan status quo. Mengembangkan sikap berani seperti itu mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan”.<sup>532</sup>

---

<sup>531</sup>A.Efenndi Choirie dkk. Sejuta gelar untuk Gus Dur. PT.Nawa Mulia Nusantara, Jakarta;2010 , h.156

<sup>532</sup>M.Sulton Fatoni & Wijdan Fr, *The Wisdom of Gus Dur: Butir-butir Kearifan Sang Waskita*, (Depok: Imania, 2014), h. 163

## BAB V IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DEMOKRASI ISLAMI ABDURRAHMAN WAHID

### A. Implementasi pada Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Gus Dur adalah salah seorang dari banyak orang NU (Nahdlatul Ulama) yang mempunyai kapabilitas personal mumpuni dalam banyak bidang, cukup mewakili pandangan dunia (*world-view*) dari kultur NU. Gus Dur bisa dikatakan sebagai sosok multidimensi yang melampaui sekaligus mengayomi beraneka ragam identitas dan pemikiran. Bagi *nahdliyin*, Gus Dur adalah figur yang mempunyai watak mengayomi, membimbing, serta memperteguh kasih sayang atas sesama.

Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak lepas dari keputusan MPR yang menampik laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat perlindungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Gus Dur mengungguli calon presiden lain yaitu Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang ditunaikan lewat pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden sesudah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden lewat pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi dimulai bersama dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang pada mulanya mengusung Gus Dur menjadi presiden yaitu PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P.

Hal senada diungkapkan Bapak Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman RI, penulis buku “Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka”, beliau mengatakan:

*Awal mula Abdurrahman Wahid melanjutkan cita-cita reformasi dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang pada mulanya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yaitu PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P”.*

Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yaitu Departemen Penerangan dan

Departemen Sosial bersama dengan alasan perampangan susunan pemerintahan. Selain itu, pemerintah menilai bahwa program-program kedua departemen tersebut bisa ditangani oleh masyarakat sendiri, karenanya harus diserahkan kepada masyarakat.

Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa lebih-lebih media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Seiring dengan pembubaran kedua departemen tersebut, Gus Dur beserta jajarannya membentuk departemen baru, yaitu departemen Eksplorasi Laut lewat Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Penjelasan tentang tugas dan kegunaan termasuk lapisan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000.

Pembentukan departemen Kelautan dan Perikanan ini dianggap mempunyai nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar justru belum mendapat perhatian yang layak pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, beragam aktivitas ekonomi yang tentang segera bersama dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut lewat pemanfaatan bioteknologi.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen pada UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen berikut tentang hirarki pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus membuat perubahan pelaksanaan proses pemilihan anggota legislatif. Pasal 18 amandemen ini menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kotamemiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya tentang pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati secara demokratis. Pasal ini dipertegas lagi di dalam Pasal 19 dalam Perubahan UUD 1945 (amandemen) yang juga mengatur soal pemilihan umum untuk DPR.

Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan termasuk menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini sering dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan lebih-lebih dalam melakukan tindakan represif pada gerakan demokrasi. Pemisahan TNI dan Polri termasuk merupakan upaya untuk mengembalikan kegunaan masing-

masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam merawat kedaulatan lokasi Republik Indonesia dari ancaman kapabilitas asing, selagi Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam merawat keamanan dan ketertiban.

Masalah lain yang menjadi pekerjaan berat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk selesaikan beragam kasus KKN yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN yang dituduhkan kepada Soeharto dan keluarganya, namun karena alasan kesehatan, proses hukum pada Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kendati proses hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan Agung memutuskan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa dalam masalah sebagian yayasan yang dipimpinnya. <sup>44</sup>

NU di bawah kepemimpinan Gus Dur menempatkan NU sebagai darah masyarakat, artinya NU tidak berpolitik sebagai institusi tetapi Abdurrahman Wahid mengizinkan NU untuk dibawa kemana-mana dengan semangat pluralisme, dan transparansi. Sikap ini adalah buah dari kebijakan kembali ke khittah tahun 1926 yang diputuskan dalam Mukhtar Situbondo pada tahun Hal ini mampu memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tokoh-tokoh NU (walaupun NU sendiri tidak berpolitik) memang mau berpolitik di mana saja, bisa di partai-partai nasional lainnya. Ini akan membawa warna tersendiri dalam masyarakat pluralistik demokratis.

Pluralism dapat diartikan sebagai paham yang mengtolerasi adanya ragam pikiran, kebudayaan, peradaban serta agama atau keyakinan. Gus Dur sendiri sangat menghargai pluralitas, kemajemukan, liberalism dan juga toleransi yang begitu tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Gus Dur, liberalism merupakan falsafah hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas kehidupan. Pluralisme ialah faham yang memberikan ruang nyaman bagi perbedaan sebagai salah satu entitas mendasar kemanusiaan <sup>83</sup> seorang muslim. Sedangkan, menurut Parsudi Suparlan (2001) mengatakan bahwa multikulturalisme ialah sebuah ideologi yang mengganggu perbedaan kultur, atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralism kultur sebagai corak kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan politik (Ronald H. Chilcote, 1981), pluralism berarti adanya pergantian dan penyebaran kekuasaan dengan otoritas yang terbagi secara luas dalam struktur-struktur kekuasaan.

NU pasca Gus Dur, akan banyak diwarnai oleh tiga karakteristik generasi. *Pertama*, ialah ulama (kiai). Bukan tidak banyak generasi NU yang bercita-cita meneruskan tradisi para salafus-shalih, yakni dengan jalan mendirikan pondok pesantren atau yayasan pendidikan Islam. *Kedua*, ialah politikus, dengan menyimpulkan kejadian pemilu dan sidang umum MPR di era reformasi, jadi kita tahu pesantren pun juga mencetak kader-kader politikus atau negarawan yang ulung. Dan *ketiga*, ialah kaum muda kritis-



progresif. Lapisan atau generasi ini meski tidak terlalu banyak, namun gerak dan gebraknya banyak mewarnai NU. Membayangkan NU pasca Gus Dur, yaitu NU di masa depan ialah gambaran jam'iyah yang memenuhi tradisionalisme namun apresiatif dan inovatif terhadap perubahan.

Sisi politik yang ditanamkan Abdurrahman Wahid adalah prinsip-prinsip *egalitarian*, *equality* dan keadilan. Semua itu merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dibuktikannya dengan cara merombak kultur yang sudah menjadi tradisi di kalangan NU, misalnya merombak hubungan Kyai dan santri yang sangat *rigid* dan memiliki hirarki yang cukup ketat. Diakui oleh semua pihak, Gus Dur mempunyai andil yang amat besar dalam soal-soal keagamaan. Dia mempunyai visi kemanusiaan yang sangat longgar, universal, dan tidak mempunyai ikatan-ikatan primordial sehingga ia bisa dan bebas bergaul dengan siapa saja.

Salah satu produk pemikiran yang mencerminkan kepribadian dan seluruh jalan pemikiran Abdurrahman Wahid adalah tentang finalitas Pancasila sebagai ideologi negara. Baginya jika sebuah negara berwatak pluralis, maka tatanan pemikiran dasarnya pun harus mampu menghargai dan beranjak dari pluralitas tersebut.

Ideologi yang eksklusif tidak bisa diterima sebagai suatu tatanan ideologi di Indonesia yang penduduknya plural. Inilah yang membedakan Abdurrahman Wahid dengan politisi Islam lainnya yang masih menggunakan agama sebagai satu-satunya referensi pemikiran untuk segala bidang garapan. Beliau lebih melihat Islam sebagai sumber moralitas bagi penganutnya. Meskipun agama bisa mempengaruhi moralitas politik, tetapi agama adalah sebuah kehidupan yang seharusnya dibebaskan dari permainan politik. Keberagaman seharusnya dibarengi dengan komitmen untuk demokrasi, sehingga kehidupan politik yang banyak dikemudikan agama turut menjadi demokratis.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan kepercayaan mereka yang beragama Konghucu lewat Keputusan Presiden No. 6 th. 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengusahakan mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama, tetapi di sisi lain ia justru mengambil alih sikap yang berseberangan bersama dengan sikap partai politik pendukungnya lebih-lebih dalam kasus komunisme dan kasus Israel. Presiden Abdurrahman Wahid sangat memahami pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas, tetapi toleransinya yang tinggi terhadap hal ini justru merupakan salah satu titik awal munculnya beragam aksi penolakan pada kebijakan dan gagasan-gagasannya, termasuk ketika

Gus Dur melontarkan ide kontroversial yaitu ide untuk mencabut <sup>3</sup> Tap.MPRS No.XXV th. 1966 tentang larangan pada Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

Gagasan berikut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi berikut mengakibatkan Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa rancangan dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR tahun 2000.

Selain kasus komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan organisasi masa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya selagi ia terpilih menjadi Presiden adalah gagasannya untuk terhubung pertalian dagang bersama dengan Israel. Gagasannya berikut mendapat tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka pertalian dagang bersama dengan Israel serupa saja bersama dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyerukan supaya penjajahan di atas dunia dihapuskan.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak lepas dari akumulasi beragam ide dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari beragam organisasi massa dan partai politik Islam yang pada mulanya mendukungnya kalau NU dan PKB. Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS tentang pelarangan komunisme dan ide pembukaan pertalian dagang bersama dengan Israel, pertalian Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan DPR dan bahkan bersama dengan sebagian menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan berikut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa mengimbuhkan info yang dapat diterima oleh DPR.

Pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan mengakibatkan DPR mengajukan hak interpelasinya. Kepercayaan masyarakat pada Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis sejalan bersama dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan pemanfaatan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana perlindungan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan

penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut.

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan ini dikuatkan dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk memberi peringatan kepada Presiden yang sudah melanggar haluan negara yang melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tidak terima terhadap isi memorandum yang menyatakan bahwa Gus Dur dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000.

Rapat DPR berikutnya dilakukan untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden pada memorandum pertama. Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas sejalan bersama dengan ancaman presiden pada DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka Presiden bakal mengumumkan kondisi darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang artinya pula bakal terjadi pergantian bagian DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil alih tindakan hukum pada sejumlah orang khusus yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. Situasi ini termasuk meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden lebih-lebih yang tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada pengrusakan dan pembakaran beragam layanan lazim dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap menolong DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunai yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir kontrol ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001. Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.



Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Presiden Abdurrahman Wahid memastikan bahwa ia tidak bakal mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata aturan MPR, sehingga tidak sah dan ilegal.

Menyadari posisinya yang terancam, presiden seterusnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat berikut seterusnya disebut Dekrit Presiden. Secara lazim dekrit berikut memuat tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyiapkan pemilu dalam selagi satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Sayangnya dekrit tersebut tidak dapat ditunaikan lebih-lebih gara-gara TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan beberapa langkah penyelamatan tidak melakukan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri berkesinambungan untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Sikap TNI dan Polri berikut ikut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa bersama dengan agenda pandangan lazim fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan bersama dengan pemungutan suara untuk terima atau menampik Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh bagian MPR yang hadir terima dua keputusan tersebut. Presiden dianggap sudah melanggar haluan negara gara-gara tidak hadir dan menampik untuk mengimbuahkan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

Jauh sebelum jadi presiden, Gus Dur memang sering memerankan dirinya sebagai aktor kritis terhadap negara. Perjuangannya yang gigih menegakkan demokrasi, dan pemikirannya yang di luar kebiasaan umum lalu diposisikan sebagai sosok politik dari negara, sehingga beliau dianggap sebagai satu-satunya sosial politik paling Independen di Indonesia. Presiden Soeharto dengan kalangan Tentara dan Birokrasi dipandang sebagai sayapnegara, oleh sebab itu Abdurrahman Wahid dengan NU dan kalangan Pro Demokrasi dianggap sebagai sayap masyarakat sipil.

Komentar-komentar dan gerakannya selalu menghiasi halaman-halaman media massa berbanding lurus dengan penampilan negara yang kian



hegemonik. Keberaniannya menentang arus utama negara dan dalam hal-hal tertentu juga harus masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya, serta kesetiaannya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan menjadikannya sebagai tokoh yang populer dan disegani. Beliau pernah terpilih menjadi tokoh terpopuler sebanyak 3 kali, *pertama*, tokoh tahun 1989 oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat; *kedua*, tokoh tahun 1990 oleh Majalah Editor, dan *ketiga* tahun 1999 oleh surat Kabar Kompas. Lebih dari itu ia juga pernah menerima penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dari Filipina Pada 31 Agustus 1993. Inilah merupakan bukti pengakuan nasional dan internasional terhadap peran dan kontribusinya dalam proses kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat demokratis, terbuka, dan toleran.

Forum Demokrasi (FORDEM) yang yang dikemukakan beliau seakan menjadi pesantren inklusif yang terbuka bagi semua kelompok dan lintas komunitas. Pada masa reformasi saat ini forum demokrasi tidak begitu penting dan bersejarah akan tetapi berbeda jika di dibandingkan dengan situasi jamannya yaitu pada saat pemerintahan orba bertahta. Kelompok atau komunitas yang berani keluar dari *mainstream* yang dikemukakan oleh penguasa ialah orang atau komunitas yang dikatakan benar-benar berani karena taruhannya ialah nyawa atau presensi diri. Dan ancaman pada saat itu terhadap Gus Dur ialah dihadang dan diburu-buru seperti pembengkang negara.

Gus Dur mendirikan forum Demokrasi karena panggilan ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan agar bermusyawarah sebagai demokrat sekaligus menjadi gerakan prodemokrasi yang dijadikan sbagai figur oposisi-loyal terhadap pemegang kekuasaan. Ia menjadi penentang yang terhadap penguasa yang buruk dan absolut tetapi tetap setia kepada tujuan bersama, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Kebhinnekaan. Hal tersebut merupakan hakikat Demokrasi yang dicintai Gus Dur.

Hal yang luar biasa dari Gus Dur pengakuan dari Dr. J Kritiyadi di dalam *Beyond The Symbols* ialah bahwa Gus Dur akan mengambil resiko apa saja dalam menegakkan suatu demokrasi. Kritiyadi mengetahuinya sebagai seorang yang bisa saja mengorbankan ketenangan dirinya untuk seatu yang ia yakini untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Dalam suatu kepentingan para peserta dan pendukung Fordem yang bertujuan untuk keutuhan bangsa Indonesia. Para pendukug Fordem ingin kesadaran bangsa dan rakyat Indonesia selalu terjaga dan tercerahkan agar tetap bergerak dalam proses menuju masyarakat yang lebih berkembang dan lebih maju. Disadari oleh forum tersebut, bahwa ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh itu hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam keadaan demokratis. Atau sebaliknya, keadaan tidak adanya demokratisasi, keadaan kurang kebebasan, hanya akan menjadi sumber tumbuhnya sikap-sikap curiga mencurigai, dan sikap melupakan norma-norma dan acuan umum.

Demokrasi sama halnya dengan negara, tidak pernah selesai dan memuaskan menurut pendapat Gus Dur. Ini justru membangkitkan semangat untuk selalu mengusahakan perbaikan terus-menerus, supaya terlihat sempurna, agar tidak terjadi penurunan dan kemacetan.

5 Demokrasi menurut pendapat bagi Gus Dur merupakan suatu proses. Ia selalu 126 erada dalam bentuk kesementaraan dalam keadaan menjadi. Akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan menjadi suatu alasan seperti yang dilakukan kaum *apologis* untuk melalaikan sistem demokrasi. Demokrasi sebagai proses juga mengandung makna bahwa pelaksanaan konkrit menurut prinsip demokrasi itulah yang menjadi hal penting. Dalam kondisi efektif, itu dilakukan oleh lembaga-lembaga mekanisme demokrasi, tetapi bukan berarti bahwa penyampaian 28 aspirasi rakyat yang tidak melalui lembaga itu tidak boleh disalurkan. Hak rakyat untuk menyatakan dan menyatukan pendapat secara langsung, tetap merupakan bagian penting dalam mekanisme demokrasi.

Membatasi pengertian demokrasi sekedar sampai adanya lembaga, dan menunjukkan penyaluran cita-cita hanya melalui suatu badan yang diresmikan, akan tetapi tidak mencukupi melihat tingginya pluralisme rakyat kita. Demokrasi yang diinginkan berjalan dengan kenyataan kemajemukan rakyat merupakan adanya berbagai golongan dan kelompok ke 28 besar kecil yang berbeda dan bahkan merlawanan yang dilihat dari suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan atupun penggabungan dengan dasar yang sama-sama behak untuk dipertimbangkan cita-citanya dan membuat suatu keputusan politik.

Sebagai seorang NU, Gus Dur bisa dikatakan sudah kenyang dengan berbagai macam perbedaan dan kepentingan, yang kental dan has pesantren. Terlebih dengan kedudukannya selama tiga periode sebagai ketua umum PBNU.

Ketika Gus Dur menjadi presiden, maka pengaruhnya dikalangan rakyat menjadi amat kuat. Setelah tidak menjadi presiden, pengaruhnya tidak banyak berkurang dan Gus Dur tetap menjadi faktor utama dalam jagad politik. Di awal pemerintahannya, Gus Dur ialah sebuah resultan politik. Akan tetapi, tanpa menjadi presiden pun, Gus Dur sesungguhnya tetap orang besar. Ia intelektual yang memiliki integritas, punya komunitas kultur NU dan partai politik. Gus Dur bukan saja sosok pemimpin yang hanya bisa dijelaskan dalam perspektif *traid theory*. Dalam perspektif tersebut, orang besar itu dilahirkan. Ia adalah sosok yang sangat disiplin di dunia keintelektualnya. Ia menjadi penjelajah di dunia wacana, berdiskusi, dan beraktivitas sosial. Ia kritis terhadap metodologi pembelajaran perkuliahannya sewaktu di Mesir.

Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial bersama dengan alasan

perampingan susunan pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang ditunaikan oleh kedua departemen berikut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa lebih-lebih media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Lagi pula paradigma penerangan yang menempatkan posisi pemerintah dalam keadaan yang lebih tahu, lebih dominan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu jika masih dibiarkan ada, justru akan menjadi kontraproduktif.

Jika Departemen Penerangan dibubarkan dengan pertimbangan keberadaan departemen tersebut tidak lagi produktif, bhkan kontraproduktif, maka pembubaran Departemen Sosial justru karena ingin mengembalikan apa yang selama ini ditangani masyarakat, kembali ke masyarakat. Departemen Sosial dibubarkan bukan karena Gus Dur tidak peduli kepada masyarakat, justru itu merupakan strateginya untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang diinginkannya.

Gambaran Indonesia <sup>3</sup> baru yang diinginkan Gus Dur adalah masyarakat yang memelihara nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber dari hati (*ash-shidqu*). Masyarakat baru <sup>3</sup> yang didambakan pun merupakan cerminan dari manusia-manusia yang dipercaya, setia, tepat janji, serta bisa memecahkan masalah-masalah sosial yang di hadapi (*al-amanah wa al-wafu'u bi al-'abdi*), kemudian juga bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), lalu tolong-menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*), dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqamah*), musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial (*al-syura*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilai utamanya, dan trakhir ialah persamaan kedudukan setiap warga negara di muka hukum (*al-musawa*) ialah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia baru tersebut, sebagaimana kerap dinyatakan Gus Dur di berbagai kesempatan, perlu adanya jaminan dasar hak-hak itu meliputi: (1) keselamatan jiwa (*hifzh an-nafs*), dengan kata lain bebas dari segala bentuk penganiayaan fisik; (2) keselamatan memeluk agama dan keyakinan (*hifzh ad-diin*) dan bebas dari berbagai bentuk pemaksaan atas nama agama; (3) keselamatan akal (*hifzh al-'Aql*) dan kebebasan mengemukakan pendapat, berekpresi, tetap terbebas dari berbagai bentuk tindakan jahat, seperti alkoholisme dan narkotisme yang merusak akal sehat; (4) keselamatan keturunan (*hifzh an-Nasl*) dan jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus; (5) keselamatan harta benda (*hifzh al-mal*) termasuk dalam hal ini jaminan atas profesi kerja yang tidak merugikan orang lain.



Perlindungan terhadap hak-hak prinsipil manusia itulah yang membuat Gus Dur sangat menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama yang diwujudkan dengan melegalisasi Konghucu menjadi agama, meskipun di negeri asalnya Konghucu hanya dianggap falsafah hidup. Menurut Gus Dur penganut Konghucu, yang pada umumnya etnis Tionghoa di Indonesia memperlakukannya sebagai agama, karena itu mereka harus juga diberi kebebasan untuk menganutnya. Pembelaannya terhadap etnis Tionghoa diwujudkan dalam bentuk Keppres No.6 tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati dengan menjadikan Imlek sebagai hari besar agama di Indonesia, dan ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keppres No. 19 tahun 2002.

Sejak awal Gus Dur konsisten dengan pendekatan sosio- kultural. Yaitu, suatu pendekatan yang mengutamakan sikap mengembangkan pandangan dan perangkat kultural, serta dilengkapi oleh upaya membangun sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang sudah ada. Hal ini didasarkan pada prinsip kaidah fiqh: “*al muhafadhah ‘ala al-qadiimis-nshaalih wal akhdzu bi al-jadiidi al-ashlah*” yaitu memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. “*tasharrafu al imam ‘ala ar-ra’yah manuutun bi al mashlaha*” bahwa kebijaksanaan pemimpin atau kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyatnya. Yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan Islam atau nilai-nilai pesantren itu sendiri, diletakkan dalam fungsinya sebagai inspirasi. Islam atau nilai-nilai pesantren itu sendiri, diletakkan dalam fungsinya sebagai inspirasi moral, serta dijadikan tenaga komplementer untuk kehidupan kebangsaan. Gus Dur secara stabil, menolak Islam dijadikan sebagai ideology dan sistem alternatif, apalagi sebagai faktor tandingan yang bersifat disintegrasi terhadap kehidupan kebangsaan.

Pada sisi pemikiran, sejak terpilih sebagai Ketua Umum *Tanfidihiyyah* PBNU pada tahun 1984, Abdurrahman Wahid telah menjadi salah seorang intelektual muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Hal ini bukan saja didukung oleh posisinya di NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, melainkan juga karena percikkan-percikkan pemikirannya yang progresif tentang Islam, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi.

Sisi politik yang ditanamkan Gus Dur adalah prinsip-prinsip egalitarian, equality dan keadilan. Semua itu merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dibuktikannya dengan cara merombak kultur yang sudah menjadi tradisi di kalangan NU, misalnya merombak hubungan Kyai dan santri yang sangat *rigid* dan memiliki hirarki yang cukup ketat. Diakui oleh semua pihak mempunyai andil yang amat besar dalam soal-soal keagamaan. Dia mempunyai visi kemanusiaan yang



sangat longgar, universal, dan tidak mempunyai ikatan-ikatan primordial sehingga ia bisa dan bebas bergaul dengan siapa saja.

Salah satu produk pemikiran yang mencerminkan kepribadian dan seluruh jalan pemikiran Gus Dur adalah tentang finalitas Pancasila sebagai ideologi negara. Baginya jika sebuah negara berwatak pluralis, maka tatanan pemikiran dasarnya pun harus mampu menghargai dan beranjak dari pluralitas tersebut. Ideologi yang eksklusif tidak bisa diterima sebagai suatu tatanan ideologi di Indonesia yang penduduknya plural. Inilah yang membedakan Gus Dur dengan politisi Islam lainnya yang masih menggunakan agama sebagai satu-satunya referensi pemikiran untuk segala bidang garapan. Gus Dur lebih melihat Islam sebagai sumber moralitas bagi penganutnya. Meskipun agama bisa mempengaruhi moralitas politik, tetapi agama adalah sebuah kehidupan yang seharusnya dibebaskan dari permainan politik. Keberagaman seharusnya dibarengi dengan komitmen untuk demokrasi, sehingga kehidupan politik yang banyak di kemudikan agama turut menjadi demokratis.

Gus Dur bisa disebut sebagai tokoh yang paling lama bertahan di jajaran elit Indonesia paling berpengaruh. Gus Dur sampai saat ini masih tetap memainkan peranan penting dalam politik Indonesia. Gus Dur mulai masuk dalam percaturan politik dan kebangsaan Indonesia sejak awal 1970-an ketika ia baru pulang belajar dari Baghdad. Pada awalnya Gus Dur tampil sebagai sosok budayawan dan cendekiawan rakyat yang pemikiran dan sikapnya menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat di tengah dinamika pembangunan nasional, kemudian tampil sebagai pemimpin umat dengan menjadi Ketua Umum PBNU selama 15 tahun, dan akhirnya menjadi pemimpin politik dengan menjadi Presiden RI dan juga Ketua Dewan Syura DPP PKB.

Sejak terpilihnya Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU (1984) mulai membawa Gus Dur ke atas panggung nasional. Ditangan Gus Dur, posisi Ketua Umum PBNU menjadi sesuatu yang amat strategis. Pada tahun 1991 Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi dan mulai muncul menjadi tokoh utama masyarakat sipil.

Mengapa Gus Dur bisa bertahan sedemikian lama dalam percaturan politik Indonesia?

**Pertama**, Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa memasuki dunia politik memerlukan kesabaran dan kesedihan untuk menjadikannya sebagai proses perjuangan jangka panjang. Dalam proses tersebut, kekuasaan harus dibangun dengan investasi sosial dan kultural yang cukup. **Kedua**, Gus Dur membangun jalur politiknya sebagai cendekiawan rakyat. Sebagai seorang cendekiawan, kekuatan politik Gus Dur bukan semata mata pada kepiawaian maneuver politik yang diperagakan, tetapi lebih pada kekuatan struktur pengetahuan yang dibangun untuk menjelaskan yang terjadi dan bagaimana

proyeksi masa depannya. **Ketiga**, Gus Dur ialah tokoh yang selalu menjaga hubungan baik dengan semua kalangan. Bagi Gus Dur politik ialah silaturahmi. Meski ia diperlakukan secara tidak adil oleh presiden Soeharto dimasa lalu, ia tetap berhubungan baik dengan penguasa Orde Baru tersebut. **Keempat**, Gus Dur ialah sosok yang mempunyai semangat hidup yang luar biasa, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Semangat dan kepercayaan diri itu menjadikan Gus Dur mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi termasuk masalah usia dan kesehatan. **Kelima**, dalam beberapa kasus, Gus Dur mengungkapkan bahwa politik ialah hal yang tidak untuk dikomunikasikan.

117

Di awal era reformasi, di masa transisi dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa, pada akhir Mei 1998 menyusul lengsernya Presiden Soeharto dan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, B.J Habibie pun naik ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto dan membentuk kabinet reformasi pembangunan. Sejak itu gerakan reformasi terus bergulir dan memperoleh momentum historisnya di pentas politik nasional. Pemerintahan Habibie tidak bisa bertahan lama dan digantikan oleh pemerintahan Abdurrahman wahid pada bulan Oktober 1999. Pemerintahan Abdurrahman wahid hanya bertahan selama 22 bulan dan kemudian diganti dengan pemerintahan Megawati sejak 23 Juli 2001.

Di tanah air sendiri, konflik, kekerasan dan pertumpahan darah telah ada sejak zaman prakolonial sampai era reformasi sekarang. Setelah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, selama 5 tahun pertama Indonesia tak pernah hilang dari yang namanya konflik disertai kekerasan. Sejumlah konflik dan kekerasan terjadi yang berkaitan dengan separatisme, peranan agama dalam negara sekuler .

Konflik-konflik yang di kemukakan oleh para pengamat sebagai konflik komunal, konflik suku, konflik sosial, konflik politik, dan konflik agama. Beberapa konflik serius dan sangat merugikan bangsa dan negara adalah konflik etnis, antara lain : 1. Suku melayu berhadapan dengan suku madura di Sambas (1996-1997, 1999, dan 2001), 2. Penganut agama Kristen Timur melawan BBM ( Buton, Bugis, Makasar) pendatang di kota-kota kupang dan Soe ( bagian barat Timor Timur (1999). Konflik ini berakhir dengan Konflik agama, 3. Kristen Ambon melawan BBM di Ambon (1999). Konflik ini juga berakhir dengan konflik agama. Konflik di antara berbagai etnis di Maluku Utara (2000). Begitu pun konflik ini, berakhir dengan konflik agama, 4. Konflik diantara berbagai kelompok di Poso Sulawesi Tengah (2001). Di tanah air sendiri, konflik dengan kekerasan dan pertumpahan darah sudah ada sejak zaman prakolonial hingga era reformasi sekarang ini.

Sejumlah peneliti menilai bahwa rezim Orde Baru dibangun di atas landasan kekerasan antikomunisme, kejam dalam memperlakukan perbedaan

pendapat, serta brutal dalam menangani pemberontakan. Kekerasan telah menjelma menjadi satu dari tiga tonggak yang menyokong kekuasaan Soeharto, disamping kinerja ekonomi dan manipulasi ideologi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah partai politik yang lahir bersama-sama partai lain pasca Orde Baru. Kelahiran PKB adalah fenomena yang tersendiri, dengan dua alasan faktual: Pertama, sebagai pendatang baru, PKB bisa langsung masuk dalam tiga besar perolehan suara pada pemilu 1999. Posisi ketiga bisa kembali dipertahankan pada pemilu 2004. Kedua, sejak berdiri sampai saat ini, PKB merupakan partai politik yang paling dinamis.

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ialah partai politik yang didirikan bersama partai lain setelah Orde Baru. Orde Baru memulai langkahnya dengan langgam liberal, sehingga pikiran-pikiran kritis dapat ditenggang secara demokratis, demikian juga kebebasan pers terjamin. Tetapi dibandingkan dengan partai politik lain yang didirikan di era reformasi, PKB bisa dibilang kejadian yang tersendiri. Oleh karena itu ada 2 alasan faktual dengan pernyataan itu. *Pertama*, sebagai partai pendatang baru, PKB langsung masuk dalam tiga besar perolehan suara pada pemilu 1999. posisi ketiga tetap bisa dipertahankan pada pemilu tahun 2004. *Kedua*, sejak berdiri sampai saat ini PKB ialah partai politik yang sangat dinamis. Konflik internal, berupa dualisme kepengurusan merupakan fenomena yang biasa.

Para pemimpin dan kader PKB selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan optimisme yang kuat untuk membuat PKB sebagai partai besar dan berpengaruh di masa yang akan datang. Tingkat kemampuan dan pengetahuan kelembagaan yang luar biasa mampu membuat PKB berkembang dalam keadaan konfliktual dan mengkonsolidasi pengetahuan kolektif di tengah arus konsumerisme dan tidak lepas dari moral sosial kultural yang dimiliki partai PKB yang didirikan pada 23 juli 1998. yang membuat PKB menjadi partai yang kapasitas dan kelembagaan yang luar biasa. *Pertama*, PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara langsung memproklamasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945 ialah sudah final. Keputusan PKB tentang status NKRI karena dasar Negara ini memiliki rujukan sejarah yang kuat dan belandaskan hukum agama (fiqih) yang kuat. *Kedua*, PKB merupakan partai politik yang mempunyai basis kultur yang kuat dalam sejarah gerakan sosial dan gerakan Islam Nusantara sejak dulu. Sebagai partai politik yang dilahirkan oleh NU, PKB ialah mata rantai perjuangan rakyat dimasa lalu menjadi ikatan yang menghubungkan pemikiran keagamaan yang elah dilembagakan oleh pesantren-pesantren sejak dahulu. *Ketiga*, PKB memiliki pemimpin tinggi yang disegani sebab kedalaman pemikiran sosialnya, keluasan pengetahuan politiknya dan tingginya pengaruh PKB sepanjang sejarah Indonesia. Sebagai partai politik,

PKB memandang perlu untuk melakukan konsolidasi pengetahuan dan gerakan.

Partai yang dikendarai oleh Gus Dur ini didirikannya untuk menjadi partai untuk semua umat. Konsep dan sikap eksklusif yang pada umumnya menjadi ciri partai Islam kurang cocok dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hanya sikap inklusif lah di mana keberagaman merupakan suatu kesatuan yang berada dalam suatu wadah yang sama, yang bisa diterima semua pihak dengan terbuka. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa, kemunculan partai yang dibentuk oleh organisasi ulama justru bersikap terbuka terhadap berasaskan Islam, adalah implementasi sikap dan pemikiran demokrasi pluralis Gus Dur. Dapat dikatakan bahwa pasca reformasi merupakan kebangkitan Islam.

Oleh karena itu dapat diuraikan kontribusi dan pengaruh pemikiran politik Abdurrahman Wahid terhadap partai Islam antara lain:

1. Gus Dur memberikan suatu pengajaran yang berharga bahwa harus adanya suatu sikap toleransi terhadap pemahaman keberagaman yang ada di Indonesia, juga memahami konsep pluralism dalam hal keyakinan.
2. Sebagai suatu pemegang kebijakan, Gus Dur merupakan pengayom bagi masyarakat yang minoritas, menjadikan kelompok sekuler sebagai bagian kelompok yang digalang dalam kekuatan serta menyerap berbagai kalangan minoritas.
3. Ketika Gus Dur menjadi Presiden, sudah memberikan warna perpolitikan Indonesia yang demokrasi. Dapat dilihat ketika beliau menjadi Presiden, banyak kebijakan-kebijakan dan peraturan yang diterapkan sebelumnya yang merugikan kaum minoritas di hapus oleh beliau.
4. Partai yang didirikan oleh Gus Dur menetapkan Pancasila sebagai dasarnya, karena pada dasarnya prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Seperti dikatakan KH M Cholil Bisri dalam pengantar buku *Membangun Demokrasi* (1999), pemikiran Gus Dur berangkat dari keinginan untuk menunjukkan bahwa ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang dipertahankan kalangan kiai pesantren dengan kitab-kitab klasik sebagai muqarrar-nya, masih sangat dan tetap relevan sebagai pijakan kehidupan masyarakat modern.

Upaya yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam hal ini adalah agar melakukan rekonsiliasi ajaran nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya setempat dengan tujuan agar budaya tersebut tidak hilang. Dapat



dilihat bahwa, dalam hal ini konsep pribumisasi Islam yang beliau gagas merupakan suatu kebutuhan dengan upaya agar dapat hidup dengan polarisasi antaraagama dengan budaya setempat. Dalam implimentasinya bahwa pribumisasi Islam ini harus tetap pada sifat Islamnya, bukan tujuan untuk sinkretisme. Jadi disini Abdurrahman Wahid bertujuan agar mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama. Jadi, dengan demikian konsep inilah yang menjadi pondasi dalam partai yang beliau kendarai dalam berpolitik sehingga tidak mengherankan jika dalam wadah partai beliau banyak warna yang tanpak. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa dalam merumuskan merubah hukum agama bukan berarti merubah hukum itu sendiri.

Gus Dur seringkali melontarkan gagasan perihal prinsip-prinsip negara Pancasila yang modern dan humanis kerakyatan agar setiap warga mempunyai hak hidup secara politik, dan beliau juga mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXXV tahun 1966 yang berkaitan dengan kasus 1965, yang berimplikasi mendiskualifikasi mantan orang-orang PKI, dan orang-orang yang oleh penguasa.

Oposisi Gus Dur yang paling berkesan di hati anak-anak muda NU khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ialah oposisi demokrasi kerakyatan yang dilakukannya terhadap rezim Soeharto. Oposisinya dilakukan dalam banyak hal: kasus Kedungombo, menjadi ketua Fordem, melawan rekayasa rezim Soeharto dalam Muktamar Cipasung pada tahun 1994. Menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden yang oleh Gus Dur diubah menjadi loyalitas kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam apel akbar tahun 1992.

Sejumlah warisan kebijakan Gus Dur sewaktu menjadi presiden yang hanya sementara juga sangat berkesan, terutama usulnya untuk mencabut TAP MPRS No. XXXV tahun 1996 yang merupakan warisan kebijakannya yang dimaksudkan untuk menjaga martabat bangsa Indonesia, tetapi sekaligus kontroversial. Selain itu warisan kebijakannya adalah:

1. Mengganti jabatan-jabatan politik yang selalu diduduki orang-orang militer dan memasukkan orang-orang sipil kedalam jabatan-jabatan tersebut.
2. Perubahan staf Sospol menjadi Staf Teritorial. Dengan perubahan ini profesionalisme militer dinaikkan dengan cara mengurangi peran militer dari persoalan non-militer.
3. Memisahkan jabatan Menhan dengan Menkopolkam, dan penempatan orang sipil di jabatan Menham.

4. Revisi pemindahan TNI-POLRI yang gagasan awalnya sudah muncul di kalangan TNI, tetapi sampai tahun 1999, POLRI masih berada di bawah komando ABRI.
5. Penghapusan hak prerogatif militer dengan menghapus Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan dan Pemantapan Nasional) yang dulu menjadi pengganti Komantip (Komando Operasi Pemulihan dan Keamanan).
6. Penghapusan kebijakan *Litsus* (meneliti seseorang terlibat PKI atau tidak) yang seringkali dijadikan alat rezim Orde Baru untuk menekan lawan-lawannya.
7. Pengakuan Konghucu dan tradisi orang-orang Tionghoa sehingga hak-hak mereka kembali setelah sekian lama dibatasi pada saat rezim Soeharto.

Dalam hal ini Gus Dur mengajarkan kepada manusia-manusia Indonesia agar bersikap teguh dalam memegang prinsip sehingga kita dapat menjadi Negara beradab dan bermartabat. Diantara warisan Gus Dur yang paling berharga untuk bangsa Indonesia, dan akan terus menjadi sumber inspirasi bagi manusia-manusia kreatif Indonesia ialah tulisan-tulisannya. Warisan Gus Dur ini akan terus dikenang, dibaca, dan dimaknai oleh manusia-manusia kreatif Indonesia.

Gebrakan pertama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden keempat Republik Indonesia adalah pembubaran eksistensi Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosialisasi (Depsos). Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa penghapusan itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah (Otda). Gagasan Gus Dur yang menempatkan agama dan Negara secara proporsional memang melejitkan namanya sebagai bapak bangsa yang patut diteladani. Gus Dur ditempatkan secara istimewa sebagai pemikir Islam, aktivis demokrasi, pejuang HAM dan pluralism. Gagasan pribumisasi Islam dan penerimaan NU terhadap Pancasila juga di latarbelakangi oleh pandangan Gus Dur tentang hakikat Islam.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu kendala dari pemberlakuan Otda adalah kurang terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi seluas mungkin berkaitan dengan kondisi daerah dan kebijakan pemerintah daerahnya melalui media massa yang ada tanpa harus ada intervensi Negara atasnya. Kendala ini akan teratasi jika negara (Pemerintah daerah) hanya melakukan fungsi fasilitasi agar masyarakat mampu memperoleh seluruh informasi yang mereka butuhkan. Kita harus takut akan adanya intervensi pemerintah seperti yang terjadi di era Orde Baru.

**Ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden**, ia menghadapi tantangan yang keras dalam membangun demokrasi di Negara ini. Salah satu bentuk persoalan adalah aspirasi masyarakat, baik domestik maupun Internasional agar tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran HAM di masa lalu.

Menyusul laporan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Azasi Manusia (KPP HAM) Timor timur yang menyebut keterlibatannya Jenderal berbintang empat itu dalam pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor timur, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator bidang politik keamanan (Menko Polkam). Kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid untuk membebastugaskan Jenderal Wiranto menimbulkan pro-kontra di dalam negeri, dari kalangan politisi, pengamat, bahkan dari kalangan tentara sendiri.

Secara sengaja Gus Dur meminta Wiranto mundur ketika ia tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara Eropa. Inilah cara Gus Dur untuk menepis kekhawatiran masyarakat internasional bahwa otoritas sipil di Indonesia tidak sanggup mengendalikan kekuatan militer, penyokong utama kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Apalagi permintaan mundur itu dilakukan di tengah upaya masyarakat internasional mendorong pengadilan HAM internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM di Timor timur. Upaya untuk membebastugaskan Wiranto dari jabatannya itu, Presiden Gus Dur dengan gagasannya itu, ingin mengembangkan tradisi baru bahwa jika ada pejabat negara yang melakukan pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum lainnya, lebih baik jika yang bersangkutan mengundurkan diri agar memudahkan pemeriksaan. Dalam konteks ini, Presiden Gus Dur sedang berusaha membangun budaya dan etika baru dalam sistem politik nasional. Langkah itu pun merupakan bagian penting untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional.

Salah satu prestasi yang sangat besar dan patut di catat selama Gus Dur menjadi Presiden adalah penghapusan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Baskorstanas) dan lembaga penelitian khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 tentang penghapusan Baskorstanas dan Litsus yang selama orde baru menjadi alat represif negara. Kebijakan ini merupakan cermin gagasan besar .

Presiden Gus Dur untuk meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan masyarakat. Kedua lembaga yang di masa lalu menjadi instrumen rezim otoriter ini dinilai tidak tepat lagi berada di alam politik baru yang demokratis. Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa



seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan perannya tidak jelas.

Sejak Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, tak henti-hentinya Gus Dur menembakkan kejutan, mulai dari ide “berkerabat” dengan Israel, Pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/1966, sampai pencopotan menteri, Reshuffle kabinet, “Buloggate”, hingga mutasi ditubuh TNI (Tentara Negara Indonesia).

Dalam acara wisuda sarjana dan Dies Natalis ke-19 Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur, pada tanggal 25 Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid menyatakan “saya secara pribadi setuju penghapusan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966. Alasannya, ya karena terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak komunis, lalu masuk dalam daftar itu”

Kebijakan Abdurrahman Wahid saat menjadi Presiden yang mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat dan partai politik. Kita dapat memahami alasan K.H. Abdurrahman Wahid untuk mencabut larangan penyebaran komunisme. Yakni bahwa kalau kita ingin mengembangkan demokrasi seharusnya tidak ada ideologi apapun dilarang berkembang di Negeri ini. Namun masalahnya, apakah pencabutan itu sudah saatnya dilakukan saat ini, karena larangan terhadap komunisme berkembang di Indonesia muncul setelah kegagalan kudeta PKI pada tahun 1965. sebelumnya PKI pernah melakukan pemberontakan tahun 1948 di Madiun.

Pemberontakan dan kudeta merupakan tindakan yang tidak demokratis. Jika larangan tersebut komunisme yang berlaku selama ini di anggap tidak demokratis, maka hal itu selayaknya dipahami bahwa tindakan yang tidak demokratis tersebut didorong oleh tindakan PKI yang juga tidak demokratis di masa lalu. Namun tindakan PKI yang tidak demokratis itu tidak boleh membuat kita untuk juga bersikap tidak demokratis secara terus-menerus.

Jika kita berpikir tentang perkembangan demokrasi di Indonesia untuk jangka panjang ke depan, pemberontakan dan kudeta tidak bisa dijadikan untuk melarang komunisme selamanya. Karena negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka jika orang-orang komunis kembali melakukan tindakan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara seperti pemberontakan dan kudeta, mereka harus diadili yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, pernyataan Gus Duryang ingin mencabut Tap MPRS tentang larangan komunisme harus di lihat sebagai gagasan tentang pengembangan demokrasi dalam jangka panjang. Ini berarti cepat atau lambat larangan itu akan di cabut, karena tidak sesuai dengan proses demokrasi yang sedang berjalan.



Ada tiga kontribusi besar Gus Dur bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. *Pertama*, Gus Dur menjadi pelopor bagi pemecah kebekuan berfikir umat Islam Indonesia. *Kedua*, gagasan-gagasan Gus Dur secara tidak langsung juga telah membuka jalan baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia sehingga tidak lagi terpaku pada satu jalan yang selama ini ditempuh, yaitu politik. *Ketiga*, gagasan-gagasan Gus Dur juga mempunyai kontribusi dalam mendorong demokratisasi di Indonesia.

Gerakan demokrasi di Indonesia sudah menjadikan suara vokal Gus Dur sebagai salah satu sarana perjuangan. Hal itu tentu bukanlah sebuah kebetulan melainkan menyatu dengan kesadaran perjuangan Gus Dur sebagai seorang intelektual organik.

Dalam konteks kewarganegaraan bineka, ketika kelompok terdiskriminasi setelah diangkat dan disetarakan dengan warga negara lain dengan melibatkan institusi negara, terjadi proses pembebasan dan kesetaraan. Namun, pengakuan lebih memberikan dampak pada politik dan psikologis dalam kedudukan sebagai manusia dan warga negara. Dampak itu akan berhenti jika tidak ada lanjutan berupa aksi dari pemerintah dalam bentuk yang lebih konkrit, dari yang bersifat fisik seperti pelibatan pada even politik secara nyata hingga non fisik, seperti jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul serta rasa aman untuk menyampaikan aspirasi yang mereka inginkan.

Ketetapan MP 100/I/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, "Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing." Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, "TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara." Ayat (2) berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan."

Selama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ketegangan K.H. Abdurrahman Wahid dengan DPR terus mengalami intensitas dan eskalasi yang semakin memanas, misalnya pada kasus buloggate dan bruneigate yang dijadikan komoditas politik oleh musuh-musuhnya lewat pembentukan Pansus (Panitia Khusus) yang ditugasi untuk mengusut kedua kasus tersebut. Kasus buloggate yang melibatkan aliran pengucuran dana yanatera bulog sebanyak Rp 35 miliar kepada beberapa orang tertentu, termasuk Suwondo yang diduga merupakan orang terdekat Presiden. Sedangkan kasus Bruneigate melibatkan pemberian hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak Sultan Brunei kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Para musuh K.H. Abdurrahman Wahid menuduh dirinya tidak melaporkan pemberian hadiah itu kepada publik dan ia dianggap telah melanggar sumpah jabatan. Dan sebaliknya, K.H. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa uang

tersebut adalah hibah dari pihak Sultan Brunei kepada dirinya sebagaipribadi.

Ketegangan K.H. Abdurrahman Wahid dengan DPR ditandai dengan dikeluarkannya memorandum I dan memorandum II oleh DPR, walaupun K.H. Abdurrahman Wahid menuduh Pansus sebagai ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran Negara. Atas dasar hasil-hasil kerja Pansus, DPR menyatakan bahwa Gus Dur “dapat diduga terlibat dalam kasus bullogate dan bruneigate.” Dengan mengambil kesimpulan bahwa Gus Dur sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. Bagi Gus Dur, Logika DPR itu terasa aneh karena sesuatu yang masih bersifat dugaan, tetapi telah dimanipulasi sebagai “sungguh-sungguh melanggar haluan Negara.”

Gus Dur sendiri dengan kasus buloggate dan brunei gatenya belum di bawa ke pengadilan, karena secara hukum Gus Dur belum dinyatakan bersalah. Selama pemerintahan Gus Dur bertahan 22 bulan, banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang mengalami delegitimasi politik dan sosial yang mengakibatkan Gus Dur lengser dari jabatannya, diantaranya adalah: Kebijakan Presiden Gus Dur yang menghapus Departemen Sosial dan pembubaran Departemen Penerangan. Dalam pandangan Gus Dur Departemen sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan, seperti korupsi dan dana bantuan kemanusiaan yang tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial, sedangkan Departemen Penerangan di anggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa Orde Baru. Berikut kebijakan Gus Dur:

- 5 1. Dicaputnya Tap MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme di seluruh wilayahIndonesia.
2. Membuka hubungan dagang (bukan hubungan diplomatik) dengan Negara zionisIsrael
3. Pencopotan beberapa menteri dan bongkar pasang kabinet. salah satunya adalah Kwik Kian Gie dari Fraksi PDI-P, Laksamana Sukardi dari Fraksi PDI-P, Yusuf Kalla dari Fraksi GOLKAR, Bambang Soedibjo dari PAN, Jend. Wiranto (TNI/Menko polkam) dan Hamzah Haz dari Fraksi PPP, yang kemudian di susul dengan Susilo Bambang Yudhoyono (TNI/Menko Polsoskam) dan Yusril Ihza Mahendrata dari Fraksi PBB.
4. Sikap K.H. Abdurrahman Wahid yang sering meninggalkan Megawati Soekarno putri (Wapres), terutama dalam hal kebijakan memberhentikan beberapa menteri dan mengangkat para penggantinya.
5. Hubungan K.H. Abdurrahman Wahid yang tidak harmonis dengan DPR-MPR.
6. Tindakan K.H. Abdurrahman Wahid yang melakukan penggantian Kapolri dalam waktu yang relatif singkat.

7. Ancaman K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberlakukan dekrit Presiden apabila kompromi politik antara dirinya (sebagai Presiden) dengan para pemimpin partai politik tidak tercapai.
8. Penolakan para pemimpin partai-partai politik (terutama PDIP, Golkar, PAN, PBB, dan PK) terhadap tawaran kompromi yang diajukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid untuk mencairkan kebekuan dan kebuntuan politik akibat ketegangan yang berkepanjangan antara K.H. Abdurrahman Wahid dan para musuh politiknya.
9. Dukungan TNI/Polri (sebagai institusi) yang dari waktu ke waktu kian menyusut terhadap K.H. Abdurrahman Wahid. Akan tetapi setelah K.H. Abdurrahman Wahid melakukan tindakan pencopotan terhadap Menko Polkam Wiranto, Kapolri Rusdiharjo dan Suroyo Bimantoro dan kemudian Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan TNI/Polri semakin menipis dan bahkan tidak ada sama sekali. Ini terbukti bahwa TNI/Polri tidak akan mendukung apabila K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit.

Dalam kasus Aceh dan Papua setidaknya mulai November 1999 hingga akhir 2000 beliau dihina oleh partai politik di DPR dan militer, memperlihatkan bukan saja kembalinya perdebatan terbuka dan substansial di antara mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat dan tanpa ancaman aparat keamanan, pesan tersebut juga menuntun disepakatinya pilihan otonomi oleh mereka sendiri tanpa paksaan apalagi ancaman dari pemerintah. Mereka tidak lagi menuntut merdeka. Keputusan ini merupakan keputusan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat dan tanpa ancaman dari aparat keamanan. konsekuensinya adalah rumusan aspirasi yang telah mereka rumuskan sendiri untuk diakomodasi ke dalam suatu sistem negara.

Kewarganegaraan bhineka yang terkonseptualisasikan dan dipraktikkan oleh Gus Dur tersebut tidak muncul tiba-tiba, melainkan memiliki landasan historis dan metodologis yang kuat, yaitu Islam post-tradisional. yang dimaksud Islam post tradisional adalah suatu metodologi yang memiliki akar historis ke Islam klasik *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Aswaja) dan tradisi yang hidup di masyarakat. metodologi ini mendasari pemikiran aksi Gus Dur ketika menyelesaikan konflik Aceh dan Papua Dalam kedudukannya sebagai ulama, bangsa dan sekaligus sebagai Presiden RI.

Gus Dur dalam upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua tidak berhenti pada pengakuan dan penghormatan eksistensial. Gus Dur bergerak lebih jauh dengan aksi konstitusional untuk mengakomodasi nilai-nilai dan aspirasi mendasar dari keduanya. Suatu legitimasi yang baru setelah terjadinya transformasi melalui apa yang kemudian disebut sebagai undang-undang otonomi khusus. Akomodasi dan *inserting* mereka ke dalam keseluruhan sistem telah memberikan kedudukan baru bagi mereka dalam



konteks status kewarganegaraan mereka berbagai suatu sistem kenegaraan yang berwajah multikulturalis alias Bhinneka Tunggal Ika.

Seluruh konseptualisasinya mereka lakukan sendiri dengan independen dan penuh partisipatif dalam suatu perdebatan yang tidak kalah seru di antara mereka karena berbagai kecenderungan di dalamnya. Konseptualisasi tersebutlah yang kemudian mengantarkan pada pemilihan otonomi atas kesadaran mereka sendiri, tentu dengan pengawalan masyarakat sipil yang kuat yang terbentuk bersamaan dengan dinamika dan dialektika kebebasan dan jaminan rasa aman yang melahirkan pilar utama tersebut. Transformasi tersebut berupa terserapnya hampir seluruh aspirasi masyarakat Aceh dan Papua ke dalam undang-undang otonomi khusus kecuali aspirasi Merdeka atas kesadaran mereka sendiri. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut di DPR, substansi dan tahapantahapannya dikawal oleh suatu gerakan sipil yang terkonsolidasi, dalam partai politik dimana di dalam yang terbentuk kaukus anggota lintas fraksi dalam parlemen dari kedua wilayah Aceh dan Papua tersebut.

Meskipun gejolak masyarakat Papua sudah lama terjadi pada masa Orde Baru, pengaruh momentum reformasi yang dikenali dengan kalahnya Soeharto pada 21 Mei 1998 agak terlambat pada tuntunan merdeka secara terbuka di Papua dibandingkan dengan cepatnya perkembangan gerakan perubahan di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Gus Dur telah memiliki hubungan baik dan dekat dengan sejumlah penguasa di Papua, terutama pemimpin agama, intelektual dan LSM jauh sebelum menjadi Presiden. Sejak awal Gus Dur memperjuangkan kesatuan RI dan menentang separatisme dengan menegusung ideologi anti kekerasan.

Presiden Gus Dur menetapkan GAM sebagai usaha dialog sejajar untuk mencari solusi damai, meskipun aspirasinya berseberangan 180 derajat. Sebagai seorang Presiden memasukkan mereka ke dalam sistem kewarganegaraan dalam proses dialog tersebut. Yang ditunjukkan bagian ini ialah bahwa Visi Gus Dur seperti yang dijelaskan sebelumnya ditindaklanjuti dalam praktik *Policy-Marketing* bahwa visi kewarganegaraan proses pembalikan cara negara dalam merespon konflik lebih karena perubahan arti sebelumnya.

Pada dasarnya dalam menjadikan negara Islam dalam negara yang memiliki kehidupan yang beragam akan mendatangkan konflik, maka dalam hal ini yang menjadi solusi ketika umat Islam melakukan pembaharuan adalah dengan menganut pola nasionalisme. Dengan demikian, dalam pandangan Abdurrahman Wahid bahwa Islam adalah agama Fitriah, dalam hal ini selama suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan-tujuan dalam Islam. Abdurrahman Wahid dalam persepektif NU yang merupakan wadah Ahlu al-Sunnah Wal Jamaah, bahwa pemerintah dalam pandangannya dinilai dari



segi fungsionalnya, bukannya normal formal eksistensinya, negara Islam atau bukan.

Hampir bisa dikatakan bahwa kaum Nahdliyin, terkhusus orang yang bergabung dengan Ormas NU dan PKB, akan menanggung akibat negatif sesudah tergesernya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari jabatan kepresidenan. PKB layaknya seperti ayam yang telah kehilangan induknya sampai-sampai langkah yang diambil terkesan bimbang dan panik.kebingungan itu seharusnya tidak perlu terdengar keluar, sangat terlihat memalukan dan tidak etis membuka diri sendiri di hadapan masyarakat banyak.

Pencabutan Motori Abdul Djalil (MAD) selaku ketua umum DPP PKB dan Abdul Kholiq (fungsionaris PKB), kesudahannya tersebar sampai menerbitkan dua kubu yang melibatkan langsung dalam konflik PKB,yaitu kubu tandingan bentukan MAD melawan kubu formal yang dipimpin Alwi Shihab.

Sekalipun akhirnya PKB mengikuti jejak MAD, yang mengakui kebenaran hasil SI MPR dan melelehkan pembekuan FKB di DPR dan MPR, kedua kubu tetap bersikeras pada pendapat masing-masing. Kubu MPR menggertak dan menggelar perundingan yang luar biasa pada oktober mendatang sebagai bandingan Mukernas PKB yang telah berakhir.

Setelah Gus Dur tergeser, sepatutnya PBNU dan PKB dengan jujur “ makna jujur terhadap diri sendiri”, terhadap umat Nahdliyin, terhadap seluruh bangsa Indonesia, dan jujur kepada Allah SWT melakukan intropeksi diri, rekonsiliasi dalam rangka melaksanakan konsolidasi, baik kedalam maupun keluar.dengan melakukan autokritik akan diperoleh hasil yang dapat dijadikan pedoman untuk mengadakan perbaikan-perbaikan.

Terdapat dua masalah pokok dalam rangka melaksanakan autokritik tersebut.*Pertama*, susah dilawan bahwa para ulama NU telah mempersiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik Gus Dur, bahkan para ulama NU ketika berkumpul di suatu ponpes di kawasan Tangerang yang memaksa agar Presiden Gus Dur segera mengeluarkan Dekrit. Jatuhnya Soeharto menjadikan pemerintahan yang dipimpinnya tidak lagi memiliki legitimasi sospol yang membuat produk-produknya tidak lagi sah. Sistem kepartaian yang sederhana sudah tidak lagi menjadi sistem multipartai. Yang diantaranya memiliki ormas Onderbouw yang menjaring masyarakat bawah. Apabila ditinjau dari konteks sosial politik seharusnya Khittah NU sudah tidak relevan, tetapi terdapat nilai dan norma yang terdapat di dalamnya yang bermanfaat sepanjang masa. Yaitu berpolitik merupakan hak individu setiap warga Nahdliyin dan amanah untuk memegang teguh akhlakul karimah bila mempergunakan hak berpolitiknya tersebut.Para ulama NU harus mengambil prakarsa sebagai peneguh dalam proses autokritik dan istilah dalam rangka

konsolidari Syuriah PBNU, Dewan Syura PKB, ditambah para ulam khos dan ulama-ulama sepuh lainnya.

*Kedua*, Gus Dur ingin memilih salah satu dari dua peran, sebagai aktor politik dan sebagai pemikir. Kedua peran itu tidak bisa di satukan dalam diri seorang pemimpin, termasuk pada Gus Dur, penyatuan dua peran tersebut akan menghasilkan racun dan situasi dilematis.

Beberapa contoh dapat dilihat, Bung Karno yang berpendapat bahwa kofrontasi terhadap Malaysia harus berjalan sampai revolusi selesai, tetapi realitas politik memperlihatkan kebaganggaan rakyat untuk permusuhan dengan sesama saudara sendiri. Hasan Al-Bana pemikir pembaruan Islam di Mesir pada akhirnya ditembak mati oleh seorang yang tidak dikenal karena menggabungkan kedua peran tersebut.

## **B. Implemetasi pada Bidang Keagamaan**

Wacana tentang agama dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, seolah-olah tidak akan pernah ada habisnya. Perbincangan hal tersebut, akan senantiasa aktual dan faktual seiring dengan banyaknya tokoh-tokoh pemikiran keagamaan yang *notebenya* lahir dari dunia pesantren, seperti K.H. Abdurrahman wahid. Dalam bahasa Arab modern, *din* (bentuk plur alnya adalah *adyan*) yang berarti “agama”. Di lihat dari asal maknanya, *din* berarti “tunduk”, “patuh”<sup>17</sup> atau “taat”.

Pada saat ini tampak sangat erat hubungan agama dan proses demokratisasi. Dimana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Di Indonesia juga demikian, para pemimpin gerakan agama silih berganti memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan kemudian demokrasi, ketika sistem pemerintahan semakin lama menjadi semakin otoriter, berbagai kegiatan dikembangkan di kalangan agama yang dimulai dari tingkat paling bawah, penumbuhan masyarakat yang demokratis. Dari mulai kebebasan berpendapat hingga masalah pencemaran lingkungan secara massif, gerakan agama langsung terlibat dalam penegakan demokrasi. Banyak lembaga keagamaan berkiprah untuk meneliti dan mengkaji asal-usul sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis<sup>5</sup>

Dalam pandangan Gus Dur, untuk dapat melakukan transformasi interen, agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, persamaan kedudukan semua manusia di muka Undang-Undang dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui upaya ini, tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan- keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah<sup>5</sup> ilai-nilai dasar universal yang akan mendudukan hubungan antar agama pada sebuah tataran baru. Dan tataran baru itulah adalah tahap pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu dalam bentuknya yang paling konkret seperti penanggulangan kemiskinan, penegakkan kedaulatan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila

sebuah agama telah memasuki tataran baru itu, barulah ia berfungsi melakukan pembebasan (*tahrir, liberation*).

Dalam beberapa tahun terakhir, nama Abdurrahman wahid atau nama akrabnya Gus Dur, sangat populer di kalangan tokoh-tokoh agama, baik Islam atau non-Islam. Gus Dur adalah orang yang cerdas dan terus terang, namun tidak jarang kecerdasannya itu justru mengantarkannya pada kesulitan. Walaupun demikian, pemikirannya dalam hal keagamaan dan juga politiknya, telah berkembang konsisten selama lebih dari tiga dekade, dan yang lebih penting lagi, Gus Dur hidup dan bertindak secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada keyakinan keagamaannya itu.

Ini artinya, sepintas memang terkadang sulit membaca apa yang dilakukannya pada suatu saat, tapi kalau diletakkan sikapnya dalam konteks yang lebih luas, Gus Dur adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal, yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.

Sebelum Gus Dur menjadi Presiden, ia mempunyai sikap yang toleran terhadap semua agama. Kebenaran “mutlak” hanyalah milik Allah, kebenaran yang ada pada manusia adalah kebenaran “relatif”. Pandangan seperti itu menjadikan Gus Dur berjiwa toleran terhadap agama dan keyakinan apapun, apalagi agama-agama samawi. Gus Dur berkeyakinan bahwa agama dan keyakinan tidak bisa dipaksakan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. Marwan Dasopang, Anggota DPR RI Fraksi PKB, beliau mengatakan:

*“Ketika PKB dirumuskan menghindari istilah-istilah yang berbau agama, sehingga dari situ nanti bias kita menangkap sebetulnya arahnya kemana. Kenapa menghindari istilah agama? Umpamanya begini, dulu PKB itu mau di sebutkan Partai Kebangkitan Umat, tapi umat itu ada bahasa agama. Ummatan. Ada bermacam-macam sehingga gusdur menyampaikan tidak penting kalau mengaitkan politik dengan agama, apa yang ditangkap dari situ, gusdur menghindari memformalkan agama sebagai institusi negara dengan politik. Kenapa begitu? Karna jika agama yang di formalkan sebagai institusi Negara dan politik itu nanti akan gaduh, karna pemahaman terhadap agama ini sepertinya itu punya kebebasan, itu ditandai baik dari segi fiqih, tasawuf itu banyak pandangan, ulama-ulama punya pandangan masing-masing yang tidak bisa disamakan maka kita mengenali beberapa ulama-ulama fiqih yang antara satu ulama dengan ulama yang lain sebetulnya guru sama murid tapi melahirkan pemikiran yang berbeda, kalau agama ini dijadikan sebagai institusi itu akan kacau, karna yang menjadi landasan itu yg mana? Sehingga akan muncul kegaduhan karna bukan*



*paham yang dijadikan sebagai institusi. Maka Negara harus membiarkan agama cukup sebagai pembimbing moral.”*

Berdasarkan gagasan ini Gus Dur memberikan suatu konsep bahwa dalam mengkonstruksi suatu bangsa, agar tidak dengan dogmatis menjadikan menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif. Maka dalam hal ini, dalam formasi tatanan sosial dan kultural masyarakat harus menampilkan Islam atau menjadikan nilai-nilai Islam sebagai unsur utama yang komplementer. Dengan demikian, jika Islam dijadikan sebagai ideologi dalam membangun negara, maka dalam hal ini tampaknya akan memberi kesan bahwa negara yang berlaku memiliki wajah tunggal, hal inilah yang menjadikan jalan bagi masyarakat akan menimbulkan perpecahan secara keseluruhan. Dengan hal ini maka konsekuensinya berdampak pada kekakuan terhadap perkembangan masyarakat Islam, sehingga moral umat Islam dalam perspektif sosial semakin jauh tuntunan Islam. Pernyataan ini tampaknya tidak berlebihan, karena ajaran dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk dapat memberikan rahmat bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan alam. Jadi, *rahmatil lil'alam* tidak akan tercapai jika umat Islam tidak terbuka diri terhadap perjalanan masa yang tidak diimbangi dengan keterbukaan dengan umat yang beragama.

Dengan demikian, melalui peran umat Islam dalam perpolitikan dengan konsep pribumisasi Islam maka akan dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan. Dalam perspektif budaya Gus Dur memberikan kritik terhadap konsep Arabisasi, hal ini karena orang yang terlalu fanatik keislamannya dalam konsep budaya, seakan-akan jika tidak kearaban seolah-olah menjadi tidak Islami atau ke-Islaman seseorang akan berkurang karenanya. Hal seperti demikian tersebut karena memberikan rasa kurang percaya diri terhadap menghadapi kemajuan dari negeri Barat yang menganut paham sekuler. Maka dalam benak umat Islam, langkahnya adalah mengkonstruksi konsep Arabisasi dalam kehidupan yang diyakini sebagai langkah untuk Islamisasi. Perlu dipahami bahwa Arabisasi bukanlah Islamisasi. Maka dalam hal ini, Wahyu Allah swt agar dipahami dengan membuat suatu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa untuk menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat factor-faktor kontekstualnya, termasuk dalam hal ini dilihat dalam kesadaran hukum dalam bernegara.

Dalam hal ini, hadirnya Gus Dur memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia dan membawa konsep ke-Islaman dengan nilai kontekstualnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang banyak berkiprah dalam bidang perpolitikan di Indonesia pasca era reformasi, bahkan sempat berkuasa dalam pemerintahan Indonesia. Pada masa pemerintahannya beliau menerapkan sistem demokrasi dengan



tujuan membuat seluruh warga negara berdaya tanpa dibedakan. Gus Dur memberikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi dan pluralisme dalam kebersamaan. Pandangannya tentang masalah-masalah nasional selalu menjadi perdebatan dan mengundang kontroversi, baik di bidang pendidikan, kebangsaan, persatuan, pluralitas, keagamaan, hingga hal-hal kecil.

Sejalan dengan pemikiran dan keinginannya untuk menegakkan demokrasi, maka Gus Dur juga berkiprah dalam persoalan keagamaan, yang dilakukannya baik sebagai pribadi maupun sebagai Nahdliyin, bahkan pemimpin NU. Bersama Nahdlatul Ulama (NU), kiprahnya di bidang keagamaan paa akhirnya mendorongnya untuk terlibat politik praktis. Gus Dur sebagai politisi dilakoninya sebagai anggota MPR, terlibat aktif di Partai Politik (PPP), sampai kemudian mendirikan PKB, tetapi aktivitas politik yang dilakukannya bukan berdiri sendiri. Pada saat yang sama, itu berimbas kepada gerakan an aktivitasnya di bidang keagamaan.

Untuk melihat pemikiran dan aktivitasnya di bidang keagamaan, perlu dibicarakan lebih dulu tentang NU, karena dengan organisasi inilah implementasi pemikiran demokrasi di bidang keagamaan dilakukannya. Jika ingin melihat tempat Nahdlatul Ulama atau (NU) dalam konfigurasi kelompok-kelompok startegi bangsa saat ini, NU merupakan bagian dari organisasi atau gerakan Islam (*Islamic movement*). oleh sebab itu kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana nasib gerakan Islam di bawah rezim Orde Baru sejauh usia dua puluh lima tahun yang pertama. Pengamatan terhadap konstelasi sosial politik pada era itu akan menunjukkan sebuah interaksi yang sangat menarik jika di lihat dari sudut pandang proses perkembangan dan pemisahan berbagai isu utama yang timbul. Dari berbagai gambaran yang timbul dari dinamika hubungan atau gerakan-gerakan islam dan pemerintahan , hubungan internal antara gerakan Islam sendiri, hubungan eksternal dengan gerakan-gerakan Islam dari luar negeri, dan hubungan gerakan-gerakan non-pemerintahan didalam negari maupun diluar negeri.

Tetapi sebelum memasuki berbagai sudut pandang tinjauan seperti itu, terlebih dahulu mengenal perkembangan dasar dalam hubungan Islam dan negara dalam masa Orde baru. Ada sebuah gambaran mengatakan sangat menarik di bahas dalam kurun waktu tersebut, yaitu adanya perkembangan yang berlawanan arah sebagai akibat ambivalensi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Islam. Partai-partai politik yang bedasarkan aliran seperti NU, PSII, Perti, Parmusi (yang menghasilkan penggabungan partai-partai islam itu ke dalam partai persatuan pembangunan). dapat dilihat sebagai kekuatan politik formal Islam bersama golonga lain habis tergusur dari panggung politik nasional. Hal ini perlu dilihat, karena sebenarnya implementasi pemikiran demokrasi Gus Dur berkaitan antara bidang politik dengan keagamaan.

Demokrasi yang dilakukan selama Orde Baru ialah demokrasi semu, karena pilar-pilar demokrasi tidak bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Yang artinya, keberadaan pilar-pilar demokrasi tidak menjamin terlaksananya demokrasi di suatu Negara. Negara disebutkan demokratis apabila semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dan luas dalam proses terbentuknya demokrasi.

Tetapi saat terlihat terdapat gerakan-gerakan Islam sebagai politik informal juga berkembang dalam masa yang sedikit lebih lama yaitu sekitar 20 tahun, karena memerlukan legitimasi bagi program-program pembangunan, pemerintah Orde baru memperoleh legitimasi dari berbagai pihak termasuk dalam gerakan-gerakan Islam. Responsasi yang konstruktif dari gerakan-gerakan Islam telah memungkinkan tumbuhnya ketergantungan parsial di pihak memungkinkan tumbuhnya ketergantungan parsial di pihak pemerintahan kepada gerakan-gerakan itu, seperti dalam masalah keluarga berencana, lingkungan hidup, perbaikan gizi keluarga, pemeliharaan stabil keadaan sosial politik dan perkembangan hukum nasional. Ketergantungan itu menjadi semakin nyata dengan terjadinya dinamika intensif dalam hubungan internal pemerintahan antara berbagai pusat.

Akibat dan ambivalensi itu dapat dilihat sekarang meskipun disatu sisi terjadi penipisan kelompok formal politik Islam, namun di pihak lain kekuatan kepemimpinan non-formal Islam justru semakin meningkat, karena ia kemudian dapat berada di dalam sistem, sekaligus sebagai kotektor diluar sistem. Ini merupakan proses yang tidak terduga sebelumnya kekuatan gerakan Islam, meskipun tidak formal sudah imbang dengan ABRI. Terlepas dari itu, dinamika yang terjadi dalam perjalanan menuju posisi inilah yang menarik untuk di simak. Karena didalamnya tersembunyi pola-pola yang digunakan untuk memproyeksikan perkembangan politik berbagai gerakan Islam di masa datang. Juga akan terungkap strategi yang di pakai oleh pihak-pihak yang saling berbeda, kalau tidak di katakan saling berlawanan di antara berbagai gerakan Islam sendiri. Atau lebih tepat lagi ia juga akan menampilkan mana yang mengembangkan dengan sadar strategi tertentu dan mana yang hanya terbawa arus tanpa memiliki strategi apapun.

Dapat dikatakan bahwa Gus Dur merupakan seorang ulama pluralis, neomodernis. Pada dasarnya tujuan utama Gus Dur tampil sebagai aktor utama dalam perpolitikan di Indonesia untuk mengajarkan umat Islam bahwa dalam menjalan nilai-nilai ajaran Islam perlu suatu aturan yang dapat mengayomi semua umat. Dalam hal ini, melalui pendewasaan politik memberikan jalan agar kebijakan dapat diambil dengan memainkan peran sebagai aktor politik.

Gus Dur merupakan sosok pemikir Islam aktivis dan pejuang yang tampat ragu berjuang untuk tegakkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan individu dan basis sosial politik yang jelas yaitu NU dimana

semua itu menjadikan disegani oleh kekuatan konverensif yang berupa mengganggu dan menghalanginya.

Pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap Gus Dur sangat lah bagus orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan tanpa tau dan mengenal Gus Dur secara pribadi. Bagi mereka Gus Dur ialah tokoh pembela kaum minoritas, Gus Dur pejuang islam moderat dan pejuang demokrasi, bagi masyarakat ia adalah seorang tokoh besar yang mendunia. Perkembangan Islam di Indonesia Toleransi terhadap keyakinan lain, perlindungan terhadap kaum-kaum minoritas dan demokrasi juga merupakan topik yang bisa membuat bicara sampai berjam-jam.

Gus Dur tidak pernah membedakan tingkatan sosial. Warga NU yang menikah atau meninggal dunia dicoba untuk disembahyangkan. Meskipun ia harus masuk ke pemukiman yang sempit atupun menempuh perjalanan berjam-jam.

Pandangan Luthfi Hasan Ishaq terhadap seorang Gus Dur merupakan seorang ulama tokoh nasional yang cukup berani dan terbuka dalam menyatakan berbagai pandangan tentang Islam dan umat Islam. Dalam pandangannya yang sangat beragam itu, walaupun berbeda PKS cukup bisa memahaminya. Pandangannya yang sangat beragam tentang Islam dan umat Islam itu lebih dihargai dan cukup bisa kami pahami.

Ketua GERINDRA (Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya sangat dekat dengan beliau, bahkan bisa dikatakan sejak masuk kecil. Tempat tinggal Prabowo dengan Gus Dur sangatlah dekat. Sebagai guru bangsa beliau sebagai pengayom bagi semua unsur di Indonesia. Pemikirannya sangat berani walaupun kadang sulit diikuti.

Pencapaian pemerintahan Gus Dur dalam bidang keagamaan yang paling krusial, tetapi sekaligus kontroversial adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan kepercayaan mereka yang beragama Konghucu lewat Keputusan Presiden No. 6 th. 2000 tentang pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Gus Dur mengusahakan kurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama tetapi di segi lain ia justru mengambil alih sikap yang berseberangan bersama dengan sikap partai politik pendukungnya lebih-lebih dalam kasus komunisme dan kasus Israel. Sikap Presiden Gus Dur yang condong menolong pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak group minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya beragam aksi penolakan pada kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam kasus komunisme, Presiden Gus Dur melontarkan ide kontroversial yaitu ide untuk mencabut Tap.MPRS No.XXV th. 1966 tentang larangan pada Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

Gagasan berikut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi berikut mengakibatkan Presiden Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa rancangan dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR th. 2000.

Selain kasus komunisme, benturan Presiden Gus Dur bersama dengan organisasi masa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya selagi ia terpilih menjadi presiden adalah gagasannya untuk terhubung pertalian dagang bersama dengan Israel. Gagasannya berikut mendapat tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan sudah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka pertalian dagang dengan Israel serupa saja bersama dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyerukan supaya penjajahan di atas dunia dihapuskan.

Bagi kelompok seperti minoritas keturunan Tionghoa, Gus Dur juga memberi ruang hidup yang lebih terhormat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pada era Gus Dur kebudayaan Tionghoa diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Tak ada lagi dikotongi dikalangan masyarakat masyarakat Tionghoa di Indonesia perihal pilihan antara mengambil pendekatan 'Asimilasi' atau 'Integrasi' seperti pada era Presiden Soekarno. Berbagai aksara Cina, yang pada era Presiden Soeharto sangat ditabukan kecuali untuk surat kabar Indonesia beraksara Cina, tidak ikut mengalami 'penghitaman' kebalik oleh kejaksaan agung.

Gus Dur juga melindungi kaum-kaum minoritas yang menganut agama atau kepercayaan di luar kelompok aliran utama agama-agama besar. Tidak mengherankan jika Gus Dur melindungi kaum Ahmadiyah yang sering di bawa-baea dan tidak di beri ruang hidup dan berkembang oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menginginkan 'pemurnian agama'.

Suatu hal amat kontroversial, Gus Dur bahkan menjadi anggota masyarakat epistemik agama Yahudi. bagi Gus Dur , mereka yang menganut agama samawi keturunan Nabi Ibrahim adalah bersaudara. Ini sesuai dengan rukun Iman, Islam yang mengakui kitab-kitab allah dari Turat, Zabur, Injil sampai Al-Qur'an. Ini juga sesuai dengan maksa dari surat Al-Kafirun 'bagimu agamamu bagiku agamaku', tanpa harus mengkafir-kafirkan mereka yang tidak menganut agama Islam.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Gus Dur tidak lepas dari akumulasi beragam ide dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari beragam organisasi massa dan partai politik Islam yang pada mulanya mendukungnya kalau NU dan PKB. Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Gus Dur hingga akhir masa pemerintahannya.



Selain gagasannya yang kontroversial tentang pencabutan Tap.MPRS tentang pelarangan komunisme dan ide pembukaan pertalian dagang bersama dengan Israel, pertalian Presiden Abdurrahman Wahid bersama dengan DPR dan bahkan bersama dengan sebagian menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan berikut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa mengimbuhkan info yang dapat diterima oleh DPR.

Fundamentalisme yang populer belakangan ini di percayai tidak bertahan lama. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok radikal agama ini dinilai Gus Dur hanya memanfaatkan waktu yang tersisa saat memanfaatkan dana dari luar negeri. Radikalisme itu tidak akan mengancam pluralisme selama rakyat Indonesia masih meyakini UUD 1945.

Bagi kalangan minoritas, Gus Dur dianggap sebagai pembela utama eksistensi mereka. Masyarakat Papua, etnis Tionghoa, atau umat Nasrani menganggap Gus Dur sebagai pembela di tengah tentangan dan ancaman politis masyarakat dan Negara. Menurut Gus Dur pembelaan terhadap kelompok minoritas bukan perjuangan gampang. Oleh sebab itu kelompok minoritas yang selama ini tersisih harus terus diperjuangkan sesuai dengan amanat UUD 1995. Mereka kelompok minoritas hanya ingin diperlakukan seperti manusia. UUD 1995 telah menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa di lihat dari pandangan agama, etnis maupun agama.

Memang mayoritas bangsa Indonesia yang notabene nya beragama islam masih di cengkam oleh kemiskinan dan kebodohan sehingga mudah di pengaruhi untuk berpindah ke agama lain secara mudah. Keadaan logis yang kenyataannya itu sebnanya adalah keharusan bagi gerakan islam untuk memajukan umat mereka.

### **C. Implementasi Pada Kehidupan Sosial Kemasyarakatan**

Posisi kontroversial Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sosok yang fenomenal seperti tidak ada habis-habisnya di sorot publik. Begitulah pesan yang bisa di ambil dari antusiasnya keramaian masyarakat kepada dirinya, bebera saat sesudah menyatakan resmi keluar dari istana kepresidenan.

Sebagian masyarakat antara lain diwakili Goenawan Mohammad bahkan secara antusias menyambut keluarganya dari 'kerangkeng struktural' kembali habitat kultural dengan menyatakan, dilengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan misal menjadi bisa momentum simbolis untuk memberdayakan atau membangun kembali perjuangan rakyat yang otentik, yaitu sebuah perjuangan yang benar-benar lahir apresiasi sejati rakyat, bukan hanya sekedar perjuangan semua yang mengatas namakan rakyat seperti yang sering di lontarkan dalam banyak retorika elit politik selama ini .

Proses kelengseran dirinya sebagai presiden bukanlah sesuatu yang memalukan sehingga tidak usah menundukkan kepala ketika keluar dari istana namun malah bisa menjadi semacam *blessing in disguise*. Dia tidak lagi disibukkan dengan urusan Birokrasi Formalistik, dan leluasa meneruskan cita-cita perjuangan Demokrasi, tentu dengan gaya dan pola yang telah lama di bangun selama ini sebagai sosok pejuang demokrat berbasis kultural.

Menurut kolumnis Sumanto al- Qurtuby, Gus Dur ialah seorang pemimpin, meminjam baha yang tertuang dalam Serat Wulangreh, yang memiliki karakter seperti samudra yang luas. Gus Dur seperti semar dalam seni perwayangan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada setiap manusia dari berbagai golongan, kelas dan ideologi apapun.

Dalam pandangan Maman Imanulhaq Faqieh, selaku orang yang sering dekat dengan beliau. Ada tiga hal dari sekian banyak hal yang ajarkan Gus Dur kepada kita demi tegaknya kebangsaan dan kemanusiaan. *Pertama*, Gus Dur mengajarkan tentang demokrasi dan keadilan sosial. Namun, dalam menjalankan demokrasi, Gus Dur berpesan tidak hanya berhenti pada tataran procedural, tetapi harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. *Kedua*, Gus Dur mengajarkan tentang pluralism (kebhinekaan). Sebagaimana yang kita ketahui bangsa ini terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama. Karena itu, sejak semula baksa ini dibangun atas dasar kebhinekaan tersebut. Bagi Gus Dur kebhinekaan terus terjaga, konstitusi yang menjamin kebebasan dan keragaman harus di tegakkan. Dengan adanya kosntitusi yang menjamin keragaman, pihak-pihak mayoritas yang sering melaksanakan diskriminasi tidak akan terjadi lagi. *Ketiga*, Gus Dur mengajarkan tentang perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan bangsa tidak akan pernah terwujud tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Gus Dur, agama Islam ialah agama yang melektakkan nilai-nilai kemanusiaan itu, Islam bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lain untuk membangun persatuan bangsa. <sup>44</sup>

NU di bawah kepemimpinan Gus Dur menempatkan NU sebagai darah masyarakat, artinya NU tidak berpolitik sebagai institusi tetapi Abdurrahman Wahid mengizinkan NU untuk dibawa kemana-mana dengan semangat pluralisme, dan transparansi. Sikap ini adalah buah dari kebijakan kembali ke khittah tahun 1926 yang diputuskan dalam Mukttamar Situbondo pada tahun Hal ini mampu memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tokoh-tokoh NU (walaupun NU sendiri tidak berpolitik) memang mau berpolitik di mana saja, bisa di partai-partai nasional lainnya. Ini akan membawa warna tersendiri dala<sup>2</sup> masyarakat pluralistik demokratis.

Salah satu diantara sekian banyak harapan besar yang ingin diletakkan banyak orang ke pundak Gus Dur dalam proses demokratisasi adalah kemampuan potensialnya untuk membangun gerakan oposisi yang

efektif terhadap pemerintah. Sebagaimana diakui banyak kalangan, track record Gus Dur selama ini terutama sebelum menjabat sebagai presiden adalah sosok yang identic sebagai tokoh oposan yang cukup disegani, terutama ketika sikap oposisinya itu dilakukan dari luar ranah kenegaraan.

Masyarakat masih ingat betul bagaimana kekuatan oposisi Gus Dur pada zaman rezim Soeharto dan BJ. Habibie. Setelah diperhitungkan karena selain kapasitas pribadi Gus Dur yang secara Intelektual, ia juga mendapat dukungan yang cukup signifikan, baik dari basis massanya secara luas maupun dari kalangan LSM pada lingkungan terbatas. Selain itu, masyarakat saat itu juga begitu percaya kepada Gus Dur, terutama kepada konsistensinya memerangnya segala tindakan yang dianggap bisa berpotensi membunuh benih-benih demokrasi, seperti sikap sektarianisme, militerisme, tirani mayoritas atas minoritas, politisasi agama pada wilayah kenegaraan, dll.

Pada ahirnya, waktu itu kebanyakan orang begitu percaya untuk menempatkan akan Gus Dur sebagai figur yang paling pantas ditempatkan di gerbang depan oposisi sebagai penimbang sekaligus pengontrol pemerintah. Donglas E. Ramage (1995:45) merangkum posisi Gus Dur saat itu sebagai seorang oposan yang potensial dengan menyatakan, *'Wahid is not only leader of NU (the largest non-governmental islamic organization in the world) but he is also a precocative religious and political thinker and a leading pponent of secular democracy in indonesia'*.

Gerakan oposisi menjadi hanya sekedar gerakan parsial dan seporadis. Bahkan kalangan LSM yang seharusnya menjadi penerus perjuangan Gus Dur sebagai fasilitator oposisi nonstruktural seperti tidak bisa meneruskan tradisi oposisi yang dirintis selam ini oleh Gus Dur bahkan pada titik tertentu menjadi mitra kerja Gur Dur di pemeritahan. Setelah Gus Dur kembali ke habitatnya harapan itu muncul kembali, dengan simbolis itu sudah dilakukan dengan banyaknya tokoh LKS maupun masyarakat informal yang sowan dan menyetarakan Gus Dur pada detik-dekik terakhir pemeritahannya. Sebuah catatan penting tampaknya harus mengemukakan berkaitan dengan menempatkan Gus Dur kembali sbagai tokoh oposan jangan diniatkan sbagai dari skenario ' politik balas dendam' terhadap lawan-lawan politiknya yang sedang berkuasa saat ini, termasuk didalamnya pihak-pihak yang terlibat skenario pelengseran dirinya.

Gerakan oposisi Gus Dur harus ditempatkan sebagai oposisi sejati, yang tidak hanya punya target kekuasaan semata-mata, tetapi ia harus ditempatkan dalam bingkai lebih besar, yaitu membangun sebuah mekanisme fungsi control terhadap Negara yang memang punya kecenderungan menyimpang. Dalam narasi besar pergerakan demokrasi, oposisi yang dirintis Gus Dur ialah sebuah basis pergerakan yang mencoba melakukan stimulasi edukatif kepada masyarakat agar terbiasa dengan tradisi berdemokrasi yang fair dan elegan.



Harapan seperti ini terasa wajar dibebankan kepada Gus Dur mengingat kita tidak dapat berharap terlalu banyak kepada elite politik lain yang sedang ada di lingkaran dalam struktur kekuasaan, dengan memperhatikan fenomena betapa asyiknya waktu mereka dihabiskan untuk urusan bagi-bagi kue kekuasaan .

Dilihat dari sejarah perjalanan hidupnya ada tiga kontribusi yang dilakukan oleh Gus Dur bagi kemajuan umat islam dan bangsa Indonesia: *Pertama*, Gus Dur menjadi pelopor bagi pemecah kebekuan berfikir umat islam indonesia. Pola pikir Gus Dur tentang modernisasi telah menjadi energi utama dalam melawan kemudahan berfikir. Gerakan pemikiran ini memicu perkembangan dialektika berfikir yang sangat produktif dikalangan umat islam Indonesia. Dialektika berfikir tersebut masuk terus berlangsung hingga saat ini. Gebrakan-gebrakan pemikiran Gus Dur terbukti mampu membangkitkan potensi berfikir umat Islam Indonesia. *Kedua*, gagasan-gagasan Gus Dur secara tidak langsung juga telah membuka jalan baru lagi perjuangan umat islam Indonesia sehingga tidak lagi teroukau pada satu jalan yang selama ini ditempuh yaitu politik. *Ketiga*, gagasan-gagasan Gus Dur juga memiliki kontribusi dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, toleransi, oposisi, musyawarah, suatu masyarakat madani dan lain-lain merupakan intelektual yang maha besar bagi proses penyebaran ide-ide dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Akhirnya di akhir tukisan ini, penulis akan mengutip kata-kata Gus Dur berka<sup>41</sup>n dengan demokrasi di Negara tercinta ini:

“Kita tidak akan menjadi bangsa besar dan kuat tanpa memiliki Negara besar, makmur, berkeadilan, dan demokratis. Hanya dengan keuletan dan ketahanan moral membuat diri berani menghadapi aneka kekuatan status quo. Mengembangkan sikap berani seperti itu mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan”.



## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat dipaparkan bahwa kesimpulan masalah-masalah yang terkait dengan pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid adalah:

1. Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Demokrasi Islami adalah pertemuan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kenegaraan dengan Islam. Islam sebagai komplementer dalam bingkai demokrasi, sehingga mewujudkan demokrasi Islami yang memberikan pengaruh dalam memberikan kebebasan dan menyatukan perbedaan, sehingga berdampak pada terciptanya *civil society*. Demokrasi itu bukan berasal dari Barat, dan bukan pula Timur, tetapi demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai martabat kemanusiaan yang bersifat universal, yang digali dari agama, filsafat, dan budaya nusantara dengan nilai-nilai universal Islam, yaitu persamaan (*musawwa*), keadilan (*'adalah*), dan demokrasi (*syûra*). Itu sebabnya dalam kerangka demokrasi, Gus Dur juga memperkenalkan gagasan Pribumisasi Islam. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi Islami itu berbasis ajaran-ajaran Islam yang sejak kecil bukan hanya dipahaminya dengan baik karena latar belakang keluarga dan pendidikannya, tetapi juga menjadi karakter dan basis pemikirannya. Persentuhannya dengan pemikiran Barat bahkan sejak kecil membuatnya mengambil sisi-sisi terbaik dari pemikiran tersebut, termasuk demokrasi tetapi kemudian diramunya dengan ajaran universal Islam, yaitu persamaan (*musawwa*), keadilan (*'adalah*), dan demokrasi (*syûra*). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi. Demokrasi bagi Gus Dur adalah
2. Konstruksi pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid adalah; nilai-nilai demokrasi Barat/liberal dipertemukan dengan nilai-nilai universalisme Islam, yaitu persamaan (*musawwa, egaliter*), keadilan (*'adalah, just*<sup>23</sup>), dan demokrasi (*syûra, democracy*) dengan dengan menggu<sup>23</sup>kan *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. Dengan menggunakan kaidah *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* ditemukan sebuah nilai baru: demokrasi Islami, yang berarti demokrasi yang bersifat Islam, atau yang dihasilkan dengan merujuk kepada ajaran-ajaran Islam. Dengan melihat itu, sebenarnya bisa dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengislamisasi konsep demokrasi sehingga tepat dan cocok untuk semua, karena Islam adalah agama yang menyatakan sekaligus mengakui persamaan derajat antara manusia, sama seperti demokrasi juga yang menyamakan kedudukan semua warga negara di muka hukum. Dslam rangka itu, maka usaha Pribumisasi Islam perlu dilakukan, karena itulah

yang paling tepat untuk masyarakat muslim Indonesia yang sudah memiliki kultur sendiri, bukan Arabisasi Islam, agar kesan Islam menakutkan dan bahkan mungkin mengancam keberadaan umat beragama lain, sirna. Kemampuan Abdurrahman Wahid melakukan ini karena kemampuan berpikirnya yang melampaui gagasan-gagasan santri yang biasanya sangat terpaku pada kitab-kitab *turats*.

3. Melihat hasil pemikiran demokrasi Islami yang terus dia perjuangkan sepanjang hidupnya, maka jelas bahwa implementasi pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid bukan hanya penting, tetapi sangat penting bagi proses demokratisasi di Indonesia, apalagi dalam suasana akhir-akhir ini di mana orang lebih suka menunjukkan perbedaan, bukannya mencari persamaan. Pemikiran demokrasi Islami Abdurrahman Wahid yang mampu memberi tempat yang sama antara kaum mayoritas dan minoritas jika benar-benar diimplementasikan dengan baik, maka akan mewujudkan negara Indonesia yang damai dan sejahtera sebagaimana tujuan Islam dan demokrasi. Jadi kepentingan mengimplementasikan pemikiran demokrasi Islami adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dalam pluralitasnya, saling menghargai dan mengerti sehingga hubungan harmonis antara kelompok-kelompok yang berbeda terutama antarumat beragama, bukan harmonis yang semu, tetapi perasaan memiliki (*sense of belonging*).

## **B. Rekomendasi**

Adapun yang menjadi dan rekomendasi dalam penelitian Disertasi yang berjudul Pemikiran Abdurahman Wahid tentang Demokrasi Islami ini, yaitu:

Gus Dur banyak menuangkan pemikiran dan gagasan lewat tulisan langsung maupun tidak langsung misalnya di berbagai media massa dan buku yang sudah banyak beredar di kalangan peneliti dan penggiat keilmuan. Progresivitas pemikiran dan gerakannya menginspirasi sejumlah kalangan, baik dalam skala nasional maupun global apalagi di kalangan mahasiswa dan peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Pemikirannya masih perlu ditelaah dan dicari lagi maknanya lebih dalam, sehingga tidak salah menilainya.

Pemikirannya yang cemerlang dapat dilihat dalam berbagai karangan-nya, baik buku maupun artikel lepas yang diuraikannya dengan cara yang berbeda dengan tulisan orang lain. Dalam hal membicarakan konsep Islam dan Negara, Islam dan Kebangsaan, serta Islam dan Demokrasi dan juga Islam dan kemanusiaan. Abdurahman Wahid tampil dengan pemikiran dan gagasannya yang brilian. Tulisan ini merekomendasikan agar penelitian ini diteruskan oleh peneliti lain untuk menangkap lebih banyak



pemikiran dari seorang humanis, yang justru figur seperti itulah yang sekarang ini dibutuhkan.

Abdurrahman Wahid ingin menegaskan bahwa Islam tidak mengatur formalisasi syariat ke dalam sistem negara. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk mendirikan negara Islam. Agama Islam cukup dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang, tak terkecuali bidang politik pemerintahan. Islam hendaknya menjadi jiwa dalam praktik berbangsa dan bernegara, bukan menjadi dasar negara. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang paling diingat humor-humor cerdasnya, tentu saja selain jasanya yang luar biasa dan pemikirannya yang cemerlang.

Banyak hal yang perlu di gali dari corak pemikiran Abdurahman Wahid ini selain corak kenegaraannya banyak hal-hal pemikirannya lagi yang perlu di eksplor misalnya corak kehidupan politik setelah menimba ilmu di pesantren hingga kairo dan kembali ke tanah air sebagai pucuk pimpinan yang humoris dan nasionalis.

Meskipun pemikiran Abdurrahman Wahid baik dan ditujukan untuk kebaikan semua, tidak berarti tidak ada kritik terhadapnya. Dalam hal ini kritik penulis untuk pemikiran Abdurahman Wahid adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Abdurrahman Wahid adalah pemikiran yang kadangkala sukar dipahami orang lain, sehingga cenderung menyebabkan salah persepsi terhadapnya. Kebebasan sebagai salah satu ciri demokrasi menyebabkan sebagian orang malah mengekspresikannya dengan cara yang salah, seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Kebebasan yang salah kaprah yang Gus Dur sendiri tidak menginginkannya, tetapi cara berpikrinya yang kerap membiarkan orang berpikir bebas, bagaimanapun sedikit banyak memengaruhi cara berpikir orang lain, yang kadangkala tidak memiliki basis aqidah yang kuat dan ilmu yang luas, seperti yang dimiliki Gus Dur.
2. Kesempatan yang sangat luas dan pembelaan terhadap minoritas yang dilakukan Gus Dur, saat ini justru membuat mereka terutama etnis Tionghoa bukannya membuat mereka lebih membaur bersama pribumi asli, tetapi bahkan membuat mereka seakan menempati tempat dan status yang lebih tinggi, terbukti dengan banyaknya berita di mana segelintir orang (etnis Tionghoa) yang justru melakukan penghinaan, bahkan terhadap alat negara.
3. Oleh karena itu nantinya penelitian ini akan menjadi bahan bacaan dan acuan bagi ilmuan dan saya pribadi khususnya, namun apabila nantinya adanya perbaikan dan masukan dalam penelitian ini hendaknya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi bagi peneliti selanjutnya, agar khazanah keilmuan kemodrenan dan pemikiran yang nyentrik Abdurahman Wahid ini bisa terus dikembangkan peneliti selanjutnya.





# Pendahuluan

---

## ORIGINALITY REPORT

---

<b>17</b> %	<b>13</b> %	<b>4</b> %	<b>6</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>www.dictio.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>2</b>	<b>www.library.ohiou.edu</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>proceeding.unzah.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>rahmadkhairul.files.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>hmjaf.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>lestariari99.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>ecampus.unusia.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<b>idr.uin-antasari.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>10</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1</b> %

---

11	<a href="http://gobloggeris.blogspot.com">gobloggeris.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://muhammadfaishol15.blogspot.com">muhammadfaishol15.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
13	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	<1 %
14	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://infopasti.net">infopasti.net</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
18	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
19	<a href="http://www.wahamid.blogspot.com">www.wahamid.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	<1 %
21	M. Khoirul Hadi. "ABDURRAHMAN WAHID DAN PRIBUMISASI PENDIDIKAN ISLAM", HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 2015 Publication	<1 %

22	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
23	media.neliti.com Internet Source	<1 %
24	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
26	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
29	Ahmad Zamakhsari. "Teologi Agama-agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme dan Kajian Pluralisme", Tsaqofah, 2020 Publication	<1 %
30	Submitted to Puslitbang Lektur Kementerian Agama Student Paper	<1 %
31	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
32	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %

33	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
34	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
35	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
36	Umi Hanik. "PLURALISME AGAMA DI INDONESIA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014 Publication	<1 %
37	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
39	<a href="http://www.pta-yogyakarta.go.id">www.pta-yogyakarta.go.id</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
41	<a href="http://gusdur.net">gusdur.net</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	<1 %
43	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %



44

Internet Source

<1 %

---

45

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1 %

---

46

[repositori.unsil.ac.id](https://repositori.unsil.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

47

Submitted to University of Muhammadiyah Malang

Student Paper

<1 %

---

48

Dede Sri Kartini. "Demokrasi dan Pengawas Pemilu", Journal of Governance, 2017

Publication

<1 %

---

49

Imam Ghozali. "Memahami Format Demokrasi Model Khawarij di Indonesia", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2020

Publication

<1 %

---

50

Kamilus Pati Doren. "KONSEP TANGGUNG JAWAB EMMANUEL LEVINAS DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBERAGAMAAN INDONESIA", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2018

Publication

<1 %

---

51

Sonia Ivana Barus. "PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN", University Of Bengkulu Law Journal, 2017

Publication

<1 %

---

52 Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper <1 %

---

53 Submitted to IAIN Surakarta Student Paper <1 %

---

54 Basman Basman. "RESPON TOKOH MUSLIM TERHADAP DEMOKRASI", Jurnal Studi Islam, 2022 Publication <1 %

---

55 Khoirurrijal Khoirurrijal. "Islam Nusantara As A Counter-Hegemony Againsts The Radicalism Of Religion In Indonesia", Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 2018 Publication <1 %

---

56 Maskuri Maskuri. "RELASI POLITIK DAN AGAMA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN IDEOLOGI", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2015 Publication <1 %

---

57 Khoiron Khoiron, Purwo Santoso, Budi Irawanto. "Political Articulation: The Intellectuality of Ahmad Mustofa Bisri in Struggling for the Contest of Truth", Journal of Politics and Law, 2023 Publication <1 %

---

58 Ilham Masykuri Hamdie. "JEJAK-JEJAK PLURALISME AGAMA DALAM SUFISME", <1 %

# Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2019

Publication

59

Indar Arifin. "Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2022

Publication

<1 %

60

Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

61

Muhammad Iqbal. "ISU DASAR NEGARA INDONESIA MENJELANG PEMILU 1955: Studi Kasus Pidato Politik Soekarno Di Amuntai 27 Januari 1953", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2011

Publication

<1 %

62

Nawir HK, Aan Parhani, Muhammad Alwi HS, Fahrudin Fahrudin. "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisā/4: 3", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2020

Publication

<1 %

63

Khoirurrijal Khoirurrijal. "ISLAM NUSANTARA SEBAGAI COUNTER HEGEMONI MELAWAN RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA", AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, 2017

Publication

<1 %

64 J. C. Walker.. "Rethinking democracy and education: Essay review of John Burnheim's, Is democracy possible?", Educational Philosophy and Theory, 1/1987 <1 %  
Publication

---

65 Submitted to Universitas Negeri Surabaya <1 %  
The State University of Surabaya  
Student Paper

---

66 Ahmad Labib Majdi. "Khairu Ummah dalam <1 %  
Pandangan K.H. Irfan Hielmy", Jurnal  
Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan  
Islam, 2017  
Publication

---

67 Submitted to IAIN Ponorogo <1 %  
Student Paper

---

68 Irfan Charis, Mohamad Nuryansah. <1 %  
"Pendidikan Islam dalam Masyarakat  
Madani Indonesia", MUDARRISA: Journal of  
Islamic Education, 2015  
Publication

---

69 Muhamad Lukman Arifianto. "Menyoal <1 %  
Konsep Demokrasi Amerika Serikat:  
Promosi dan Trajektorinya", Jurnal  
Keamanan Nasional, 2017  
Publication

---

70 Iskandar Iskandar. "PRINSIP <1 %  
KEMASHALAHATAN UMAT DAN  
PENGHARGAAN TERHADAP HUKUM DALAM  
BINGKAI KESADARAN MULTIKULTUR



KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA",  
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH  
DAN PERBANKAN ISLAM, 2016

Publication

---

- 71 Y Yusefri. "Syariat Islam Tentang Relasi dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Alquran", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 <1 %
- Publication
- 

- 72 Victor Silaen. "Kristen dan Kenaifan Politik: Kritik atas Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2017 <1 %
- Publication
- 

- 73 Anwar Sanusi. "SIKAP DAN KEBIJAKSANAAN SOEKARNO TERHADAP ISLAM PASCA KEMERDEKAAN", Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2018 <1 %
- Publication
- 

- 74 Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %
- Publication
- 

- 75 Rian Prayudi Saputra. "ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KEBENARAN DAN REKONSILIASI", Jurnal Pahlawan, 2019 <1 %

76 Ahmad Sanusi. "KONSEP NEGARA MENURUT IHKWANUL MUSLIMIN", Al-Ahkam, 2018 <1 %  
Publication

---

77 Akhyar Hanif. "Studi Terhadap Kosakata Bahasa Arab Dalam Bahasa Minangkabau", Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, 2017 <1 %  
Publication

---

78 Ali Mutakin. "KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018 <1 %  
Publication

---

79 Basri Basri. "PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN TRANSENDENTAL", Varia Justicia, 2017 <1 %  
Publication

---

80 Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1 %  
Publication

---

81 Ahmad Khoirul Mustamir. "Islam Nusantara: Strategi Perjuangan "Keumatan" Nahdlatul Ulama", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2019 <1 %  
Publication

---

82

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

&lt;1 %

83

Hamlan Andi Baso Malla. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Humanistik dalam Membentuk Budaya Toleransi Peserta Didik Di SMA Negeri Model Madani Palu, Sulawesi Tengah", INFERENSI, 2017

Publication

&lt;1 %

84

Muhammad Anas Ma`arif. "Pendidikan Islam Dan Tantangan Modernitas (Input, Proses Dan Output Pendidikan Di Madrasah)", Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2016

Publication

&lt;1 %

85

Agus Ganjar Runtiko. "Desain Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2013

Publication

&lt;1 %

86

Masmuni Mahatma. "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara", MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2017

Publication

&lt;1 %

87

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung

Student Paper

<1 %

88

Anis Fauzi, Cecep Nikmatullah.  
"PELAKSANAAN PENDIDIKAN MADRASAH  
DINIYAH DI KOTA SERANG", Jurnal  
Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Publication

<1 %

89

Submitted to Forum Komunikasi  
Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen  
Indonesia (FKPPTKI)

Student Paper

<1 %

90

Josina Augustina Yvonne Wattimena,  
Vondaal Vidya Hattu. "Ketahanan Pangan  
Masyarakat Adat Sebagai Wujud  
Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi  
Covid-19", SASI, 2021

Publication

<1 %

91

Muhamad Beni Kurniawan. "Politik Hukum  
Pemerintah dalam Penanganan Pandemi  
Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi  
atas Kesehatan", Jurnal HAM, 2021

Publication

<1 %

92

Abdul Hamid. "Pluralitas Agama Menurut  
Tokoh-Tokoh Agama Dayak", Jurnal Ilmiah  
Ilmu Ushuluddin, 2018

Publication

<1 %

93

Submitted to IAIN Padangsidempuan

Student Paper

<1 %



94	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
95	Kiki Mikail. "Problem Doktrin Keagamaan Dan Fundamentalisme Dalam Membangun Budaya Multikultural", Journal of Darussalam Islamic Studies, 2020 Publication	<1 %
96	A. Syatori. "TAFSIR DAN IJTIHAD POLITIK PESANTREN: Suatu Perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon", JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 2018 Publication	<1 %
97	Samsul Bahri. "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Sistem Pendidikan Pesantren", Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2018 Publication	<1 %
98	<a href="http://aniezpamungkas.blogspot.com">aniezpamungkas.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
100	Ahmad Jazuli. "Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016	<1 %

101 Franz Magnis Suseno. "Politik Identitas? Renungan Tentang Makna Kebangsaan", MAARIF, 2018 <1 %

Publication

---

102 Muhammad Taufik, Ardillah Abu. "ISLAM DAN DEMOKRASI", Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2020 <1 %

Publication

---

103 Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1 %

Publication

---

104 R Siti Zuhro. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, 2019 <1 %

Publication

---

105 Adi Putra Surya Wardhana, Titis Srimuda Pitana, Susanto -. "Revivalisme Kebudayaan Jawa Mangkunegara VIII di Era Republik", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2019 <1 %

Publication

---

106 Johanis Putratama Kamuri. "YESUS DAN MACHIAVELLI: MORALITAS, RELIGIUSITAS DAN KOMPETENSI POLITISI DI RUANG POLITIK", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2019 <1 %

- 
- 107** Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Student Paper <1 %
- 
- 108** Muhammad Arief. "Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Kalabbirang Law Journal, 2021  
Publication <1 %
- 
- 109** Submitted to pbpa  
Student Paper <1 %
- 
- 110** "References", Wiley, 2004  
Publication <1 %
- 
- 111** Choirul Anwar. "Islam Dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018  
Publication <1 %
- 
- 112** Irfan Noor. "ISLAM TRANSNASIONAL DAN MASA DEPAN NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2016  
Publication <1 %
- 
- 113** Jurna Roszi, Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018  
Publication <1 %
-

114	Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
115	Syaiful Arif. "Islam, Radikalisme dan Deradikalisasi Berbasis Pancasila", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2017 Publication	<1 %
116	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
117	Sofyan Hadi. "Relasi Dan Reposisi Agama Dan Negara", Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 2018 Publication	<1 %
118	Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
119	Bahaudin Bahaudin. "Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan", Jurnal Keamanan Nasional, 2017 Publication	<1 %
120	Syafiin Mansur. "PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM TENTANG KRISTENISASI DI INDONESIA 1966-1998", ALQALAM, 2014 Publication	<1 %



121

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

122

Mukhlisi & Surya Fajar Rasyid. "BASRA Ulama and Medina Porch of Madura; Portrait of religious freedom in Madura", Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman, 2018

Publication

<1 %

123

Nur Rohim Yunus. "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 2016

Publication

<1 %

124

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

125

Wahyu Supriyatin. "Perbandingan Metode Sobel, Prewitt, Robert dan Canny pada Deteksi Tepi Objek Bergerak", ILKOM Jurnal Ilmiah, 2020

Publication

<1 %

126

alhassanain.org

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

## **RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS DIRI**

1. Nama : Elly Warnisyah Harahap
2. NIM : 94313030375
3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Maret 1967
4. Pekerjaan : Dosen di FUSI UINSU Medan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Tuasan Gg. Kesturi No. 5 Medan

### **II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. SD Josua No. 4 Medan
2. SMP Josua I Medan
3. SMA Negeri 3 Medan
4. Fak. Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat, IAIN Medan
5. Program S2 Pemikiran Islam, IAIN Sumatera Utara, Medan
6. Program S3 Aqidah dan Filsafat Islam, UIN SU Medan

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Tahun 1991-1997 : Guru dan Dosen di UMN Medan
2. Tahun 1995-1997 : Bendahara di UMN Medan
3. Tahun 2000-sekarang : Dosen di FUSI UINSU Medan
4. Tahun 2002-2015 : Dosen di STAI Alhikmah Medan
5. Tahun 2010-2014 : Sekjur PPI FUSI UINSU Medan
6. Tahun 2016-2020 : Kalab FUSI UINSU Medan

### **IV. KELUARGA**

1. Suami :Drs. Syarif Abdullah Siregar
2. Anak : Nadhiyatul Rif'ah Siegar, S.Pd  
: Luthfi Sakina Siregar, A.Md  
: Mardiana Siregar  
: Rais Siregar
3. Saudara : Lelis Sriwati Harahap, S.Pd  
: Dr. Armansyah Harahap, SPOG  
: Nurlatifah Harahap, M.Pd